



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19

- Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

- Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri A No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah Dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015-2019.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut

RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005-2025.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013-2018.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
19. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 6

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
- j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
- k. BAB XI Penutup.

Pasal 7

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi hal-hal yang mendasar; dan/atau;
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional/kepentingan masyarakat luas.

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan capaian sasaran Tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
NOMOR 7 SERI E NO.4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : (...../.....)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021

I. UMUM.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 16 (enam belas) daerah di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kendal memenangkan pasangan dr. Mirna Annisa, M.Si dan Masrur Masykur sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2016-2021. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dikukuhkan dan dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Dengan telah dilantikanya Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, maka kewajiban Pemerintah Daerah adalah segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi dasar dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD ini nantinya berfungsi sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD 2016-2021 perlu mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik regional maupun nasional, memperhatikan arahan dan kebijakan pembangunan nasional dan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kebijakan nasional yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD antara lain adalah mulai diberlakukannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*

disingkat dengan SDGs, dan juga adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal ini mengacu arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kendal 2005–2025, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Penyusunan RPJMD disusun disesuaikan dengan tahap-tahap penyusunan RPJMD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahap tersebut mulai dari tahap persiapan, penyusunan draft rancangan awal, musrenbang jangka menengah sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud “pelaksanaan lebih lanjut” adalah Rencana Pembangunan Tahunan pada tahun berjalan mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 158

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 7 TAHUN 2016
TANGGAL 30 AGUSTUS 2016

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peluang daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri semakin terbuka lebar. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Implementasi terencana dan terarah ini terwujud dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memedomani beberapa ketentuan mendasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah ada. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan

pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada pasal 263 UU 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tidak berbeda jauh, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 5 Ayat (2), yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dari uraian pasal dari kedua undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang

merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten/kota pada saat pergantian kepala daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 21 (duapuluh satu) daerah di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kendal memenangkan pasangan Dr. Mirna Annisa, M.Si dan Masrur Masykur sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2016-2021. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dikukuhkan dan dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Dengan telah dilantikanya Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, maka kewajiban pemerintah daerah adalah segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi dasar dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD ini nantinya berfungsi sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, yang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

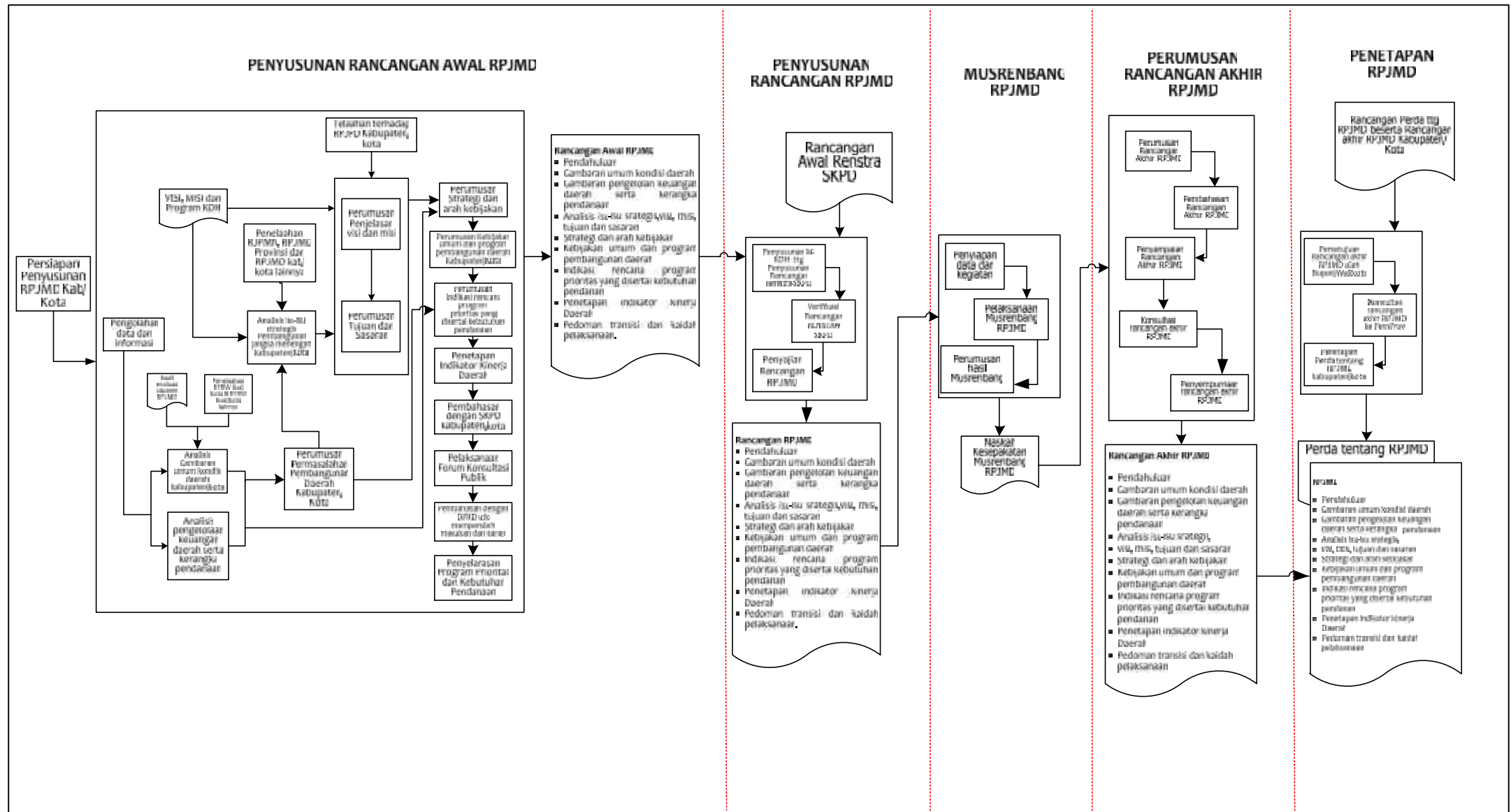
RPJMD Kabupaten Kendal dalam proses penyusunannya memperhatikan 4 pendekatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 6 s/d Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning.

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif berarti bahwa proses penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih dan dibahas bersama dengan DPRD dalam penetapan peraturan perundangan daerah. pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD 2016–2021 perlu mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik regional maupun nasional, memperhatikan arahan dan kebijakan pembangunan nasional dan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kebijakan nasional yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD antara lain adalah mulai diberlakukannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs, dan juga adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal ini mengacu arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kendal 2005–2025, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Penyusunan RPJMD disusun disesuaikan dengan tahap-tahap penyusunan RPJMD sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahap tersebut mulai dari tahap persiapan, penyusunan draft rancangan awal, musrenbang jangka menengah sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota (Sumber: Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal 2016-2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
9. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58\)](#)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

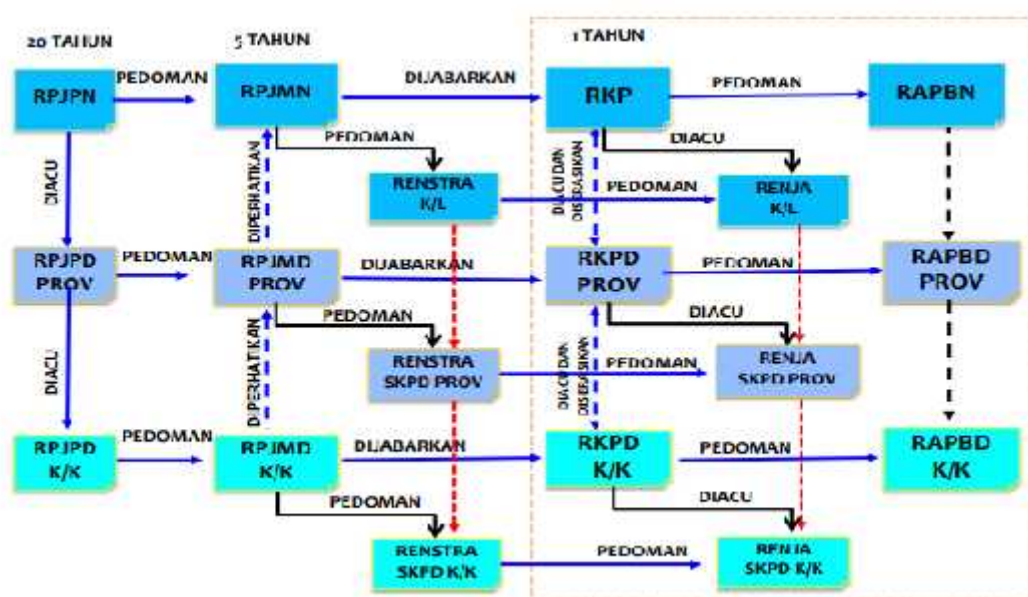
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009– 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031.

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJM Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Selain itu penyelarasan juga dilakukan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan juga RPJMD Daerah sekitar. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang diacu dalam RPJP Kabupaten Kendal akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal. Selain itu RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan menjadi pedoman juga dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal. RPJMD Kabupaten Kendal ini nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Selain itu, RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Gambaran keterkaitan dapat dilihat pada gambar berikut :

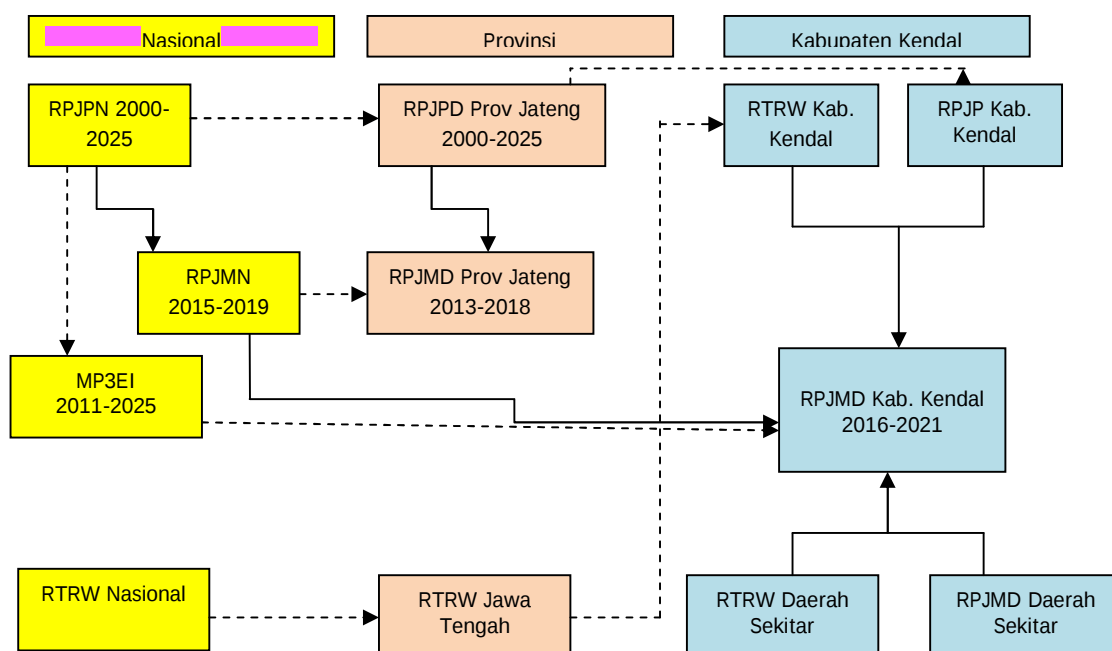


1.3.1. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJMD

RPJMD tahun 2016-2021 merupakan RPJMD Tahun Ketiga dan Keempat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025. Dimana dalam tahap ini arah pembangunan Kabupaten Kendal ditekankan pada:

- Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kendal Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab;
- Terwujudnya masyarakat yang berdaya-saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
- Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
- Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai; Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
- Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari;
- Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju; dan
- Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antar regional, nasional.

Gambaran keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dapat dilihat berikut ini :

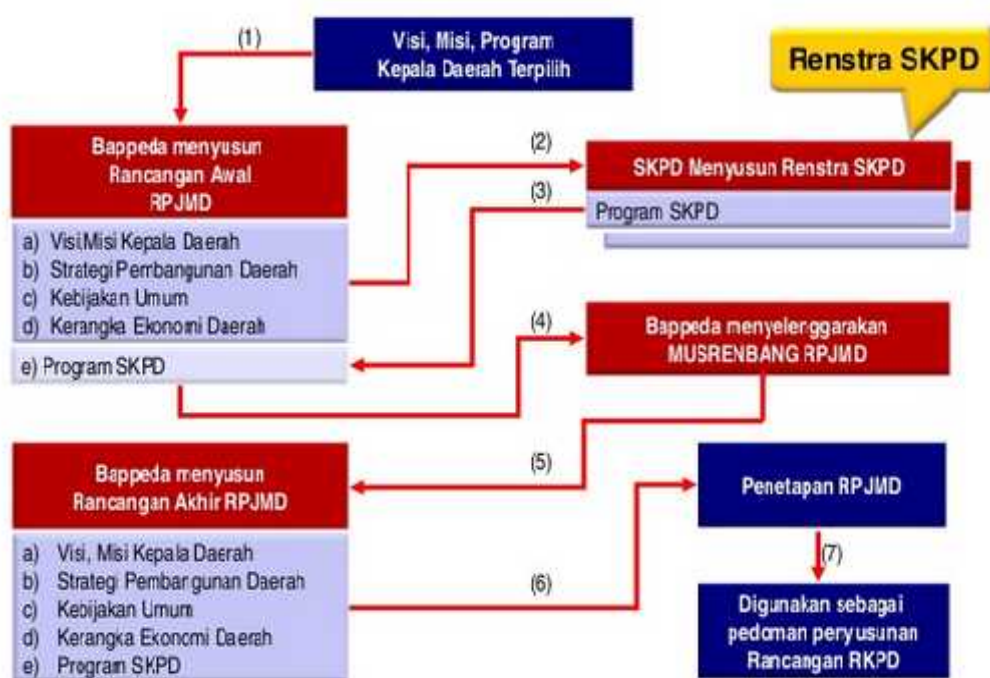


1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra-PD)

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana Permendagri 54 tahun 2010 pasal 93 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan perangkat daerah; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator kinerja Daerah harus sama dengan bab 6 Renstra perangkat daerah yaitu indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Hubungan antara RPJMD dengan Renstra-PD seperti yang dikutip dari dadang-solihin.blogspot.com adalah sebagai berikut.



1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 tahun 2010 pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan majusebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan

sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RPKD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Kendal memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang dan wilayah seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal. Keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RTRW erat kaitannya dengan perencanaan penyusunan program dalam RPJMD. Penyusunan program dalam RPJMD hendaknya memperhatikan perencanaan dan pola pemanfaatan tata ruang yang sudah diatur dalam dokumen RTRW. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 10 (sepuluh) bab, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal.
2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Kendal secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.
3. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan untuk periode RPJMD 2016-2021.
4. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS menjelaskan tentang berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan, sasaran, dan indikator sasarannya.
6. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
7. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

8. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN, Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
9. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH. Bagian ini menguraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
10. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.
11. BAB XI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kendal sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari pasangan kepala daerah terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

2. Tujuan

- a. Mendiskripsikan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah yang

nantinya akan menjadi dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyusun Renstra-PD periode 2016-2021;

- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2016-2021 kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2016-2021;
- d. Menetapkan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
- e. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah (PD) dan Indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kendal sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021.

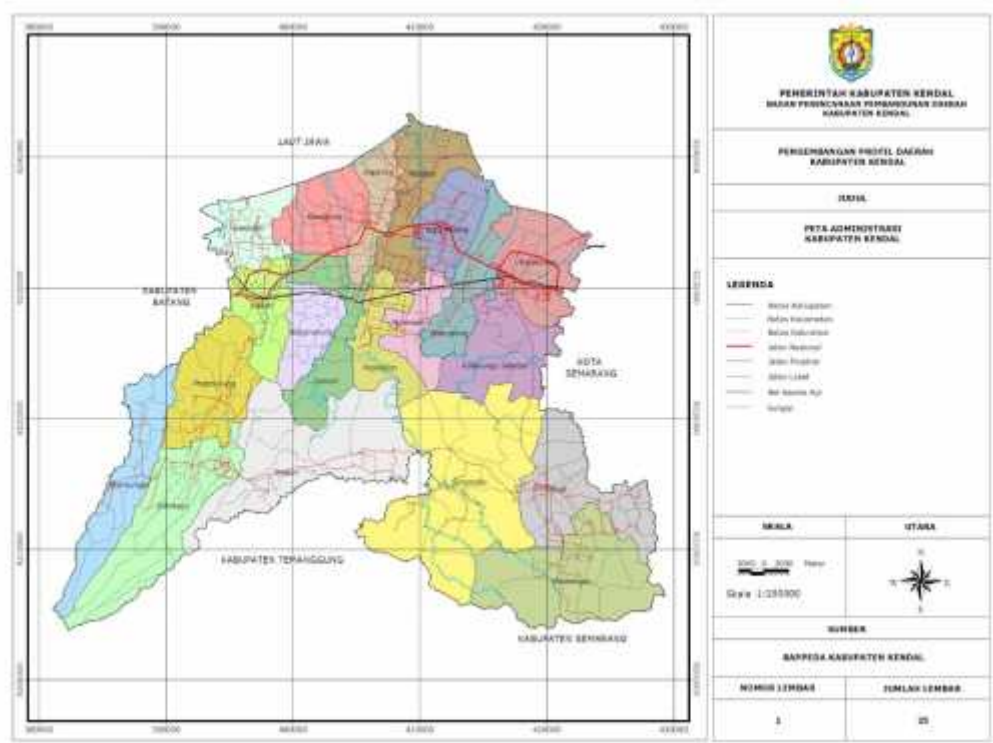
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.002,23 Km2. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.



Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Kendal
(Sumber: *Bappeda Kabupaten Kendal*)

Jumlah kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 286 yang terdiri 266 desa dan 20 kelurahan. Terdiri dari 1.140 dukuh, 1.490 RW dan 6.351 RT.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Kendal berada pada jalur penghubung Pulau Jawa bagian utara (Pantura) sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Selain itu juga Kabupaten Kendal letaknya berbatasan langsung dengan

Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Kendal merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Menurut data dari Kendal dalam angka tahun 2016, dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2015, 70% digunakan untuk usaha pertanian (sawah dan tegalan) dan hutan serta perkebunan. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), dan lain-lain.

c. Topografi

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian selatan dengan ketinggian sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25°C. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27°C. Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dalam wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 697 m dpl. Begitu pula dengan Kecamatan Sukorejo dengan ketinggian 524 m dpl. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut, dengan ketinggian 22 m dpl.

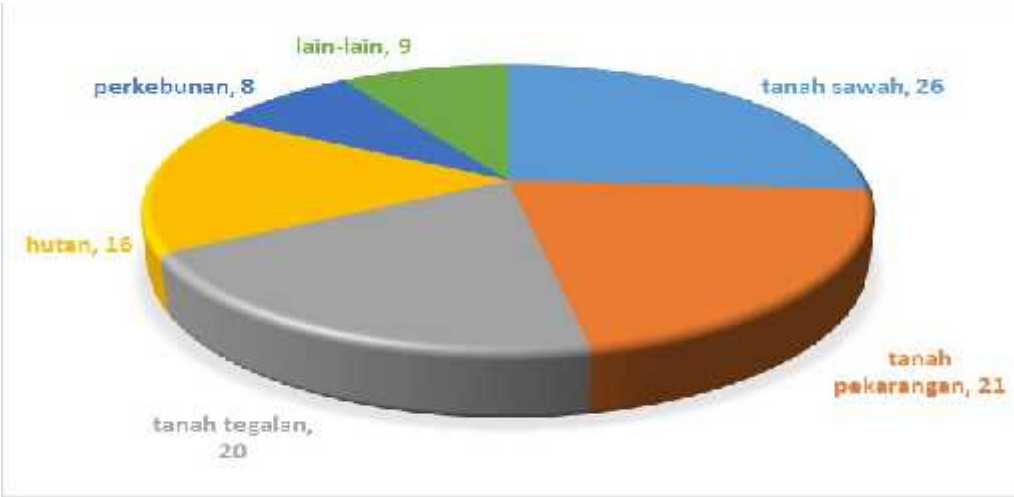
d. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang berdekatan dengan Laut Jawa (dataran rendah), kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas. Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan (dataran tinggi), kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk.

Tahun 2015 di Kabupaten Kendal memiliki curah hujan yang cukup tinggi, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, adapun curah hujan terendah terjadi pada bulan September. Jumlah curah hujan pada tahun 2015 lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Tahun 2014 curah hujan sebesar 2.644 mm, sedangkan tahun 2015 berkisar 1.780 mm. Rata-rata hari hujan selama tahun 2015 adalah 97 hari.

e. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kendal menurut buku Kendal Dalam Angka 2016 adalah 1.002,3 Km². Total luas tersebut terdiri atas tanah sawah seluas 259,64 Km², tanah pekarangan 210,74 Km², tanah tegalan 203,13 Km², perkebunan 78,65 Km², hutan 157,21 Km², dan lahan untuk lain-lain (perumahan, fasilitas umum, industri, dsb) seluas 92,86 Km². adapun persentase pemanfaatan lahan/tanah di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.



Gambar 2.2.
Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Kendal Tahun 2015 (%)
(Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2016)

Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Budidaya.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;

Kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Limbangan; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Plantungan; dan di Kecamatan Singorojo. Sedangkan Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 15.225 (lima belas ribu dua ratus dua puluh lima) hektar berada di Kecamatan Limbangan;

Kecamatan Singorojo; Kecamatan Kaliwungu Selatan; Kecamatan Ringinarum; Kecamatan Boja; Kecamatan Pageruyung; Kecamatan Weleri; Kecamatan Plantungan; Kecamatan Kaliwungu; dan Kecamatan Sukorejo.

b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;

Kawasan hutan rakyat berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meliputi: sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Singorojo; sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; sebagian Kecamatan Ringinarum; sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Pageruyung; sebagian Kecamatan Gemuh; sebagian Kecamatan Weleri; sebagian Kecamatan Plantungan; sebagian Kecamatan Kaliwungu; dan sebagian Kecamatan Sukorejo.

c) Kawasan Peruntukan Pertanian;

Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan.

Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar meliputi: sebagian Kecamatan Rowosari; sebagian Kecamatan Kangkung; sebagian Kecamatan Cepiring; sebagian Kecamatan Patebon; sebagian Kecamatan Kendal; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kaliwungu; sebagian Kecamatan Ngampel; sebagian Kecamatan Pegandon; sebagian Kecamatan Gemuh; sebagian Kecamatan Weleri; sebagian Kecamatan Ringinarum; sebagian Kecamatan Sukorejo; sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Singorojo; sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Patean; sebagian Kecamatan Plantungan; sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan; dan sebagian kecamatan Pageruyung.

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 5.723 (lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektar meliputi: sebagian Kecamatan Rowosari; sebagian Kecamatan Kangkung; sebagian Kecamatan Cepiring; sebagian Kecamatan Patebon; sebagian Kecamatan Kendal; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kaliwungu; sebagian

Kecamatan Ngampel; sebagian Kecamatan Ringinarum; sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; sebagian Kecamatan Gemuh; dan sebagian Kecamatan Pegandon.

Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 20.135 (dua puluh ribu seratus tiga puluh lima) hektar meliputi sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Singorojo; sebagian Kecamatan Patean; sebagian Kecamatan Pageruyung; sebagian Kecamatan Plantungan; sebagian Kecamatan Sukorejo; dan sebagian Kecamatan Ngampel.

Kawasan peternakan menyebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Adapun komoditas dari industri peternakan yang ada di Kabupaten Kendal adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, kelinci, itik, dan ayam ras.

d) Kawasan Peruntukan Perikanan;

Rencana pengembangan kawasan perikanan terdiri dari kawasan pengembangan perikanan tangkap; kawasan pengembangan budidaya air payau; kawasan pengembangan budidaya air tawar; dan kawasan pengembangan budidaya laut.

Kawasan pengembangan perikanan tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan pantai utara; dan perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi waduk, rawa, sungai, dan embung.

Kawasan pengembangan budidaya air payau dengan luas kurang lebih 3.531 (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu. Sementara itu kawasan pengembangan budidaya air tawar hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan pengembangan budidaya laut dengan jarak sampai dengan 4 (empat) mil laut, sepanjang pesisir utara meliputi Kecamatan Kaliwungu; Kecamatan Brangsong; Kecamatan Kendal; Kecamatan Patebon; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Kangkung; dan Kecamatan Rowosari.

e) Kawasan Peruntukan Pertambangan;

Pengembangan kawasan pertambangan terdiri atas mineral; minyak dan gas bumi; panas bumi;

Kawasan pertambangan mineral terdiri atas mineral logam; mineral bukan logam; dan batuan. Kawasan pertambangan mineral logam berada di kawasan Pantai Muara Desa Pidodo Kulon Kecamatan Patebon dan di kawasan Pantai Ngebom Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu. Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi Kecamatan Pegandon Kecamatan Weleri; Kecamatan Pageruyung; Kecamatan Patean; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Singorojo; dan sepanjang Sungai Bodri. Adapun Kawasan pertambangan batuan meliputi Kecamatan Limbangan; Kecamatan Boja; Kecamatan Ngampel; Kecamatan Brangsong; Kecamatan Kaliwungu Selatan; Kecamatan Kaliwungu; Kecamatan Weleri; Kecamatan Pageruyung; Kecamatan Sukorejo; sepanjang Sungai Bodri.

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berskala kecil berada di Kecamatan Gemuh. Sedangkan Kawasan Pertambangan Panas bumi berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Ungaran.

f) Kawasan Peruntukan Industri;

Pengembangan kawasan industri terdiri atas industri besar; industri sedang; dan industri kecil atau mikro. Kawasan industri besar dan industri sedang berada di Kecamatan Kaliwungu. Pengembangan kawasan industri besar dan industri sedang memiliki luas total kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar. Sedangkan kawasan industri kecil atau mikro berada di seluruh kecamatan.

g) Kawasan Peruntukan Pariwisata;

Pengembangan kawasan pariwisata difokuskan kepada pariwisata budaya; pariwisata alam; dan pariwisata buatan.

Kawasan pariwisata budaya meliputi Makam Pangeran Juminah dan Makam Sunan Katong berada di Kaliwungu Selatan; Makam Nyai Dapu dan Makam Sunan Bromo berada di Kecamatan Boja; Situs Batu Seloarjuno dan Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan; dan Goa

Maria berada di Kecamatan Weleri.

Kawasan pariwisata alam meliputi Pantai Sendangkulon, Pantai Jungsemi, dan Pantai Tanjungmojo berada di Kecamatan Kangkung; Pantai Sendangsikucing berada di Kecamatan Rowosari; Wana Wisata berada di Kecamatan Ringinarum; Curug Semawur, Tuk Air Hangat Tirtomoyo, dan Agrowisata Ngebruk berada di Kecamatan Patean; Curug Sewu berada di Kecamatan Patean; Goa Kiskendo dan Bendung Singorojo berada di Kecamatan Singorojo; Air Panas Gonoharjo, Goa Jepang, dan Air Terjun Panglebur gongso berada di Kecamatan Limbangan; dan Pantai Muara Kencan di Kecamatan Patebon.

Kawasan pariwisata buatan meliputi: Plantera berada di Kecamatan Patean; Agrowisata Ngadiwarno berada di Kecamatan Sukorejo; Wisata Kuliner Pemancingan berada di Kecamatan Weleri; Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba berada di Kecamatan Rowosari; dan Agrowisata Darupono, Agrowisata Kedungsuran, dan Agrowisata Jerukgiling berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

h) Kawasan Peruntukan Permukiman;

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 8.734 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektar, dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 10.132 (sepuluh ribu seratus tiga puluh dua) hektar.

Kawasan permukiman perkotaan meliputi permukiman berada di perkotaan Kendal, dan permukiman yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh kecamatan.

i) Kawasan Peruntukan Pesisir;

Kawasan pesisir di Kabupaten Kendal meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu.

j) Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan;

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Komando Distrik Militer (Kodim) 0715 yang berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal, Komando Daerah Militer (Kodam) 408 yang berada di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri, dan Kepolisian Resor (Polres) Kendal yang berada di Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal.

2) Kawasan Lindung.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Kendal terdiri atas:

a) Hutan Lindung;

Hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.704 (seribu tujuh ratus empat) hektar meliputi Kecamatan Limbangan; Patean; Plantungan; Singorojo; Sukorejo, dan Boja.

b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya;

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa kawasan resapan air. Kawasan resapan air di Kabupaten Kendal meliputi sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Singorojo; sebagian Kecamatan Patean; sebagian Kecamatan Sukorejo; sebagian Kecamatan Plantungan; dan Kecamatan Pageruyung.

c) Kawasan Perlindungan Setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai; kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar danau/waduk; kawasan terbuka hijau perkotaan; kawasan dengan kemiringan 40 % (empat puluh persen) atau lebih; kawasan sempadan rel kereta api.

Kawasan sempadan pantai ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi pantai meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan

Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu.

Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan (sungai bertanggung dan sungai tidak bertanggung); sempadan sungai di luar kawasan perkotaan; sempadan sungai di luar permukiman; dan sempadan sungai di dalam permukiman;

Kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, mikrolimat, ekosistem, dan habitat fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 2.683 (dua ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan perkotaan.

Kawasan dengan kemiringan 40% (empat puluh persen) atau lebih meliputi sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Plantungan; dan sebagian Kecamatan Sukorejo.

Kawasan sempadan rel kereta api ditetapkan 6 (enam) meter dari batas luar pengamanan rel kereta api meliputi: sebagian Kecamatan Weleri; sebagian Kecamatan Ringinarum; sebagian Kecamatan Gemuh; sebagian Kecamatan Pegandon; sebagian Kecamatan Ngampel; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan sebagian Kecamatan Kaliwungu.

d) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Dan Cagar Budaya;

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan suaka alam; pantai berhutan bakau; dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan suaka alam di Kabupaten Kendal adalah kawasan Suaka Alam Pagerwunung Darupono berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar.

Kawasan pantai berhutan bakau meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu.

Kawasan cagar budaya yaitu situs Seloarjuno berada di Kecamatan Limbangan; tugu gerbang Kabupaten Lama berada di Kecamatan Kaliwungu; tugu gerbang Pasarean berada di

Kecamatan Kendal; dan Candi Gunung Gentong berada di Kecamatan Limbangan.

e) Kawasan Lindung Geologi;

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air. Kawasan ini meliputi kawasan imbuhan air, dan kawasan sempadan mata air.

Kawasan imbuhan air dengan luas kurang lebih 17.876 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar berada di sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Boja; dan sebagian Kecamatan Singorojo.

Kawasan sempadan mata air ditetapkan selebar 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air meliputi sebagian Kecamatan Boja; sebagian Kecamatan Plantungan; sebagian Kecamatan Limbangan; sebagian Kecamatan Sukorejo; sebagian Kecamatan Patean; dan sebagian Kecamatan Singorojo.

f) Kawasan Rawan Bencana;

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal, terdapat 8 ancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Kendal. Delapan ancaman bencana tersebut adalah banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran gedung dan pemukiman, cuaca ekstrim, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta gempa bumi.

Kawasan yang masuk dalam daerah rawan banjir adalah Kecamatan Kaliwungu (daerah muara atau hilir Kali Aji pada Desa Mororejo dan muara Kali Waridin pada Desa Wonorejo), Kecamatan Brangsong (daerah hilir Sungai Waridin pada Desa Turunrejo), Kecamatan Kota Kendal (daerah hilir Kali Blorong pada Desa Bandengan dan Banyutowo, bagian hilir Kali Kendal pada daerah Bandengan dan Karangsari), Kecamatan Patebon (daerah hilir Kali Buntu pada Desa Wonosari serta daerah hilir Kali Bodri pada Desa Pidodo Wetan dan Pidodo Kulon), Kecamatan Rowosari (daerah hilir Kali Kutho pada Desa Jatipurwo, Gempolsewu dan Rowosari), dan Kecamatan Kangkung (daerah hilir Kali Blukar pada Desa Jungsemi,

Kangkung, Tanjungmojo dan Rejosari serta daerah hilir Kali Damar pada Desa Sendang Dawung, Laban dan Karangmalang Wetan.

Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Kendal berdasarkan data dan pemetaan dari dokumen RPB terdapat di 286 desa. Potensi bahaya kekeringan yang dimaksud adalah jumlah ketersediaan air untuk kebutuhan hidup manusia, dan biota lain termasuk tanaman dan ternak dimana jika keadaan kering bertambah panjang waktunya akan menimbulkan kerugian sedikitnya harta benda patut diwaspadai dan dilakukan tindakan penanganan. Kekeringan yang terjadi biasanya di pengaruhi oleh bebarapa faktor fisik yaitu; bentuk lahan, curah hujan, kedalaman air tanah, dan tekstur tanah bagian atas yg berpengaruh terhadap daya meresapkan air hujan..

Kawasan rawan bencana longsor ada di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kendal. Dalam dokumen RPB disebutkan ada 135 desa yang berpotensi rawan longsor atau gerakan tanah. Gerakan tanah yang terjadi pada daerah bahaya tanah longsor tinggi berupa gerakan tanah dangkal dengan kedalaman bidang gelincir sekitar 1-3 m, kemiringan lereng 50o - 70o. Gerakan tanah yang terjadi karena kondisi litologi berupa tanah pelapukan dari breksi vulkanik yang matriksnya tersusun oleh lempung pasir yang memiliki sifat semi impermeable sehingga apabila hujan dengan intensitas yang tinggi air permukaan akan menggenang pada tanah pelapukan dan akan tertahan pada bidang kontak antara tanah pelapukan dan batuan breksi vulkanik di bawahnya. Akibat tekanan air pada tanah meningkat menyebabkan kuat geser mengecil dan menyebabkan tanah pelapukan menjadi labil dan cenderung bergerak ke lereng bagian bawah.

Potensi bencana berikutnya adalah kebakaran gedung dan permukiman. Kebakaran gedung dan permukiman didefinisikan sebagai bentuk kebakaran yang diakibatkan oleh nyala api yang sukar dikendalikan pada tempat yang tidak dikehendaki sehingga merugikan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk peta bahaya kebakaran gedung dan permukiman adalah frekuensi jumlah kejadian kebakaran, nilai

kerugian ekonomi (miliar rupiah), jumlah korban meninggal dan jumlah korban luka berat. Semua desa di Kabupaten Kendal memiliki potensi terjadi bencana kebakaran gedung dan permukiman.

Pemetaan bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Kendal menggunakan parameter yang sudah ditetapkan oleh BNPB melalui Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Pada peta zonasi bencana daerah rawan cuaca ekstrim disusun berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, curah hujan tahunan yang divalidasi dengan data kejadian sebagai indikatornya. Dari parameter tersebut dapat disimpulkan, bahwa semakin luas area yang masuk dalam zonasi daerah rawan cuaca ekstrim, semakin besar ancaman terhadap bahaya cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Wilayah rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Kendal berdasarkan data dari BPBD meliputi 203 desa.

Kawasan rawan bencana gelombang tinggi dan abrasi (sebagian Kecamatan Rowosari; sebagian Kecamatan Kangkung; sebagian Kecamatan Cepiring; sebagian Kecamatan Patebon; sebagian Kecamatan Kendal; sebagian Kecamatan Brangsong; dan sebagian Kecamatan Kaliwungu). Adapun desa-desanya adalah Turunrejo, Purwokerto, Juwiring, Kaliayu, Kalirandu Gede, Korowelang Kulon, Korowelang Anyar, Margorejo, Sidomulyo, Mororejo, Wonorejo, Karangmalang Wetan, Tanjungmojo, Kadilangu, Kalirejo, Kalibuntu Wetan, Banyutowo, Karang Sari, Wonosari, Kartikajaya, Pidodo Wetan, Pidodo Kulon, Gempolsewu, dan Sendang Sikucing.

Potensi bencana berikutnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan berdampak negatif bagi tumbuhan/tanaman, sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Dampak negatif kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bagi hutan dan lahannya itu sendiri, tetapi lebih jauh akan mengganggu kehidupan dan proses pembangunan. Kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah/dikendalikan, karena secara umum sudah diketahui bahwasannya kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi saat musim kemarau. Oleh karena itu, pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak

hanya tertuju pada usaha pemadaman apinya saja, tetapi upaya pencegahan yang terencana dan berkelanjutan perlu diupayakan secara maksimal, baik saat musim kemarau ataupun saat musim penghujan. Desa di Kabupaten Kendal yang memiliki potensi bencana ini berjumlah 218 desa.

Potensi bencana terakhir adalah gempa bumi. Berdasarkan peta bahaya gempabumi, maka diindikasikan wilayah yang rawan bencana gempabumi di Kabupaten Kendal adalah di semua desa (286 desa).

Berdasarkan penilaian dan identifikasi kebencanaan di Kabupaten Kendal, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi bencana di Kabupaten Kendal dibagin atas tiga tingkat ancaman yaitu:

- Tingkat ancaman rendah berpotensi terjadi pada ancaman gelombang ekstrim-abrasi;
- Tingkat ancaman sedang berpotensi terjadi pada ancaman banjir, tanah longsor;
- Tingkat ancaman tinggi berpotensi terjadi pada ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kebakaran gedung dan permukiman dan gempabumi.

g) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Kendal berupa kawasan perlindungan plasma nutfah. Kawasan perlindungan plasma nutfah terdiri atas kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan, dan kawasan perlindungan plasma nutfah di lautan.

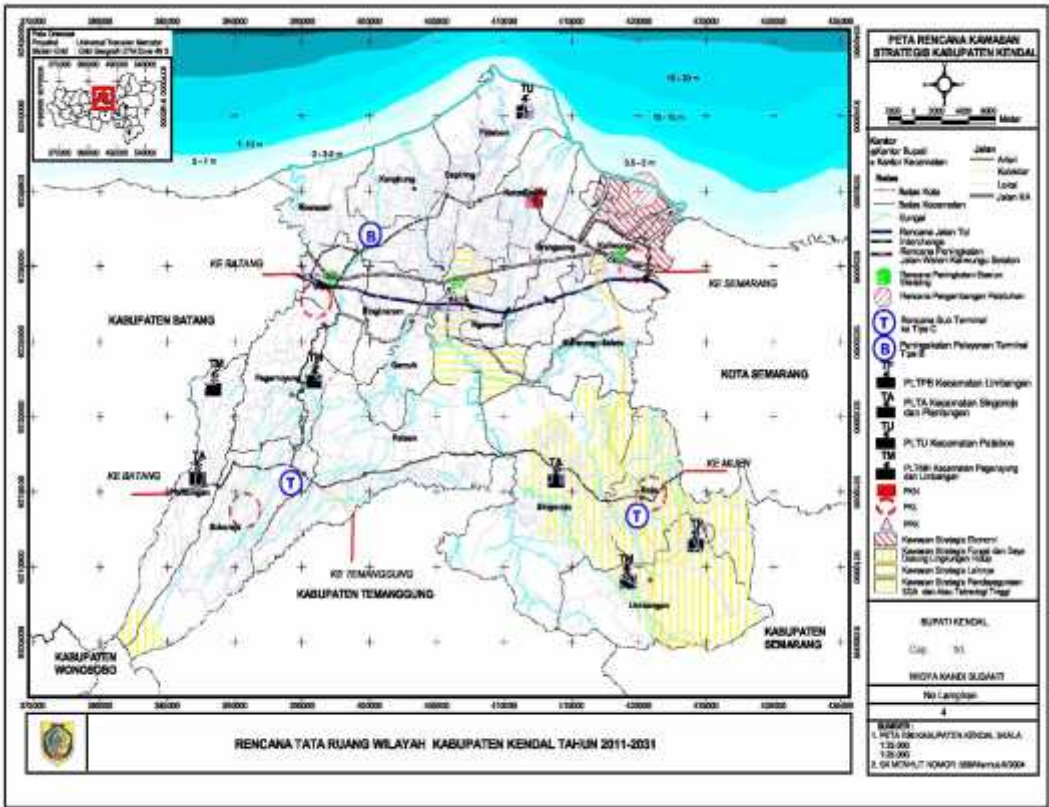
Luas Kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan dengan luas kurang lebih 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektar meliputi Kecamatan Limbangan; Kecamatan Plantungan; Kecamatan Sukorejo; dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Kawasan perlindungan plasma nutfah di lautan meliputi Kecamatan Rowosari; Kecamatan Kangkung; Kecamatan Cepiring; Kecamatan Patebon; Kecamatan Kendal; Kecamatan Brangsong; dan Kecamatan Kaliwungu.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa Kabupaten Kendal merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi. Selain itu di dalam Perda tersebut juga direncanakan pengembangan sistem transportasi laut dan Kendal sebagai kawasan strategis ekonomi.

Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari Rencana Tata dan Ruang Wilayah Kabupaten Kendal. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal mengklasifikasikan rencana pola ruang di Kabupaten Kendal kedalam dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.



Gambar 2.3.
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kendal
(Sumber: *RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031*)

Dari peta di atas, dapat dilihat bahwa ke depan rencananya akan terdapat kawasan yang akan dikembangkan di Kabupaten Kendal. Kawasan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Kawasan Strategis Ekonomi. Kawasan ini berada di Kecamatan Kaliwungu dengan luas kurang lebih 1.064 (seribu enam puluh

- empat) hektar, meliputi: Desa Mororejo; Desa Wonorejo; Desa Krajan Kulon; dan Desa Kutoharjo.
- b) Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Kawasan ini berada di kawasan panas bumi Gunung Ungaran.
- c) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini memiliki luas kurang lebih 17.876 (tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar. Kawasan ini meliputi: Kecamatan Limbangan; dan Kecamatan Boja.

2.1.3 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2015 tercatat sebanyak 952.966 jiwa, terdiri atas 481.061 (50,48%) laki-laki dan 498.106 (50,14 persen) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja dengan jumlah penduduk 69.219 (7,26%). Sedangkan Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 32.287 jiwa (3,239%).

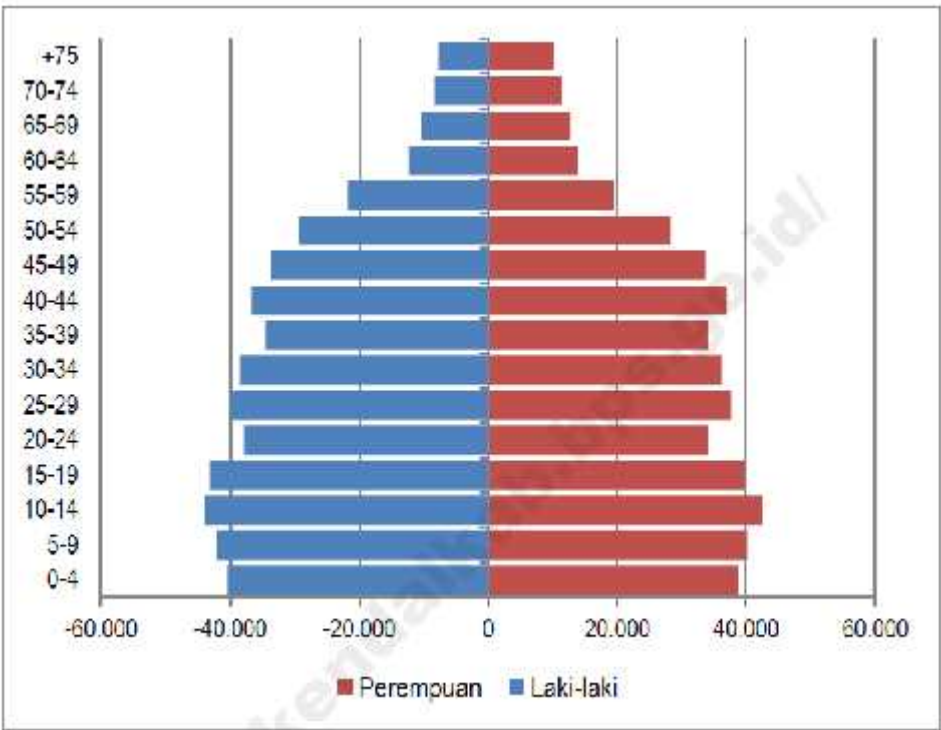
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		Laki - laki	Perempuan	
1	Plantungan	16.689	16.072	32.761
2	Sukorejo	18.506	17.652	36.158
3	Pageruyung	30.514	29.183	59.697
4	Patean	25.952	24.952	50.904
5	Singorojo	25.258	24.726	49.984
6	Limbangan	16.461	15.826	32.287
7	Boja	34.894	34.325	34359.9
8	Kaliwungu	29.279	28.913	58.192
9	Kaliwungu Selatan	23.623	22.983	46.606
10	Brangsong	18.072	18.386	36.458
11	Pegandon	24.757	24.623	49.380
12	Ngampel	28.811	28.551	57.362
13	Gemuh	25.206	25.456	50.662
14	Ringinarum	28.722	28.293	57.015
15	Weleri	27.736	27.091	54.827
16	Rowosari	25.480	25.418	50.898
17	Kangkung	24.063	23.953	48.016
18	Cepiring	17.526	17.107	34.633
19	Patebon	16.956	16.569	33.525
20	Kota Kendal	22.556	21.826	44.382
Jumlah		481.061	471.905	952.966

(Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016)

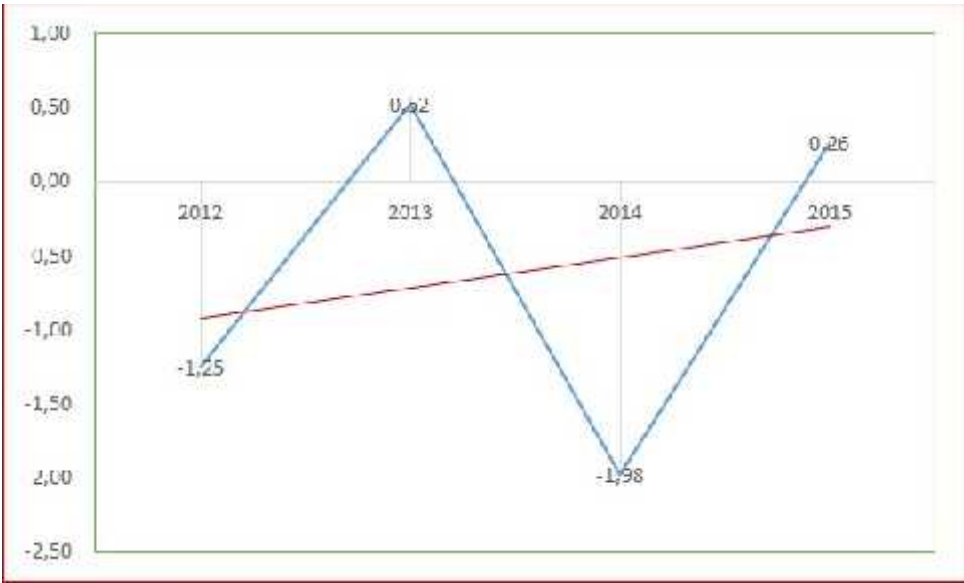
Kepadatan penduduk di Kabupaten Kendal sebesar 951 jiwa per km². Penyebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Kecamatan Ringinarum (2.426 jiwa/km²). Sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Limbangan (450 jiwa/km²).

Jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2014 (data tahun 2015 belum tersedia data per kelompok umur) terbanyak berada pada strata 10 – 14 tahun, dengan jumlah jiwa 86.600. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada strata 75 tahun keatas berjumlah 17.911 jiwa. Dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Kendal maka kelompok umur usia produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.



Gambar 2.4.
Komposisi Penduduk Kabupaten Kendal Berdasarkan
Kelompok Umur Tahun 2014
(Sumber: *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016*)

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang meningkat meskipun angkanya fluktuatif. Perumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, yakni dari posisi negatif (-1,98%) pada tahun 2014 menjadi 0,26% pada tahun 2015.



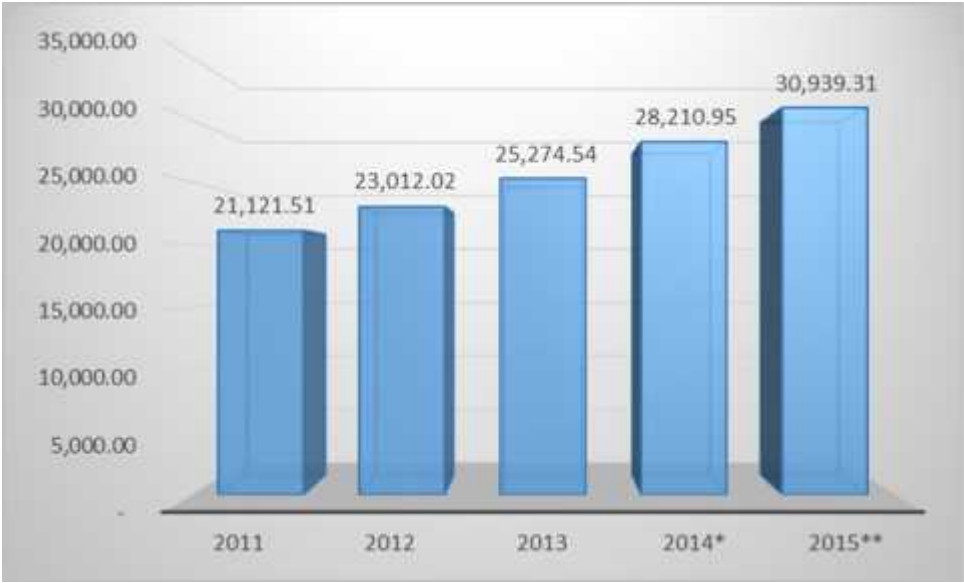
Gambar 2.5.
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2012-2015
(Sumber: *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016 diolah*)

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2011 PDRB ADHB sebesar Rp 21.121,51 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp. 30.939,31 miliar pada tahun 2015 (angka sangat sementara). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah ini.



Keterangan:
*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Gambar 2.6.
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015
(miliar rupiah)
(Sumber: *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016*)

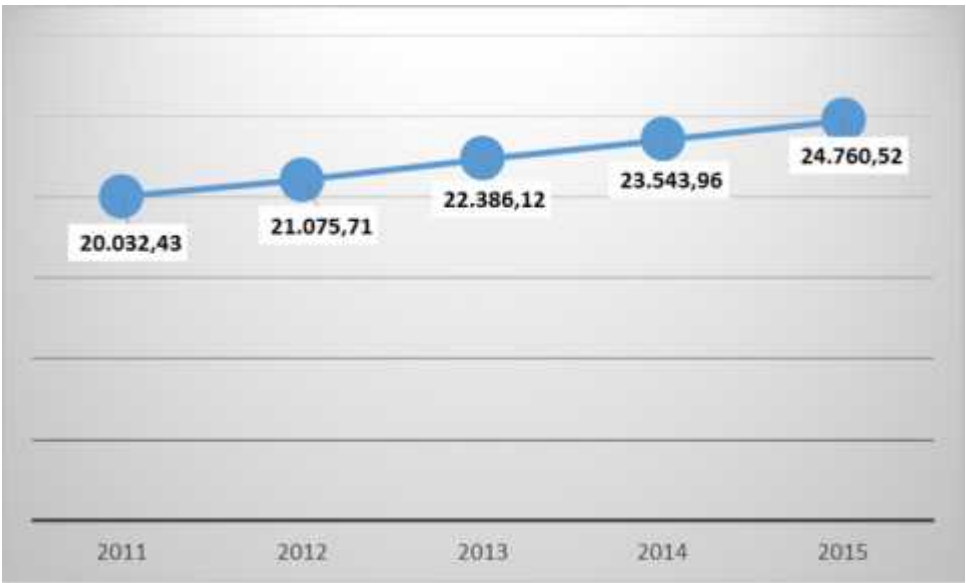
Sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kendal adalah sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lebih lengkapnya distribusi masing-masing sektor dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015 (%)

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,32	21,96	22,25	22,22	21,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,40	0,38	0,36	0,41	0,58
3.	Industri Pengolahan	40,42	41,42	40,71	40,74	41,55
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
6.	Konstruksi	6,28	6,43	6,72	6,85	6,55
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,67	12,00	11,82	11,31	12,77
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,04	1,93	1,86	1,80	1,92
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3,11	2,99	3,27	3,55	3,23
10.	Informasi dan Komunikasi	3,29	3,22	3,00	2,82	2,95
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,95	2,04	2,06	2,08	2,03
12.	Real Estate	0,76	0,74	0,82	0,90	0,91
13.	Jasa Perusahaan	0,24	0,24	0,26	0,27	0,27
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,14	2,17	2,18	2,24	2,20
15.	Jasa Pendidikan	2,16	2,29	2,49	2,56	2,56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,68	0,69	0,69	0,74
17.	Jasa Lainnya	1,30	1,23	1,25	1,29	1,23

(Sumber: *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016*)

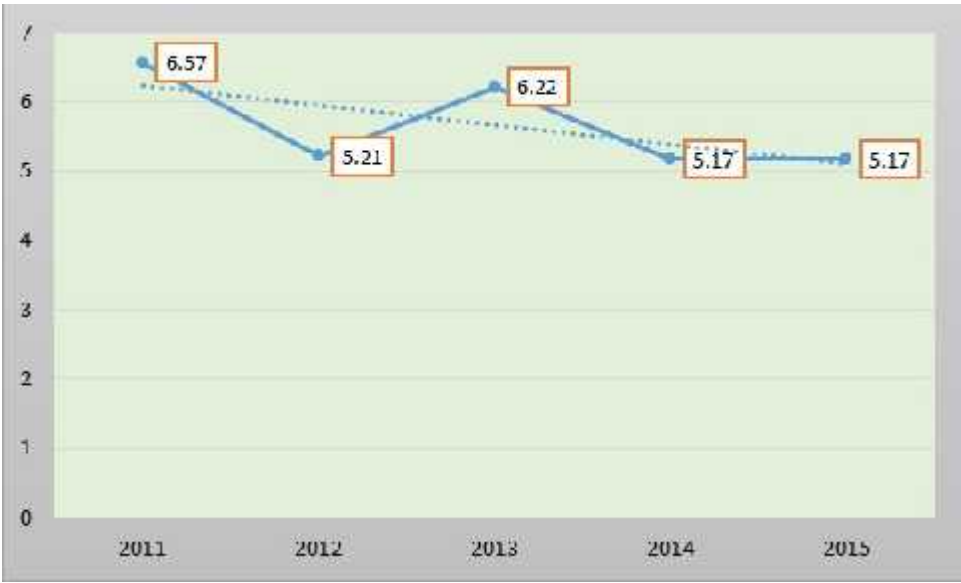
Sementara itu perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) trennya juga meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011 PDRB ADHK tahun 2010 Kabupaten Kendal adalah Rp 20.032,43 miliar, dan meningkat menjadi Rp 24.760,52 miliar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini.



Gambar 2.7.
Perkembangan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Kabupaten Kendal
Tahun 2011– 2014 (Miliar Rupiah)
(Sumber: *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016*)

b. Pertumbuhan Ekonomi

Dari data diatas maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal sejak tahun 2011 sampai 2015 cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2011 angkanya sebesar 6,57%, pada tahun 2015 turun menjadi 5,17%.

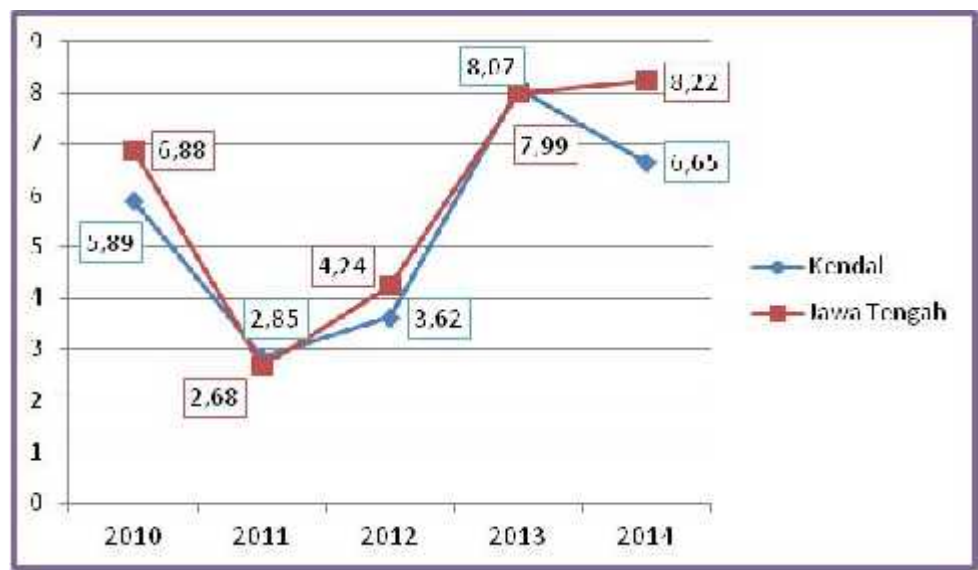


Gambar 2.8.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015
(Sumber: *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016*)

c. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Kendal menunjukkan tren meningkat dengan angka yang fluktuatif. Dalam 5 tahun terakhir (2010 – 2014) rata-rata inflasi di Kabupaten Kendal sebesar

5,42%. Jika dibandingkan dengan inflasi di Jawa Tengah selama 5 tahun, angka inflasi di Kendal masih dibawah inflasi Jawa Tengah, kecuali pada tahun 2011 dan 2013. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.7 di bawah ini.



Gambar 2.9.
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah (%)
Tahun 2010 – 2014
(Sumber: *Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kendal 2014*)

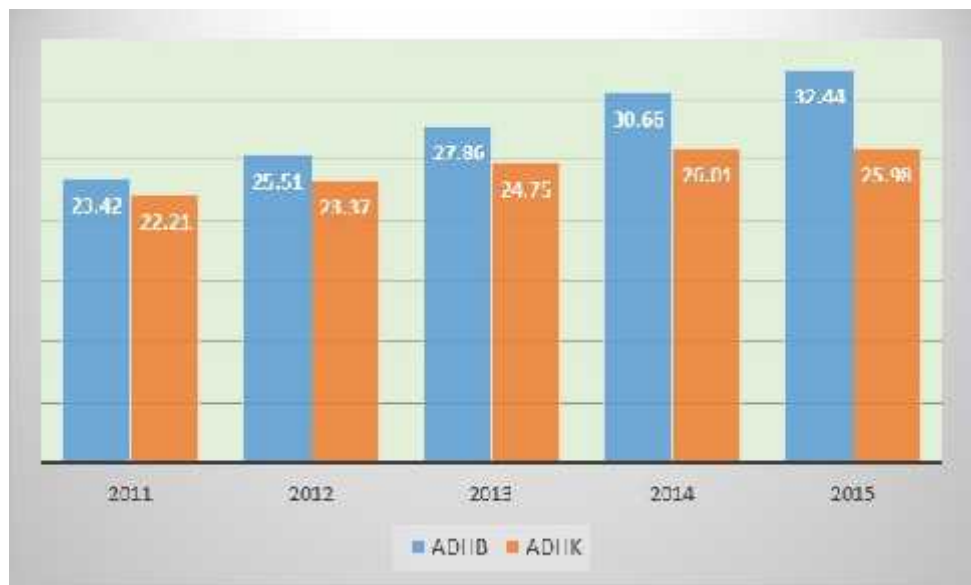
d. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal dalam kurun 2011-2015 naik dari Rp.23,42 juta menjadi Rp. 32,44 juta

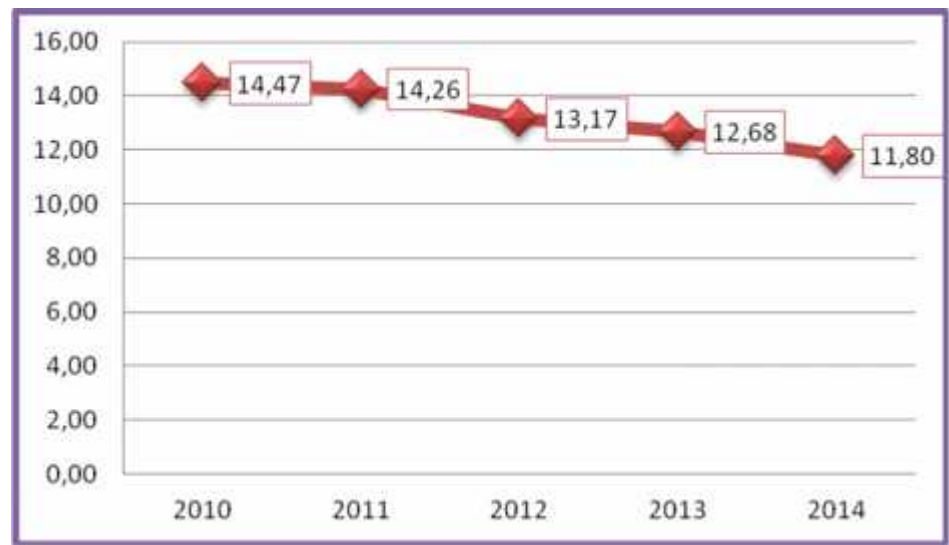
berdasarkan atas harga berlaku. Sedangkan berdasarkan harga konstan naik dari 22,21 juta rupiah menjadi 25,98 juta rupiah.



Gambar 2.10.
PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015 (juta)
(Sumber: *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016 diolah*)

e. Penduduk Miskin

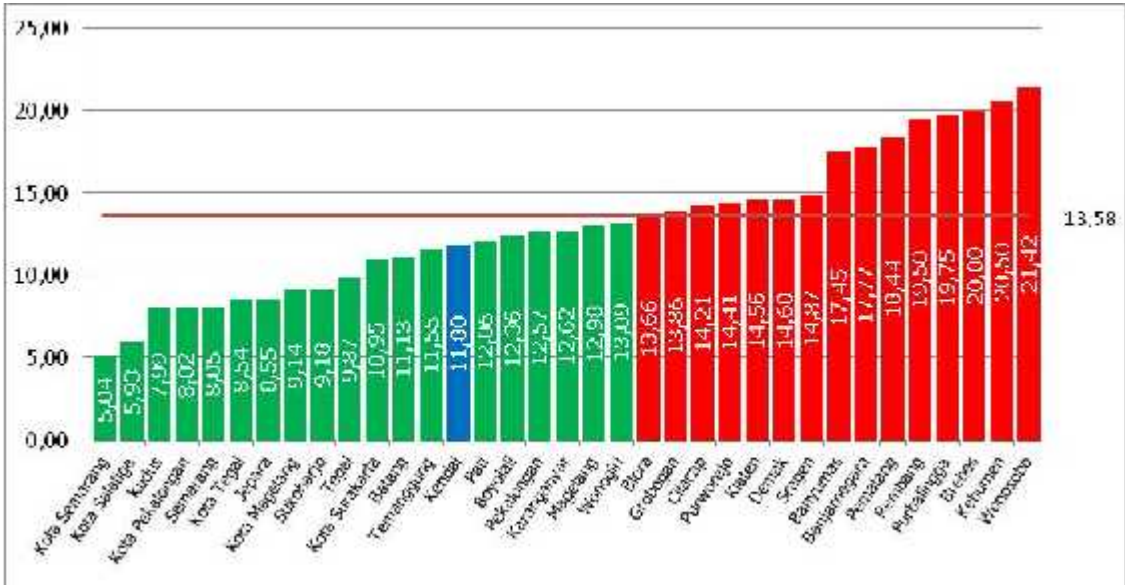
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari 14,47% pada tahun 2010 menjadi 11,80% pada tahun 2014. Jika diakumulasikan terjadi penurunan capaian sebesar 2,67%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.9 di bawah ini.



Gambar 2.11.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2014
(Sumber: *TKPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*)

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 14 dari total 35 kabupaten/kota yang ada. Capaian Kabupaten Kendal sudah di bawah rata-rata Jawa Tengah. Jika

dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Kabupaten Kendal masih lebih tinggi tingkat kemiskinannya dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan juga Temanggung.



Gambar 2.12.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2014
dibandingkan Kab/Kota Lain di Jawa Tengah
(Sumber: TKPK Provinsi Jawa Tenga Tahun 2015)

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, rumah tangga miskin menggunakan sumber basis data terpadu untuk program perlindungan sosial (2015) maka rumah tangga miskin pada desil 1 dan 2 paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Penduduk miskin Desil 3 paling banyak ada di Kecamatan Boja. Adapun untuk desil 4 ada di Kecamatan Kaliwungu.

Sedangkan kalau dilihat dari individu, paling banyak pada desil 1 adalah Kecamatan Plantungan. Desil 2 paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Desil 3 paling banyak di Kecamatan Boja, dan desil 4 paling banyak ada di Kecamatan Brangsong.

Tabel 2.3
Sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Kendal Menurut Kecamatan Berdasarkan PBDT 2015

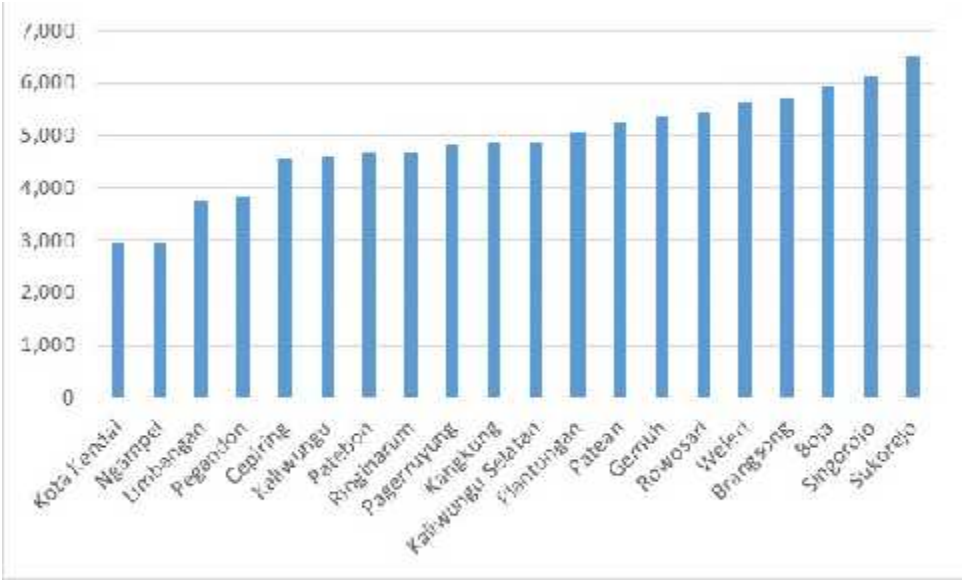
Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL
Plantungan	2.740	1.392	666	274	5.072	11.728	4.227	1.846	729	18.530
Sukorejo	2.744	1.969	1.157	613	6.483	10.941	5.663	2.914	1.646	21.164
Pagerruyung	2.327	1.451	712	335	4.825	9.104	4.178	1.927	900	16.109
Patean	2.451	1.632	810	339	5.232	9.094	4.173	1.854	756	15.877
Singorojo	2.034	1.915	1.346	827	6.122	8.460	5.964	3.745	2.275	20.444
Limbangan	934	1.111	997	721	3.763	3.963	3.611	2.981	2.150	12.705
Boja	1.177	1.763	1.586	1.429	5.955	4.929	5.598	4.717	4.286	19.530
Kaliwungu	622	1.081	1.371	1.519	4.593	2.858	3.898	4.202	4.726	15.684
Kaliwungu Selatan	1.198	1.392	1.178	1.117	4.885	4.963	4.298	3.589	3.616	16.466

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL
Brangsong	1.162	1.631	1.458	1.452	5.703	5.164	5.474	4.716	4.797	20.151
Pegandon	1.109	1.277	897	560	3.843	4.449	3.260	2.232	1.467	11.408
Ngampel	947	1.010	669	332	2.958	3.801	2.489	1.442	806	8.538
Gemuh	1.788	1.804	1.057	711	5.360	7.111	4.904	2.885	1.990	16.890
Ringinarum	1.683	1.673	835	469	4.660	6.169	4.078	2.141	1.291	13.679
Weleri	1.621	1.756	1.358	899	5.634	6.703	5.048	3.662	2.491	17.904
Rowosari	1.812	1.746	1.178	732	5.468	7.754	5.009	2.982	1.907	17.652
Kangkung	1.429	1.683	1.082	680	4.874	5.744	4.442	2.636	1.796	14.618
Cepiring	1.147	1.430	1.122	834	4.533	4.750	3.809	2.718	2.101	13.378
Patebon	981	1.300	1.263	1.107	4.651	4.459	4.495	3.719	3.414	16.087
Kota Kendal	524	633	817	983	2.957	2.520	2.396	2.530	2.814	10.260
TOTAL	30.430	29.649	21.559	15.933	97.571	124.664	87.014	59.438	45.958	317.074

(Sumber: *PBDT Tahun 2015*)

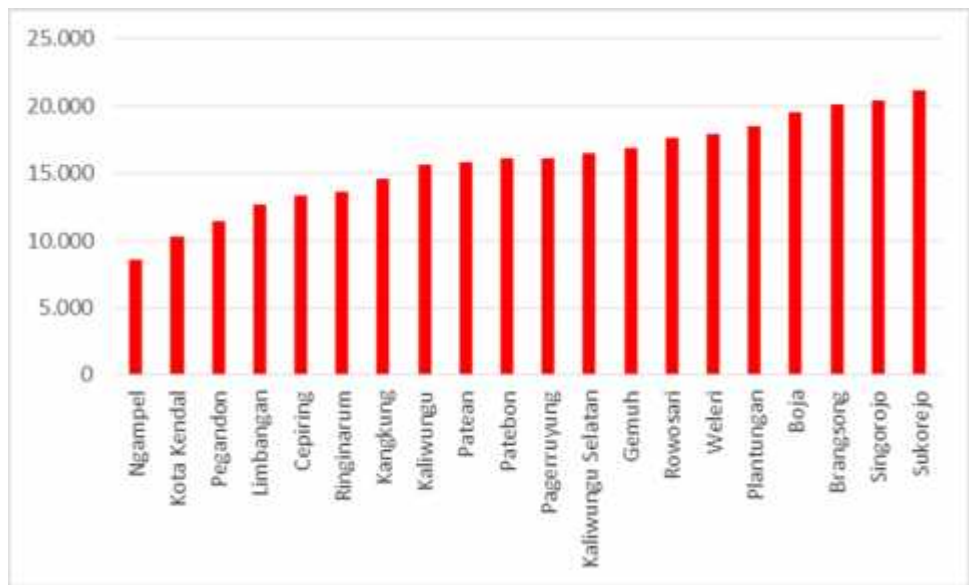
- Catatan:
- Desil 1: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
 - Desil 2: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)
 - Desil 3: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)
 - Desil 4: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% - 40% terendah di Indonesia)

Jika dilihat dari posisi relatif, jumlah rumah tangga miskin dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Kendal paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Kota Kendal.



Gambar 2.13.
Posisi Relatif Rumah Tangga Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kendal
(Sumber: *PBDT Tahun 2015*)

Jika dilihat dari sisi individu, penduduk miskin dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Kendal paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Ngampel.



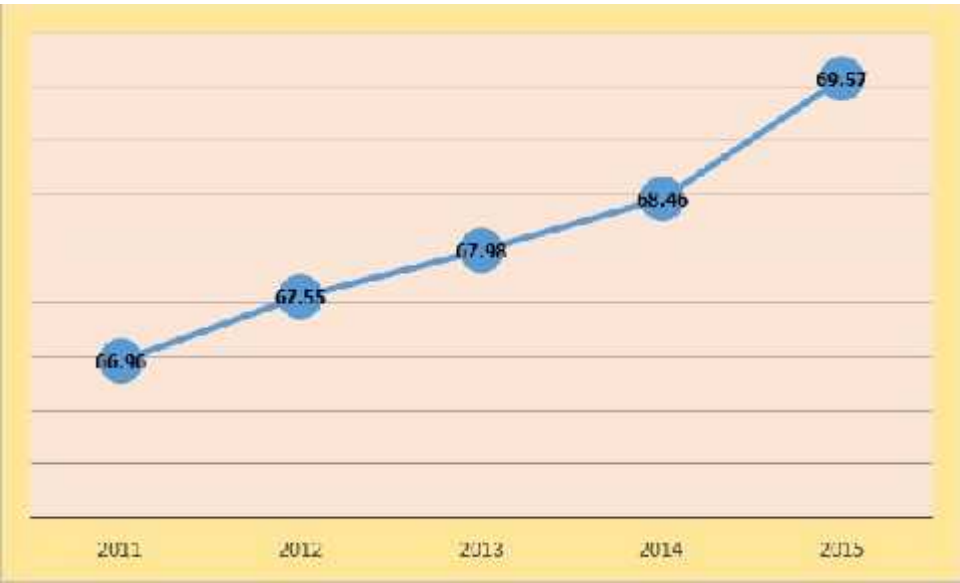
Gambar 2.14.
Posisi Relatif Individu Miskin dengan Status Kesejahteraan 40%
Terendah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kendal
(Sumber: *PBDT Tahun 2015*)

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

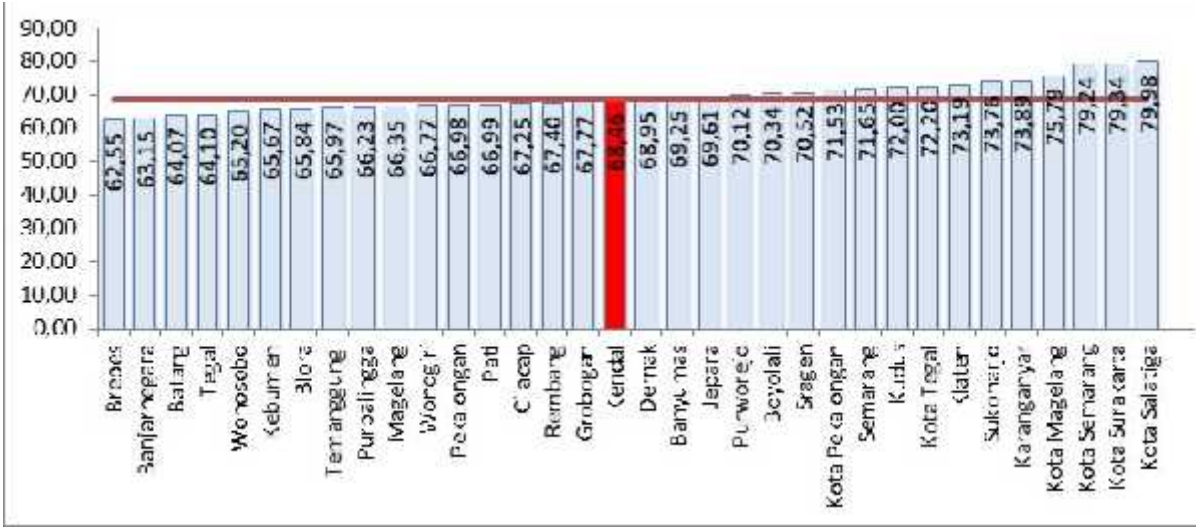
Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM (dengan metode baru dari BPS) di Kabupaten Kendal dalam periode 2011-2015 menunjukkan peningkatan. Tahun 2011 IPM Kabupaten Kendal sebesar 66,96 kemudian meningkat menjadi 69,57 pada tahun 2015. Perkembangan IPM Kabupaten Kendal sejalan dengan peningkatan perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah yang meningkat dari 66,08 menjadi 68,78 pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.15 di bawah ini.



Gambar 2.15.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015
(Sumber: *Statistik Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

Capaian perkembangan IPM Kabupaten Kendal jika dibandingkan dengan capaian Kab/Kota lain posisinya ada di kelompok menengah yakni peringkat 18 dari 35 kab/kota di Jawa Tengah. Capaian tersebut sudah di atas Kabupaten Batang dan Temanggung, namun demikian masih dibawah capaian Kabupaten Semarang. Apabila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Kendal masih lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.16 di bawah ini.



Gambar 2.16.
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal
dan Kab/Kota di Sekitarnya Tahun 2015
(Sumber: *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2016*)

Sementara itu. indeks pembentuk IPM Kabupaten Kendal yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita akan diuraikan di bawah ini.

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2015) menunjukkan peningkatan. Capaian selama lima tahun meningkat dari 73,92 tahun kemudian meningkat menjadi 74,15 tahun pada tahun 2015. AHH di Kabupaten Kendal setiap tahun capaiannya selalu di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.15 di bawah ini:



Gambar 2.17.

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015
(Sumber: *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2016* diolah)

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, capaian

angka HLS adalah 11,32 tahun kemudian meningkat menjadi 12,41 tahun pada tahun 2015. Tahun 2011 sampai 2012 dan 2015 capaian HLS Kabupaten Kendal selalu di atas capaian rata-rata Jawa Tengah, namun pada tahun 2013 dan 2014 angkanya justru di bawah capaian rata-rata Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.18 di bawah ini.



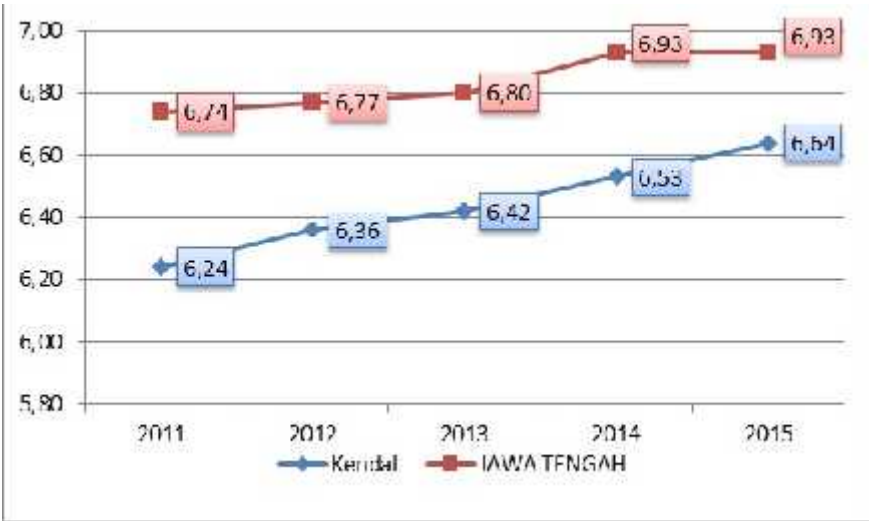
Gambar 2.18.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015 (Sumber: *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2016* diolah)

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan tingkat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal cenderung stabil pada 5 tahun terakhir. Peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Jika diakumulasikan, perkembangan rata-rata lama dari tahun 2011 sampai 2015 adalah sebesar 0,4. Selain itu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun juga masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan capaian yang tidak terlalu signifikan adalah tanda bagi pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan upaya-upaya guna meningkatkan kemampuan masyarakat supaya masyarakat dapat mendapatkan pendidikan yang layak.

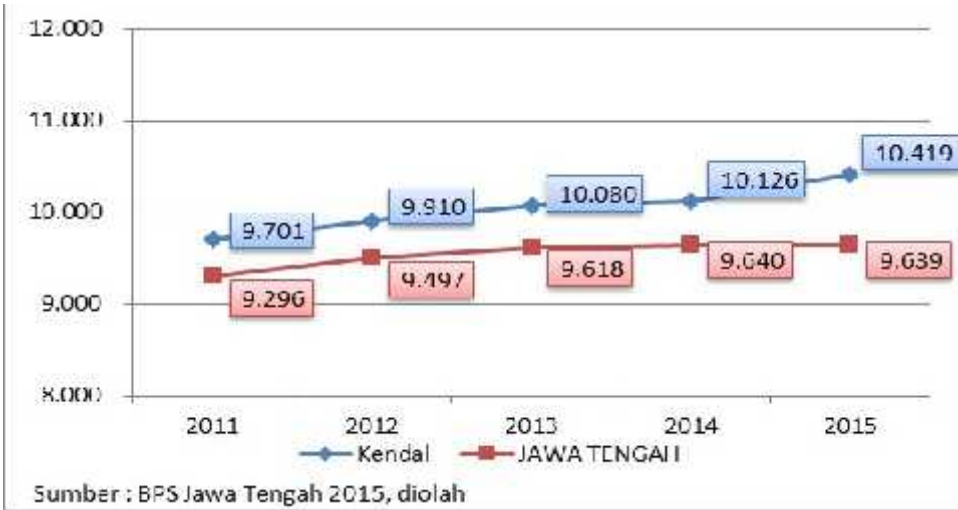
Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.19 di bawah ini.



Gambar 2.19.
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011 – 2015
(Sumber: *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2016* diolah)

4) Pengeluaran per Kapita

Capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal dari tahun 2011-2015 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2011, capaian pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 9.701.000/kapita/tahun dan meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 10.419.000/kapita/tahun. Capaian tersebut sudah di atas rata-rata Jawa Tengah. Meningkatnya capaian pengeluaran per kapita ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sebagai simbol dari meningkatnya kesejahteraan juga semakin baik. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.20 di bawah ini.

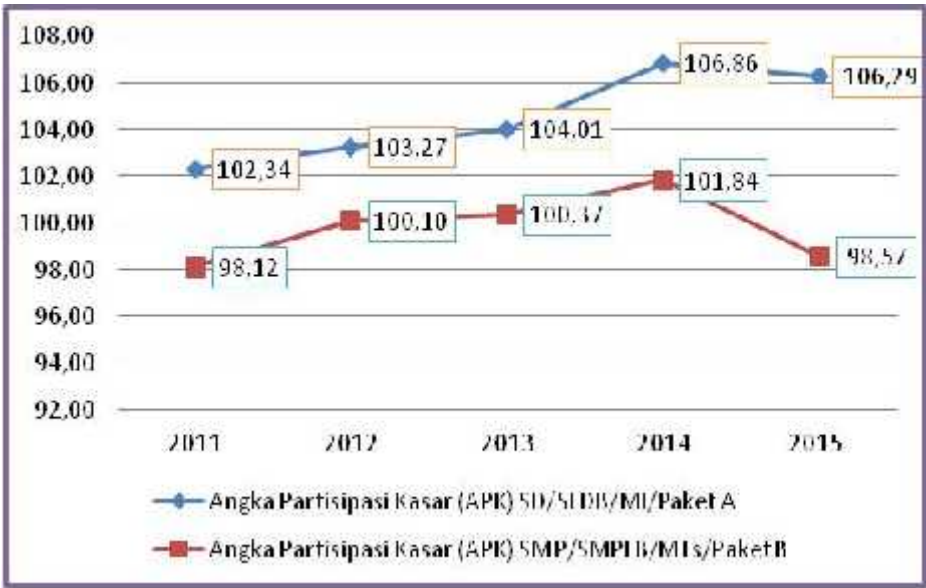


Gambar 2.20.
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp)
Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011 – 2015
(Sumber: *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2016* diolah)

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu.

Angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kendal selama 5 tahun terakhir angkanya fluktuatif. Jenjang pendidikan SD sederajat capaian terakhir di atas 100%, sedangkan untuk SMP sederajat capaiannya 98,57%. Lebih lengkap perkembangan APK di Kabupaten Kendal dapat dilihat dalam gambar 2.21 berikut.

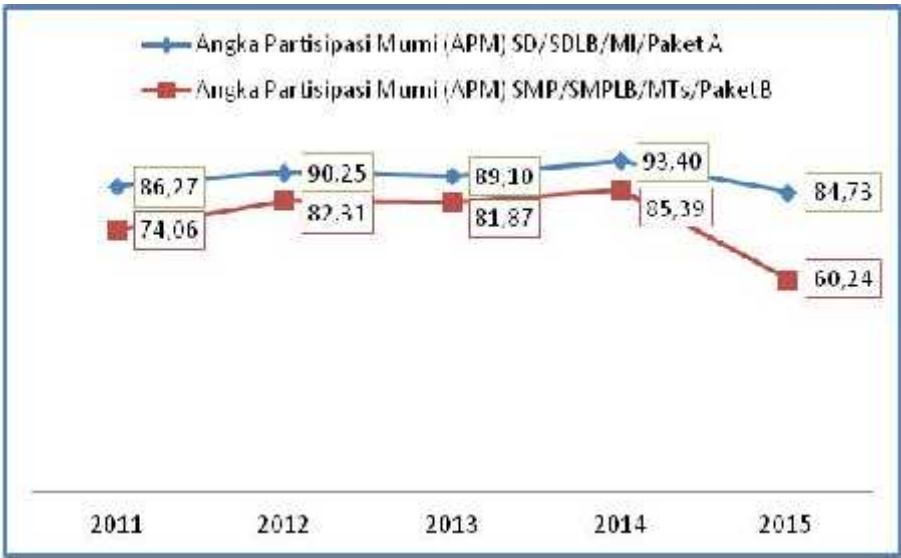


Gambar 2.21.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Kendal
Tahun 2011 – 2015
(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2016)

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

Angka partisipasi murni jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Kendal capaiannya mengalami tren yang menurun meskipun angka per tahunnya fluktuatif. Penurunan APM tersebut dipengaruhi antara lain oleh semakin banyaknya anak usia di luar usia 7-12 tahun yang sudah mulai masuk SD/SDLB/MI/Paket A dan juga anak usia di luar 13-15 tahun yang berada di SMP/SMPLB/MTs/Paket B. Lebih lengkap capaian APM di Kabupaten Kendal tersaji dalam gambar 2.22 berikut.



Gambar 2.22.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
di Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015
(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Jika dilihat dari data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), persentase anak usia SD (7-12 tahun) dan SMP (13-15 tahun) di Kabupaten Kendal yang tidak bersekolah sebesar 3,87% dan 17,35%. Anak usia SD yang tidak sekolah paling tinggi persentasenya ada di Kecamatan Sukorejo (6,16%). Sedangkan untuk usia SMP yang tidak sekolah paling tinggi juga ada di Kecamatan Sukorejo (31,07%). Data lengkap terkait dengan anakl usia sekolah yang bersekolah dan tidak sekolah jenjang SD dan SMP tersaji dalam tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Sebaran Penduduk Usia Sekolah Tidak Sekolah di
Kabupaten Kendal Menurut Kecamatan Berdasarkan PBDT 2015

Nama Kecamatan	Jumlah Anak yang Bersekolah		Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah		Jumlah Anak Sekolah dan Tidak Sekolah		Persentase Anak yang Tidak Bersekolah	
	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun
Plantungan	1.727	740	92	240	1.819	980	5,06	24,49
Sukorejo	1.934	843	127	380	2.061	1.223	6,16	31,07
Pagerruyung	1.474	715	40	146	1.514	861	2,64	16,96
Patean	1.395	655	67	218	1.462	873	4,58	24,97
Singorojo	1.931	845	90	249	2.021	1.094	4,45	22,76
Limbangan	1.110	575	48	104	1.158	679	4,15	15,32
Boja	1.712	913	79	179	1.791	1.092	4,41	16,39
Kaliwungu	1.474	793	53	98	1.527	891	3,47	11,00
Kaliwungu Selatan	1.551	802	34	127	1.585	929	2,15	13,67
Brangsong	1.742	1.017	46	115	1.788	1.132	2,57	10,16
Pegandon	903	534	44	81	947	615	4,65	13,17
Ngampel	698	324	30	72	728	396	4,12	18,18

Nama Kecamatan	Jumlah Anak yang Bersekolah		Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah		Jumlah Anak Sekolah dan Tidak Sekolah		Persentase Anak yang Tidak Bersekolah	
	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun
Gemuh	1.531	748	56	141	1.587	889	3,53	15,86
Ringinarum	1.126	601	33	95	1.159	696	2,85	13,65
Weleri	1.546	850	69	137	1.615	987	4,27	13,88
Rowosari	1.467	751	71	197	1.538	948	4,62	20,78
Kangkung	1.336	641	27	107	1.363	748	1,98	14,30
Cepiring	1.105	637	37	84	1.142	721	3,24	11,65
Patebon	1.465	785	56	124	1.521	909	3,68	13,64
Kota Kendal	1.022	533	37	109	1.059	642	3,49	16,98
TOTAL	28.249	14.302	1.136	3.003	29.385	17.305	3,87	17,35

(Sumber: *PBDT tahun 2015* diolah)

d. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu di Kabupaten Kendal mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jika dilihat dari data yang ada kondisinya sangat memprihatinkan karena angkanya masih sangat tinggi. Meskipun demikian Angka kematian ibu dalam kurun waktu tersebut trennya mengalami penurunan. Angka tersebut perlu menjadi perhatian bagi semua stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan dan program dalam rangka penurunan AKI di Kabupaten Kendal. Lebih lengkap capaian AKI di Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam gambar 2.23 berikut.



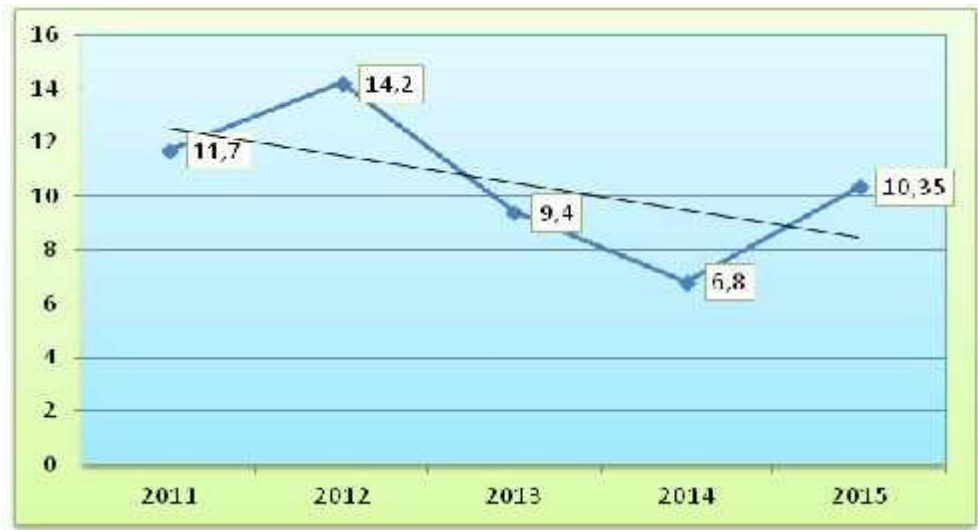
Gambar 2.23.
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kendal
Tahun 2011 – 2015
(Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

e. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

Kematian bayi tersebut dibagi atas dua kategori yaitu; (1) kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan, (2) kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kendal dari tahun 2011–2015 trendnya turun, meskipun dari sisi capaian tahunannya fluktuatif. Pada tahun 2011 AKB Kabupaten Kendal sebesar 11,7 per 1.000 kelahiran hidup meningkat sangat drastis pada tahun 2012 menjadi 14,2 per 1.000 Kelahiran Hidup, namun kondisinya menurun pada tahun 2015 AKB sebesar 10,35 per 1.000 Kelahiran Hidup. Jika dilihat kondisi tahun terakhir AKB justru mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Kendal.

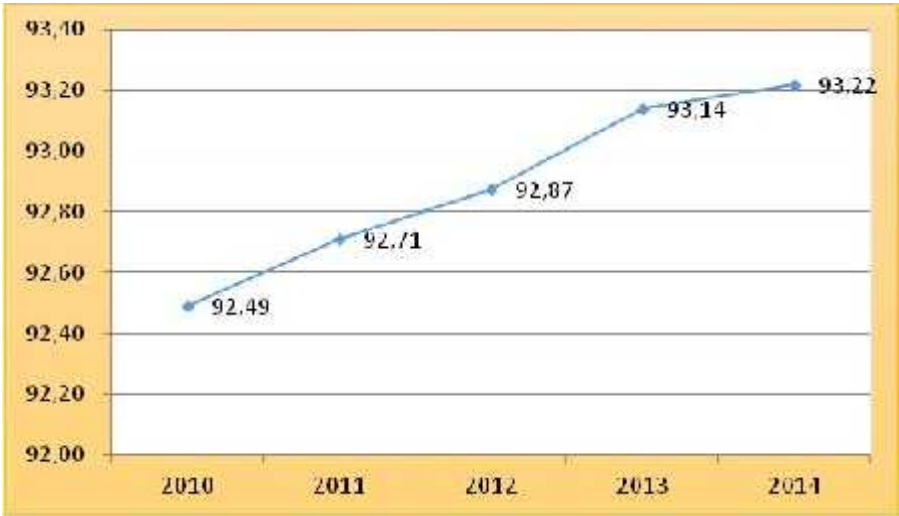


Gambar 2.24.
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kendal
Tahun 2011 – 2015
(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2016)

f. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

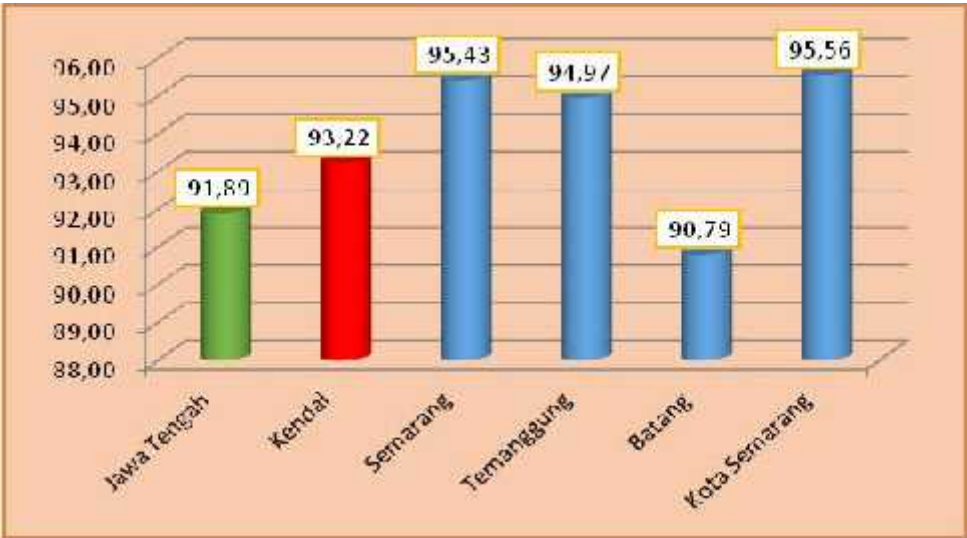
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG

digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG mendekati angka 100. Tahun 2011-2015 capaian IPG Kabupaten Kendal mengalami kenaikan dari 92,49 menjadi 93,22 pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.25 di bawah ini.



Gambar 2.25.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2014
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015)

Capaian IPG Kabupaten Kendal pada tahun 2014 adalah 93,22. Capaian ini, jika dibandingkan dengan capaian Kab/Kota sekitar seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, dan Kota Semarang, hanya lebih tinggi dari capaian Kabupaten Batang yang sebesar 90,79. Capaian Kabupaten Kendal juga diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.26 di bawah ini.



Gambar 2.26.
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal
dan Kab/Kota di Sekitarnya Tahun 2014
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015)

Capaian IPG Kabupaten Kendal Tahun 2014 jika di rinci menurut indikator pembentuknya, dapat dilihat sebagai berikut :

1) Angka Harapan Hidup

Pada indikator Angka Harapan Hidup. capaian perempuan pada 2010-2014 lebih besar dari capaian laki-laki. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. capaian angka harapan hidup perempuan pada tahun 2014 adalah sebesar 76,02, sedangkan capaian angka harapan hidup laki-laki adalah sebesar 71,15. Adanya kesenjangan dalam capaian pada indikator tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya gaya hidup, lingkungan, kondisi psikis dan lain-lain.

Tabel 2.5
Perbandingan Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Wilayah di sekitar Tahun 2010-2014

Kabupaten	Angka Harapan Hidup									
	(tahun)									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Semarang	73,38	77,30	73,41	77,32	73,43	77,35	73,46	77,38	73,48	77,40
Temanggung	73,16	77,07	73,21	77,12	73,25	77,16	73,30	77,21	73,33	77,24
Kendal	71,93	75,80	71,99	75,86	72,05	75,92	72,12	75,99	72,15	76,02
Batang	72,23	76,11	72,28	76,16	72,33	76,21	72,39	76,27	72,42	76,30
Pekalongan	71,11	74,95	71,18	75,02	71,25	75,09	71,32	75,17	71,35	75,21
JAWA TENGAH	70,80	74,75	70,99	74,92	71,18	75,10	71,37	75,28	71,97	75,87
NASIONAL	67,89	71,83	68,09	72,02	68,29	72,22	68,49	72,41	68,87	72,6

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015)

2) Angka Harapan Lama Sekolah

lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan di Kabupaten Kendal lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan angka harapan lama sekolah selama tahun 2010-2014. Tahun 2014 Angka Harapan Lama Sekolah perempuan sebesar 12,08, sementara laki-laki sebesar 11,64. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal dibandingkan dengan wilayah disekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Perbandingan Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Kendal dibandingkan dengan Wilayah di sekitar Tahun 2010-2014

Kabupaten	Harapan Lama Sekolah									
	(tahun)									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Semarang	12,07	11,51	12,25	11,86	12,43	12,08	12,71	12,30	12,81	12,53
Temanggung	10,23	10,31	10,63	10,71	11,03	11,12	11,34	11,42	11,55	11,88
Kendal	11,07	11,26	11,14	11,55	11,45	11,70	11,54	11,85	11,64	12,08
Batang	10,15	9,79	10,40	10,01	10,65	10,23	10,66	10,44	10,67	10,59
Pekalongan	10,17	10,76	10,73	11,26	11,02	11,54	11,32	11,83	11,56	12,29
Jawa Tengah	11,17	10,95	11,22	11,15	11,43	11,35	11,91	11,87	12,20	12,14
Nasional	11,20	11,37	11,41	11,56	11,63	11,75	12,07	12,13	12,37	12,40

(Sumber: *BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*)

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Pada indikator rata-rata lama sekolah, capaian rata-rata lama sekolah penduduk perempuan masih lebih rendah dari capaian penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan upaya keras dalam memperbaiki capaian rata-rata lama sekolah penduduk perempuan. Adanya kesenjangan dalam indikator ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masih adanya stigma dalam masyarakat bahwa perempuan tidak harus menuntut ilmu yang tinggi karena perempuan hanya akan menjadi pendamping laki-laki, bukan pemimpin yang akan memikul beban dan tanggungjawab terhadap keluarga. Angka rata-rata lama sekolah laki-laki di Kabupaten Kendal tahun 2014 sebesar 7,38 tahun, sedangkan perempuan sebesar 6,06 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal dibandingkan dengan wilayah disekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perbandingan Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Kendal dibandingkan dengan Wilayah di sekitar Tahun 2010-2014

Kabupaten	Rata - Rata Lama Sekolah									
	(tahun)									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Semarang	7,69	6,57	7,79	6,65	8,06	6,67	8,10	6,70	8,14	6,72
Temanggung	6,64	5,78	6,69	5,83	6,75	5,87	6,89	5,92	7,03	5,97
Kendal	6,77	5,48	6,88	5,60	6,99	5,73	6,99	5,85	7,38	6,06

Kabupaten	Rata - Rata Lama Sekolah									
	(tahun)									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Batang	6,10	4,93	6,14	4,97	6,40	5,02	6,53	5,43	6,65	5,72
Pekalongan	5,96	5,32	6,07	5,38	6,18	5,60	6,40	5,67	6,61	5,82
Jawa Tengah	7,34	6,12	7,36	6,15	7,39	6,18	7,40	6,23	7,47	6,40
Nasional	7,91	6,89	7,98	6,96	8,06	7,03	8,14	7,09	8,24	7,23

(Sumber: *BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*)

4) Sumbangan Pendapatan

Pada indikator sumbangan pendapatan, terjadi ketimpangan capaian yang sangat besar antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari capaian dalam kurun waktu 5 tahun (2010 -2014). Pada tahun 2014 pengeluaran per kapita laki-laki sebesar 13.623.044, sedangkan perempuan sebesar 9.866.657. Selengkapnya perkembangan sumbangan pendapatan Kabupaten Kendal dibandingkan dengan wilayah disekitar dapat dilihat pada tabel berikut :

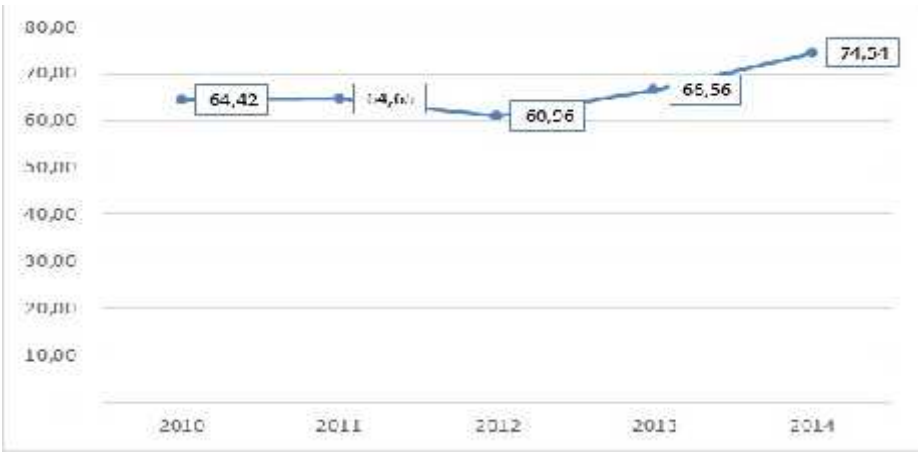
Tabel 2.8
Perbandingan Sumbangan Pendapatan Kabupaten Kendal dibandingkan dengan Wilayah di sekitar Tahun 2010-2014

Kota / Kabupaten	Pengeluaran Per Kapita									
	(tahun)									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Semarang	10.217.721	8.680.765	10.651.801	9.326.782	11.104.321	10.020.875	11.317.652	10.512.068	11.341.664	10.584.177
Temanggung	8.659.457	6.002.654	8.959.236	6.301.772	9.269.393	6.565.532	9.557.875	7.985.770	9.666.014	8.010.120
Kendal	11.067.941	8.098.595	11.841.002	8.463.124	12.668.059	9.191.010	13.387.125	9.598.997	13.623.044	9.866.657
Batang	10.444.865	5.751.712	10.625.275	6.502.940	10.773.748	6.893.508	10.924.295	6.925.621	11.070.693	7.130.566
Pekalongan	12.143.971	7.009.766	12.221.477	7.167.109	12.456.976	7.327.983	12.641.403	7.660.645	12.825.830	7.746.144
Jawa Tengah	12.701.157	8.058.470	12.961.060	8.393.806	13.226.283	8.642.907	13.285.549	8.787.869	13.344.816	8.944.660
Nasional	13.856.365	7.570.957	13.984.252	7.688.348	14.113.318	8.062.864	14.131.697	8.189.479	14.150.076	8.316.461

(Sumber: *BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*)

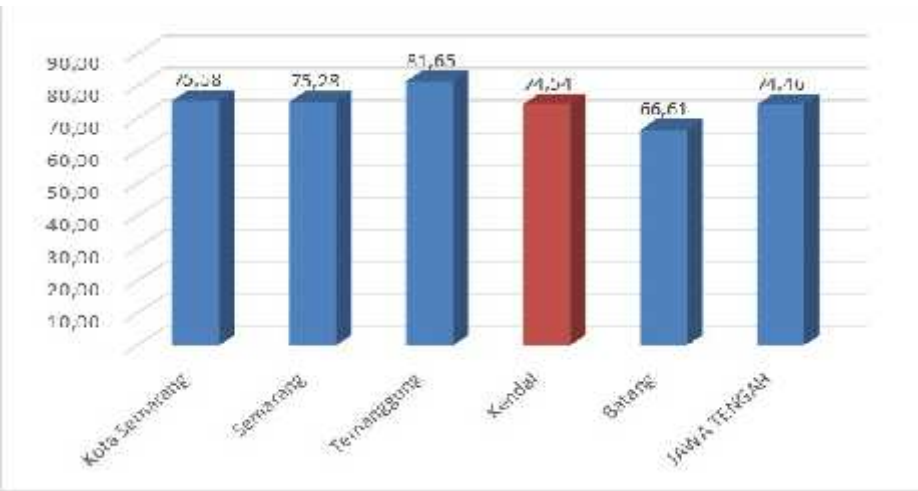
g. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka pembentuk IPG yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Pada kurun waktu 2010-2014 Kabupaten Kendal mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan yaitu sebesar 64,42 menjadi 74,54 pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.27 di bawah ini.



Gambar 2.27.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2014
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015)

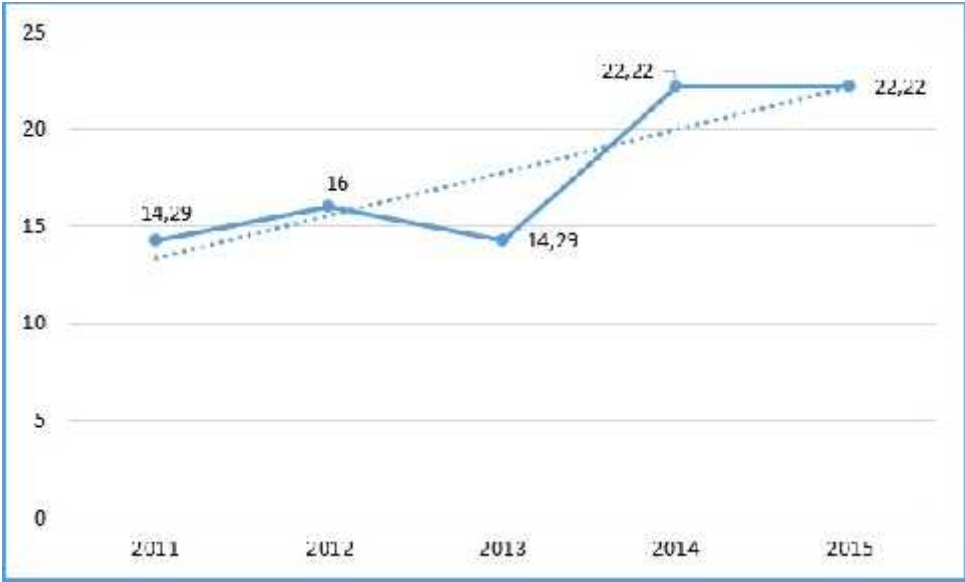
Jika dibandingkan dengan capaian Kab/Kota sekitar, capaian IDG Kabupaten Kendal lebih rendah dari capaian Kabupaten Temanggung dan lebih tinggi dari capaian Kabupaten Batang dan Kota Semarang. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian Kabupaten Kendal lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.28 di bawah ini.



Gambar 2.28.
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kendal
dengan Kab/Kota Sekitar dan Prov. Jawa Tengah Tahun 2014
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015)

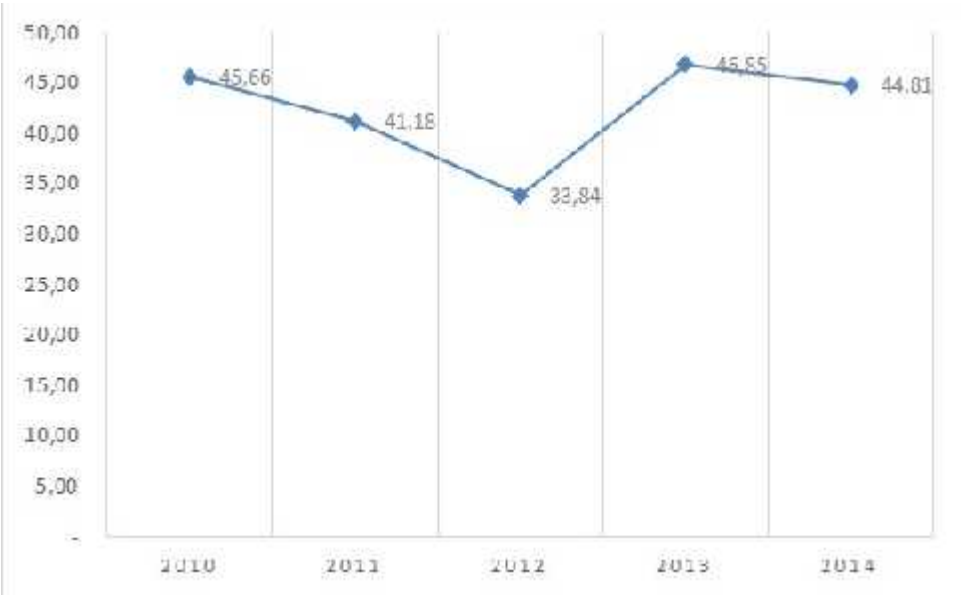
Sementara itu indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Keterlibatan Perempuan Di Parlemen. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dan Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja.

Perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan hampir di setiap tahun. Bahkan pada pemilihan legislatif periode 2014-2019 terdapat 10 orang perempuan yang terpilih untuk mewakili masyarakat di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk berpartisipasi di bidang politik. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.29 di bawah ini.



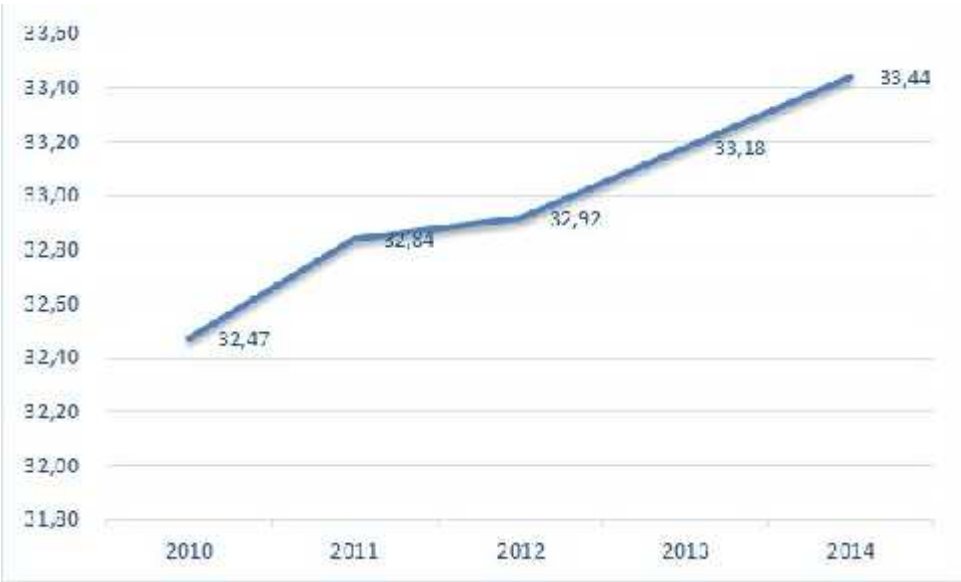
Gambar 2.29.
Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)
Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015
(Sumber: *Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Tahun 2016* diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perempuan yang bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknisi perkembangannya fluktuatif tiap tahunnya. Namun jika melihat datanya mencapai 44,81%, menunjukkan bahwa perempuan sudah cukup banyak mendapatkan kesempatan dalam bidang perekonomian. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.30 di bawah ini.



Gambar 2.30.
Perkembangan Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2014
(Sumber: *BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*)

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja kondisinya fluktuatif dengan tren dalam 4 tahun terakhir meningkat. Dari capaian 32,47% pada tahun 2010 menjadi 33,44% pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.31 di bawah ini.

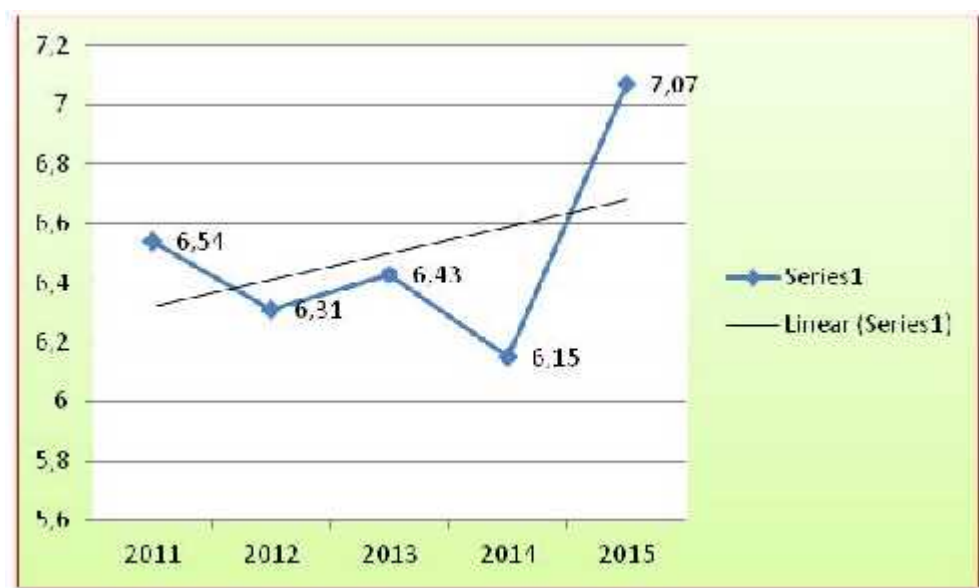


Gambar 2.31.
Perkembangan Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2010- 2014
(Sumber: *BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*)

h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

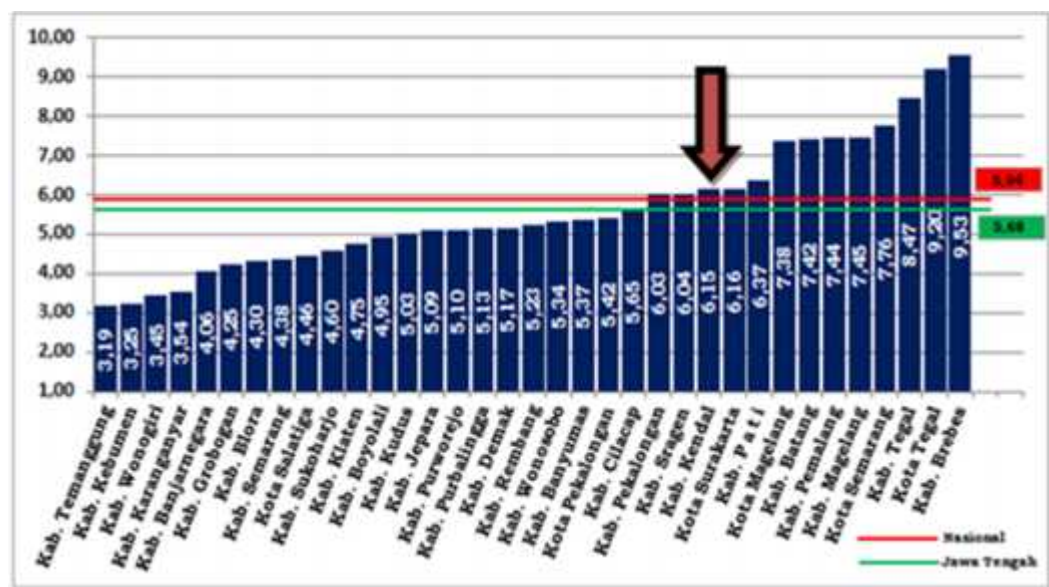
Persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal, selama periode 2011-2015 kondisinya fluktuatif dengan tren negatif karena meningkat. Kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kondisi tahun 2 tahun terakhir yang persentasenya naik cukup signifikan dibandingkan dengan

capaian tahun tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2015 persentase TPT di Kabupaten Kendal adalah yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 7,07%.



Gambar 2.32.
Perkembangan TPT Kabupaten Kendal Tahun 2011 - 2015
(Sumber : BPS Tahun 2016)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kendal pada tahun 2014 sebesar 6,15% dilihat berdasarkan posisi relatifnya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata capaian TPT Provinsi Jawa Tengah bahkan nasional. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, TPT Kabupaten Kendal hanya lebih rendah dari Kabupaten Batang dan Kota Semarang, dan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.



Gambar 2.33.
Perbandingan TPT Kabupaten Kendal dengan Kab/Kota Lain
di Jawa Tengah Tahun 2014
(Sumber : BPS Tahun 2015 diolah)

2.2.3 Fokus Seni dan Budaya

a. Kebudayaan

Kelompok seni di Kabupaten Kendal jumlahnya cukup banyak, jumlahnya pada tahun 2015 sebanyak 602 kelompok. Jumlah kelompok seni yang begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya adalah tersedianya gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor kebudayaan sudah didukung dengan keberadaan gedung kesenian yang ada. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Kendal hanya ada 1 unit.

b. Pemuda dan Olahraga

Prestasi keolahragaan di Kabupaten Kendal memang belum begitu bagus di wilayah Jawa Tengah. Pada pelaksanaan Pekan Olahraga daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, peringkat Kabupaten Kendal di urutan 23 dari 35 Kabupaten Kota dengan perolehan 5 medali emas, 5 medali perak, dan 20 medali perunggu. Oleh karena itu upaya pembinaan terhadap berbagai cabang olahraga perlu ditingkatkan. Pembinaan tersebut bisa dilakukan melalui klub-klub olahraga yang ada. Tahun 2015 organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Kendal sebanyak 29. Sedangkan sarana prasarana gedung olahraga maupun lapangan yang ada sebanyak 665 unit.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan anak sejak dini sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarantau dan terbina.

Kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar, yaitu APK PAUD usia 0-6 tahun dan APK PAUD usia 0-6 tahun. APK PAUD Usia 4-6 tahun di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan.

Jika pada tahun 2011 hanya sebesar 49,24% saja, maka pada tahun 2015 sudah mampu mencapai 52,92%. Demikian halnya APK PAUD usia 0-6 tahun juga mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 31,14% meningkat menjadi 38,17% pada tahun 2015.

Untuk mendukung pelaksanaan dan kesuksesan pendidikan anak usia dini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar mengajar. Jumlah TK/RA/BA pada tahun 2011 di Kabupaten Kendal sebanyak 471 lembaga, meningkat menjadi 530 lembaga pada tahun 2015. Jumlah murid TK/RA/BA pada tahun 2011 sebanyak 23.567 orang, meningkat menjadi 25.307 orang pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah guru TK/RA/BA mengalami penurunan yang mana pada tahun 2011 sebanyak 1.927 orang menjadi 1.429 di tahun 2015.

Dengan memperbandingkan antara jumlah guru dan murid TK/RA/BA tersebut dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid TK/RA/BA di Kabupaten Kendal. Rasio murid TK/RA/BA terhadap guru di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebesar 12 : 1 (12 orang murid diajar satu orang guru). Pada tahun 2015 rasio guru terhadap murid TK/RA/BA di Kabupaten Kendal meningkat menjadi 18 : 1 (18 murid diajar satu orang guru). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 17 menyatakan bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk TK/RA, atau yang sederajat adalah 15 : 1 agar guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi.

2) Pendidikan Dasar

Kinerja pendidikan dasar di Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Kinerja pendidikan dasar dapat dilihat dari tingkat partisipasi, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka melanjutkan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas.

a) Angka Partisipasi

Angka partisipasi penduduk usia sekolah tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Kendal sudah baik. Hal

tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar yang ada. Capaian APK dan APM di Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Bahkan untuk APK SD/SLDB/MI/Paket A sudah berada di atas 100%. Sedangkan untuk APM capaiannya memang masih dibawah target SPM sebesar 100%.

Tabel 2.9
Angka Partisipasi Tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten
Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	102,34	103,27	104,01	106,86	106,29
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	98,12	100,10	100,37	101,84	98,57
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	%	86,27	90,25	89,10	93,40	84,73
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	74,06	82,31	81,87	85,39	60,24

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2016)

b) Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Angka Putus Sekolah pendidikan dasar menunjukkan angka yang kurang baik. Perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD sederajat selama kurun waktu 2011 – 2015 cenderung meningkat pada angka 0,16% pada tahun 2015. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, perkembangan Angka Putus Sekolah SMP selama kurun waktu 2011 – 2015 fluktuatif namun cenderung meningkat. Secara rinci perkembangan Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Kendal terlihat pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Angka Putus Sekolah SD sederajat dan SMP sederajat
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/SDLB/MI	%	0,10	0,10	0,08	0,08	0,16
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ SMPLB/ MTs	%	0,42	0,59	0,27	0,28	0,84

(Sumber: *Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

c) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan pendidikan dari siswa SD sederajat ke SMP sederajat, dan juga dari SMP sederajat ke SMA sederajat di Kabupaten Kendal sudah cukup baik. Persentase siswa lulusan SD sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMP sederajat mencapai 100%. Adapun lulusan SMP sederajat yang melanjutkan ke SMA sederajat angkanya selalu naik dari 78,37% di tahun 2011 menjadi 88,35% di tahun 2015.

Tabel 2.11
Angka Melanjutkan SD sederajat dan SMP sederajat
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	99,00	99,00	99,45	99,05	100,00
2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/ MTs ke SMA/SMALB/SMK/MA	%	78,37	80,21	81,00	88,27	88,35

(Sumber: *Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

d) Ketersediaan Sekolah dan Guru

Gedung sekolah atau ruang kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Kendal cenderung mengalami penurunan. Untuk jenjang SD sederajat, gedung sekolah yang kondisinya baik sebesar 60,61%. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat sebesar 69,32%.

Sedangkan untuk rasio rombongan belajar per ruang kelas SD sederajat sebesar 1,00. Jenjang SMP sederajat sebesar 0,98. Rasio guru / siwa sebesar 0,06 untuk SD sederajat, dan 0,07 untuk SMP Sederajat. Lebih lengkap terkait dengan ketersediaan sekolah dan guru dapat dilihat dalam tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12
Kondisi Sarana Prasarana dan Rasio Guru SD sederajat dan
SMP Sederajat Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Ruang Kelas SD/SDLB/MI Kondisi Baik	%	89,00	89,00	87,00	83,48	60,61
2.	Persentase Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs Kondisi Baik	%	NA	81,46	78,21	78,64	69,32
3.	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD/SDLB/MI	%	NA	0,99	1,02	1,00	1,00
4.	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs	%	NA	NA	NA	NA	0,98
5.	Rasio Guru/Siswa SD/SDLB/MI	%	NA	NA	NA	NA	0,07
6.	Rasio Guru/Siswa SMP/SMPLB/MTs	%	NA	NA	NA	NA	0,06

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2016)

3) Pendidikan non formal

Penduduk Kabupaten Kendal yang berusia antara 15 – 60 tahun mayoritas sudah melek huruf. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat capaian penduduk usia 15 – 60 tahun melek huruf yang sudah mencapai 96,41%.

Tabel 2.13
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-60 Tahun di Kabupaten
Kendal Tahun 2011-2015 (%)

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka melek huruf penduduk usia 15-60	%	NA	NA	NA	NA	96,41%

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2016)

4) Tenaga Pendidik

Keberhasilan program pendidikan juga ditopang oleh keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase pendidik yang berkualifikasi S1 atau D4 serta persentase pendidik yang sudah bersertifikasi. Untuk jenjang PAUD, pendidik yang berkualifikasi S1/D4 persentasenya semakin naik. Pada tahun 2011 baru sebesar 23%, namun pada tahun 2015 persentasenya meningkat menjadi 46,36%. Demikian juga untuk jenjang pendidikan yang lain, kualifikasi pendidik yang S1 atau D4 semakin meningkat meskipun angkanya belum mampu mencapai 100%. Pada tahun 2015 persentase pendidik TK, SD, dan SMP yang sudah bersertifikasi berturut-turut sebesar 42,74%, 54,89%, dan 56,96%.

Tabel 2.14
Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Tahun 2011-2015 (%)

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4	%	23,00	37,66	40,51	38,85	46,36
2.	Persentase Pendidik SD Berkualifikasi S1/D4	%	NA	58,00	60,00	65,30	84,00
3.	Persentase Pendidik SMP Berkualifikasi S1/D4	%	NA	85,70	85,80	87,30	91,40
4.	Persentase pendidik TK memiliki Sertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	42,74
5.	Persentase pendidik SD memiliki Sertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	54,89
6.	Persentase pendidik SMP memiliki Sertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	56,96

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2016)

b. Kesehatan

Pembangunan yang berwawasan kesehatan merupakan paradigma dalam pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Pembangunan Kesehatan pada Buku RPJMN adalah mewujudkan Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Upaya Pelayanan kesehatan dapat dilihat dari Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pelayanan nifas, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Cakupan pelayanan anak balita, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat, Cakupan peserta

KB aktif, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (AFP, Pnemonia Balita, TB Paru, DBD, Diare) dan cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	78	75	89	79	87
2	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100
3	Prevalensi balita gizi kurang	%	8,5	2,3	3,52	3,98	3,93
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
5	Cakupan pelayanan anak balita	%	90,15	100	84	101,5	98,03
6	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	53,87	50,96	49,46	55,78	71,07
7	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 59 bulan	%	0	95,59	98,3	98,98	99,7
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	96,30	98,94	92,63	95,84	93,71
9	Cakupan kunjungan bayi	%	98,8	96,3	69,5	96,8	97,0
10	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	95,55	95,64	92,42	94,26	93,27
11	Cakupan pelayanan nifas	%	91,70	98,07	89,97	94,11	90,42
12	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	30,3	39,9	37,7	65,3	113
13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	67,13	77,42	71,04	92	108,73

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Pelayanan warga miskin yang datang di rumah sakit umum daerah Kabupaten Kendal tahun 2015 mencapai 28.706 orang, dan semuanya terlayani. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan RSUD juga sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari penilaian

kepuasan masyarakat yang mampu mencapai angka 90,18, artinya pelayanan di RSUD Kabupaten Kendal sudah sangat baik.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Lainnya Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	% orang	100 26.506	100 26.138	100 38.574	100 26.680	100 28.706
2	BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	72,03	71,57	73,39	63,73	76,48
3	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	%	3,92	3,53	4,01	3,04	3,24
4	TOI (Turn Over Interval)	%	1,54	1,4	1	1,73	1
5	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	%	66,94	74,26	76,14	76,52	86,08
6	NDR (Net Death Rate)	%	23,85	22,73	21,65	18,62	19,64
7	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	skor	76,12	73,66	74,99	74,17	90,18

(Sumber: RSUD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Sumber Daya Air

Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (SDA ESDM) pada tahun 2015, terlihat bahwa hal mendesak yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah kondisi saluran primer dan saluran sekunder. Dimana kondisi keduanya sebagian besar (59,5%) dalam kondisi rusak. Dari panjang 478,936 km saluran sekunder yang ada di Kabupaten Kendal, sepanjang 320 km berada di bawah kewenangan Kabupaten dan 158,936 km berada di bawah kewenangan Provinsi dan Pusat. Irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kendal capaiannya selalu naik, pada tahun 2011 hanya 30% namun pada tahun 2015 mampu mencapai 40,50%.

Selain irigasi, Kabupaten Kendal memiliki saluran darinase sepanjang 46,921 Km. Panjang darinase tersebut meningkat dibandingkan tahun 2011 yang memiliki panjang 43,400 Km. Dari total 46,921 km tersebut 65% diantaranya memiliki pembuangan yang baik (tidak tersumbat).

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Bidang Sumberdaya Air Kabupaten Kendal

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
Prosentase kawasan tangkapan air dalam kondisi baik	%	25,00	27,00	29,00	32,00	34,00
Menurunnya titik-titik lokasi genangan di daerah rawan banjir	%	NA	NA	NA	NA	40,00
berkurangnya luasan kawasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun)	%	NA	NA	NA	39,00	50,00
Persentase irigasi berfungsi baik	%	30,00	32,00	37,00	39,00	40,50
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	41 % dari 43,400 (Km)	44 % dari 44,268 (Km)	50 % dari 45,153 (Km)	54 % dari 46,056 (Km)	65 % dari 46,921 (Km)

(Sumber : Dinas Bina Marga SDA ESDM dan Dinas Ciptaru, 2016)

2) Air Limbah

Air limbah merupakan air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Air limbah perkotaan biasanya dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau septic tank. Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan. Tahun 2011 persentase penduduk yang terlayani sebesar 40%, tahun 2015 meningkat menjadi 58%.

Persentase rumah tangga yang tidak memiliki jamban berdasarkan data PBDT 2015 paling banyak adalah Kecamatan Rowosari (56,17%), kemudian Kecamatan Ringinarum (51,5%). Adapun kecamatan yang rumah tangganya tidak memiliki jamban paling rendah adalah Kecamatan Sukorejo (11,49%). Total rumah tangga di Kabupaten Kendal yang tidak memiliki jamban adalah 33, 16%.

Tabel 2.18
Jumlah Rumah Tangga Memiliki dan Tidak Memiliki Jamban di Kabupaten Kendal Tahun 2015

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			% Rumah Tangga Tidak Memiliki Jamban
	Jamban Sendiri	Jamban Bersam/ Umum	Tidak ada	
Plantungan	2.731	727	1.614	31,82
Sukorejo	3.959	1.779	745	11,49
Pagerruyung	2.303	473	2.049	42,47

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			% Rumah Tangga Tidak Memiliki Jamban
	Jamban Sendiri	Jamban Bersam/ Umum	Tidak ada	
Patean	2.951	1.059	1.222	23,36
Singorojo	3.877	945	1.300	21,23
Limbangan	2.716	441	606	16,10
Boja	4.118	814	1.023	17,18
Kaliwungu	2.856	845	892	19,42
Kaliwungu Selatan	2.840	692	1.353	27,70
Brangsong	2.682	1.015	2.006	35,17
Pegandon	1.697	570	1.576	41,01
Ngampel	1.089	513	1.356	45,84
Gemuh	2.250	570	2.540	47,39
Ringinarum	1.410	850	2.400	51,50
Weleri	2.392	1.095	2.147	38,11
Rowosari	1.907	468	3.093	56,57
Kangkung	2.206	808	1.860	38,16
Cepiring	1.771	875	1.887	41,63
Patebon	2.479	621	1.551	33,35
Kota Kendal	1.590	228	1.139	38,52
TOTAL	49.824	15.388	32.359	33,16

(Sumber: *PBDT Tahun 2015*)

3) Air Bersih

Terkait dengan penyediaan air bersih, ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kendal baru tercapai 30%. Angka tersebut naik sebesar 10% dari capaian tahun 2011 yang hanya sebesar 20% saja. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Kendal sudah mencapai 75%, dan dari angka tersebut 37,4% di antaranya terlayani melalui jaringan perpipaan.

Tabel 2.19
Gambaran Pelayanan Air Bersih Di Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	%	20	23	26	28	30
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	62	65	68	70,50	75
Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	62	65	68	70,50	75

(Sumber : *Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2016*)

Jika dilihat dari sumber airnya, masih terdapat 15,84% rumah tangga di Kabupaten Kendal yang memakai sumber air tidak terlindung. Persentase penduduk yang memakai sumber air tidak terlindung paling tinggi di Kecamatan Pagerruyung (43,75%). Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2.20
Pemakaian Air Berdasarkan Sumbernya Di Kabupaten Kendal
Tahun 2015

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				% Penduduk Memakai Sumber Air Tidak Terlindung
	Air Kemasan	Air Ledeng	Sumber Terlindung	Sumber Tidak Terlindung	
Plantungan	-	436	3.680	956	18,85
Sukorejo	11	937	4.082	1.453	22,41
Pagerruyung	6	330	2.378	2.111	43,75
Patean	9	233	4.014	976	18,65
Singorojo	4	164	5.023	931	15,21
Limbangan	2	355	2.377	1.029	27,35
Boja	60	779	3.992	1.124	18,87
Kaliwungu	100	2.531	1.879	83	1,81
Kaliwungu Selatan	345	1.254	3.057	229	4,69
Brangsong	263	1.307	3.894	239	4,19
Pegandon	214	481	2.174	974	25,34
Ngampel	146	792	1.804	216	7,30
Gemuh	435	317	3.619	989	18,45
Ringinarum	97	93	3.504	966	20,73
Weleri	161	389	4.303	781	13,86
Rowosari	278	218	3.876	1.095	20,03
Kangkung	549	306	3.539	480	9,85
Cepiring	203	1.317	2.753	260	5,74
Patebon	229	1.949	2.023	450	9,68
Kota Kendal	84	2.581	178	114	3,86
TOTAL	3.196	16.769	62.149	15.456	15,84

(Sumber: PBDT Tahun 2015)

4) Bina Marga

Terdapat sepanjang 770,993 km jalan kewenangan Kabupaten Kendal. Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan baik di Kabupaten Kendal pada tahun 2012 sebesar 32,01%, tahun 2014 turun menjadi 31,9%, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 37,10%. Rata-rata peningkatan jalan baik dari tahun 2012-2015 hanya mencapai 0,05%.

Tabel 2.21
Gambaran Kinerja Kebinamargaan di Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	NA	32,01	31,25	31,79	37,10
Tersedianya dokumen inspeksi jalan dan jembatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tertanganinya jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersediannya data base jalan dan jembatan yang up to date	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	30,00	35,00	40,00	50,00	70,00

(Sumber : Dinas Bina Marga SDA ESDM, 2016)

5) Penataan Ruang

Penataan kawasan dan ruang di Kabupaten Kendal telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2013-2031. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal menjadi pedoman untuk : 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2) Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Kota; 3) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; 4) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 5) penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana Tata Ruang Kabupaten Kendal dijabarkan secara rinci dengan rencana tata ruang kawasan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, termasuk untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Perencanaan Tata Ruang di Kendal juga tidak terlepas dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 26-31 diatur berkaitan dengan Penyediaan RTH. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Luas RTH Publik yang tersedia di Kabupaten Kendal tahun 2014 sebesar 85,5 Ha, sementara itu luas RTH Publik yang seharusnya tersedia di Kabupaten Kendal sebesar 727,4 Ha. Melihat data tersebut capaian tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan baru mencapai 11,75%.

Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang, Kabupaten Kendal berupaya meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dari 4 pengaduan yang masuk di tahun 2014 semuanya tertangani.

Tabel 2.22
Gambaran Kinerja Tata Ruang Di Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase kawasan memiliki RTBL	%	0	5% dari 8 Kawasan	10% dari 8 Kawasan	20% dari 8 Kawasan	20% dari 8 Kawasan
2	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	10% dari 200 Ha	5% dari 8 Kawasan	5% dari 8 Kawasan	5% dari 8 Kawasan	5% dari 8 Kawasan
3	Ruang Publik yang berubah peruntukannya	kasus	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	3 Kasus
4	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang	kasus	0	0	0	4 Aduan, terpenuhi penanga nannya 4	0

(Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2016)

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mengurangi luasan kawasan kumuh dan peningkatan rasio rumah yang sehat dan layak huni, Pemerintah Kabupaten Kendal selama 5 tahun terakhir telah membangun 700 rumah sederhana bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu juga telah dibangun 2 TB rumah susun untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal masyarakat.

Jika dilihat dari status kepemilikan, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Kendal menempati rumah sendiri, persentasenya mencapai 87,63%. Adapun sisanya menempati rumah sewa, rumah milik keluarga dan lainnya. Kondisi lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.23.

Tabel 2.23
Jumlah Rumah Tangga Memiliki Tempat Tinggal
Berdasarkan Status Rumah Tahun 2015

Nama Kecamatan	Jumlah rumah tangga			
	Milik sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas sewa	Lainnya
Plantungan	4.864	2	153	53
Sukorejo	5.972	17	455	39
Pagerruyung	4.691	1	128	5
Patean	4.899	16	312	5
Singorojo	5.732	11	362	17
Limbangan	3.511	16	226	10
Boja	5.137	69	730	19
Kaliwungu	3.654	92	770	77
Kaliwungu Selatan	4.362	51	451	21
Brangsong	5.130	21	498	54
Pegandon	3.227	12	599	5
Ngampel	2.467	9	408	74
Gemuh	4.698	14	583	65
Ringinarum	3.795	9	794	62
Weleri	4.365	75	1.175	19
Rowosari	4.489	12	937	30
Kangkung	4.232	11	544	87
Cepiring	3.742	32	608	151
Patebon	4.121	20	492	18
Kota Kendal	2.416	40	489	12
TOTAL	85.504	530	10.714	823

(Sumber: PBDT Tahun 2015)

Jika dilihat berdasarkan kondisi dan jenis lantai tempat tinggal, rumah tempat tinggal di Kabupaten Kendal mayoritas berlantai semen/bata/tanah yakni sebesar 73,63%. Sedangkan

yang berlantai marmer/keramik/ubin sebesar 26%. Data lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.24 di bawah ini.

Tabel 2.24
Kondisi Rumah Tempat Tinggal Berdasarkan Jenis Lantai
Tahun 2015

Nama Kecamatan	Jumlah rumah tangga				
	Marmer/ Keramik/ Ubin	Kayu/Papan kualitas tinggi	Semen /Bata/ Tanah	Bambu/ Kayu/Papan kualitas rendah	Lainnya
Plantungan	1.289	9	3.766	8	0
Sukorejo	1.084	14	5.368	16	1
Pagerruyung	1.189	10	3.619	7	0
Patean	814	20	4.389	9	0
Singorojo	1.697	17	4.401	7	0
Limbangan	1.193	2	2.561	7	0
Boja	2.176	18	3.752	8	1
Kaliwungu	2.043	5	2.531	13	1
Kaliwungu Selatan	1.115	4	3.762	2	2
Brangsong	1.907	16	3.775	4	1
Pegandon	1.044	7	2.786	6	0
Ngampel	543	7	2.406	2	0
Gemuh	888	3	4.456	10	3
Ringinarum	330	9	4.315	6	0
Weleri	1.753	18	3.854	6	3
Rowosari	1.668	6	3.783	10	1
Kangkung	667	3	4.199	1	4
Cepiring	1.271	7	3.243	10	2
Patebon	1.352	4	3.287	7	1
Kota Kendal	1.354	4	1.596	2	1
TOTAL	25.377	183	71.849	141	21

(Sumber: PBDT Tahun 2015)

Jumlah rumah tempat tinggal di Kabupaten Kendal dilihat dari jenis dinding paling banyak adalah berdinding kayu/bambu sebesar 63,41%. Sedangkan yang berdinding tembok sebesar 35,96%. Sebaran rumah berdasarkan jenis dinding di semua wilayah kecamatan tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.25
Kondisi Rumah Tempat Tinggal Berdasarkan Jenis Dinding
Tahun 2015

Nama Kecamatan	Jumlah rumah tangga			
	Tembok	Plesteran anyaman	Kayu/ Bambu	Lainnya
Plantungan	951	36	4.047	38
Sukorejo	1.288	16	5.176	3
Pagerruyung	1.966	23	2.830	6
Patean	1.879	12	3.309	32

Nama Kecamatan	Jumlah rumah tangga			
	Tembok	Plesteran anyaman	Kayu/Bambu	Lainnya
Singorojo	2.532	29	3.541	20
Limbangan	2.948	6	807	2
Boja	4.241	13	1.673	28
Kaliwungu	2.095	33	2.440	25
Kaliwungu Selatan	1.549	24	3.302	10
Brangsong	1.698	34	3.969	2
Pegandon	1.027	13	2.802	1
Ngampel	509	10	2.438	1
Gemuh	921	14	4.420	5
Ringinarum	309	8	4.340	3
Weleri	2.702	15	2.909	8
Rowosari	2.200	26	3.234	8
Kangkung	825	18	4.024	7
Cepiring	1.564	16	2.951	2
Patebon	2.036	24	2.579	12
Kota Kendal	1.848	27	1.079	3
TOTAL	35.088	397	61.870	216

(Sumber: PBDT Tahun 2015)

Rumah di Kabupaten Kendal sebagian besar beratap genteng, yaitu sebesar 96,67%. Sisanya ada yang beratap beton/genteng beton, asbes/seng, sirap/bambu/jerami. Kondisi lengkapnya tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.26
Kondisi Rumah Tempat Tinggal Berdasarkan Jenis Atap Tahun 2015

Nama Kecamatan	Jumlah rumah tangga				
	Beton/Genteng beton	Genteng	Asbes/Seng	Sirap/Bambu/Jerami	Lainnya
Plantungan	2	4.240	828	0	2
Sukorejo	10	5.458	1.008	7	0
Pagerruyung	3	4.768	50	3	1
Patean	14	5.128	89	1	0
Singorojo	10	6.029	78	5	0
Limbangan	3	3.480	278	2	0
Boja	12	5.699	241	2	1
Kaliwungu	6	4.551	35	0	1
Kaliwungu Selatan	1	4.799	83	1	1
Brangsong	3	5.685	12	3	0
Pegandon	4	3.829	9	1	0
Ngampel	1	2.951	5	1	0
Gemuh	5	5.315	32	4	4
Ringinarum	3	4.638	17	2	0
Weleri	2	5.582	44	2	4
Rowosari	2	5.433	32	1	0
Kangkung	0	4.774	86	9	5

Nama Kecamatan	Jumlah rumah tangga				
	Beton/ Genteng beton	Genteng	Asbes/ Seng	Sirap/Bambu/ Jerami	Lainnya
Cepiring	2	4.462	64	4	1
Patebon	5	4.593	45	7	1
Kota Kendal	6	2.916	34	0	1
TOTAL				55	22

(Sumber: *PBDT Tahun 2015*)

Berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal tahun 2015, rumah tinggal sehat dalam artian bersanitasi di Kabupaten Kendal pada tahun 2015 baru mencapai 73%. Sedangkan cakupan rumah yang layak huni baru 95,81%.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Perumahan Di Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	%	60	63,11	65,42	68,20	73
2	Prosentase Kawasan Kumuh	%	2,34	2,15	1,94	1,75	1,53
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	%	94,3	94,62	94,97	95,39	95,81

(Sumber: *Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2016*)

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kabupaten Kendal sebagai salah satu kota yang terletak di jalur utara Pulau Jawa adalah wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Kendal ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan yang cukup tinggi. Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Kendal selama 5 tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2012, namun dari 2013 sampai 2014 justru mengalami kenaikan, dan turun lagi pada tahun 2015. Selain kejadian kriminal, di Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sampai 2015 juga sempat terjadi konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi tersebut dapat ditangani dengan kerjasama yang baik antara aparat kemanan dan juga pihak pemerintah (FORKOMPINDA).

Tabel 2.28
Kejadian Gangguan Keamanan dan Ketertiban
di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun	Kasus	130	110	144	178	150
2.	Jumlah konflik sosial yang terjadi	kasus	0	0	1	1	1

(Sumber: *Kesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

Upaya menjaga kondusifitas lingkungan di wilayah Kabupaten Kendal bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja, namun menjadi tanggung jawab semua masyarakat Kabupaten Kendal. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan menjadi salah satu perhatian pemerintah. Perhatian pemerintah untuk meningkatkan rasa memiliki oleh segenap komponen masyarakat tersebut ditingkatkan melalui kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam hal wawasan kebangsaan. Kegiatan tersebut secara rutin selalu dilaksanakan setiap tahunnya dengan sasarannya adalah tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan anggota organisasi masyarakat. Selain oleh pemerintah, kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Hanya saja dari banyaknya LSM yang ada dan terdaftar di Kabupaten Kendal, baru sedikit yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Tabel 2.29
Indikator Kegiatan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan kepada masyarakat	orang	190	225	1.450	240	280
2.	Ormas, LSM dan OKP yang melaksanakan peningkatan wawasan kebangsaan	organisasi	1	1	13	1	0
3.	LSM dan Ormas aktif	organisasi	200	200	200	200	200

(Sumber: *Kesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2015*)

Selain gangguan keamanan berupa tindakan kriminal, ketertiban di Kabupaten Kendal juga sering terganggu dengan terjadinya tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada. Kejadian pelanggaran terhadap

Perda yang terjadi dan dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Kendal angkanya fluktuatif dengan tren meningkat. Pada tahun 2011 terjadi 79 pelaporan kasus pelanggaran Perda, dan tahun 2015 meningkat menjadi 80 kasus. Dari jumlah kasus yang dilaporkan, sebagian besar akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait (Satpol PP).

Upaya yang dilakukan untuk menekan kejadian pelanggaran ketertiban umum antara lain adalah dengan melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hanya saja capaian indikator ini masih belum bisa 100% seperti yang ditargetkan dalam SPM. Satpol PP Kabupaten Kendal baru mampu mencapai 50% dari target yang ditentukan.

Kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan tingkat kejadian pelanggaran Perda dan Perkada adalah terbatasnya jumlah personil Satpol PP yang dimiliki. Tahun 2015 Kabupaten Kendal hanya memiliki 53 personil, sedangkan jumlah penduduknya mencapai 955.949 jiwa.

Tabel 2.30
Indikator Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Banyaknya kelompok patroli x3 patroli dalam sehari	kali	10	10	10	20	20
		Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/ kota	kecamatan	20	20	20	20	20
2.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam	kali	125	175	115	215	213
5	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/ kota	Orang	9.315		9.382	9.382	9.382
		Jumlah RT	unit	6.322	6.313	6.351	6.351	6.351

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
6	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Jumlah Linmas	Orang	9.315		9.382	9.382	9.382
		Jumlah Penduduk	jiwa	976.804	964.568	969.627	950.463	952.966
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran perda dan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Jumlah pelanggaran perda dan /atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan	kasus	75	70	75	80	80
		Jumlah pelanggaran perda dan /atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan /atau dipantau di tahun bersangkutan	kasus	79	80	76	81	80
9	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Jumlah polisi pamong praja	Orang	59	59	55	53	53
		Jumlah Penduduk	jiwa	976.804	964.568	969.627	950.463	952.966

(Sumber: *Satpol PP Kabupaten Kendal Tahun 2015*)

f. Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Upaya untuk mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Kendal dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah pemberian pelatihan kepada para PMKS dengan tujuan

meningkatkan ketrampilan mereka. Fakir miskin dan PMKS yang menerima kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah jumlahnya. Selain PMKS, para petugas pemberdayaan PMKS juga selalu dilatih untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada para PMKS. Jumlah petugas yang dilatih jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Lebih rinci capaian indikator urusan sosial tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	%	NA	26,25	26,05	22,5	22,5
2.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	NA	16,25	3,0	1,2	2,4
3.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	NA	16,66	82,2	100	100
4.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	NA	6,03	4,4	7,3	3,9
5.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	NA	71	100	100	100
6.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	NA	10	4	4	4
7.	Jumlah PMKS	Orang	NA	385.685	385.685	385.685	385.685
8.	Jumlah Panti asuhan/Panti Jompo/ Panti Sosial	unit	14	14	14	14	14

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Selain upaya tersebut di atas, pemerintah juga mengupayakan agar para eks penyandang penyakit sosial dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Dari tahun 2012 sudah 78 orang eks penyandang penyakit sosial dapat melaksanakan fungsi sosialnya telah kembali ke masyarakat.

Upaya pengurangan jumlah PMKS selain dilaksanakan oleh pemerintah, juga melibatkan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Peran aktif dunia usaha tersebut sudah dimulai sejak tahun 2012. Setiap tahun dari tahun 2012 tersebut 250 orang PMKS menerima bantuan untuk meningkatkan kapasitas dan keberdayaan ekonomi mereka.

Salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian selain penduduk miskin adalah para penyandang disabilitas/kecacatan. Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Kendal pada tahun 2015 mencapai 7.235 orang, dan 64,12% diantaranya adalah berusia produktif. Kondisi lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Sebaran Penduduk dengan Disabilitas di Kabupaten Kendal Tahun 2015

Nama Kecamatan	Jumlah individu yang menderita cacat								TOTAL
	Usia di bawah 15 tahun		Usia 15 - 44 tahun		Usia 45 - 59 tahun		Usia 60 tahun keatas		
	P	L	P	L	P	L	P	L	
Plantungan	16	17	41	79	33	40	41	49	316
Sukorejo	13	21	56	68	35	34	36	36	299
Pagerruyung	13	10	53	64	36	54	52	67	349
Patean	12	13	38	75	34	32	58	44	306
Singorojo	13	23	60	76	38	51	46	44	351
Limbangan	9	7	44	53	21	35	29	34	232
Boja	17	28	77	96	31	54	40	49	392
Kaliwungu	10	10	40	67	45	44	57	43	316
Kaliwungu Selatan	7	11	57	63	27	35	50	30	280
Brangsong	12	26	81	94	47	53	68	56	437
Pegandon	6	6	51	84	42	45	74	51	359
Ngampel	5	16	52	73	33	42	40	43	304
Gemuh	14	20	93	102	46	57	67	47	446
Ringinarum	6	18	64	95	56	35	55	57	386
Weleri	6	13	43	65	32	31	25	24	239
Rowosari	11	15	103	98	56	44	99	66	492
Kangkung	9	10	91	103	66	69	69	60	477
Cepiring	8	16	99	107	61	51	87	57	486
Patebon	13	16	83	114	63	49	78	70	486
Kota Kendal	7	14	44	65	32	39	54	27	282
TOTAL	207	310	1.270	1.641	834	894	1.125	954	7.235

(Sumber: PBDT tahun 2015)

2.3.2 Urusan Pelayanan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Selanjutnya salah satu aspek penduduk yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari, dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan lapangan kesempatan kerja / berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Kendala yang dihadapi dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan melalui kegiatan proyek pembangunan yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal sejak tahun 2011 sampai 2015 selalu meningkat, dari 6,54% menjadi 7,07%. Meningkatnya TPT sebagai akibat dari menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada tahun 2011 TPAK sebesar 70,7% kemudian tahun 2012 naik menjadi 72,81%. Kemudian sejak tahun 2013 sampai 2015 capaiannya selalu turun dengan kondisi terakhir pada angka 65,7%. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kendal juga mengalami

penurunan dari 0,48% pada tahun 2011 menjadi 0,46% pada tahun 2015.

Tabel 2.33
Indikator Makro Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2015

Indikator Data Ketenagakerjaan	Satuan	Data Ketenagakerjaan				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Angkatan Kerja	orang	478.641	499.395	499.333	501.077	468.158
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	orang	677.022	685.901	694.906	703.513	712.580
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,7	72,81	71,86	71,22	65,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,54	6,31	6,43	6,15	7,07
Rasio Penduduk yang Bekerja/ Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	93,46	93,69	93,57	93,85	92,93
Rasio Ketergantungan	%	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46

(Sumber: *BPS Kab. Kendal Tahun 2016*)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pencari kerja, pemerintah melaksanakan berbagai macam kegiatan pelatihan. Pelatihan ketrampilan tersebut ada yang berbasis pada kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2015 sebanyak 100%. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 58,96%, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 80%.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	NA	NA	NA	96,04	100
2	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	94,95	96,24	91,26	96,04	58,96
3	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	NA	NA	NA	66,67	80,00

(Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

Upaya Keselamatan dan perlindungan perusahaan terhadap pekerja di Kabupaten Kendal masih cukup rendah dimana tahun 2011 persentase keselamatan dan perlindungan perusahaan terhadap pekerja sebanyak 15,44%, tahun 2015 hanya mencapai 24,84%.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan mengalami perkembangan yang fluktuaktif, tahun 2011 sebesar 67,65%, meningkat tahun 2015 menjadi 69,77%. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan tahun 2011 sebesar 38,89%, tahun 2015 turun menjadi 36,17%.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kenagakerjaan Lainnya di Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2015 (%)

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Keselamatan dan perlindungan	%	15,44	18,44	18,49	24,18	24,84
2	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/PB	%	100,00	100,00	100,00	87,50	92,86
3	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan	%	0	0	0	0	88,90
4	Prosentase Pemeriksaan Perusahaan	%	67,65	73,05	62,33	60,78	69,77
5	Prosentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	38,89	40,51	20,00	34,78	36,17

(Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan Gender atau PUG yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Merespon amanat tersebut Kabupaten Kendal membentuk kelembagaan PUG, namun dari 62 kelembagaan yang terbentuk hanya terdapat 4 lembaga yang aktif.

Peningkatan kesetaraan gender dibidang pembangunan dapat terlihat juga dari Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Tahun 2011 sebesar 47,64%, tahun 2013

meningkat menjadi 51,07%, dan tahun 2015 menjadi 49,91%. Sementara itu Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang masih rendah dimana persentase perempuan di lembaga legislatif hanya mencapai 22,22%, meskipun demikian jika dilihat trennya maka terjadi kenaikan.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	Jumlah Kelembagaan aktif	Unit	0	2	3	4	4
		Jumlah kelembagaan PUG	Unit	62	62	62	62	62
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah Anggota Perempuan dalam lembaga pemerintah	orang	5305	5259	5209	4977	5237
		Jumlah Anggota di Lembaga Pemerintah	orang	11135	10842	10200	9972	10354
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan		%	58,99	57,20	NA	NA	NA
5.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif		%	14,29	16	14,29	22,22	22,22

(Sumber: *BPPKB Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

Rasio KDRT yang terjadi di Kabupaten Kendal cakupannya fluktuatif. Pada tahun 2011 KDRT yang terjadi sebanyak 111 kasus (0,05%) dari total rumah tangga sebanyak 276.878 dan kondisi terakhir tahun 2015 juga terjadi 111 kasus (0,04%) dari total 301.543 rumah tangga.

Dalam rangka upaya penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan Kabupaten Kendal telah memiliki pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A). Setiap tahun kasus yang terlapor di sekretariat P2TP2A ini seluruhnya akan langsung ditangani.

Cakupan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut :

Tabel 2.37
Capaian SPM Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten
Kendal Tahun 2011-2015 (%)

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio KDRT	%	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan	%	100	100	100	100	100
3	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100	100	100	100
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	100	100	100	100
7	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	0	0	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

(Sumber: *BPPKB Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

Permasalahan lain yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan perempuan adalah banyaknya rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan. Di Kabupaten Kendal, tahun 2015 terdapat 24.803 rumah tangga yang dikepalai keluarga perempuan/janda. Dari total tersebut 44,45% diantaranya adalah berusia produktif. Komposisi rumah tangga dengan kepala

keluarga perempuan tertinggi ada di Kecamatan Rowosari, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Weleri, kemudian Kecamatan Boja.

Tabel 2.38
Sebaran Rumah Tangga dengan Kepala Keluarga Perempuan di Kabupaten Kendal Tahun 2015

Nama Kecamatan	Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan			
	Usia di bawah 45 tahun	Usia 45 - 59 tahun	Usia 60 tahun keatas	TOTAL
Plantungan	139	246	433	818
Sukorejo	191	391	618	1.200
Pagerruyung	139	304	510	953
Patean	183	373	680	1.236
Singorojo	172	396	606	1.174
Limbangan	106	240	363	709
Boja	182	468	863	1.513
Kaliwungu	166	461	639	1.266
Kaliwungu Selatan	158	387	646	1.191
Brangsong	149	482	729	1.360
Pegandon	112	398	724	1.234
Ngampel	90	329	617	1.036
Gemuh	160	463	848	1.471
Ringinarum	113	431	814	1.358
Weleri	177	526	839	1.542
Rowosari	187	522	988	1.697
Kangkung	204	429	818	1.451
Cepiring	131	479	955	1.565
Patebon	121	420	644	1.185
Kota Kendal	103	298	443	844
TOTAL	2.983	8.043	13.777	24.803

(Sumber: PBDT Tahun 2015)

c. Pangan

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman dikonsumsi, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan mencakup 4 (empat) aspek, yaitu ; ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup ketersediaan, distribusi, dan konsumsi bahan pangan. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh

pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Subsistem konsumsi bahan pangan berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya.

Guna menjaga stabilitas produksi bahan pangan, di Kabupaten Kendal telah ditetapkan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). luas LP2B di Kabupaten Kendal sepeerti yang termuat dalam Perda RTRW seluas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kendal.

Ketersediaan pangan utama di wilayah Kabupaten Kendal menunjukkan kondisi yang cukup baik. Ketersediaan pangan utama meskipun angka capaiannya fluktuatif namun sudah mampu di atas target SPM ketahanan pangan sebesar 60% pada tahun 2015. Begitu pula dengan ketersediaan energi dan ketersediaan protein per kapita, capaiannya pada tahun 2015 sudah mampu melebihi target SPM sebesar 90%. Indikator yang belum mampu mencapai target SPM ketahanan pangan adalah penguatan cadangan pangan, dimana target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 60% namun Kabupaten Kendal baru mampu mencapai 20,09% pada tahun 2015.

Tabel 2.39
Capaian SPM Ketahanan Pangan Indikator Ketersediaan Pangan(%)

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ketersediaan pangan utama	%	169,24	165,65	161,22	163,16	165
2.	Ketersediaan energi perkapita	%	NA	166,14	173,50	175,41	177
3.	Ketersediaan protein perkapita	%	NA	162,75	176,63	163,49	165
4.	Penguatan cadangan pangan	%	NA	18,9	18,4	18,4	20,09

(Sumber : *Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2016*)

Terkait dengan indikator SPM dalam hal distribusi pangan, Kabupaten Kendal masih harus bekerja keras dalam rangka mewujudkan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah karena capaian pada tahun 2015 baru 67,8% sedangkan targetnya adalah 90%. Adapun indikator stabilitas

harga dan pasokan pangan sudah di atas target 90% karena Kabupaten Kendal capaiannya sudah 100%.

Tabel 2.40
Capaian SPM Ketahanan Pangan Indikator Distribusi Pangan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	-	25	25	50	67,8
2.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	-	100	100	100	100

(Sumber : *Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2016*)

Indikator SPM bidang ketahanan pangan yang perlu mendapatkan perhatian karena capaiannya masih di bawah target yang telah ditentukan adalah capaian skor pola pangan harapan yang ditergetkan 90% baru mampu dicapai 87,9%. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sudah mencapai target karena tercapai 80%. Dan juga indikator Persentase Desa/kel rawan pangan yang memiliki lumbung pangan (cadangan pangan 500kg) baru mampu mencapai 14,2%.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Ketahanan Pangan Lainnya

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84,1	88,4	87	87,9	87,9
2	Pengawasan dan pembinaan kewanaman pangan	%	80	80	75	75	80
3	Penanganan daerah rawan pangan	%	21,4	21,4	35,7	35,7	35,7
4	Persentase Desa/kel rawan pangan yang memiliki lumbung pangan (cadangan pangan 500kg)	%	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2

(Sumber : *Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2016*)

d. Pertanian

Bidang pertanian dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomis dan sosial. Karena adanya fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, status tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan

status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Berdasarkan data BPS Kabupaten Kendal tahun 2016 jumlah pemohon sertifikat tanah pada tahun 2015 sebanyak 26.961 pemohon sedangkan jumlah sertifikat yang diselesaikan sebanyak 25.765 sertifikat (95,56%).

Tabel 2.42
Banyaknya Pemohon dan Penyelesaian Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

Tahun	Jml Pemohon	Jml Diselesaikan (unit)	Persentase (%)
2011	23.638	21.652	91,60
2012	23.841	24.101	101,09
2013	24.385	23.628	96,90
2014	24.563	24.006	97,71
2015	26.961	25.765	95,56

(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2016)

Perincian sertifikat yang dikeluarkan tahun 2015 adalah Hak Milik (HM) sebanyak 7.699 sertifikat, Hak Guna Bangunan sebanyak 775 sertifikat, dan Hak Pakai sebanyak 26 sertifikat.

Tabel 2.43
Banyaknya Sertifikat yang Dikeluarkan Berdasarkan Jenisnya Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

Jenis	2011	2012	2013	2014	2015
Hak Milik	8.040	9.286	8.262	9.496	7.699
Hak Pakai	3	111	11	50	26
Hak Guna Usaha	-	4	1	2	0
Hak Guna Bangunan	104	386	604	268	775
Jumlah	8.147	9.787	8.878	9.816	8.500

(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2016)

e. Lingkungan Hidup

Produksi sampah di Kabupaten Kendal pada tahun 2015 sebesar 88.059,9 m3. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebesar 81.413,25 m3. Apabila dilihat dari kemampuan pengangkutan, kemampuan pengangkutan sampah justru mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2013 kemampuan pengangkutan sebesar 83,39%, dan tahun 2014 kemampuan pengangkutan naik menjadi 86,53%, tahun 2015 turun menjadi 82,07%.

Menurunnya kemampuan pengangkutan sampah tersebut diantaranya dikarenakan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Kendal jumlahnya bada yang berkurang, yaotu tempat

pembuangan sementara dan gerobak sampah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44
Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Kendal
Tahun 2012-2015

No	Rincian	2012	2013	2014	2015
1	Truk sampah	6	7	8	9
2	Truk container	7	7	7	9
3	Container	23	20	24	28
4	Gerobak sampah	52	45	47	18
5	Tempat Pembuangan	210	208	500	91
6	Tempat pembuangan akhir	2	2	2	2
7	Truk tinja	0	0	0	0
8	Transfer depo	3	3	2	3
9	Instalasi pengolahan limbah	0	0	0	0
10	Whelloader	1	1	0	0
11	Bulldozer	1	2	3	3

(Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2016)

Daerah pelayanan kebersihan di Kabupaten Kendal meliputi 12 Kecamatan, yaitu Kota Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Pegandon, Patebon, Cepiring, Ngampel, Weleri, Sukorejo, dan Boja.

Apabila dilihat dari jenis sampahnya, penanganan sampah di Kabupaten Kendal tidak sepenuhnya perlu mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang jumlahnya terbatas. Dimana persentase terbanyak adalah berupa sampah organik dan kayu. Jenis sampah tersebut merupakan jenis sampah yang dapat diolah kembali dan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga masyarakat yang mengelolanya. Pada tahun 2015 dari 30,18 m3/ hari sisa sampah yang tidak terangkut ke TPA, sebanyak 0,4-0,5 m3/hari diolah untuk komposting.

Tabel 2.45
Persentase Komposisi Jenis Sampah di Kabupaten Kendal
Tahun 2012-2015

Jenis Sampah	Persentase Komposisi Sampah (%)			
	2012	2013	2014	2015
Kertas	8,50	8,37	8,53	8,66
Kayu	22,14	22,47	22,1	22,54
Kain	2,70	2,74	2,79	2,86
Karet/ Kulit	0,75	0,74	0,76	0,77
Plastik	7,15	7,26	7,11	7,22
Metal/ Logam	1,10	1,08	1,11	1,14
Gelas/ Kaca	1,56	1,58	1,65	1,69
Organik	56,00	55,16	55,5	54,67
Lain-lain	0,10	0,60	0,45	0,46

(Sumber : *Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2016*)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas : a) pelayanan pencegahan pencemaran air, b) pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. c) pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dan d) pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.

Capaian kinerja indikator SPM bidang lingkungan hidup di Kabupaten Kendal beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai. Indikator Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air ini sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 angkanya meningkat dan mampu mencapai target 100%.

Indikator SPM kedua yaitu Indikator kinerja berikutnya adalah pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Capaian target indikator tercapai baru 20% dari target seharusnya 100%.

Indikator berikutnya adalah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa. Capaian kinerja tahun 2011-2015 menunjukkan kinerja yang masih tidak baik karena angkanya masih jauh di bawah target

sebesar 100%. Target indikator ini pada tahun 2015 baru tercapai 16,8%.

Indikator SPM keempat adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 menunjukkan kinerja belum baik karena capaiannya baru sampai pada angka 2,5% padahal target untuk indikator ini adalah 100%.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	3%	5%	5%	5%	100%
2	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	kasus	0	14	25	18	20
3	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	0	0	0	12,4	16,8
4	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	titik	0	12	12	4	6

(Sumber : *Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, 2015*)

Capaian indikator bidang lingkungan hidup lainnya dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.47
Capaian Indikator Bidang Lingkungan Hidup Lainnya

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemantauan status mutu air	titik	0	12	12	35	45
2	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		0	4	4	5	3

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
3	Kegiatan Penegakan hukum lingkungan	kasus	0	11	25	18	13
4	Rasio Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	Ha	0	50	35	0	0
5	Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	%	0	0	100	NA	100

(Sumber : *Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, 2015*)

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk.

Dalam upaya tertib administrasi kependudukan, Kabupaten Kendal giat melakukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencatatkan dokumen kependudukan. Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 ratio penduduk ber KTP sebesar 65,56%, meningkat menjadi 74,2% tahun 2015. Untuk Rasio bayi ber-akte kelahiran tahun 2011 sebesar 85,37% dan tahun 2015 sebesar 93,65%. Persentase Kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan dimana tahun 2011 sebanyak 63,98%, tahun 2015 menurun menjadi 63,22%. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat anak yang belum memiliki akta kelahiran. Untuk Cakupan Akte Kematian selama 5 tahun terakhir sebesar 100%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio penduduk ber KTP	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	Jiwa	545.099	538.606	399.247	515.427	545.856
		Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Jiwa	816.187	821.555	694.868	722.688	734.153
2.	Rasio bayi ber-akte kelahiran	Jumlah bayi berakte kelahiran (0 -4 thn)/4	Orang	7.567	13.978	17.104	17.829	11.091
		jumlah keseluruhan bayi yang lahir thn ybs	Orang	14.728	16.372	16.862	16.307	15.937
3.	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akte kelahiran	Jiwa	652.304	692.298	717.962	733.874	510.334
		Jumlah penduduk	Jiwa	1.077.866	1.081.988	1.101.342	947.978	951.465
4.	Rasio pasangan berakte nikah	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	pasangan	107	58	61	50	7017
		jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah	pasangan	316.044	328.123	274.261	293.290	327.240
5.	Ketersediaan database kependudukan	-	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Cakupan Akte Kematian	Jumlah penduduk yang meninggal memiliki akte kematian	Jiwa	15	7	21		138
		jumlah penduduk yang meninggal	Jiwa	15	7	21		138

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal, 2016)

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang strategis dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Melalui pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat desa

dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dalam pemberdayaan masyarakat ada 3 aspek utama kegiatan pemberdayaan yaitu 1) pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM), 2) pemberdayaan sosial ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal dan 3) pelestarian lingkungan. Oleh karena itu keberhasilan pemberdayaan masyarakat tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, terwujudnya peran serta atau partisipasi masyarakat ditentukan oleh tingkat kapasitas masyarakat dan kesadaran serta tanggungjawab untuk memberikan kontribusi pemikiran, tenaga maupun materiial dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Tantangan ke depan lainnya adalah dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan disahkannya undang-undang tersebut maka desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selain itu juga dengan adanya Undang-Undang ini sebagian wewenang Kabupaten akan dilaksanakan oleh desa.

Menindak lanjuti dari diberlakukannya Undang-Undang Desa tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya untuk meningkatkan kapasitas seluruh komponen pemerintah desa melalui pembinaan dan pendampingan. Kabupaten Kendal memiliki desa dengan jumlah total 286, terdiri dari 6.351 RT dan 1.490 RW.

Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh kelompok Posyandu yang ada di tiap Kelurahan sebagai wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan kesehatan ibu dan Balita. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu antara lain posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan

bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Posyandu di Kabupaten Kendal berdasarkan data yang ada dalam Kendal dalam angka berjumlah 1.392 unit tersebar di seluruh wilayah. Dari total tersebut posyandu yang masuk dalam kategori mandiri berjumlah 119 unit, kategori purna 491 unit, kategori madya 556 unit, dan kategori pratama sebanyak 224 unit.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan kepada keberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan. Guna mendukung itu semua pembinaan kepada masyarakat selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Pembinaan tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan juga kepada pemerintahan desa.

Beberapa capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	PKK aktif	Unit	286	286	286	286	286
2	Posyandu aktif	unit	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392

(Sumber : *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kendal, Tahun 2016*)

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Kabupaten Kendal dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk juga turut mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Total Fertility Rate Kabupaten Kendal tahun 2015 sebesar 2,07. Angka tersebut menunjukkan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya.

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan, tahun 2011 sebesar 78,74%, tahun

2015 meningkat menjadi 80,6%. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun, tahun 2011 sebanyak 1,45%, tahun 2013 turun menjadi 1,35% dan tahun 2015 meningkat menjadi 1,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal telah berhasil dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan dilihat dari Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (target dibawah 3,5%).

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) tahun 2011 sebesar 11,67%, tahun 2015 menurun menjadi 9,9%. Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria masih tergolong rendah dimana tahun 2015 sebesar 1,02%.

Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat masih rendah dimana tahun 2011 sebesar 30,06%, tahun 2015 turun menjadi 27,74%. Untuk meningkatkan KB mandiri dari masyarakat, pemerintah memiliki petugas yang berada di tingkat kelurahan. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana /Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) tahun 2010 sebesar 0,28%, menurun tahun 2014 menjadi 0,21%,. Kondisi ini menunjukkan jumlah PLKB yang ada belum dapat memenuhi pelayanan. Idealnya terdapat 1 PLKB pada 1 desa/kelurahan. Sejak ditetapkannya UU no 23 Tahun 2014, pemenuhan PLKB akan menjadi kewenangan pemerintah pusat

Selain PLKB terdapat Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang yang mendukung implementasi program KB dimasyarakat. Sampai dengan saat ini untuk jumlah PPKBD telah memenuhi.

Sementara itu untuk pengembangan konseling remaja hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal telah memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja. Namun jika dilihat dari PIK Remaja aktif dalam pelayanan informasi dan konseling masih sangat rendah. Tahun 2015 hanya 17,7% dari PIK R yang ada berstatus aktif dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan dan konseling.

2) Keluarga Sejahtera

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB tahun 2011 sebesar 80,47%, tahun 2015 menurun menjadi 77,59%. Cakupan Tri Bina pada Desa/Kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) sebesar 18,18% di tahun 2014. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB tahun 2011 79,56%, tahun 2015 turun menjadi 79,21%.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	anak	2,29	2,28	2,13	2,07	2,07
2	Rasio akseptor KB	%	97,16	95,91	105,86	97,74	90,89
3	Cakupan peserta KB aktif	%	78,74	78,55	79,07	79,75	80,60
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,45	1,42	1,35	1,5	1,5
5	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,67	11,65	10,93	10,48	9,90
7	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,21	1,11	1,09	1,07	1,02
8	Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	30,06	29,20	28,09	27,74	27,74
9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100
10	Ratio Pembantu Pembina KeluargaBerencana (PPKBD)	%	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
11	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	%				59,66	62,07
12	Persenta se kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	100	100	100	100	100
13	Persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	5	3	6	13,3	17,7
14	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	80,47	78,03	78,36	77,59	76,13
15	Cakupan Tri Bina pada Desa/Kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL)	%	0	0	0	16,08	20,9
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	79,56	76,58	48,86	80,27	79,21

(Sumber: BPPKB Kabupaten Kendal, 2016)

i. Perhubungan

Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang mempunyai arus lalu lintas yang padat, dilalui jalur jalan Regional antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang. kondisi jalur lalu lintas sering menimbulkan kemacetan khususnya di kawasan-kawasan yang dilewati secara langsung oleh jalan utama pantura.

Kabupaten Kendal memiliki 4 terminal yaitu Terminal Kendal, Sukorejo, Boja dan Weleri. Keempat terminal ini melayani transportasi massal baik dalam kota maupun luar kota. Adapun angkutan darat yang terdata pada tahun 2015 sebanyak 725 unit. Dilihat dari segi jumlah, angkutan darat di Kabupaten Kendal dari tahun 2011 sampai 2015 cenderung turun, namun dari 2013 ke 2015 kembali naik. Sedangkan penumpang angkutan darat dari tahun 2011 sampai 2015 trennya naik, namun tahun 2015 menurun. Data terakhir tahun 2015 adalah sebanyak 4.742.465 penumpang.

Guna menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelintas yang melewati wilayah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Perhubungan melengkapi jalan-jalan utama dengan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Kondisi sarana prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Kendal sampai tahun 2015 dalam kondisi baik sebanyak 88,9% dari total yang ada.

Tabel 2.51
Kondisi Transportasi di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Terminal	Unit	4	4	4	4	4
2	Jumlah angkutan darat	Unit	743	680	633	725	725
3	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	3.433.256	3.864.738	4.285.339	5.373.424	4.742.465
4	Jumlah Trayek AKDP, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan	Unit	61	61	61	61	61
5	Persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	33,33	33,33	36,67	43,33	50

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
6	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	40,0	40,0	40,0	40,0	88,9

(Sumber: *Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

Selain angkutan yang melayani jalur utama, telah tersedia juga angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang sebanyak 2 jaringan trayek. Sedangkan jaringan jalan kabupaten yang terlayani angkutan umum adalah 57 dari 223 total jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas di jalan raya, di tempat-tempat yang membutuhkan petunjuk dan peringatan lalu lintas telah dipasang rambu-rambu. Kebutuhan rambu-rambu untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten Kendal adalah sebanyak 2.500 buah. Namun pada tahun 2015 yang terpenuhi baru 22,68% saja atau sebanyak 567 buah. Kondisi tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya karena banyak rambu-rambu yang rusak dan belum diganti.

Untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada penumpang angkutan umum, semua kendaraan umum wajib melakukan uji kir angkutan umum. Dinas perhubungan Kabupaten Kendal telah memiliki unit pengujian kendaraan bermotor. Jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR dari tahun ke tahun selalu meningkat. Jika pada tahun 2011 jumlahnya adalah 11.044 unit kendaraan, pada tahun 2015 meningkat menjadi 12.056 unit kendaraan.

j. Komunikasi dan Informatika

Lembaga penyiaran radio/TV di Kabupaten Kendal sampai dengan tahun 2015 sebanyak 6 radio dan 16 TV. Dalam rangka peningkatan komunikasi dan informasi pemerintahan, telah dikembangkan website di SKPD Pelayanan Publik. Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki portal website sampai dengan tahun 2015 sebanyak 13%.

Sementara itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang komunikasi dan informatika telah dibentuk kelompok informasi masyarakat (KIM) di 10 kecamatan yang ada di

Kabupaten Kendal. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan tahun 2010 sebesar 40%, meningkat menjadi 100% ditahun 2015. Capaian tersebut mencapai target SPM dimana KIM yang harus terbentuk adalah 50% dari total kecamatan yang ada.

Untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kabupaten Kendal dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media baru seperti website (media online); media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, dan baliho. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui beberapa media selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lembaga penyiaran radio/TV	unit	NA	5 (radio) 14 (tv)	5 (radio) 14 (tv)	6 (radio) 16 (tv)	6 (radio) 16 (tv)
2.	Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki portal website (%)	Unit	NA	5 SKPD	6 SKPD	6 SKPD	8 SKPD
		%	NA	8	10%	10%	13%
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Unit	NA	4	0	10	10
		%	NA	40%	40%	100%	100 %
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:						
	▪ Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;		NA	NA	60	60	60
	▪ Media baru seperti website (media online);		NA	12	12	12	12
	▪ Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;		NA	6	6	6	6
	▪ Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau		NA	3	3	3	3
	▪ Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur,spanduk, dan baliho		NA	200	200	200	200

No	Indikator	Satuan	Tahun				
5.	Rasio pengaduan informasi publik yang tertangani	%	NA	100%	100%	100%	100%
6.	Web site milik pemerintah daerah	unit	NA	NA	1	1	1

(Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal, 2016*)

k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan terstruktur. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengklasifikasi kriteria usaha masyarakat menjadi 3 kategori, yaitu mikro, kecil dan menengah. Klasifikasi jenis usaha tersebut didasarkan pada jumlah aset dan omset dari masing-masing kategori usaha. Perkembangan UMKM di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan, jumlah usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Kendal pada tahun 2015 mencapai 17.744 UMKM. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang sebanyak 11.055 UMKM.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dilakukan peningkatan produk dan promosi produk UMKM melalui pengembangan sarana dan prasarana pemasaran serta penyelenggara promosi produk UMKM. Penyelenggaraan promosi dilakukan melalui pelaksanaan pameran, dengan presentase UMKM yang mengikuti pameran promosi produk sebesar 25% pada tahun 2015.

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Kendal selama tahun 2011-2015 juga mengalami peningkatan dari 50% tahun 2011 menjadi 82% pada tahun 2015. Perkembangan capaian pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	89,5	93,8	96,5	98,9	99,01
2.	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Unit	11.055	12.242	17.195	17.682	17.744

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
3.	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	10	15	15	20	25
4.	Persentase Koperasi aktif	%	50	48	56	71	71,4
5.	Jumlah Produk Unggulan Daerah	produk	6	7	9	10	11

(Sumber: *Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kendal, 2016*)

1. Penanaman Modal Daerah

Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam setahun di Kabupaten Kendal selama 5 tahun terakhir sebanyak 5 informasi setiap tahunnya. Sementara fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan dan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota baru dilaksanakan selama 1 kali dalam 1 tahun.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami penurunan. Tahun 2011 jumlah investor sebanyak 561, tahun 2015 menurun menjadi 163. jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebanyak 17 jenis. Jenis pelayanan yang dilayani dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebanyak 2 jenis.

Dalam rangka mendukung daya tarik investasi, BPMPT Kabupaten Kendal juga telah memiliki peta potensi investasi. Dengan peta tersebut diharapkan para calon investor bisa memilih potensi yang ingin dikembangkan di wilayah Kabupaten Kendal.

Capaian kinerja urusan penanaman modal lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Indikator	Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	5	5	5	5	5
2	Jumlah fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	1	1	1	1	1

No	Indikator	Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
3	Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1	1	1	1	1
4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	561	416	372	230	163
5	Jumlah bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1	1	1	1	1
6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	3	2	2	2	2
7	Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	17	17	17	17	17
9	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	1	1	1	1	1

(Sumber: *BPMPT Kabupaten Kendal, 2016*)

m.Kepemudaan dan Olahraga

Dari sisi pembangunan kepemudaan, di Kabupaten Kendal terdapat banyak wadah organisasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pemuda. Organisasi tersebut sifatnya beragam, mulai dari organisasi kepemudaan yang berbasis keagamaan seperti Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyah, IPNU, IPPNU, Fatayat NU, Nasiyatul Aisiyah (NA). Selain itu juga organisasi kepemudaan yang bersifat nasionalis misalnya KNPI, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, PKK remaja dan sebagainya. Semua organisasi tersebut tentunya harus mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan karena potensi pemuda tersebut bisa dimanfaatkan dalam berbagai proses pembangunan. Dari data yang ada, 100% organisasi pemuda yang ada dan terdaftar di Kabupaten Kendal telah dibina.

Tabel 2.55
Gambaran Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pemuda yang mendapatkan pelatihan	orang	255	268	275	290	300
2.	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	87	92	94	98	100

(Sumber: *Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kendal, 2016*)

Sementara itu dibidang olahraga, organisasi olahraga yang berkembang dan dibina sampai dengan tahun 2015 sebanyak 29 klub. Cabang Olahraga Berprestasi tahun 2011 sebanyak 18 cabang olahraga, tahun 2015 meningkat menjadi 50 cabang olahraga. Gedung dan lapangan olahraga sebagai salah satu fasilitas olahraga, telah banyak jumlahnya di Kabupaten Kendal. Tahun 2011 jumlah gedung olahraga dan lapangan olahraga sebanyak 80 buah, tahun 2015 meningkat menjadi 665 buah.

Tabel 2.56
Gambaran Kegiatan Pembinaan Keolahragaan Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah klub olahraga	Klub	25	26	28	29	29
2.	Jumlah gedung olahraga	Unit	80	125	258	665	665

(Sumber: *Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kendal, 2016*)

n. Statistik

Dalam UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

Pasal 5 UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1)statistik dasar; (2)statistik sektoral dan; (3) statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi

pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kendal setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Kendal Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan Indeks Harga Konsumen serta Inflasi dan penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten. Selain itu juga masing-masing SKPD yang mengampu urusan-urusan strategis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan data profil masing-masing urusan yaitu profil pendidikan dan profil kesehatan.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Bidang Statistik Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kabupaten Kendal Dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	PDRB Kabupaten Kendal	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: *Bappeda Kab. Kendal*, 2016)

o. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian merupakan pelayanan komunikasi khususnya pemberitaan rahasia negara yang memerlukan metode pengamanan yang dilakukan secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Kabupaten Kendal sudah memiliki pelayanan persandian yang merupakan bagian dari Bagian Umum Setda pada sub bagian Tata Usaha Setda dan Sandi Telekomunikasi.. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi standar antar instansi pemerintah.

Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi setiap tahun masih rendah, hal ini tidak terlepas dari minimnya rasio pemanfaatan persandian dalam komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi terhadap Pemerintah Kabupaten Kendal. Disamping itu juga karena minimnya kebutuhan atas prioritas keamanan komunikasi yang ada selama ini. Diharapkan penyelenggaraan pelayanan persandian semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Bidang Sandi Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	100	100	100	100	100

(Sumber: *bagian Umum Setda Kab. Kendal, 2016*)

p. Kebudayaan

Kabupaten Kendal memiliki Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2011 sebanyak 60%, meningkat sampai dengan tahun 2015 menjadi 70%.

Jumlah grup kesenian juga mengalami perkembangan yang meningkat dimana pada tahun 2011 jumlah grup kesenian 565 kelompok, tahun 2015 meningkat menjadi 602 kelompok. Cakupan

Gelar Seni di Kabupaten Kendal sampai tahun 2015 dilaksanakan 21 pertunjukan, 1 festival, dan 1 lomba.

Capaian kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Kendal masih belum cukup baik, hal tersebut dikarenakan banyak target SPM Kesenian yang belum mampu dicapai. Indikator yang belum bisa memenuhi target SPM antara lain yaitu cakupan kajian seni yang ditargetkan mencapai 50% baru bisa tercapai 6,67%. Kemudian cakupan fasilitasi seni baru bisa mencapai 14,28% padahal targetnya adalah 30%. Cakupan sumberdaya kesenian masih 0, padahal targetnya adalah 25%. Sedangkan indikator yang sudah mampu dicapai adalah misi kesenian, cakupan organisasi seni, dan cakupan tempat umum, serta cakupan gelar seni.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	60 %	60 %	60 %	70 %	70%
2.	Jumlah grup kesenian	565	570	580	601	602
3.	Misi Kesenian (%)	100	100	100	100	100
4.	Cakupan Kajian Seni (%)	6,67	6,67	6,67	13,3	6,67
5.	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	0	0	0	14,28	0
6.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (%)	0	0	0	0	0
7.	Cakupan Organisasi seni (%)	34	34	34	34	34
8.	Cakupan Tempat umum (%)	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Gelar Seni (%)	75	75	75	75	75

(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kendal, 2016)

q. Perpustakaan

Kabupaten Kendal memiliki perpustakaan umum dan khusus yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan selama tahun 5 tahun. Tahun 2015 jumlah perpustakaan sebanyak 20 perpustakaan. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun juga meningkat, kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan minat baca masyarakat. Data terakhir tahun 2015 menunjukkan bahwa pengunjung perpustakaan mencapai 13.200 kunjungan. Selain itu jumlah bahan bacaan koleksi perpustakaan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan sampai tahun 2015 mencapai 28.000 judul buku.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pustakawan, Kabupaten Kendal memfasilitasi peningkatan kapasitas pustakawan. Jumlah Pengelola perpustakaan umum dan khusus yang mengikuti Bimbingan Teknis tahun 2011 sebanyak 30 orang, tahun 2015 jumlah pustakawan yang mendapat bimtek sebanyak 35 orang. Sementara itu jumlah pustakawan yang mendapatkan sertifikasi sebanyak 3 orang.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	8	10	12	15	20
2.	Jumlah pustakawan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	30	30	30	25	35
3.	Jumlah pustakawan yang mendapatkan sertifikasi	Orang	1	1	2	3	3
4.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	6784	9022	9549	6769	13200
5.	Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	17500	19000	21000	23000	28000

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Kendal, 2016)

r. Kearsipan

Pengelolaan arsip sebagai bagian dari sejarah pembangunan sebuah negara/organisasi harus dilaksanakan dengan baik. Arsip sebagai sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban sebuah pelaksanaan kegiatan bagi pemerintah daerah yang dapat diakses secara terbuka menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan tahap pelestarian arsip. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan baik pada arsip statis maupun arsip dinamis. Pengertian dari arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia

dan/atau lembaga kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Sebagai salah satu penopang pelaksanaan pelayanan dan pemerintahan, pengelolaan arsip perlu dibuat sebuah keseragaman dalam sistem yang baku. System tersebut harus menjadi acuan bagi semua pelaksana pemerintahan dalam hal ini SKPD untuk mengelola arsip di intitusinya masing-masing.

Penanganan arsip yang baik juga membutuhkan tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan, karena dalam penanganan dan pengelolaan arsip harus teliti dan terstruktur. Adanya tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan akan sangat menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, jumlah SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Kendal masih sangat kurang yaitu hanya ada 5 (lima) orang pada tahun 2015, sementara Jumlah SDM pengelola kearsipan yang ikut diklat/bintek bahkan mencapai 45 orang pada tahun 2015. Dokumen-dokumen kearsipan yang tersimpan pun perlu dipelihara untuk menghindari adanya kerusakan dokumen. Pada tahun 2015, jumlah arsip yang tersimpan di depo arsip berjumlah 105.618 arsip. Akan tetapi, jumlah arsip yang dipelihara baru mencapai 5.280 arsip. Kurangnya tenaga pengelola arsip dapat menjadi faktor penyebab sedikitnya jumlah dokumen arsip yang dipelihara. Dilihat berdasarkan retensi arsip, pada tahun 2015, sudah dilakukan penilaian terhadap dokumen arsip sebanyak 3000 arsip.

Terkait Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah dialihmediakan dalam bentuk informatika, sampai pada tahun 2015, belum ada dokumen arsip yang telah dialihmediakan.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah arsip yang telah dilakukan penilaian berdasarkan masa guna arsip (retensi arsip)	Jumlah arsip dalam kategori musnah, dinilai kembali dan atau permanen	berkas	0	0	0	0	3000

No	Indikator	Sub Indikator	Satuan	Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang ikut diklat/bintek	Orang	0	53	29	40	45
		Jumlah SDM pengelola kearsipan secara keseluruhan	Orang	2	4	4	5	5
3.	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah dialihmediakan dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah dialihmediakan dalam bentuk informatika	Berkas	0	0	0	0	0
		jumlah keseluruhan dokumen yang ada di Kantor Arsip Daerah	Berkas	0	0	0	0	0
4.	Jumlah arsip inaktif yang dikelola hasil akuisisi	Jumlah SKPD yang dikelola arsipnya	Unit	1	1	1	1	5
		jumlah SKPD terlikuidasi	Unit	22	22	22	22	22
5.	Jumlah arsip inaktif yang dilakukan pemeliharaan fisik	Jumlah arsip yang dipelihara	Berkas	3.000	3.000	3.000	3.500	5.280
		jumlah arsip di depo arsip	Berkas	96.318	99.318	102.318	105.318	105.618
6.	Pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD dan Desa/Kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Unit	347	347	347	347	347
		Jumlah SKPD dan Desa/Kelurahan	Unit	347	347	347	347	347
7.	Peningkatan jumlah arsiparis/tenaga teknis pengelola arsip	Jumlah arsiparis/pengelola arsip yang ada	orang	2	4	4	5	5

(Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Kendal, 2016)

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kewenangan berkaitan dengan perikanan tangkap meliputi: pemberdayaan nelayan kecil; dan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Produksi

perikanan tangkap di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2011-2015 fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 produksi perikanan tangkap sebanyak 1.368.113 Kg, pada tahun 2015 menjadi 1.858.904 Kg. Dalam upaya peningkatan kapasitas nelayan, Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan pembinaan kelompok nelayan. Cakupan bina kelompok nelayan tahun 2011-2015 berkisar antara 6 kelompok hingga 24 kelompok.

Berkaitan dengan perikanan budidaya, kewenangan yang dimiliki kabupaten yaitu: Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan; pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Produksi perikanan budidaya tahun 2011-2015 meningkat secara signifikan dari sebesar 7.583.644 kg menjadi sebesar 21.967.096 kg. Peningkatan produksi perikanan budidaya tersebut dipengaruhi oleh upaya pemerintah Kabupaten Kendal dalam melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada kelompok budidaya perikanan. Tingkat cakupan bina kelompok ikan selama 2011-2015 berkisar antara 6 hingga 38 kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun cakupan bina kelompok ikan capaiannya relatif kecil, namun mampu meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya.

Kabupaten Kendal memiliki potensi perikanan yang cukup besar, namun tingkat konsumsi ikan penduduk relatif rendah. Tingkat konsumsi ikan penduduk sampai dengan tahun 2015 hanya sebesar 14,53%, meningkat dari tahun 2010 sebesar 12,56%. Dalam rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan dan nilai tambah perikanan, Pemerintah Kabupaten Kendal mendorong masyarakat untuk memproduksi produk olahan ikan yang memenuhi standar mutu. Jumlah produksi hasil olahan ikan cenderung meningkat dari sebesar 2.095.920 kg pada tahun 2011 menjadi sejumlah 20.598.649 kg pada tahun 2015. Peningkatan produksi dan kualitas produk hasil olahan ikan dipengaruhi oleh pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan, dengan cakupan bina kelompok pengolah dan pemasaran berkisar antara 10 kelompok hingga 18 kelompok. Jumlah usaha pengolahan ikan yang menerapkan standar mutu meningkat dari

sebanyak 73 unit pada tahun 2011 menjadi 81 unit pada tahun 2015.

Secara rinci kinerja urusan kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	1.711.768	2.056.175	1.822.807	2.055.180	1.858.904
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok)	19	17	6	10	24
3	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	7.583.644	8.060.480	9.096.600	9.271.985	21.967.096
4	Tingkat Cakupan Bina Kelompok Ikan (%)	5	5	5	5	0,42
5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok)	6	18	38	10	14
6	Jumlah Surat tanda pencatatan usaha/perijinan usaha pembudidayaan ikan	NA	NA	NA	NA	1
7	Tingkat konsumsi ikan penduduk	12,56	13,95	14	14	14,53
8	Jumlah usaha pengolahan ikan yang menerapkan standar mutu (unit)	73	73	74	74	81
9	Jumlah Produksi hasil olahan ikan (Kg)	2.095.920	22.441.202	26.279.545	20.598.649	20.598.649
10	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasaran (kelompok)	10	10	10	10	18
11	Jumlah surat tanda daftar kapal perikanan yang dikeluarkan	NA	NA	32	86	378

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal, 2016)

b. Pariwisata

Kunjungan Wisata di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. Tahun 2011 sebanyak 140.825 orang, tahun 2015 meningkat menjadi 175.000 orang. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga berdampak positif terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kendal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2011 sebanyak Rp. 438.884.000, tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 1.080.000.000.

Jumlah obyek wisata unggulan di Kabupaten Kendal juga semakin meningkat. Jika pada tahun 2011 hanya ada 5 obyek, maka pada tahun 2015 meningkat menjadi 9 obyek. Obyek wisata

di Kabupaten Kendal yang paling banyak pengunjungnya adalah pantai sendang sikucing dan air terjun curug sewu.

Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata, restoran dan penginapan juga mulai berkembang. Jenis, kelas, dan jumlah restoran sampai dengan tahun 2015 mencapai 88 restoran, dan 23 hotel kelas melati serta 2 hotel bintang.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kunjungan wisata	Orang	140.825	145.043	156.683	164.858	175.000
2.	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100	100	100
3.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	438.884 .000	803.916 .000	888.140 .000	859.140 .000	1.080.000.000
4.	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	5	7	7	9
5.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Unit	73	75	80	85	88
6.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit	Hotel Melati 22	Hotel Melati 21	Hotel Melati 22	Hotel Melati 23	Hotel Melati 23 Bintang 2

(Sumber: *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Kendal, 2016*)

c. Pertanian

1) Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Kendal yaitu padi sawah, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kenaikan dan penurunan jumlah produksi yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2011 produksi padi mencapai 253.728 ton, sampai tahun 2015 kenaikannya menjadi 289.870 ton. Produksi jagung dalam kurun waktu yang sama juga mengalami tren peningkatan, meskipun tahun 2015 justru turun dibandingkan tahun 2014. Jika pada tahun 2011 produksi jagung sebesar 186.061 ton, pada tahun 2014 produksinya mampu mencapai 214.637 ton, lalu turun menjadi 209.032 ton pada 2015. Sedangkan untuk produksi kedelai, selama lima tahun justru kondisinya mengalami penurunan meskipun pada tahun 2015 kondisinya membaik. Tahun 2011 total produksi jagung mencapai 6.547 ton, turun menjadi

3.032ton pada tahun 2015. Jika dilihat dari tingkat produktivitasnya, maka dapat diketahui bahwa kondisinya fluktuatif dari tahun 2011-2015.

Komoditas peternakan yang populasinya mengalami peningkatan adalah ayam potong, untuk produksi sapi potong, kambing, dan domba justru mengalami penurunan. Sedangkan untuk produksi daging, semua jenis daging mengalami kenaikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian dan peternakan antara lain adalah dengan melakukan pembinaan-oembinaan terhadap kelompok tani dan ternak yang ada. Cakupan kelompok bina tani di Kabupaten Kendal mencapai 51%. Sedangkan kelompok ternak yang mampu menerapkan teknologi peternakan sebanyak 84%.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan bina kelompok petani (kelompok)	61	72	77	57	51
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	57,02	56,82	52,31	54,01	65,91
3	Produksi pertanian tanaman pangan utama (ton)					
	- Padi	253.728	241.139	236.538	235.580	289.870
	- Jagung	186.061	189.162	195.565	214.637	209.032
	- Kedelai	5.614	718	2.099	1.753	3.032
4	Nilai Tukar Petani	NA	NA	NA	NA	NA
5	Populasi Komoditas Peternakan Utama (ekor)					
	- Sapi Potong	27.430	29.502	29.565	28.639	21.440
	- Kambing	69.774	74.226	73.140	73.037	36.718
	- Domba	80.339	109.435	127.793	127.294	29.839
	- Ayam Ras Pedaging	7.543.470	8.414.490	8.197.232	8.190.231	8.587.800
	- Ayam Ras Petelur	2.811.736	2.819.527	3.029.101	3.025.102	3.583.300
6	Produksi Daging (kg)					
	- Sapi Potong	344.040	217.400	234.135	414.000	418.140
	- Kambing	52.064	7.088	14.259	14.492	14.513
	- Domba	4.989	4.430	5.041	5.348	5.374
	- Ayam Ras Pedaging	2.704.586	3.651.933	3.664.723	3.666.147	3.649.815
	- Telur ayam ras	20.554.720	25.754.332	33.128.578	32.991.728	28.827.900
7	Angka Kematian/ Mortalitas (%)					
	- Sapi	3,32	3,25	3,21	3,41	3,00

No	Indikator	Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
	- Kambing	2,96	2,85	2,8	2,71	2,61
	- Domba	2,73	2,15	2,85	2,52	2,61
	- Ayam Ras	5,55	5,4	5,25	5	4,8
8	Kelompok tani ternak yang mampu menerapkan teknologi peternakan (kelompok)	82	83	84	84	84

(Sumber: *Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

2) Perkebunan

Terdapat kurang lebih 20 jenis komoditi perkebunan di Kabupaten Kendal. Dari 20 jenis tersebut terdapat beberapa komoditi yang memberikan sumbangsih cukup signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Kendal. Produk-produk perkebunan tersebut antara lain tebu, tembakau, kopi, cengkeh, karet, kelapa, dan kakao. Produksi hasil perkebunan yang disebutkan tadi meskipun memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian.

Produksi tanaman hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Produksinya cukup baik. Tanaman hortikulutra berupa bawang merah dan cabe produksinya selama 5 tahun trennya mengalami peningkatan. Demikian juga dengan produksi perkebunan kondisinya juga banyak yang meningkat. Komoditas perkebunan yang produksinya mengalami penurunan adalah kelapa dan tembakau.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Perkebunan dan Hortikultura Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi Tanaman Hortikultura					
	- Bawang Merah (Kw)	215.395	195.537	200.219	254.252	254.993
	- Cabe (Kw)	31.865	23.746	40.962	45.141	45.001
2	Produksi Tanaman Perkebunan					
	- Tebu (Kw)	20.665	12.131	1.993	15.248	21.124
	- Tembakau (ton)	9.233	10.224	6.239	4.172	4.728
	- Kopi (ton)	853	1.203	1.558	1.397	1.082
	- Cengkeh (ton)	253	458	367	363	422
	- Karet (ton)	44	46	53	59	52
	- Kelapa (ton)	1.143	1.311	1.293	1.191	771
	- Kakau (ton)	54	117	106	92	123

(Sumber: *Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal Tahun 2016*)

d. Perdagangan

Urusan perdagangan di Kabupaten Kendal dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 untuk nilai perdagangan luar negeri berfluktuatif. Nilai perdagangan luar negeri dari tahun 2011 hingga tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan dimana tahun 2014 mencapai 447.639.743,28 US juta dollar. Kondisi ditahun berikutnya yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan penurunan, dimana tahun 2015 nilai perdagangan luar negeri hanya mencapai 108.921.201,7 US juta dollar. Peningkatan nilai perdagangan luar negeri tahun 2012 didukung oleh ketersediaan dokumen tentang data dan informasi kebijakan dan peluang pasar luar negeri yang lebih banyak dibandingkan tahun yang lain. Upaya lain yang dilakukan selama 5 tahun untuk meningkatkan perdagangan di Kabupaten Kendal adalah dengan mengikuti pameran dan promosi perdagangan baik ditingkat regional, nasional dan internasional yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Upaya lain untuk meningkatkan perdagangan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah ketersediaan prasarana perdagangan. Tahun 2015 jumlah pasar tradisional di Kabupaten Kendal sebanyak 12 unit dan jumlah pasar desa sebanyak 24 unit. Untuk jumlah pasar tradisional yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan belum tersedia. Selain itu juga terdapat toko-toko modern dan juga pasar swalayan. Jumlah toko modern di Kabupaten Kendal selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang ada, toko modern yang tersebar di wilayah Kabupaten Kendal sebanyak 56 unit. Jumlah tersebut meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2011 yang hanya berjumlah 5 unit saja. Selain itu juga terdapat 4 unit pasar hewan, dan 3 unit pasar sepeda di wilayah Kabupaten Kendal.

Dalam rangka mendukung kinerja perdagangan dalam negeri khususnya di pasar-pasar tradisional, telah dilaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang yang ada. Kelompok pedagang informal yang tercatat sampai tahun 2015 jumlahnya mencapai 600 kelompok. Hanya saja kendala yang dihadapi adalah belum semua kelompok yang ada tersebut dapat

dibina oleh Pemerintah, hal tersebut tentunya karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

Kewenangan lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perdagangan adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Upaya yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir meliputi uji tera metrologi sebanyak 20 pelaku usaha setiap tahunnya. Hal lain yang dilakukan terkait dengan perlindungan konsumen adalah kegiatan pengawasan terhadap peredaran barang dan sosialisasi perlindungan konsumen yang bekerjasama dengan LSM terkait dan rutin dilakukan setiap tahunnya.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Nilai Ekpor non migas						
a	Nilai ekspor non migas (US dollar)	US \$	158.122 .444,81	447.639 .743,28	101.299 .431,68	100.201 .610,22	108.921 .201,7
b	Jumlah promosi dan pameran skala regional, nasional, internasional	kali	15	18	18	15	15
c	Jumlah dokumen tentang data dan informasi kebijakan dan peluang pasar luar negeri	dok	3	5	2	-	-
2	Sarana prasarana perdagangan						
a	Jumlah pasar tradisional	unit	11	11	11	12	12
b	Persentase ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat;	%	100	100	100	100	100
d	Persentase perusahaan yang memiliki SIUP (1% per tahun)	%	100	100	100	100	100
3	Perlindungan Konsumen						
a	Jumlah pengujian tera metrologi	kali	20	20	20	20	20
b	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa	kali	22	22	10	10	10
c	Jumlah Sosialisasi perlindungan konsumen	kali	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
4	Pembinaan pelaku usaha						
a	Jumlah pembinaan pelaku usaha bidang perdagangan	Kali	3	4	7	4	4
b	Persentase peningkatan pembinaan pedagang kaki lima	%	80	80	85	90	90

(Sumber: *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kendal, 2016*)

e. Perindustrian

Gambaran perindustrian di Kabupaten Kendal tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan untuk jumlah industri di tahun 2011 sebanyak 17.893 industri menjadi 17.830 industri di tahun 2015. Dari jumlah industri tersebut telah dilakukan paya pengembangan dimana sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai 80%. Bentuk pengembangan dan pembinaan yang dilakukan diantaranya adalah fasilitasi ijin usaha industri kecil melalui P-IRT bagi industri kecil makanan dan minuman. Fasilitasi ini dilaksanakan sejak tahun 2013, dan sampai saat ini sudah 65 industri kecil makanan dan minuman terfasilitasi dan telah memiliki P-IRT. Selain itu juga para pelaku industri kecil dan menengah telah difasilitasi untuk mengikuti pameran promosi produk yang diselenggarakan setiap tahun. Pelaku industri kecil dan menengah yang terfasilitasi untuk mengikuti pameran promosi produk meskipun masih terbatas namun jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hasil yang didapat dari pengembangan industri adalah persentase industri yang elah menerapkan standar industri meningkat 5 % di tahun 2011 sebesar 75% menjadi 80% di tahun 2015.

Hasil lainnya dari upaya pengembangan yang dilakukan menunjukkan IKM yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksinya mencapai 20%. Sedangkan persentase IKM yang menghasilkan jenis produk bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional mencapai 25%. Untuk lebih meningkatkan kapasitas IKM telah dilakukan fasilitasi kerjasama antara IKM dengan industri berskala menengah dan besar dimana di tahun 2014 sudah mencapai 80%. Upaya lainnya adalah dengan

meningkatkan ketrampilan SDM yang ada dengan mengikutsertakan dalam pelatihan ketrampilan yang mencapai 80% dan pemberian bantuan peralatan dimana pada tahun 2013 sudah mencapai 90%.

Terkait dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB, Industri pengolahan memiliki kontribusi yang paling besar pada struktur PDRB Kabupaten Kendal, dimana pada tahun 2013 industri pengolahan Sedangkan jika menurut harga berlaku, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB adalah sebesar 32,84%.

Perkembangan perindustrian di Kabupaten Kendal, khususnya yang termasuk dalam kategori industri mikro, kecil dan menengah oleh Pemerintah Kabupaten Kendal juga disertai dengan beberapa fasilitasi kegiatan pengembangan.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pembentukan kelembagaan kluster IKM melalui pendekatan OVOP (%)	10	11	12	8	8
2	Persentase sentra industri yang telah dikembangkan (8% per tahun)	80	85	85	75	80
3	Jumlah industri (0,2% per tahun)	17.693	17.843	17.641	17.670	17.830
4	Persentase IKM yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%)	18	20	18,5	20	20
5	Persentase IKM yang menghasilkan jenis produk bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional	15	17	20	25	25
6	Persentase industri yang telah menerapkan standar industri (%)	75	75	80	80	80
7	Persentase jejaring kerjasama antara IKM dengan industri berskala menengah dan besar	75	75	80	80	-
8	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan ketrampilan	85	85	95	90	85
9	Persentase usaha IKM yang memperoleh bantuan peralatan	85	85	90	-	-
10	Persentase produk IKM yang dipasarkan	100	100	90	75	80

(Sumber: *Disperindag Kabupaten Kendal, 2016*)

f. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (human rights), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya, serta hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

Kabupaten Kendal melaksanakan urusan ketransmigrasian sesuai dengan amanat pemerintah. Dalam rangka menyiapkan mental calon transmigran, pemerintah Kabupaten Kendal menyelenggarakan pelatihan dasar umum. Hanyan saja memang pelatihan dasar umum tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya dilaksanakan 2 kali yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2013. Pada tahun 2010 peserta pelatihan mencapai 20 orang, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 15 orang.

Sementara itu untuk transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 calon transmigran yang diberangkatkan sebanyak 20 KK, dari sebanyak 18 KK yang mendaftar. Jika dilihat maka, terdapat 2 KK yang tidak terdaftar tetapi ikut diberangkatkan. Tahun 2011 dari 58 KK yang mendaftar transmigran sebanyak 10 KK (17,24%) yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Tahun 2014 dari 28 KK yang mendaftar, hanya sebanyak 4 KK (14,29%) yang diberangkatkan ke lokasi Transmigrasi. Sedangkan tahun 2015 tidak ada pemberangkatan transmigran karena tidak ada pendaftar. Tidak semua KK yang mendaftar diberangkatkan ke lokasi transmigrasi, hanya yang memenuhi persyaratan yang diberangkatkan.

Capaian kinerja Transmigrasi di Kabupaten kendal diukur melalui 2 indikator yaitu Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) dan Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK).

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Indikator Transmigrasi		Satuan	Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)		Orang	0	0	15	0	0
2.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	Orang	10	15	7	4	0
		Jumlah calon transmigran yang mendaftar	Orang	58	52	49	28	0

(Sumber: *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal, Tahun 2016*)

2.3.4 Urusan Penunjang Pembangunan

a. Perencanaan Pembangunan

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan sejak berlakunya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat ke dua undang-undang tersebut pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (lima tahun) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk kegiatan tahunan serta penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Masalah ytang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidak lengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Bappeda Kabupaten Kendal telah memiliki data pendukung perencanaan daerah, berupa Sistem Informasi, buku PDRB, buku Kabupaten Kendal Dalam Angka, buku Kecamatan dalam angka, buku indek pembangunan manusia, analisis indeks pembangunan dan indeks kesejahteraan rakyat, analisis hasil sensus pertanuian 2013, Dokumen Evaluasi Kegiatan dan berbagai dokumen yang dapat menggambarkan profil masing-masing urusan kewenangan, serta dokumen-dokumen lainnya.

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP. No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan harus melibatkan representasi dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik SKPD, tokoh masyarakat/agama, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi. Pelibatan segenap pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD. Demikian pula, dalam proses menyusun dokumen perencanaan yang bersifat sektoral, antara lain perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, kepariwisataan, tata ruang wilayah, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan gender, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan, agar dokumen perencanaan tersebut menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis.

Tabel 2.69
Jenis Dokumen Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Jumlah Produk				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan data perencanaan Pembangunan daerah (dokumen)	dokumen	2	5	5	6	8
2	Jumlah hasil kajian/studi yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	dokumen	5	15	16	5	5

No	Indikator	Satuan	Jumlah Produk				
			2011	2012	2013	2014	2015
3	Tingkat kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi (%)	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian internal	dokumen	3	3	5	5	5
5	Jumlah koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah	kegiatan	40	57	46	58	53

(Sumber: *Bappeda Kab. Kendal Tahun 2016*)

b. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2011–2015 mengalami perkembangan yang cukup baik. Apabila dilihat dari beberapa indikator yang ada menunjukkan adanya capaian yang terus meningkat.

Kondisi keuangan daerah di Kabupaten Kendal relatif cukup baik, total pendapatan di Kabupaten Kendal mampu digunakan untuk membiayai belanja. Rasio realisasi belanja daerah terhadap Total pendapatan menunjukkan bahwa realisasi belanja masih di bawah 100%, yang artinya terjadi penghematan dalam belanja atau terjadi surplus dalam APBD. Dari tahun 2011–2015 rasio realisasi belanja mengalami penurunan dari 94% tahun 2011 menjadi 85% pada tahun 2015. Selain itu raso belanja Pegawai terhadap APB cukup baik yaitu 53% pada tahun 2015, kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan alokasi anggaran untuk belanja langsung yang lebih ditujukan kepada masyarakat cukup besar. Pengelolaan keuangan Kabupaten Kendal pada tahun 2015 telah mencapai penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2011–2015. Aspek positif dari besaran SILPA tersebut adalah dalam pelaksanaan kegiatan

atau APBD telah terjadi penghematan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah namun tidak mengurangi kualitas pekerjaan atau kegiatan. SILPA juga dapat berarti bahwa Perangkat Daerah belum berkinerja secara optimal dan ada kegiatan yang belum dapat atau tidak dapat dilaksanakan.

Capaian yang mencerminkan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan yang lain adalah meningkatnya proporsi dan nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan capaian meningkat dari tahun 2011–2015. Pada tahun 2011 proporsi hanya sebesar 8% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 11%, bahkan pada tahun 2014 mencapai 14%. Proporsi PAD terhadap potensi PAD yang ada juga mencerminkan kinerja yang bagus yaitu capainnya mencapai 105% pada tahun 2015, proporsi PAD terhadap potensi yang ada dari tahun 2011–2015 fluktuatif. Proporsi tertinggi dicapai tahun 2014 yaitu sebesar 130%. Artinya kemampuan daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah cukup besar.

Gambaran capaian indikator pengelolaan keuangan daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Belanja Pegawai terhadap APBD	54,89%	60,45%	61,31%	57,44%	50,71%
2.	Belanja Langsung terhadap total APBD	43,39%	38,02%	38,60%	41,57%	37,92%
3	Rasio belanja modal terhadap APBD	18,02%	16,54%	12,23%	18,50%	16,67%
4.	Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	7%	11%	16%	20%	20%
5.	Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan	5%	12%	18%	23%	20%
6.	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	94%	92%	85%	81%	85%
7.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	8%	10%	8%	14%	11%
8.	Rasio realisasi PAD terhadap <u>potensi PAD</u>	106%	125%	120%	130%	105%
9.	Peningkatan PAD	104%	109%	119%	58%	11%
10.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal 2016)

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah PNS Kota di Kabupaten Kendal tahun 2015 sebanyak 10.453 orang. Jumlah tersebut melayani kurang lebih 951.223 penduduk Kabupaten Kendal.

Jika dilihat dari peningkatan kapasitas, dapat dilihat bahwa aparatur PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan mencapai 100%. Begitu pula dengan PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional yang difasilitasi oleh BKD Kabupaten Kendal mencapai 100%.

Terkait dengan pengisian jabatan, yang masih menjadi permasalahan adalah belum terpenuhinya persentase pengisian jabatan pengawas dan pelaksana. Masing-masing baru tercapai 88,86% dan 57,14%. Adapun untuk jabatan pimpinan tinggi dan adminstrator sudah tercapai 100%.

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Bidang Kepegawaian
di Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan pada tahun berjalan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Teknis / Fungsional yang difasilitasi BKD Kab. Kendal pada tahun berjalan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase struktur jabatan pimpinan tinggi yang terisi	%		100	91,42	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
4	Persentase struktur jabatan administrator yang terisi	%		100	100	100	100
5	Persentase struktur jabatan pengawas yang terisi	%		89,85	88,29	91,02	88,86
6	Persentase struktur jabatan pelaksana yang terisi	%		68,25	61,90	60,31	57,14
7	Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	Jenis	2	3	4	4	6
8	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	100	100	100	100	100

(Sumber: *BKD Kab. Kendal Tahun 2016*)

d. Fungsi Lain

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adaalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap semua obyek pemeriksaan di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk kategori. Indikator yang menunjukkan kinerja Inspektorat berdasarkan hasil pengawasan

dan pengendalian terhadap obyek pemeriksaan SKPD adalah besaran rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti dan banyaknya LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan. Kinerja tindaklanjut hasil temuan BPK di Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, rasio tercapai sebesar 61% meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu pada LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan peningkatannya signifikan yang mencapai 146 LHP pada tahun 2015, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 91 LHP. Kinerja Inspektorat Kabupaten Kendal dalam lima tahun terakhir ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Inspektorat

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	45	50	64	64	61
2	Jumlah LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan	LHP	92	75	90	91	146

(Sumber : *Inspektorat Kabupaten Kendal, 2016*)

Penyelenggaraan pemerintahan umum dalam era otonomi daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas KKN dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif berdasar pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan profesionalisme aparatur dan citra kelembagaan Perangkat Daerah (PD) yang baik.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal semakin ditingkatkan melalui pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi. Hal ini merupakan komitmen dalam penataan sistem manajemen melalui website www.kendalkab.go.id yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas

dan responsibilitas kinerja, telah dibangun beberapa sistem informasi manajemen daerah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta sistem informasi penunjang lainnya.

Beberapa indikator kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum di Kabupaten Kendal dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Pemerintahan Umum

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun	buah	-	1	4	2	1
2	Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan peraturan perundangan tentang penataan kelembagaan	unit	1	70	0	0	1
3	% SKPD yang bernilai IKM baik	Unit	20	6	1	1	1
		Unit	26	26	26	26	26
4	% Pelaksanaan Urusan Sesuai SPM yang telah diterbitkan	%	0	0	14	1	0
5	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Kendal komponen pelaporan kinerja	skor	6,5	6,74	8,69	8,1	8,15

(Sumber : *Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, 2016*)

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

a. Panjang Jalan

Kabupaten Kendal memiliki luas wialayah 1.002,23 Km² dan terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 770,993 km (jalan kewenangan Kabupaten Kendal). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2015 sebesar 37,10% dalam kondisi baik dan sisanya 62,9% dalam kondisi rusak.

b. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa bagian utara. Tersedia 4 terminal di wilayah Kabupaten Kendal yang

melayani transportasi baik dalam kota maupun keluar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 penumpang angkutan umum sebanyak 3.433.256 orang, meningkat menjadi 4.742.465 orang pada tahun 2015.

c. Ketaatan Terhadap RTRW

Saat ini Kabupaten Kendal telah memiliki peraturan mengenai tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal. Tingkat ketaatan terhadap Perda RTRW juga cukup baik, tercatat sampai tahun 2015 hanya terdapat 4 kasus pengaduan terkait pelanggaran tata ruang dan semuanya dapat diatasi oleh instansi yang berwenang.

d. Luas Wilayah Industri

Luas kawasan industri di Kabupaten Kendal sesuai dengan apa yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal adalah 1.200 hektar. Adapun pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kendal terletak di Kecamatan Kaliwungu. Sejak tahun 2014 Kabupaten Kendal mulai mengembangkan kawasan industri terpadu yang terletak di Kecamatan Kaliwungu. Lahan yang direncanakan untuk pengembangan awal adalah 2.770 ha.

e. Luas Wilayah Kebanjiran

Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia, namun jika dilihat dari kawasan yang rawan terkena bencana banjir dapat diketahui ternyata terdapat 9 wilayah kecamatan yang rawan terkena bencana banjir. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kendal, Patebon, Ngampel, Kaliwungu, Brangsong, Cepiring, Kangkung, Rowosari, dan Weleri. Luas wilayah yang berpotensi terkena banjir di Kabupaten Kendal mencapai 55.600,21 Ha.

f. Luas Wilayah Kekeringan

Selain banjir, Kabupaten Kendal juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah Patebon, Kaliwungu, Kaliwungu

selatan, Ngampel, Pegandon, Brangsong, Gemuh, Cepiring. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Luas daerah yang berpotensi terkena bencana kekeringan adalah 99.972,78 Ha.

g. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal menetapkan bahwa wilayah perkotaan terbagi atas 3 pusat kegiatan. Pertama adalah Pusat kegiatan nasional yang selanjutnya di sebut sebagi PKN adalah kawasan perkotaaan yang melayani kegiatan skala nasional. Kedua Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Dan yang ketiga adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Kabupaten Kendal sebagai Pusat Kegiatan Nasional bersama dengan Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur). Wilayah yang termasuk dalam pusat kegiatan lokal adalah Kendal, Weleri, Boja, Kaliwungu, dan Sukorejo. Sedangkan pusat pelayanan kawasan adalah Kecamatan Pegandon.

h. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Jumlah restoran yang ada di Kabupaten Kendal dari tahun 2010 sampai tahun 2015 menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 restoran di Kabupaten Kendal berjumlah 70 buah, dan di tahun 2015 meningkat menjadi 88 buah.

i. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel yang ada di Kabupaten Kendal total berjumlah 25 buah. Sedangkan dilihat dari kelasnya, 23 buah hotel tersebut merupakan hotel kelas melati dan 2 hotel bintang. Salah satu penyebab kurang berkembangnya perhotelan di Kabupaten Kendal adalah karena letak geografisnya yang

berdekatan dengan Kota Semarang. Banyak orang yang berkunjung ke Kabupaten Kendal lebih memilih untuk menginap di Kota Semarang karena fasilitasnya lebih lengkap.

j. Pelayanan Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut karena indikator ini menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. Tahun 2010 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Kendal sebesar 60%, kemudian pada tahun 2015 pencapaiannya sudah sampai pada angka 75%.

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Kendal selama 5 tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2012, namun dari 2013 sampai 2014 justru mengalami kenaikan. Tahun 2010 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 293, dan tahun 2015 sebanyak 150 kasus.

Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi di wilayah Kabupaten Kendal adalah pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Data terakhir menunjukkan kasus pencurian yang terjadi sebanyak 80 kasus, sedangkan penyalahgunaan narkoba sebanyak 31 kasus.

b. Kemudahan perijinan

Pelayanan perijinan di Kabupaten Kendal saat ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi.

Jenis perijinan yang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi / Keterangan Lokasi, Izin Gangguan, Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB), Izin Trayek, Izin Kartu Pengawasan Angkutan Dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin

Usaha Industri (SIUI), Tanda Daftar Gudang (TDP), Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Kepariwisata / Dan Pengelolaan Obyek Wisata, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), dan Izin Usaha Toko Modern.

Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan bervariasi, mulai dari 3 hari sampai 14 hari. Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.74
Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya

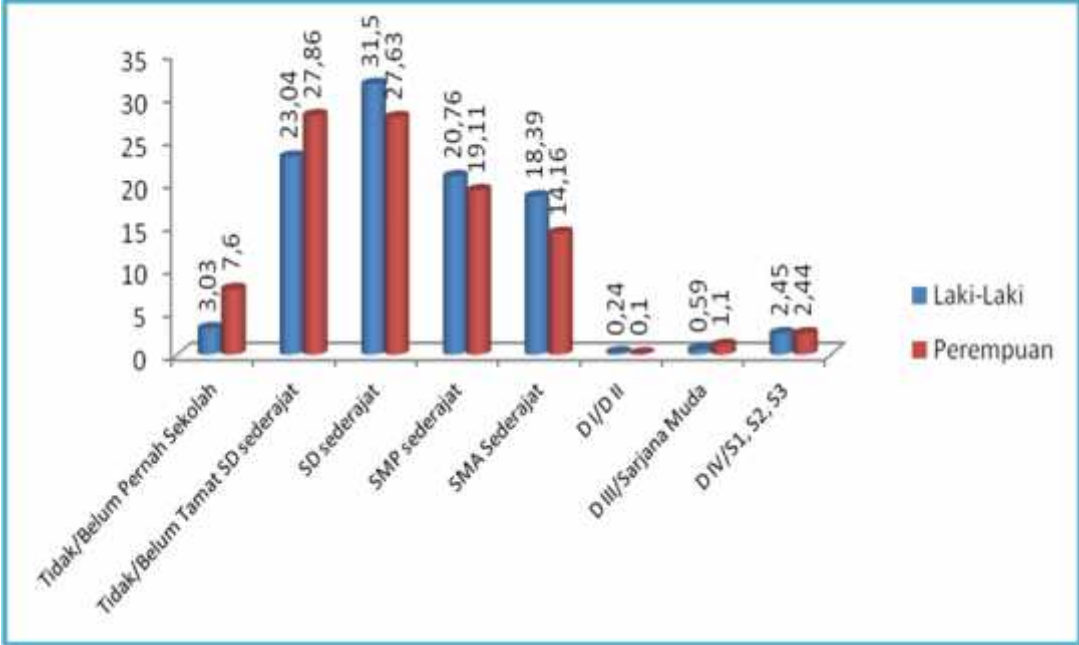
No	Jenis Ijin	Lama Proses Ijin
1.	Izin Usaha Kepariwisata	12 hari
2.	Izin Gangguan HO	14 hari
3.	Izin Kartu Pengawasan Angkutan dengan Kendaraan Umum	3 hari
4.	Izin Lokasi/Keterangan Lokasi	14 hari
5.	Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB)	14 hari
6.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	14 hari
7.	Izin Reklame	14 hari
8.	Izin trayek	14 hari
9.	Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum	5 hari
10.	Izin Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum	5 hari
11.	Persetujuan / Izin Prinsip	14 hari
12.	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	12 hari
13.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari
14.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	12 hari
15.	Tanda Daftar Industri (TDI)	7 hari
16.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	7 hari

(Sumber: *BPMPT Kabupaten Kendal, 2015*)

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

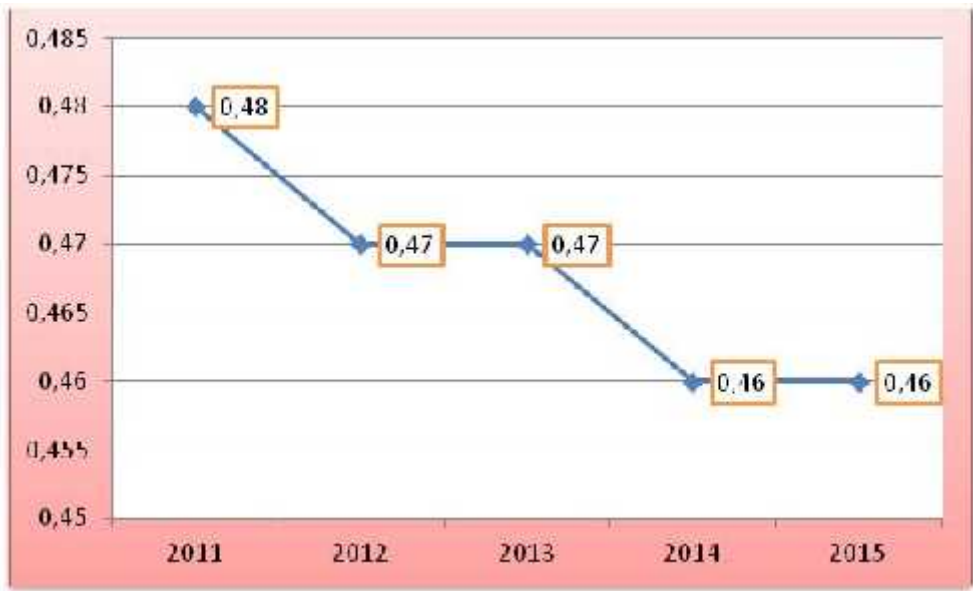


Gambar 2.34.
Persentase Penduduk Kabupaten Kendal Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014
(Sumber: *Kendal dalam Angka 2015*)

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kendal berpendidikan SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk yang tidak/belum tamat SD, berikutnya adalah kelompok lulusan SMP sederajat dan kelompok lulusan SMA sederajat.

b. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kendal dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan. Dari 0,48 pada tahun 2011 menjadi 0,46 di tahun 2015. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Kendal menanggung 46 orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41).



Gambar 2.35.
Angka Ketergantungan di Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015
(Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2016)

2.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja RPJMD Periode Sebelumnya

Rekapitulasi capaian kinerja RPJMD Kabupaten Kendal periode 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.75
Rekapitulasi Capaian Kinerja RPJMD Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Pendidikan			
% anak usia 4-6 tahun mengikuti progrm TK/RA	100	73	Akan Tercapai
% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	50	140	Tercapai
% TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri	90	50	Tidak tercapai
Jumlah anak usia 0-4 tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat	40	130	Tercapai
Jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal.	50	40	Tidak Tercapai
% APK SD/MI	100	107	Tercapai
% APM SD/MI	98	95	Akan Tercapai
% APK SMP/MTs	100	101	Tercapai
% APM SMP/MTs	80	107	Tercapai
% Angka Putus sekolah SD	0,02	390	Tercapai
% ruang kelas SD/MI sesuai standar	80	104	Tercapai
% SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	35	41	Tidak Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	70	83	Akan Tercapai
% SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	74	99	Akan Tercapai
% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	100	78	Akan Tercapai
% Angka kelulusan UASBN	99	101	Tercapai
% lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	99	100	Tercapai
% Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,22	127	Tercapai
% Angka kelulusan Ujian nasional SMP/MTs	99	101	Tercapai
% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan %	90	98	Tercapai
% SD memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya	10	50	Tidak Tercapai
% APK SMA/MA/SMK	75	104	Tercapai
% APM SMA/SMK/MA	55	120	Tercapai
% angka putus sekolah	0,35	194	Tercapai
% Kelulusan UN SMA/MA/SMK	99	101	Tercapai
% lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya	50	86	Akan Tercapai
% penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis	100	98	Akan Tercapai
Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun (%)	0	0	Tidak Tercapai
Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus (unit)	1	100	Tercapai
% penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	100	95	Akan Tercapai
% lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	60	120	Tercapai
% tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	70	111	Tercapai
% pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	80	50	Tidak Tercapai
Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yg diperbarui secara terus menerus.	1	100	Tercapai
% penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan /kelompok belajarusaha/magang	40	83	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
% lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	100	93	Akan Tercapai
% lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	80	75	Akan Tercapai
% lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	50	130	Tercapai
% tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan	100	80	Akan Tercapai
% lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/ magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	75	100	Tercapai
Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/ magang yang diperbarui secara terus menerus (unit)	1	100	Tercapai
% penduduk difable menjadi peserta didik Sekolah LB	10	67	Akan Tercapai
% angka kelulusan SLB	99	100	Tercapai
% guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	75	100	Tercapai
% SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	50	130	Tercapai
Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus (unit)	1	100	Tercapai
% guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	75	52	Tidak Tercapai
% guru SD yang sertifikasi	100	47	Tidak Tercapai
% guru SD/MI layak mengajar	100	65	Tidak Tercapai
% guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	100	87	Akan Tercapai
% guru SMP/MTs yang sertifikasi	100	47	Tidak Tercapai
% guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi	100	61	Tidak Tercapai
% Guru SMA/SMK/MA layak mengajar	100	93	Akan Tercapai
% Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik.	100	90	Akan Tercapai
% SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).	100	30	Tidak Tercapai
% SMP/MTs menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).	100	90	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
% SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik.	100	90	Akan Tercapai
Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000.	100	21	Tidak Tercapai
% Perguruan tinggi bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan	100%	100	Tercapai
Kesehatan			
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 (%)	95,00	105	Tercapai
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	80	115	Tercapai
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	90,00	106	Tercapai
Cakupan pelayanan nifas (%)	90	105	Tercapai
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	80	82	Akan tercapai
Cakupan kunjungan bayi (%)	90	108	Tercapai
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100	Tercapai
Cakupan pelayanan anak balita (%)	90	113	Tercapai
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	100	99	Akan Tercapai
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	Tercapai
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100	100	Tercapai
Cakupan peserta KB aktif (%)	70,00	117	Tercapai
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (%)			
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate /100.000 pddk < 15 th (%)	≥2	300	Tercapai
Penemuan penderita pneumonia balita (%)	100	171	Tercapai
Penemuan pasien baru TB BTA positif (%)	100	50	Tidak Tercapai
Penderita DBD yang ditangani (%)	100	100	Tercapai
Penemuan penderita diare (%)	100	127	Tercapai
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (%)	100	100	Tercapai
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	Tercapai
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten (%)	16,67	600	Tercapai
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Cakupan desa Siaga aktif (%)	80	125	Tercapai
Lingkungan Hidup			
Persentase usaha/kegiatan yg memenuhi baku mutu air	100	74,35	Akan Tercapai
Persentase usaha/kegiatan yg memenuhi baku mutu udara	100	78,00	Akan Tercapai
Persentase tindaklanjut aduan kasus lingkungan	100	62,50	Akan Tercapai
Berkurangnya luas lahan kritis (300 Ha)	60	83,33	Akan Tercapai
Berkurangnya luas kerusakan pesisir (200 Ha)	50	44,75	Tidak Tercapai
Jumlah Kecamatan yg disosialisasi lingkungan (20 Kecamatan)	4 Kec	160,00	Tercapai
Jumlah Data/ informasi lingkungan yg tersedia (1 dokumen SLHD pertahun)	1	80,00	Akan Tercapai
Pekerjaan Umum			
Konservasi Rehabilitasi Kawasan Lindung di Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kendal	50	44,0	Tidak Tercapai
Efisiensi penggunaan air irigasi di musim kemarau	75	89,3	Akan Tercapai
Revitalisasi jaringan irigasi	70	95,7	Akan Tercapai
Peningkatan peran serta petani/masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	100	100,0	Tercapai
Pengendalian bahaya banjir	100	93,0	Tercapai
Peningkatan Jalan Aspal (%)	15	23,3	Tidak Tercapai
Perbaikan Jalan (%)	15	3,3	Tidak Tercapai
Peningkatan jalan poros desa (%)	80	0,0	Tidak Tercapai
Peningkatan jumlah ruas jalan berkondisi baik	90	35,3	Tidak Tercapai
Peningkatan jumlah unit jembatan berkondisi baik	95	3,0	Tidak Tercapai
Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan	30	66,0	Akan Tercapai
Penetapan kawasan Strategis Perkotaan	4	500,0	Tercapai
Penetapan Kawasan Pusat Pertumbuhan Perdeaan	16	125,0	Tercapai
Penyusunan SPAM Perdesaan	10	800	
Peningkatan Kapasitas Pelayanan PDAM di Kawasan Perkotaan, sesuai Target MDG's	85	85,88	Akan Tercapai
Pembangunan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat / On Site	10	60,0	Tidak Tercapai
Pembangunan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat	10	60,0	Tidak Tercapai
Penurunan Jumlah Timbulan Sampah sebanyak 20%	197,8	136,5	Tercapai
Prosentase Jumlah Timbulan Sampah Terangkut ke TPA	100%	83,0	Akan Tercapai
Fasilitasi Program Pengelolaan & Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat Terpadu dgn Konsep	10	40,0	Tidak Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
3R Skala Kawasan Permukiman Perkotaan			
Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase Primer	Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase Primer pada 5 Sungai / Sal Drainase: Kali Aji / Slemban, Kali Waridin, Kali Glodog, Kali Bloring, Kali Kendal sepanjang 98 Km	62,24	Tidak Tercapai
Penyusunan RP4D	20 Kec	100,0	Tercapai
Penetapan Kasiba Lisiba	2	100	Tercapai
Penyusunan Data Base Bangunan & Lingkungan	1	100,0	Tercapai
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran	1 dokumen yang dilengkapi dengan 1 pos Induk Pemadam Kebakaran dan 3 Pos Pemadam Kebakaran	100,0	Tercapai
Tata Ruang			
Tersusunnya Dokumen RUTRK-RDTRK Tiap Kecamatan di wilayah Kab. Kendal	20 Kecamatan	95	Akan Tercapai
Tersusunnya Dokumen RTRK Kawasan Strategis Tiap Kecamatan	25 Dokumen RTRK pada 5 Kawasan Strategis di wilayah Kecamatan	48	Tidak Tercapai
Tersusunnya Dokumen RTBL Kawasan Pengembangan tiap Kecamatan	10 Kawasan Pengembangan di 5 Wilayah Kecamatan	130	Tercapai
Tersusunnya Dokumen Rencana Program Pembangunan Pemanfaatan Ruang dari masing-masing Satuan perangkat kerja Daerah (SKPD).	50 Dokumen Program Pembangunan Pemanfaatan Ruang Masing-masing 5 Dokumen Program dari	110	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
	10 SKPD di Kabupaten Kendal.		
Tercapainya Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang di Masing-masing Wilayah Kelurahan di 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal.	285 kegiatan Sosialisasi di Wilayah Desa / Kelurahan di 20 Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kendal.	70	Akan Tercapai
Perencanaan Pembangunan			
Tersedianya dokumen statistik (unit)	12	300	Tercapai
Tersedianya dokumen kajian bidang penelitian (unit)	3	166	Tercapai
MOU kerjasama antar wilayah dan lembaga (unit)	5	120	Tercapai
Terlayaninya pelaksanaan program KKN PTdan akademi di Kab Kendal	18	100	Tercapai
Teranganinya berbagai masalah perbatasan antar daerah	4	100	Tercapai
Terwujudnya koordinasi penataan ruang di kab kendal	4	100	Tercapai
Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh	3	100	Tercapai
Jumlah desa yang didampingi	20	470	Tercapai
Jumlah aparatur perencana yang mengikuti bintek di bidang perencanaan (10 orang)	2	3300	Tercapai
Jumlah aparatur perencana yang dapat menyusun dokumen perencanaan dengan benar sesuai dengan tupoksinya (10 orang)	2	100	Tercapai
Jumlah fungsional perencana (11 orang)	2	0	Tidak Tercapai
Terlaksananya musrenbang	2	83	Akan Tercapai
Tersusunnya RKPD	1	100	Tercapai
Tersusunnya KUA PPAS	2	100	Tercapai
Tersusunnya RPJMDes di semua desa	1	100	Tercapai
Tersusunnya dokumen perencanaan bidang ekonomi	4	125	Tercapai
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi	4	125	Tercapai
Tersusunnya dokumen perencanaan bidang sosbud	42	95	Akan Tercapai
Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sda	3	233	Tercapai
Tersusunnya dokumen daerah rawan bencana	3	67	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Terealisasinya bantuan peningkatan kualitas Permukiman (paket)	6 paket	83	Akan tercapai
Tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah Daerah 25 % dari kegiatan program.	700	100	Tercapai
Tersusunnya peraturan tentang bangunan dan Gedung	5 unit	40	Tidak Tercapai
Tersusunnya Program peningkatan kualitas permukiman	5 unit	80	Akan Tercapai
Pemuda dan Olahraga			
Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program (%)	100	100	Tercapai
Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan (%)	100	100	Tercapai
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (%)	100	100	Tercapai
Jumlah kegiatan aksi bhakti social kepemudaan	100	100	Tercapai
Jumlah kegiatan Fasilitasi temu wicara organisasi kepemudaan (%)	100	100	Tercapai
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda (%)	100	100	Tercapai
Jumlah kegiatan fasilitasi lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda (orang)	300	100	Tercapai
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kader pemuda pelopor keamanan lingkungan (orang)	75	100	Tercapai
Jumlah kegiatan fasilitasi pameran prestasi hasil karya pemuda (keg)	150	113	Tercapai
Jumlah prestasi cabang yang diraih baik regional, nasional maupun internasional	30	100	Tercapai
Penanaman Modal			
Jumlah kegiatan promosi investasi yang diikuti/ dilaksanakan.	20	115,0	Tercapai
Persentase ketersediaan layanan investasi online sesuai perkembangan teknologi.	75	86,7	Akan tercapai
Jumlah jangkauan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan investasi.	185	93,5	Akan tercapai
Jumlah seluruh perijinan yang diterbitkan.	24,4	93668,0	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Jumlah pengusaha/perorangan yang mendapatkan layanan/fasilitas untuk merencanakan berinvestasi baru, perluasan dan atau pengembangan.	500	139,6	Tercapai
Jumlah pengusaha/perorangan yang mendapatkan persetujuan berinvestasi baru, perluasan dan atau pengembangan.	400	139,5	Tercapai
Jumlah pengusaha/perorangan yang merealisasikan investasi baru, perluasan dan atau pengembangan.	380	126,3	Tercapai
Nilai realisasi investasi (swasta) baru, perluasan dan atau pengembangan yang masuk di Kabupaten Kendal.	5 T	118,5	Tercapai
Jumlah kegiatan kajian potensi, peluang dan layanan investasi yang dilaksanakan.	8	87,5	Akan tercapai
Jumlah dokumen perkembangan investasi Kabupaten Kendal yang disusun.	5	80,0	Akan tercapai
Koperasi dan UMKM			
Jumlah koperasi yang berbadan hukum (unit)	536 unit	98,51	Akan Tercapai
Persentase UMKM yang mempunyai SIUP, TDP dan lainnya (%)	75%	94,67	Akan Tercapai
Jumlah Koperasi yang mengakses kredit/pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainnya (unit)	115 unit	95,65	Akan Tercapai
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank atau lembaga keuangan lainnya (unit)	160 unit	96,88	Akan Tercapai
Rata-rata jumlah wirausaha baru	25 UMKM	100,00	Tercapai
Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima bantuan teknologi tepat guna (unit)	250 unit	84,00	Akan Tercapai
Jumlah produk unggulan UMKM (unit)	11 unit	90,91	Akan Tercapai
Jumlah koperasi aktif (unit)	390 unit	98,72	Akan Tercapai
Persentase koperasi yang melaksanakan RAT (%)	85%	98,82	Akan Tercapai
Persentase koperasi yang sehat (%)	67%	97,01	Akan Tercapai
Rata-rata persentase pendapatan retribusi pasar daerah (%)	2%	100,00	Tercapai
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
Meningkatnya persentase kepemilikan KTP (%)	100	94,15	Akan tercapai
Meningkatnya persentase kepemilikan KK (%)	100	100	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Meningkatnya persentase kepemilikan akte kelahiran (%)	100	69	Akan tercapai
Meningkatnya persentase kepemilikan akte perkawinan (%)	100	83,95	Akan tercapai
Program peningkatan kualitas Ketenagakerjaan			
telah dibangunnya BLK (unit)	-	100	Tercapai
Adanya bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja (pelatihan)	8	500	Tercapai
Adanya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (orang)	440	105	Tercapai
	200		
Adanya pemeliharaan BLK (kali)	2	100	Tercapai
Adanya rehabilitasi sarana dan prasarana BLK (kali)	1	600	Tercapai
Pemberian kerja Darurat (lokasi)	15	133	Tercapai
Tersusunnya informasi bursa kerja (bulan)	12	100	Tercapai
Penyebaran informasi tenaga kerja (bulan)	12	100	Tercapai
adanya kerjasama LPKS	42	100	Tercapai
Pembinaan LPKS	42	100	Tercapai
Bantuan kepada LPKS dan BBK	42	100	Tercapai
Lembaga penyalur ketenagakerjaan terkendali terfasilitasi	125	8	Tidak Tercapai
Penyelesaian hubungan industrial terfasilitasi	2	150	Tercapai
Peraturan ketenagakerjaan tersosialisasi	5	80	Akan Tercapai
Meningkatnya pengawasan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	12 bulan	100	Tercapai
Survey KHL terlaksana, UMK tersusun	156 Vol	145	Tercapai
Berlakunya UMK di perusahaan terawasi	65	246	Tercapai
Terlaksananya TOT pengupahan	70	0	Tidak Tercapai
Adanya pembekalan akhir CTKI dan TKI	1	100	Tercapai
Masalah ketenagakerjaan terpecahkan	4	100	Tercapai
Ketahanan Pangan			
Ketersediaan bahan pangan khususnya beras (%)	0,54	266,7	Tercapai
Ketersediaan bahan pangan khusus konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (jagung)		100	Tercapai
meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat sebesar 5,10% per tahun dan tercapainya konsumsi protein hewani sebesar 6,96 gram/kapita/hari pada tahun 2010 (%)	6000%	145,7	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Jumlah lumbung pangan desa (unit)	8 unit (0,09%)	387,5	Tercapai
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Jumlah kelompok perempuan yang terlatih dalam upaya peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup (unit).	25	960	Tercapai
Jumlah kelompok PUG dan perlindungan anak, dengan fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)	12	300	Tercapai
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan anak dalam penanganan ABH, ESKA dan AIM DAMAI (unit)	87	115	Tercapai
Peningkatan kapasitas kelembagaan forum anak dalam mensosialisasikan hak-hak anak (%)	80	125	Tercapai
Penyediaan baselinedata profil anak sebagai indikator program kegiatan dan permasalahan anak (%)	80	125	Tercapai
Program aksi Kabupaten Layak anak dengan mengacu Rencana Aksi Daerah KLA (%)	85	118	Tercapai
Diketahunya UU 23 / 2004, UU No. 21 / 2007; UU No. 23 / 2002 Oleh masyarakat	1790	84	Akan Tercapai
Pelatihan konseling korban bagi tim PPT PKPA kecamatan dan Kabupaten (%)	70	100	Tercapai
Terlaksananya pelatihan manajemen kasus berbasis gender dan anak (%)	50	200	Tercapai
Meningkatnya koordinasi tim PPT PKPA antara lain penanganan korban kekerasan (%)	100	100	Tercapai
Fasilitasi penyediaan shelter bagi korban kekerasan (%)	90	111	Tercapai
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah PT PPO (%)	100	100	Tercapai
Sistim pencatatan dan pelaporan korban kekerasan terintegrasi	50	200	Tercapai
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
Menurunnya Persentase Unmetneed (%)	5,00	45	Tidak Tercapai
TFR (%)	2,10	101	Tercapai
Meningkatnya persentase peserta KB Baru (%)	100	80	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Meningkatnya persentase peserta KB aktif (%)	85	119	Tercapai
Meningkatnya persentase peran laki-laki dalam ber KB (%)	10	10	Tidak Tercapai
Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (%)	20	41	Tidak Tercapai
Menurunnya persentase kegagalan penggunaan alat kontrasepsi (%)	0,00	100	Tercapai
Perhubungan			
Meningkatnya Jumlah Terminal Tipe C di Kabupaten Kendal (buah)	5 Buah (Weleri, Boja, Sukorejo, Cepiring, Kaliwungu)	140	Tercapai
Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (kegiatan)	1 Kegiatan (82 Ruas Jalan)	100	Tercapai
Peningkatan Prasarana Sarana untuk memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Bus AKDP Yang Masuk Terminal			
Datang	4.618.402	88	Akan Tercapai
Turun	3.819.390	90	Akan Tercapai
Naik	3.745.735	95	Akan Tercapai
Berangkat	3.383.213	98	Akan Tercapai
Peningkatan Prasarana Sarana untuk memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Penumpang di Terminal Boja			
Penumpang Naik (orang)	304	300	Akan tercapai
Penumpang Turun (orang)	272	205	Akan tercapai
Peningkatan Prasarana Sarana untuk memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Penumpang di Terminal Weleri			
Penumpang Naik (orang)	2.175.790	97	Akan Tercapai
Penumpang Turun (orang)	2.448.369	95	Akan Tercapai
Peningkatan Prasarana Sarana untuk memfasilitasi Meningkatnya Aktivitas Penumpang di Terminal Sukorejo			
Penumpang Naik (orang)	1.235.263	149	Tercapai
Penumpang Turun (orang)	1,386	118698	Tercapai
Peningkatan Prasarana Sarana Jalan untuk memfasilitasi Meningkatnya Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)	274,891	77	Akan Tercapai
Meningkatnya Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor (buah)	103,817	94	Akan Tercapai
Peningkatan Keselamatan LLAJ (kasus kecelakaan)	133	141	Tercapai
Peningkatan SDM perhubungan (orang)	100	90	Akan Tercapai
Peningkatan Pelayanan Angkutan (kendaraan)	1,165	102	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Komunikasi dan Informatika			
Perdesaan yang mendapat pelayanan akses telekomunikasi (%)	80	97,025	Akan tercapai
Perdesaan yang mendapat pelayanan akses internet (%)	80	86,1	Akan tercapai
Diklat/Bintek SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika (%)	80	87,925	Akan tercapai
Pertanahan			
Pelaksanaan sosialisasi sistem pendafftran (kegiatan)	48	104,17	Tercapai
Meningkatnya jumlah tanah yang disertifikatkan (%)	12,5	120,00	Tercapai
Tingkat kualitas pelayanan administrasi pertanahan (%)	100	95,00	Tercapai
Tertib penetapan arahan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya (% luas lahan)	80	106,25	Tercapai
Tertib administrasi pertanahan (%)	100	98,00	Akan Tercapai
Keamanan, dan Ketertiban Umum			
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (%)	87	83	Akan Tercapai
Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtrantibmas) dan pencegahan tidak kriminal (%)	95	105	Tercapai
Pelatihan dan sarasehan tentang wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda (orang)	450	87	Akan Tercapai
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan (orang)	140	193	Tercapai
Peningkatan upaya pencegahan dan pemberatasan penyakit masyarakat (pekat) (%)	100	100	Tercapai
Peningkatan dan kegiatan pendidikan politik masyarakat (orang)	200	1233	Tercapai
Upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (orang)	115	100	Tercapai
Otonomi Daerah			
Jumlah dokumen perencanaan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (buah)	8	175	Tercapai
Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah melaluipeningkatan pendidikan aparat, diklat dan bintek :			

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal lanjut (S1; S2 dan profesi)	170	188	Tercapai
Pelaksanaan diklat aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur :			
· PNS yang mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan I dan II (orang) (%)	100	100	Tercapai
· PNS yang mengikuti diklat pra jabatan untuk golongan III dan IV (orang). (%)	100	100	Tercapai
· Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan (%)	100	102	Tercapai
Penyelenggaraan Ujian Dinas KP dan Ujian KP PI	100	489	Tercapai
Penyelenggaraan Diklat Kesamaptaan CPNS	660	136	Tercapai
Tes PCPA (Position Competencies Assisment Program) bagi Calon Sekda/ Eselon II	7	257,14	Tercapai
Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Praja IPDN	2	137,5	Tercapai
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.			
Pembinaan Disiplin Pegawai (%)	100%	76	Akan Tercapai
Jumlah Penyelesaian kasus-kasus kepegawaian dan indisipliner	35	677	Tercapai
Meningkatnya Kinerja Baperjakat	18	153	Tercapai
Evaluasi Kinerja Pejabat struktural (%)	100%	100	Tercapai
Pengangkatan/pelantikan dalam jabatan (%)	100%	100	Tercapai
Pengadaan CPNS Daerah	350	167	Tercapai
Asistensi Penyusunan Formasi PNSD (%)	100%	100	Tercapai
Penerbitan SK KP, PMK, CPNS menjadi PNS, Pensiun dan Mutasi (%)	100%	100	Tercapai
Terselesaikannya Penataan NIP	100%	100	Tercapai
Terprosesnya Ijin Belajar dan penggunaan gelar PNS	760	422	Tercapai
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kepegawaian (%)	100%	100	Tercapai
Pemberian Jaminan Keselamatan kerja :			
Pemberian Jaminan Keselamatan kerja beresiko tinggi.	450	292	Tercapai
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai			
Santunan Kematian bagi PTT Kab. Kendal	30	87	Akan Tercapai
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian :			
Penyelenggaraan Rakorbid Kepegawaian (%)	100%	100	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Pengelolaan Administrasi PTT	2271	348	Tercapai
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepegawaian	14	421	Tercapai
Dokumentasi dan Statistik Pegawai	11796	84	Akan Tercapai
Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data PNS/CPNS (%)	100%	100	Tercapai
Pengurusan Karis,Karsu,Karpeg,Kartu Peserta Taspen, KGB, Satya Lencana Karya Satya dan Taperum	4297	131	Tercapai
Pendataan Tenaga Honorer	7000	165	Tercapai
Penataan arsip Kepegawaian	11450	88	Akan Tercapai
Jumlah kesepakatan kerjasama antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan pihak ketiga (pemerintah daerah dan dunia usaha), yaitu :			
Jumlah MoU kerja sama dengan Pemerintah Daerah (unit)	15	93	Akan Tercapai
Jumlah MoU kerja sama dengan swasta dan PT (unit)	15	140	Tercapai
Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi (%).	100%	100	Tercapai
Meningkatnya ketepatan pelaksanaan pelaporan keuangan akhir tahun dan semester		100	Tercapai
Meningkatnya pendapatan asli daerah (%)	60	115	Tercapai
Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembayaran gaji (kekurangan/kenaikan), SPT. Meningkatkan pengetahuan bendahara pengeluaran dalam hal penatausahaan keuangan.	1 bulan	100	Tercapai
Tersusunnya buku APBD dan perubahan APBD tepat waktu. Penelitian DPA	Bulan Septem ber.	Bulan Desembe r 2009.	Tercapai
Jumlah Perda dan Perbup sesuai dengan peraturan perundangan yang baru.			
Jumlah Perda (buah)	25	352	Tercapai
Jumlah Perbup (buah)	95	2367	Tercapai
Jumlah Peraturan Perundang-undangan yg dikaji dan diubah sesuai regulasi dan relevansinya	120	100	Tercapai
Jumlah peningkatan kompetensi penyusunan kebijakan	60	133	Tercapai
Jumlah struktur organisasi yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai standar beban kerjanya	70 buah	103	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Jumlah SKPD yang memiliki instrumen ketatalaksanaan untuk mendukung kinerja	55	95	Akan Tercapai
Persentase SKPD yang sarana dan prasarananya memenuhi standar.	10%	180	Tercapai
Jumlah aparatur yang berkompeten dibidangnya	50 orang	152	Tercapai
Persentase penurunan pelanggaran disiplin.	2%	33	Tidak Tercapai
Persentase SKPD yang membuat laporan sesuai ketentuan.	90%	94	Akan Tercapai
Frekuensi informasi yang dipublikasikan	16x	100	Tercapai
Jumlah usulan dan tanggapan dari masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti	2400	96	Akan Tercapai
Persentase SKPD dan Desa yang mendapat fasilitas jaringan dan akses internet serta SIM yang terpadu	100%	100	Tercapai
Jumlah bukti kepemilikan aset milik pemerintah daerah.	50%	970	Tercapai
Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan raskin	72,067	82	Akan tercapai
Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10 Perda	183	Tercapai
Tingkat kemampuan baik secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan (%)	50	90	Akan Tercapai
Tingkat perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat (%)	65,7	91	Akan Tercapai
Sosial			
Kemampuan petugas pemberdayaan PMKS meningkat (orang)	50	310	Tercapai
Fakir miskin mempunyai ketrampilan (orang)	160	751	Tercapai
Keluarga miskin punya usaha (orang)	300	420	Tercapai
Meningkatnya semangat hidup PMKS dan pejuang (orang)	220	461	Tercapai
PMKS mempunyai ketrampilan (orang)	285	344	Tercapai
Korban bencana tertangani (orang)	12	100	Tercapai
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial (orang)	200	250	Tercapai
Peningkatan kesejahteraan PMKS (KK)	200	2500	Tercapai
Meningkatnya ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	45	67	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Bakat dan ketrampilan anak terlantar berkembang	185	0	Tidak Tercapai
Penyandang cacat dan penyakit kejiwaan terdata	1	100	Tercapai
Meningkatnya keterampilan penyandang cacat dan eks trauma	350	0	Tidak Tercapai
Meningkatnya ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik penyandang cacat dan eks trauma	15	0	Tidak Tercapai
Meningkatnya ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik di Panti Asuhan/Panti Jompo	15	133	Tercapai
Meningkatnya ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	50	0	Tidak Tercapai
Eks penyandang penyakit sosial dapat melaksanakan fungsi sosialnya	50	156	Tercapai
Meningkatnya peran aktif masyarakat dunia usaha	100	250	Tercapai
Meningkatnya jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	12	50	Tidak Tercapai
Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	100	400	Tercapai
Berkembangnya model kelembagaan perlindungan sosial	20	80	Akan Tercapai
Kebudayaan			
Tingkat perkembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (meningkat/ menurun)	Meningkat	100	Tercapai
Tingkat perkembangan upaya pelestarian budaya dan kesenian daerah (%)	Meningkat	100	Tercapai
Tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman budaya lokal (%)	Meningkat	100	Tercapai
Statistik			
Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah (%)	100%	100	Tercapai
Kearsipan			
Penyelamatan dan pelestarian arsip dalam bentuk tekstual (%)	43	91	Akan Tercapai
Akuisisi arsip rutin dan berkala (%)	45	78	Akan Tercapai
Kegiatan diklat/bintek kearsipan bagi SKPD, kecamatan dan desa/kelurahan (% peningkatan)	12	292	Tercapai
Arsiparis (orang)	6	67	Akan Tercapai
SDM yang mengikuti kegiatan diklat/ bintek kearsipan (orang)	327	70	Tercapai
Perpustakaan			
Pengunjung perpustakaan (%)	32	90,63	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Perpustakaan sekolah (%)	80	113,75	Tercapai
Perpustakaan masyarakat (buah)	108	125,00	Tercapai
Koleksi perpustakaan (%)	80	81,25	Tercapai
Pustakawan (orang)	6	50,00	Akan Tercapai
Koleksi perpustakaan yang bernilai penting dan bernilai sejarah (dokumen)	39	197,44	Tercapai
Kelautan dan Perikanan			
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap (ton)	1426761	115,07	Tercapai
Meningkatnya Produksi perikanan budidaya air payau (ton)	10113836	68,85	Akan Tercapai
Meningkatnya Produksi perikanan budidaya air tawar (ton)	867876	0,32	Tidak Tercapai
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap di perairan umum (ton)	154.669	78,09	Akan Tercapai
Meningkatnya Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	13,37	104,71	Tercapai
Meningkatnya jumlah unit usaha pengolahan ikan	78	94,87	Akan Tercapai
Meningkatnya rata-rata pendapatan nelayan (% per tahun)	10	80,80	Akan Tercapai
Meningkatnya rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (%)	15	113,33	Tercapai
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian perikanan	100	90,00	Akan Tercapai
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh pertanian perikanan	90	88,89	Akan Tercapai
Tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang pertanian perikanan	90	88,89	Akan Tercapai
Tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan budidaya secara organik di lingkungan pertanian perikanan	60	83,33	Akan Tercapai
Pertanian			
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (%)	100%	96	Akan Tercapai
Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan daerah (%)	100%	97	Akan Tercapai
Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi komoditas hasil pertanian/perkebunan (%)	90%	94	Akan Tercapai
Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/ perkebunan (% pertumbuhan)	2,5%	200	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan	meningkat	100	Tercapai
Angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (kasus)	40%	100	Tercapai
Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan (% pertumbuhan)	10%	70	Akan Tercapai
Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%)	100%	100	Tercapai
Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi peternakan (%)	80%	87	Akan Tercapai
Kehutanan			
Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan	2,5%	120,00	Tercapai
Peningkatan produksi hasil hutan	5%	60,00	Tidak Tercapai
Peningkatan rehabilitasi hutan	20%	75,00	Akan Tercapai
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan kota (%)	70%	78,57	Akan Tercapai
Tingkat kinerja tenaga penyuluh kehutanan lapangan	10000%	80,00	Akan Tercapai
Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan penyuluh kehutanan	9000%	94,44	Akan Tercapai
Tingkat pemanfaatan dan daya serap teknologi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam kehutanan	90%	88,89	Akan Tercapai
Tingkat kesadaran sebagai petani untuk menciptakan budidaya secara organik di lingkungan kehutanan	60%	100,00	Tercapai
Energi dan Sumberdaya Mineral			
Jumlah ijin usaha pertambangan (SIPD);	75	111	Tercapai
Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha pertambangan dan mineral	40	75	Akan Tercapai
Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Minerba Kabupaten Kendal;	1	100	Tercapai
Jumlah ijin pemanfaatan air bawah tanah;	20	115	Tercapai
Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha pemanfaat air bawah tanah	10	70	Akan Tercapai
Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kabupaten Kendal	1	100	Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Jumlah ijin usaha ketenaglistrikan	40	2,5	Tidak Tercapai
Jumlah pembinaan dan pengawasan pengusaha ketenagalistrikan	20	125	Tercapai
Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Ketenalistrikan Kabupaten Kendal	1	100	Tercapai
Jumlah penelitian dan pengembangan pemanfaatan dan penganekaragaman energi alternatif /energi baru terbarukan;	1	300	Tercapai
Sosialisasi hasil litbang pemanfaatan dan penganekaragaman energi alternatif /energi baru terbarukan	1	300	Tercapai
Pariwisata			
Meningkatnya Jumlah SDM Kepariwisataan (%)	30 Org	283	Tercapai
Meningkatnya lama tinggal wisatawan (hr)	2,1 hr	95	Akan Tercapai
Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan harian (%)	15 %/Th	87	Akan Tercapai
Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan (%)	Meningkat 5% per tahun	156,6	Tercapai
Meningkatnya pendapatan daerah dari kunjungan wisata (%)	5%/tahun	216,6	Tercapai
Pengembangan Daerah tujuan wisata potensial (buah)	5 bh	160	Tercapai
Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah (buah)	15 event	60	Tidak Tercapai
Meningkatnya jumlah event MICE (Meeting, Incentive Travel, Conference and Exhibition) di daerah (buah)	96 event	231,25	Tercapai
Meningkatnya jumlah anggota kelompok sadar wisata (orang)	15 kel	1213	Tercapai
Meningkatnya jumlah UMKM dan Industri Kreatif (unit)	7,5 kel	120	Tercapai
Terciptanya Desa Wisata (desa)	2	250	Tercapai
Perindustrian			
Persentase pembentukan kelembagaan kluster IKM melalui pendekatan OVOP (%)	90%	58,9	Tidak Tercapai
Jumlah industri yang telah memiliki ijin usaha (SIUI)			
Persentase sentra industri yang telah dikembangkan (8% per tahun)	90%	83,0	Akan Tercapai
Jumlah industri (0,2% per tahun)	17,812	99,0	Akan Tercapai
Persentase IKM yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%)	85%	94,1	Akan Tercapai
Persentase IKM yang menghasilkan jenis produk bersertifikasi sesuai dengan standar produk nasional (%)	85%	82,4	Akan Tercapai

Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015	Tingkat Capaian	Interpretasi
Persentase industri yang telah menerapkan standar industri (%)	85%	88,2	Akan Tercapai
Persentase jejaring kerjasama antara IKM dengan industri berskala menengah dan besar (%)	85%	88,2	Akan Tercapai
Persentase SDM yang mengikuti pelatihan ketrampilan (%)	95%	105,0	Tercapai
Persentase usaha IKM yang memperoleh bantuan peralatan (%)	95%	378,9	Tercapai
Persentase produk IKM yang dipasarkan (%)	100%	75,0	Akan Tercapai
Perdagangan			
Nilai ekspor non migas (juta US dollar) (%/th)	2%/th	2884,00	Tercapai
Jumlah promosi dan pameran skala regional, nasional, internasional (keg)	15	346,67	Tercapai
Jumlah dokumen tentang data dan informasi kebijakan dan peluang pasar luar negeri (dok)	1	1000,00	Tercapai
Jumlah pasar tradisional yang dibangun (1 unit per tahun)	15	73,33	Akan Tercapai
Persentase ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat (%)	100	75,00	Akan Tercapai
Jumlah pembinaan pelaku usaha bidang perdagangan	20	95,00	Akan Tercapai
Persentase perusahaan yang memiliki SIUP (1% per tahun)	100		Tercapai
Jumlah pengujian tera metrologi	20	100	Tercapai
Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa	12	83,00	Akan Tercapai
Jumlah Sosialisasi perlindungan konsumen	95 Koordinasi dengan LSM Perlindungan Konsumen Nusantara	515,79	Tercapai
Persentase peningkatan pembinaan pedagang kaki lima	95	84,21	Akan Tercapai
Transmigrasi			
Adanya kerja sama antar wilayah antar pelaku antar sektor di kawasan transmigrasi (naskah)	5	160	Tercapai
Tersedianya dan terkelolanya sarana dan prasarana sosial di kawasan transmigrasi (kk)	40	405	Tercapai
Pemberangkatan calon transmigran keluar jawa (lokasi)	3	33	Tidak Tercapai
Terpantau dan termonitornya transmigran (lokasi)	3	67	Akan Tercapai
Adanya penyuluhan transmigrasi lokal (desa)	75	360	Tercapai
Adanya pelatihan transmigrasi lokal (orang)	100	95	Akan Tercapai

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2010-2015

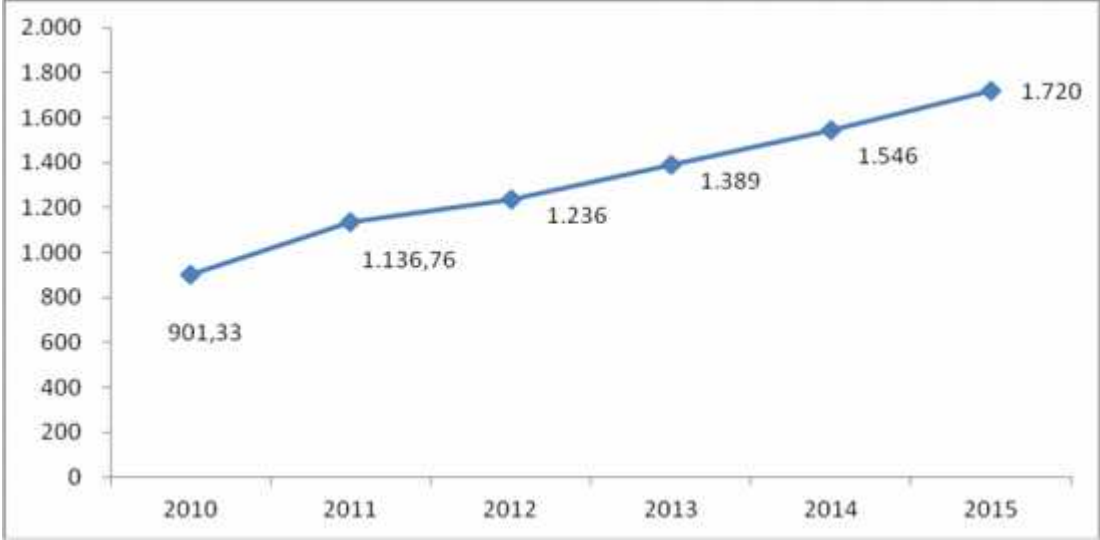
Kinerja keuangan daerah tahun 2010-2015 mencakup analisis terhadap kinerja realisasi APBD, dan analisis perkembangan neraca daerah Kabupaten Kendal. Kinerja Realisasi APBD Kabupaten Kendal tahun 2010-2015 mencakup analisis terhadap kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.1.1 Pendapatan

Evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal periode 2010 sampai dengan 2015 apabila dilihat dari berbagai sisi diuraikan berikut ini.

Besarnya pendapatan daerah selama tahun 2010 hingga tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 realisasi pendapatan kabupaten Kendal sebesar Rp 901.333.718.120,-, selanjutnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 menjadi Rp 1.720.297.184.798,-. Perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 3.1
Besarnya Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Apabila dilihat dari masing-masing unsur pendapatan yang ada di dalam APBD, selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 proporsi terbesar didominasi oleh Dana Perimbangan sebesar 66,86%. Diikuti oleh dana dari lain-lain pendapatan yang sah dan pendapatan asli daerah. Gambar 3.2 juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah selama tahun 2010

hingga tahun 2015 sebesar 149,66% diikuti dengan peningkatan persentase lain-lain pendapatan yang sah 112,98% dan Dana Perimbangan sebesar 49,97%%. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama tahun 2010-2015 Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan potensi yang ada. Meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa potensi tersebut masih bisa ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Perkembangan masing-masing unsur pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2
Besarnya Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2010-2015
(Milyar Rupiah)



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kendal tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2015
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	PENDAPATAN	901.333.718.120	1.136.759.150.013	1.236.364.509.508	1.388.635.845.964	1.546.101.820.182	1.720.297.184.798	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.235.293.510	93.289.526.850	120.162.135.739	136.029.702.522	215.294.086.780	239.340.237.947	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	23.671.770.836	25.891.043.038	34.623.032.985	38.400.390.427	60.871.073.718	70.285.888.571	25,60
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.015.367.857	14.742.534.083	17.525.238.263	18.592.267.189	25.025.239.731	19.334.541.627	5,78
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.482.257.225	3.292.630.850	5.142.929.715	8.973.767.313	7.765.907.188	7.424.928.728	17,26
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.065.897.592	49.363.318.879	62.870.934.776	70.063.277.593	121.631.866.143	142.294.879.021	29,35
1.2	DANA PERIMBANGAN	643.064.281.301	698.282.269.411	845.851.037.337	910.086.714.469	964.405.138.040	996.572.170.245	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	63.842.695.301	61.713.903.411	79.257.929.337	80.021.146.469	64.347.674.040	53.310.294.245	(2,14)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.676.886.000	569.223.666.000	702.708.128.000	788.134.078.000	852.170.849.000	884.901.572.000	11,38
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	58.544.700.000	67.344.700.000	63.884.980.000	41.931.490.000	47.886.615.000	58.360.304.000	2,32
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	172.034.143.309	345.187.353.752	270.351.336.432	342.519.428.973	366.402.595.362	484.384.776.606	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	243.103.000	3.853.487.400	5.900.679.825	512,75
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	33.506.332.509	47.380.326.392	64.026.944.432	71.357.053.973	93.924.928.962	116.113.283.815	28,65

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2015
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
	Daerah Lainnya							
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59.741.242.800	182.230.162.360	128.304.737.000	179.304.962.000	216.448.389.000	257.423.596.000	50,97
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	78.786.568.000	115.576.865.000	78.019.655.000	91.614.310.000	52.175.790.000	30.661.344.000	(10,53)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah (ADD)						74.239.102.000	
	Jumlah	901.333.718.120	1.136.759.150.013	1.236.364.509.508	1.388.635.845.964	1.546.101.820.182	1.720.297.184.798	

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016

Terhadap pendapatan secara keseluruhan, proporsi pendapatan selama tahun 2010-2015 di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa ada penurunan proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan. Proporsi dana perimbangan menurun dari 71,35% pada tahun 2010 dan menjadi 57,93% pada tahun 2015. Meskipun tidak selalu menurun dari tahun 2010 ke tahun 2015, namun secara rata-rata proporsi Dana Penimbangan selama enam tahun terakhir adalah sebesar 64,51%.

Proporsi PAD selama tahun 2010-2015 mengalami peningkatan, meskipun terjadi penurunan di tahun 2011. Proporsi PAD di Kabupaten Kendal meningkat dari 9,57% pada tahun 2010 menjadi 13,91 pada tahun 2015, sehingga rata-rata proporsi PAD di Kabupaten kendal sebesar 10,85%. Peningkatan proporsi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan ini menunjukkan bahwa ada geliat kondisi perekonomian yang baik di Kabupaten Kendal. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Kendal semakin baik.

Kondisi proporsi lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan dari 19,09% pada tahun 2010 menjadi 28,16% pada tahun 2015. Meskipun tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun proporsi lain-lain pendapatan yang sah ini secara rata-rata selama enam tahun terakhir adalah sebesar 24,64%.

Secara rinci perkembangan proporsi masing-masing unsur pendapatan selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.3
Proporsi Masing-Masing Unsur Pendapatan Terhadap Total
Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 (%)



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Kondisi pertumbuhan dari masing-masing unsur pendapatan di Kabupaten Kendal selama tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan fluktuasi. Secara rata-rata laju pertumbuhan Lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Kendal sebesar 28,97%. Meskipun pada tahun 2011 sempat terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar 100,65%. Namun pada tahun 2012 justru mengalami kondisi sebaliknya, yaitu mengalami pertumbuhan negatif (-21,7%). Kondisi yang hampir sama juga dialami oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kendal dari sebesar 8,59% pada tahun 2011 mencapai angka tertinggi pada tahun 2014 sebesar 58,3%. Sehingga secara rata-rata pertumbuhan PAD di Kabupaten Kendal selama tahun 2010-2015 sebesar 23,93%. Semakin membaiknya kondisi PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah di Kabupaten Kendal selama enam tahun terakhir mampu meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu pertumbuhan dana perimbangan rata-rata sebesar 9,32%.

Gambar 3.4
Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan Tahun 2010-2015(%)



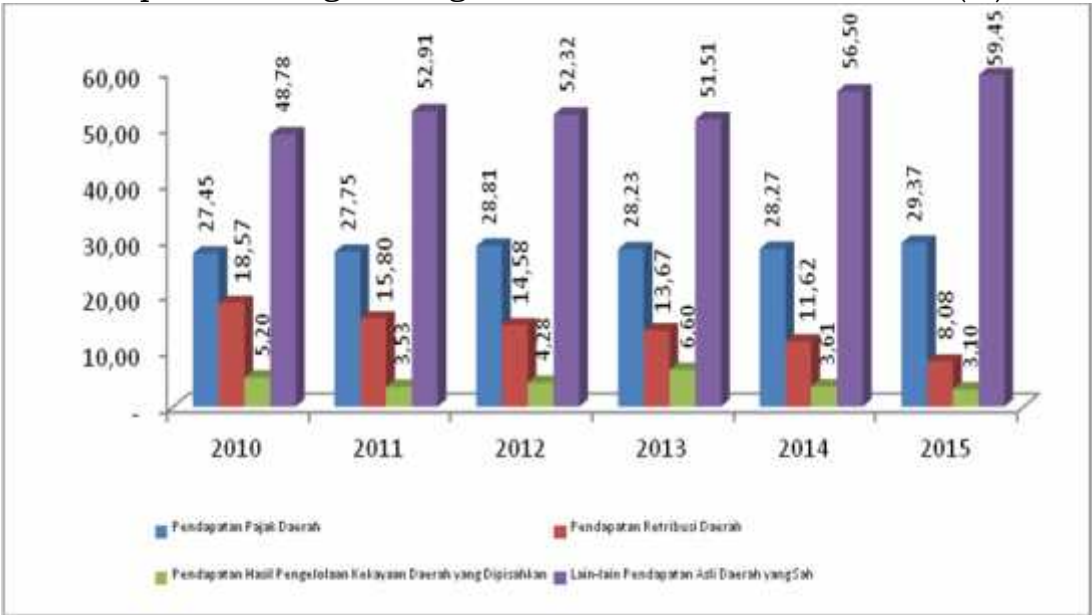
(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal mengalami peningkatan selama tahun 2010-2015. Dalam kesempatan ini, komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hingga saat ini PAD Kabupaten Kendal sangat dipengaruhi oleh komponen Lain-lain PAD yang sah. Rata-rata proporsi Lain-lain PAD

yang sah selama tahun 2010-2015 sebesar 53,58% dari PAD. Selanjutnya diikuti oleh komponen Pendapatan Pajak Daerah dengan rata-rata sebesar 28,31% dari PAD.

Komponen ketiga yang memberikan kontribusi terhadap PAD adalah Retribusi Daerah. Selama tahun 2010-2015, proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD mengalami penurunan dari sebesar 18,57% pada tahun 2010 menjadi 8,08% pada tahun 2015. Secara rata-rata proporsi Retribusi daerah terhadap PAD selama tahun 2010-2015 sebesar 15,09%. Komponen PAD yang mempunyai kontribusi paling rendah terhadap PAD di kabupaten Kendal adalah Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai proporsi terhadap PAD sebesar 5,20% pada tahun 2010 kemudian semakin menurun menjadi 3,10% pada tahun 2015. Secara rata-rata proporsi Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD sebesar 4,39% per tahun.

Gambar 3.5
Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2010-2015 (%)

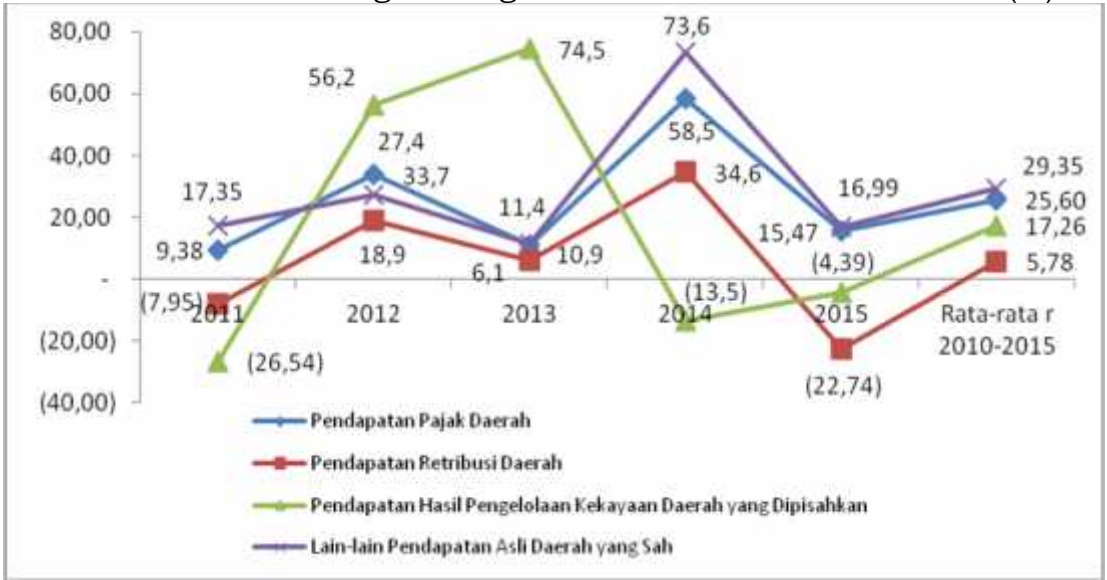


(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Pertumbuhan masing-masing komponen dalam Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 relatif fluktuatif. Pertumbuhan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 29,35%. Pertumbuhan Pendapatan pajak daerah juga cukup tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 25,60% per tahun. Rata-rata pertumbuhan komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sebesar 17,26%. Pertumbuhan komponen ini sangat unik karena pada tahun 2011 dan tahun 2014 pernah mengalami pertumbuhan negatif sebesar (-26,54) dan (-13,50), namun pertumbuhannya tahun 2013 pernah menjadi komponen yang mempunyai pertumbuhan paling tinggi dibandingkan yang lain. Pertumbuhan pendapatan retribusi daerah juga fluktuatif, sempat terjadi pertumbuhan negatif pada tahun 2011 (-26,54), dan tahun 2015 sebesar 22,74%. Secara rata-rata pertumbuhan pendapatan retribusi di Kabupaten Kendal sebesar 12,9%.

Gambar 3.6
Pertumbuhan Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2010-2015 (%)



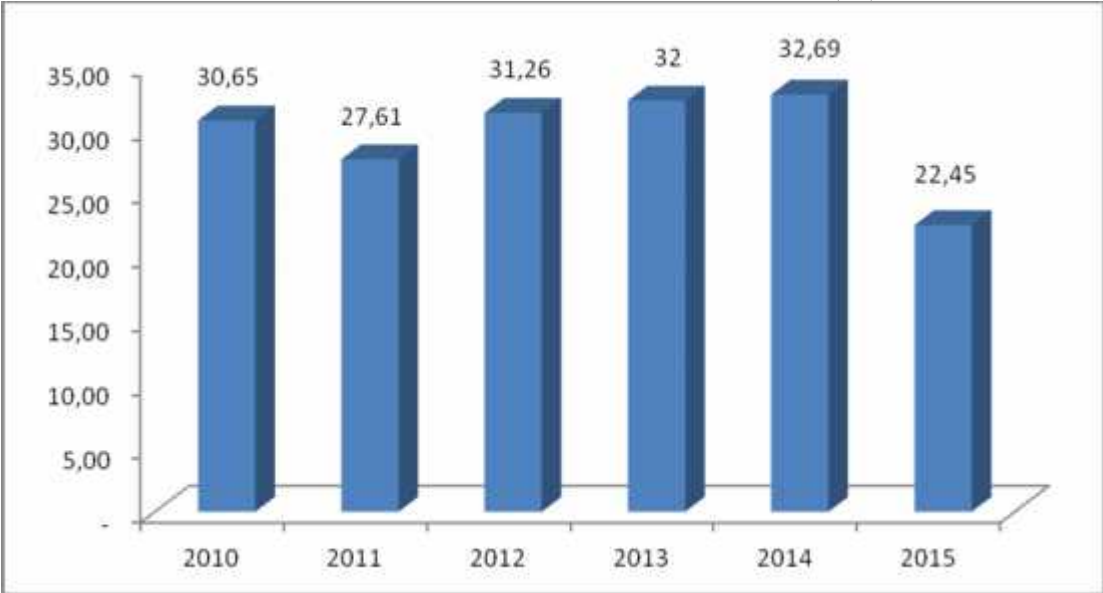
(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Ruang fiskal pada dasarnya menunjukkan seberapa besar keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat earmarked (ditentukan penggunaannya). Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan ruang fiskal yang semakin besar. Ruang fiskal dihitung dengan formula sebagai berikut:

Rasio Ruang Fiskal (%)	Pendapatan Daerah – (DAK + Hibah + Dana Penyesuaian + Dana Darurat + Belanja Pegawai Tidak Langsung + Belanja Bunga)		x 100
	=		
	Total Pendapatan Daerah		

Ruang fiskal di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan selama tahun 2010-2015. Pada tahun 2010 ruang fiskal yang tersedia sebesar 30,65%, meski sempat turun pada tahun 2011 menjadi 27,61% namun setelah itu terjadi peningkatan. Pada tahun 2014 ruang fiskal di Kabupaten kendal mampu mencapai sebesar 32,69%, namun tahun 2015 menurun menjadi 22,45%. Tentu saja kondisi ini sangat dipengaruhi dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan rasio ruang fiskal selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.7
Rasio Ruang Fiskal Tahun 2010-2015 (%)

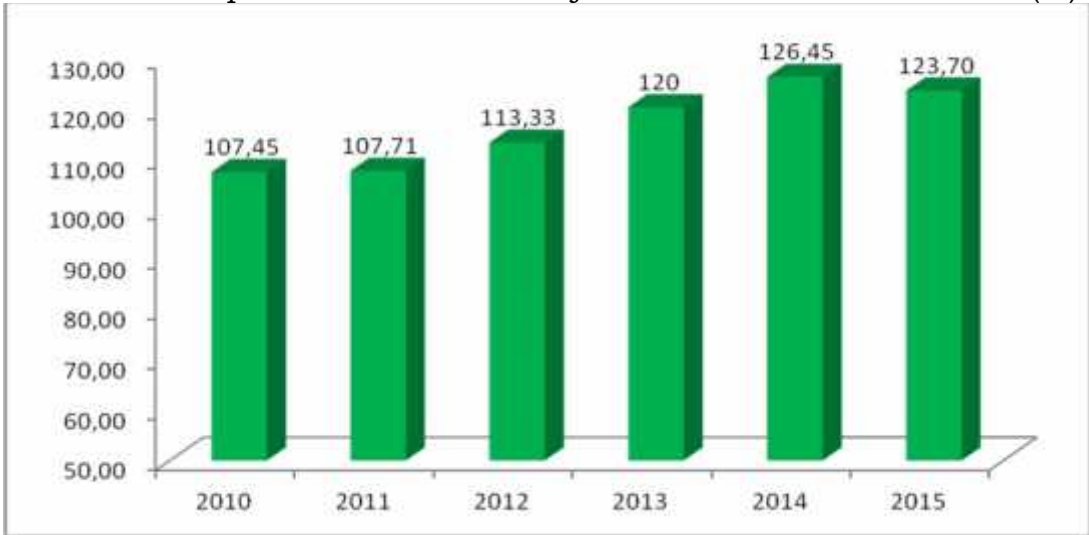


(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah dihitung dengan formula sebagai berikut:

Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan		X 100
	=		
	Total Belanja Daerah		

Gambar 3.8
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2010-2015 (%)



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa rasio kemampuan Kabupaten Kendal mendanai belanja daerah selama tahun 2010-2015 cenderung meningkat. Pada tahun 2010 rasio kemampuan mendanai belanja daerah sebesar 107,45%, mencapai angka tertinggi pada tahun 2014 sebesar 126,45%, dan tahun 2015 sebesar 123,70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kemampuan keuangan Kabupaten Kendal dalam mendanai belanja daerah tergolong baik.

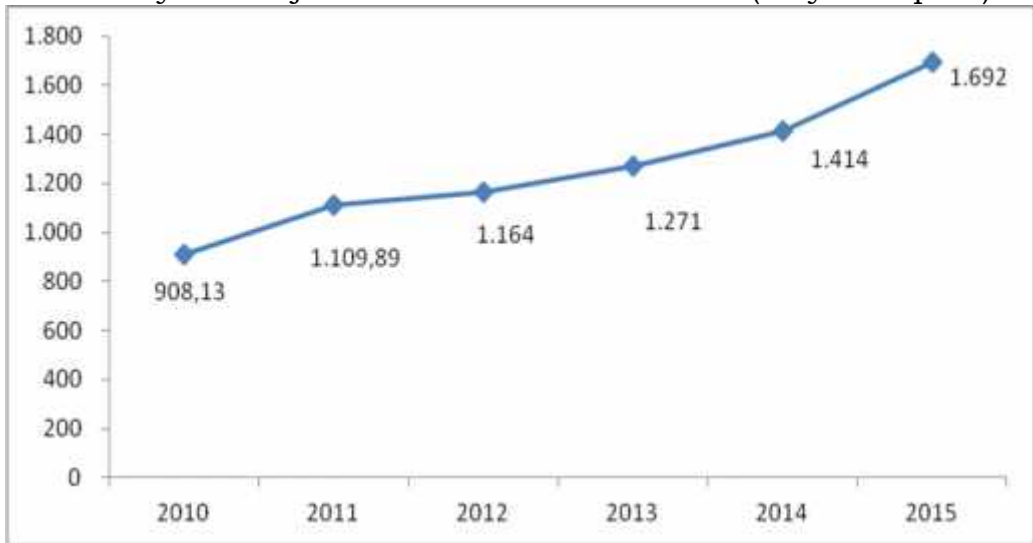
3.1.2 Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk menyejahterakan penduduk di suatu daerah.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Kendal selama tahun 2010-2015 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 besarnya belanja sebesar Rp 908.133.645.026,- dan menjadi sebesar Rp 1.692.494.766.232,- pada tahun 2015. Dengan demikian rata-rata belanja daerah sebesar 55,74%. Apabila dikaitkan dengan Gambar

3.1 tentang Besarnya Pendapatan, maka rata-rata pendapatan daerah sebesar 71,53%. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Kendal masih dalam kondisi “save” terkait dengan besarnya dana yang dimiliki dan belanja yang digunakan.

Gambar 3.9
Besarnya Belanja Daerah Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Secara rinci perkembangan belanja daerah Kabupaten Kendal tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

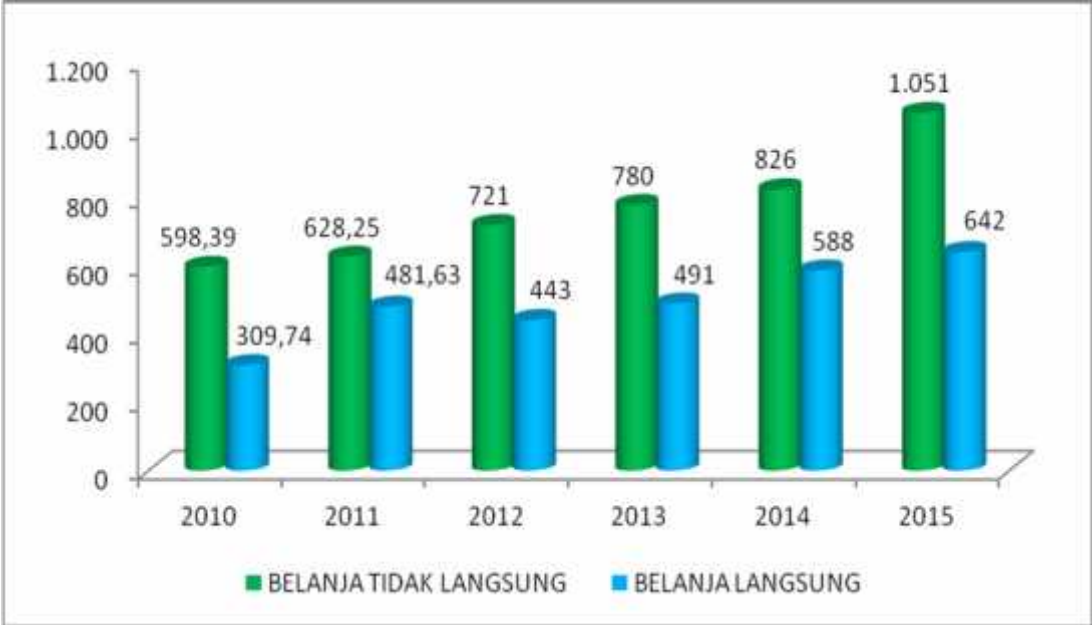
Tabel 3.2.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015

No	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata 2010-2015
2	BELANJA	908.133.645.026,00	1.109.885.631.168,00	1.163.988.889.310	1.270.620.865.836	1.414.346.670.683	1.692.494.766.232	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	598.389.135.697,00	628.251.031.473,00	721.434.054.273	780.114.015.480	826.472.035.944	1.050.770.068.622	12,21
2.1.1	Belanja Pegawai	506.658.399.760,00	573.219.671.712,00	657.644.454.319	719.808.166.689	772.383.408.226	1.012.293.491.725	15,14
2.1.2	Belanja Bunga	130.365.547,00	109.513.914,00	88.890.794	67.810.652	46.959.019	30.000.000	(25,08)
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	15.021.918.701,00	10.355.921.313,00	11.991.595.000	5.940.202.000	3.391.337.000	851.131.073.468	(41,73)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	39.295.790.025,00	15.952.090.000,00	6.732.083.224	6.017.886.130	1.663.750.000	-	13,68
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	16.095.908,00	0,00	-	-	-	6.131.631.429	(100,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	36.852.130.756,00	27.856.704.534,00	44.048.713.936	46.582.517.727	47.669.668.699	168.945.323.627	59,24
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	414.435.000,00	757.130.000,00	928.317.000	1.697.432.282	1.316.913.000	2.334.331.800	48,60
2.2	BELANJA LANGSUNG	309.744.509.329,00	481.634.599.695,00	442.554.835.037	490.506.850.356	587.874.634.739	641.724.697.610	17,45
2.2.1	Belanja Pegawai	26.653.806.235,00	35.991.112.619,00	46.043.043.993	59.199.099.193	39.974.876.070		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.819.738.208,00	245.653.545.265,00	203.930.145.305	275.908.850.195	286.313.682.947		
2.2.3	Belanja Modal	134.270.964.886,00	199.989.941.811,00	192.581.645.739	155.398.900.968	261.586.075.722		
	Jumlah	908.133.645.026,00	1.109.885.631.168,00	1.163.988.889.310	1.270.620.865.836	1.414.346.670.683	1.692.494.766.232	11,89
	Surplus/ (Defisit)	(6.799.926.906,00)	26.873.518.845,00	72.375.620.198	118.014.980.128	131.755.149.499	27.802.418.566	

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Selama tahun 2010-2015 besarnya belanja tidak langsung dan belanja langsung selalu mengalami peningkatan. Meskipun belanja langsung pernah mengalami penurunan pada tahun 2012. Apabila dilihat dari besarnya belanja maka belanja tidak langsung relatif lebih besar dibandingkan belanja langsung. Namun apabila dianalisis lebih dalam, secara rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 12,21% sedangkan Belanja Langsung secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 17,45%. Dengan demikian meskipun secara absolut belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung, namun secara proporsi pertumbuhan belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung di Kabupaten Kendal.

Gambar 3.10
Besarnya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2010-2015 (Milyar Rupiah)



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Dilihat dari proporsinya, selama kurun waktu tahun 2010-2015 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belaja daerah. Ada kecenderungan peningkatan proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah dari sebesar 34,11% menjadi sebesar 37,92%. Angka proporsi tertinggi belanja langsung terjadi pada tahun 2011 sebesar 43,39%. Kecenderungan peningkatan proporsi belanja langsung menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Secara rinci proporsi masing-masing unsur belanja daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.11
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2010-2015 (%)

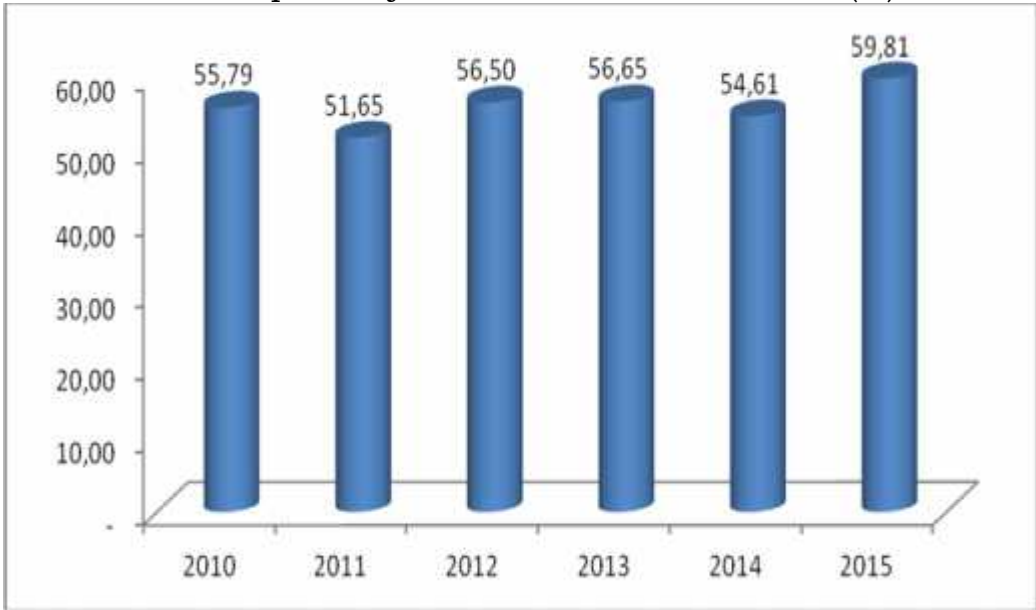


(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Berikut ini diuraikan mengenai rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Semakin menurunnya porsi belanja pegawai tidak langsung dalam APBD menunjukkan bahwa semakin sedikit porsi APBD yang digunakan untuk belanja aparatur, sehingga APBD bisa lebih terkonsentrasi pada belanja yang langsung terkait dengan layanan publik. Asumsinya belanja ini semakin berkurang maka akan direalokasikan ke belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih efektif dalam mendorong roda perekonomian daerah.

Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kendal menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar 55,79% pada tahun 2010 dan menjadi 59,81% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kebutuhan belanja pegawai yang semakin besar. Perkembangan rasio belanja pada Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.12
Rasio Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung
Terhadap Belanja Daerah Tahun 2010-2015 (%)



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Kendal selama tahun 2010-2015 menunjukkan bahwa proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja maupun proporsi belanja modal terhadap belanja langsung kondisinya fluktuatif. Namun apabila dianalisis menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sebesar 14,79% menjadi sebesar 16,67% pada tahun 2015. Kondisi ini menjadi indikasi yang baik atas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal.

Gambar 3.13
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah dan Terhadap Belanja Langsung Tahun 2010-2015 (%)



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik pengeluaran maupun penerimaan. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang perlu dibayarkan namun suatu saat akan diterima kembali, sedangkan penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan pengeluaran pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam penganggaran pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2015 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 74.458.100.485 pada tahun 2010 menjadi Rp 373.378.781.553 pada tahun 2015. Pengeluaran pembiayaan daerah juga cenderung meningkat dari sebesar Rp 8.963.029.730 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 23.175.029.731 pada tahun 2015. Selisih pembiayaan netto meningkat dari sebesar Rp 65.495.070.755 pada tahun 2010 menjadi Rp 350.203.751.822 pada tahun 2015. Secara rinci perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Kendal tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

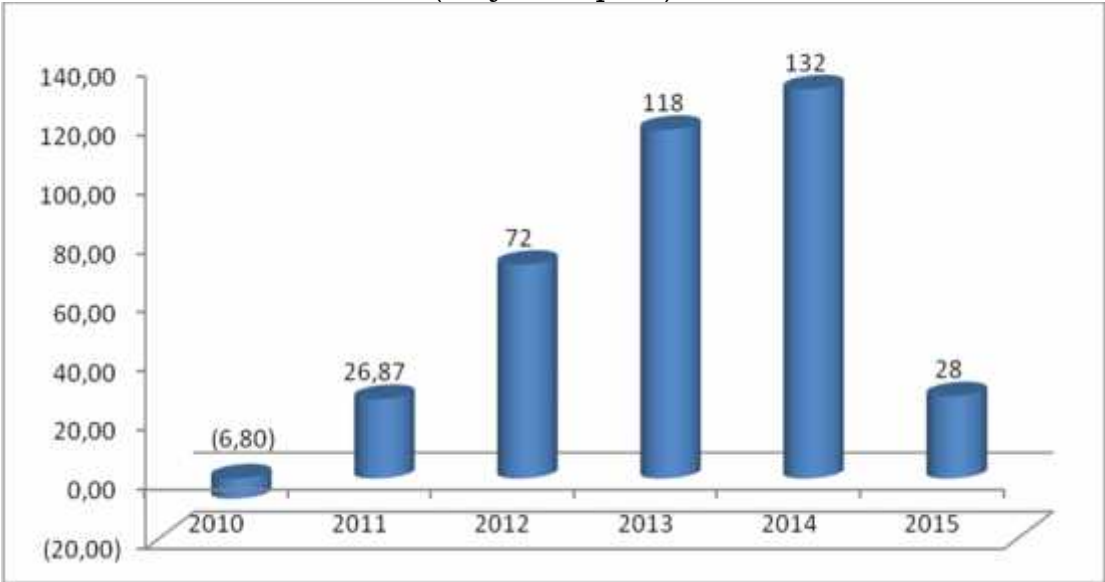
Tabel 3.3.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015 (Rupiah)

No	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN DAERAH						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68.115.082.285,74	58.695.143.849,74	82.672.669.153	140.977.348.824	242.255.861.640	352.315.650.553
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-	-	21.000.000.000
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	0,00	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.343.018.200,00	47.411.833,00	89.689.500	56.100.000	49.900.000	63.131.000
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	-	-	-	
	Jumlah	74.458.100.485,74	58.742.555.682,74	82.762.358.653	141.033.448.824	242.305.761.640	373.378.781.553
3.2	PENGELUARAN DAERAH						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.788.000.000,00	2.000.000.000,00	11.803.213.297	9.617.537.582	14.570.230.855	16.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	175.029.730,00	175.029.730,00	175.029.730	175.029.730	175.029.730	175.029.731
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	0,00	-	-	-	-
3.2.5	Pemberian Kembali Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000	-	-	-
3.2.6	Pengembalian Kelebihan Dana Transfer TPP Guru		400.500.000,00	182.387.000	-	-	-
3.2.7	Pembayaran Kekurangan Pajak Penghasilan		2.825.645,00	-	-	-	-
3.2.8	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga		365.050.000,00	-	-	-	-
	Jumlah	8.963.029.730,00	2.943.405.375,00	14.160.630.027	16.792.567.312	21.745.260.585	23.175.029.731
	Pembiayaan Neto	65.495.070.755,74	55.799.150.307,74	68.601.728.626	124.240.881.512	220.560.501.055	350.203.751.822
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	58.695.143.849,74	82.672.669.152,74	140.977.348.824	242.255.861.640	352.315.650.553	378.006.170.388

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2011-2015 defisit terjadi pada tahun 2010, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2011-2014. Ada kecenderungan peningkatan surplus APBD dari sebesar Rp 26.873.518.845,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp 131.755.149.499,00 pada tahun 2014, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.14
Surplus/Defisit Kabupaten Kendal Tahun 2010-2014
(Milyar Rupiah)

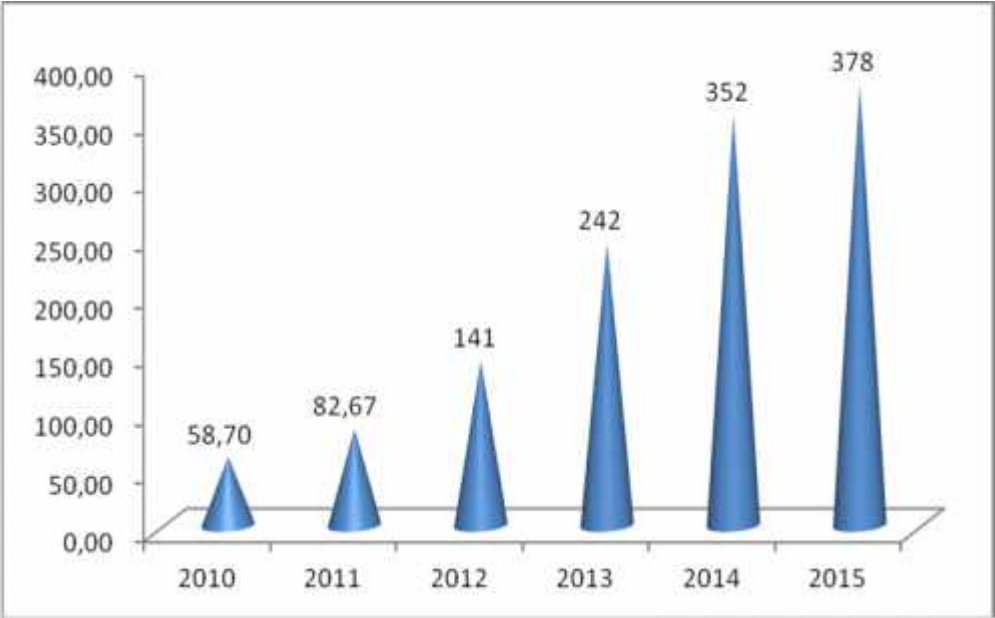


(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Pelampauan Pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBD dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD merupakan nilai estimasi. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Tahun 2010 terdapat SiLPA sebesar Rp 58.695.143.849,74 dan meningkat menjadi Rp 352.315.650.554,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata selama tahun 2010-2015 terjadi pertumbuhan sebesar 500,25%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kendal masih banyak dana publik yang belum digunakan dalam belanja

maupun pengeluaran yang lain. Sehingga masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap.

Gambar 3.15
Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (Milyar Rupiah)
Tahun 2010-2015

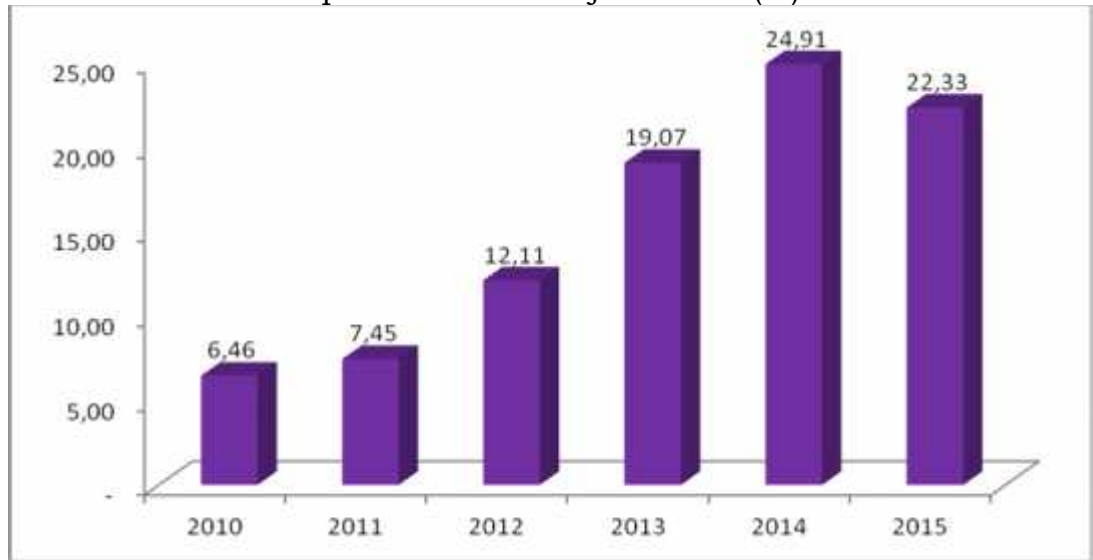


Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016

Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio ini diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa ditengarai oleh karena rendahnya penyerapan belanja daerah, yang pada dasarnya mengindikasikan tidak efisien dan efektifnya perencanaan kegiatan di daerah. Sumber SiLPA selain itu adanya dana dari pusat yang tidak terserap. Sehingga rasio ini juga perlu dicermati oleh pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan transfer ke daerah yang efisien dan efektif.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja menunjukkan ada peningkatan dari sebesar 6,46% pada tahun 2010 menjadi 24,91% pada tahun 2014 dan 22,33% pada tahun 2015. Dengan kondisi ini maka dapat disampaikan bahwa terjadi penyerapan belanja yang sangat rendah dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Penyerapan belanja yang rendah ini memberikan tanda bahwa ada hal-hal yang tidak efisien dan efektif terutama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.

Gambar 3.16
Rasio SiLPA terhadap Realisasi Belanja Daerah (%) Tahun 2010-2015



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Kendal Tahun 2016)

3.1.4 Neraca Daerah

Neraca daerah mencakup aset, kewajiban dan ekuitas dana. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dapat berupa: Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang Pajak Daerah, Piutang retribusi daerah, Piutang Lainnya dan Persediaan. Perkembangan asset Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dari sebesar Rp 3.111.800.227.764 menjadi Rp 3.559.882.666.518. Kewajiban merupakan kewajiban yang harus dipenuhi /diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Kewajiban mencakup kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi /diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, dan kewajiban jangka panjang yang harus dipenuhi /diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Terjadi penurunan kewajiban dari sebesar Rp 904.967.177 menjadi sebesar Rp 1.092.763. Sementara itu Ekuitas Dana Investasi mencerminkan ekuitas Pemerintah Kabupaten yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. Perkembangan ekuitas dana investasi menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 3.011.811.247.622 menjadi Rp 27.364.696.

Tabel 3.5
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	ASET					
1.1.	ASET LANCAR					
1.1.1.	Kas	83.647.723.305	142.893.324.878	243.753.453.716	354.315.814.507	379.688.406.219
1.1.2.	Piutang	5.168.136.946	6.792.509.406	12.998.972.324	68.670.037.989	99.473.051.081
1.1.3.	Persediaan	14.126.716.519	12.168.725.363	17.728.709.605	32.897.305.734	20.258.544.200
	JUMLAH ASET LANCAR	102.942.576.770	161.854.559.647	274.481.135.645	455.883.158.230	499.420.001.500
1.2.	ASET TETAP					
1.2.1.	Tanah	949.543.808.380	467.082.378.010	601.987.660.388	603.987.533.958	622.728.244.456
1.2.2.	Peralatan dan mesin	217.771.581.723	256.510.586.726	307.577.445.373	304.507.998.065	404.179.089.177
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	1.101.475.897.617	1.153.829.361.216	921.432.865.601	930.862.590.459	1.028.667.919.857
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	686.600.489.584	768.474.197.946	693.794.745.720	790.268.457.026	955.142.181.350
1.2.5.	Aset tetap lainnya	36.553.704.279	36.723.008.295	37.232.325.146	4.091.566.939	6.214.609.477
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	7.286.353.000	27.944.006.071	83.847.369.733	28.817.250.210	39.451.031.690
	JUMLAH ASET TETAP	2.999.231.834.583	2.710.563.538.264	2.645.872.411.961	2.662.535.396.657	3.056.383.076.007
1.3	ASET LAINNYA					
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	0	0	0	0	57.090.000
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	898.747.061	0	36.668.500	9.000.000	0
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	0	0	0	0	0
1.3.4.	Aset tak berwujud	8.727.069.350	1.753.169.220	2.479.944.086	2.948.244.022	4.022.499.011
	JUMLAH ASET LAINNYA	9.625.816.411	1.753.169.220	2.516.612.586	2.957.244.022	4.079.589.011
	JUMLAH ASET DAERAH	3.111.800.227.764	2.874.171.267.131	2.922.870.160.192	3.121.375.798.909	3.559.882.666.518

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
2.	KEWAJIBAN					
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	904.967.177	937.820.565	998.804.994	994.239.937	1.092.763
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	0	0	0	0	0
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	0	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	904.967.177	937.820.565	998.804.994	994.239.937	1.092.763
3.	EKUITAS DANA					
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR					
3.1.1.	SILPA	82.672.669.153	140.977.348.824	242.255.861.640	352.315.650.554	378.230.336.423
3.1.2.	Cadangan piutang	5.168.136.946	5.918.263.975	12.160.077.990	26.894.127.381	0
3.1.3.	Cadangan persediaan	14.126.716.519	12.168.725.363	17.728.709.605	32.897.305.734	0
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	101.967.522.618	159.064.338.162	272.144.649.235	412.107.083.669	378.230.336.423
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI					
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	2.999.231.834.584	2.710.563.538.265	2.645.872.411.961	2.662.535.396.657	0
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	12.579.413.038	9.424.044.939	26.122.487.144	25.660.919.967	0
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	3.011.811.247.622	2.719.987.583.204	2.671.994.899.105	2.688.196.316.624	27.364.696
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.114.683.737.417	2.879.989.741.931	2.945.138.353.334	3.101.297.640.230	378.258.793.882

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dihitung dengan rasio likuiditas (rasio lancar dan rasio quick), dan rasio solvabilitas (rasio total hutang terhadap total aset), dan rasio hutang terhadap modal. Rasio lancar dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan angka diatas 1 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 113,75 pada tahun 2011 menjadi 457,02 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki Kabupaten Kendal mampu digunakan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Begitu pula dengan rasio quick, dengan angka capaian juga meningkat dari sebesar 98,14 pada tahun 2011 menjadi 438,49 pada tahun 2015, menunjukkan bahwa aset lancar diluar persediaan yang dimiliki Kabupaten Kendal mencukupi digunakan untuk membayar hutang jangka pendeknya.

Dilihat dari Rasio total hutang terhadap total aset dalam kurun waktu tahun 2013-2015 menunjukkan angka dibawah 1 dari sebesar 0,01 pada tahun 2013 dan 2015. Capaian ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki pemerintah daerah dapat ditutup dengan aset yang dimiliki. Dilihat dari rasio hutang terhadap modal, capaiannya dibawah angka 1 yaitu dari sebesar 0,01 pada tahun 2013 dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki Kabupaten Kendal dapat ditutup dengan investasi yang ditanamkan. Hasil perhitungan data analisis neraca daerah secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2011 - 2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio lancar (current ratio)	113,75	172,59	274,81	458,52	457,02
2.	Rasio quick (quick ratio)	98,14	159,61	257,06	425,44	438,49
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004

3.2 Kerangka Pendanaan

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik

oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Perkembangan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ditampilkan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat sera Prioritas Utama
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

No	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	573.219.671.712	639.596.863.869	689.160.436.864	743.479.505.122	817.460.474.310
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.889.350.000	2.850.430.000	4.084.250.000	4.009.675.000	3.880.500.000
3	Belanja Bunga	109.513.914	88.890.794	67.810.652	46.959.019	26.107.387
4	Belanja bagi hasil	0	0	0	0	6.131.631.429
		576.218.535.626	642.536.184.663	693.312.497.516	747.536.139.141	827.498.713.126
B	Belanja Langsung					
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	10.606.296.238	18.755.357.250	1.921.170.000	39.974.876.070	23.292.623.317
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	180.800.000	258.000.000	85.800.000	87.000.000
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon, dan sejenisnya)	-	42.035.188.244	54.645.186.215	78.767.814.628	98.604.495.122
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	1.039.410.499	1.306.354.000	1.466.185.478	1.958.695.800
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	0	886.992.908	1.020.120.817	1.047.408.900
		10.606.296.238	43.255.398.743	57.096.533.123	81.339.920.923	101.697.599.822

No	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
C	Pembiayaan Pengeluaran					
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
2	Pembayaran pokok utang	175.029.730	175.029.730	175.029.730	175.029.730	175.029.731
		175.029.730	175.029.730	7.175.029.730	7.175.029.730	7.175.029.731
TOTAL (A+B+C)		586.999.861.594	685.966.613.136	757.584.060.369	836.051.089.794	936.371.342.679

Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2010-2015, pendapatan daerah Kabupaten Kendal diproyeksikan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1.923.570.573.725 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2.660.904.067.872,00 pada tahun 2021.

Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian daerah tumbuh semakin baik yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.
2. Tidak terjadi kenaikan harga (inflasi) yang ekstrem.
3. Di sektor Pajak dan Retribusi Daerah selalu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
4. Dana Perimbangan tidak berkurang dari tahun 2016 bahkan diharapkan lebih besar.

Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebesar Rp 1.989.413.403.646,- pada tahun 2016 menjadi Rp 2.664.215.819.325,00 pada tahun 2021, dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai meningkat sebesar 9,5% per tahun, dengan asumsi tidak adanya kebijakan kenaikan gaji PNS yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan telah menghitung kebutuhan gaji ke-14.
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa meningkat sebesar 4,04% per tahun.

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2016-2021 antara lain sebagai berikut:

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Kendal;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

3. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
4. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
6. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
7. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.

Secara rinci proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah (Rupiah)

No	URAIAN	2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
1	PENDAPATAN	1.951.844.835.467	2.080.196.912.529	2.218.923.325.217	2.368.895.010.150	2.531.058.003.001	2.706.440.049.150
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	263.274.261.742	289.601.687.916	318.561.856.707	350.418.042.378	385.459.846.616	424.005.831.278
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	77.314.477.428	85.045.925.171	93.550.517.688	102.905.569.457	113.196.126.402	124.515.739.043
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.267.995.790	23.394.795.369	25.734.274.906	28.307.702.396	31.138.472.636	34.252.319.899
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.167.421.601	8.984.163.761	9.882.580.137	10.870.838.151	11.957.921.966	13.153.714.162
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	156.524.366.923	172.176.803.615	189.394.483.977	208.333.932.375	229.167.325.612	252.084.058.173
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.392.628.289.725	1.491.026.982.106	1.596.794.156.366	1.710.499.081.725	1.832.755.848.381	1.964.226.938.891
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	49.885.731.765	50.693.880.620	51.515.121.486	52.349.666.454	53.197.731.050	54.059.534.293
1.2.2	Dana Alokasi Umum	972.952.576.000	1.052.053.620.429	1.137.585.579.770	1.230.071.287.405	1.330.076.083.071	1.438.211.268.625
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	369.789.981.960	388.279.481.058	407.693.455.111	428.078.127.866	449.482.034.260	471.956.135.973
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	295.942.284.000	299.568.242.507	303.567.312.144	307.977.886.047	312.842.308.004	318.207.278.981
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.260.000.000	6.260.000.000	6.260.000.000	6.260.000.000	6.260.000.000	6.260.000.000
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	87.848.856.000	87.848.856.000	87.848.856.000	87.848.856.000	87.848.856.000	87.848.856.000

No	URAIAN	2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.237.692.000	38.863.650.507	42.862.720.144	47.273.294.047	52.137.716.004	57.502.686.981
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah (ADD)	166.595.736.000	166.595.736.000	166.595.736.000	166.595.736.000	166.595.736.000	166.595.736.000
2	BELANJA	2.048.877.498.459	2.222.737.400.573	2.347.714.677.985	2.497.686.362.918	2.659.849.355.769	2.841.731.401.918
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.286.989.828.536	1.390.999.744.593	1.504.449.282.864	1.628.199.581.997	1.763.193.395.273	1.910.462.748.979
2.1.1	Belanja Pegawai	988.965.915.786	1.082.917.677.786	1.185.794.857.175	1.298.445.368.607	1.421.797.678.625	1.556.868.458.094
2.1.2	Belanja Bunga	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah	13.956.444.000	12.979.492.920	12.070.928.416	11.225.963.427	10.440.145.987	9.709.335.768
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	7.391.301.973	7.391.301.973	7.391.301.973	7.391.301.973	7.391.301.973	7.391.301.973
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	273.146.166.777	284.181.271.915	295.662.195.300	307.606.947.990	320.034.268.689	332.963.653.144
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	761.887.669.923	831.737.655.980	843.265.395.121	869.486.780.921	896.655.960.496	931.268.652.939
2.2.1	Belanja Pegawai	33.585.043.600					
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	362.303.482.240					

No	URAIAN	2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
2.2.3	Belanja Modal	306.535.049.270					
	Surplus/ (Defisit)	(97.032.662.992)	(142.540.488.044)	(128.791.352.768)	(128.791.352.768)	(128.791.352.768)	(135.291.352.768)
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN DAERAH	114.207.662.992	151.240.488.044	137.491.352.768	137.491.352.768	137.491.352.768	137.491.352.768
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	114.059.629.992	151.077.651.744	137.343.319.768	137.343.319.768	137.343.319.768	137.343.319.768
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-		-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		162.836.300	148.033.000	148.033.000	148.033.000	148.033.000
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	148.033.000	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-					
3.2	PENGELUARAN DAERAH	17.175.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	2.200.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.000.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	175.000.000	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

No	URAIAN	2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
3.2.5	Pemberian Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.6	Pengembalian Kelebihan Dana Transfer TPP Guru	-	-	-	-	-	-
3.2.7	Pembayaran Kekurangan Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
3.2.8	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	97.032.662.992	142.540.488.044	128.791.352.768	128.791.352.768	128.791.352.768	135.291.352.768
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	-	-	-

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGI

4.1 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJP Kabupaten Kendal tahun 2005-2025. Dimana pada periode ini adalah tahapan ketiga dan keempat dari pentahapan RPJP. Hasil identifikasi dari pencapaian sasaran pokok RPJP Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Identifikasi permasalahan dalam Pencapaian Sasaran Pokok RPJP Kabupaten Kendal

Sasaran Pokok RPJPD tahapan ke - 3	Indikator	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab	1. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional, nasional, dan internasional;	Masih rendahnya rasa nasionalisme masyarakat	Memperkuat jati diri dan membentuk karakter bangsa yang baik
	2. Penguatan akses dan mutu pendidikan, tenaga pendidik yang bersertifikasi serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pangsa pasar kerja;	Masih rendahnya mutu pendidikan	Penguatan kurikulum berbasis pangsa pasar kerja
	3. Penguatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang profesional;	Belum optimalnya tenaga pelayanan dan sarana prasarana kesehatan	kualitas tenaga pelayanan dan sarana prasarana kesehatan
	4. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis pada modal sosial yang makin berkembang;	Menurunnya nilai-nilai kearifan lokal	Peningkatan nilai kearifan lokal
	5. Penguatan sikap yang baik dalam hubungan (toleransi) antarumat beragama di Kabupaten Kendal; dan	Toleransi antarumat beragama sudah baik	Kerukunan antar umat beragama
	6. Penguatan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat kabupaten kendal.	Tingginya pengaruh negatif budaya asing	Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama

Sasaran Pokok RPJPD tahapan ke - 3	Indikator	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya-saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera	1. Penguatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;	SDM masih kurang berkualitas dan berdaya saing rendah	SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
	2. Penguatan penanganan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;	SDM masih kurang berkualitas dan pengelolaan SDA yang kurang memperhatikan wawasan lingkungan	Peningkatan pendapatan masyarakat
	3. Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur penunjang kegiatan tersebut;	Infrastruktur dasar yang belum memadai	Peningkatan investasi
	4. Penguatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan rekonstruksi kelembagaan;	Rendahnya partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan / CSR
	5. Penguatan dalam pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun daerah yang berkarakter cerdas, kompetitif, adil, beradab dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;	IPM dan IPG masih dalam kategori cukup	Peningkatan Usia lama sekolah, usia harapan hidup, dan daya beli masyarakat
	6. Penguatan kinerja aparat terkait dalam upaya meminimalkan jumlah penduduk miskin, dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan jumlah angka pengangguran;	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan
	7. Penguatan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rangka meningkatkan daya beli dan	Masih kurangnya Pelatihan ketenagakerjaan	Peningkatan daya beli masyarakat

Sasaran Pokok RPJPD tahapan ke - 3	Indikator	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	kesejahteraan masyarakat miskin;		
	8. Penguatan dalam peningkatan profesionalisme kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal melalui pelatihan (DIKLAT) sehingga dapat meningkatkan sistem dan pelayanan terpadu, serta mempersempit kemungkinan penyalahgunaan/penyimpangan yang merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan	Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur
	9. Penguatan dalam penerapan hasil penelitian dan IPTEK yang mampumendorong berkembangnya teknologi madya diberbagai bidang.	Hasil penelitian dan IPTEK belum dapat di optimalkan	Implementasi hasil penelitian dan IPTEK
3. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan	1. Penguatan dalam penempatan supremasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dan Pemerintah Daerah memperbaiki kinerja maupun sistem kelembagaannya;	Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat	Penegakan hukum secara adil
	2. Penguatan dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan clean government melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Pelaksanaan good governance dan clean government belum optimal	Reformasi birokrasi
	3. Penguatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik dan akuntabilitas aparat dan penegak hukum;	Masih rendahnya budaya politik masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik
	4. Penguatan kualitas dan implementasi perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis;	Belum konsistennya antara perencanaan dengan realisasi	Kualitas pengendalian pembangunan daerah
	5. Penguatan peran kelembagaan lokal yang berbasis kepada nilai-nilai lokal yang bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupaten Kendal dalam pembangunan daerah;	Kearifan lokal belum mewarnai dalam proses pembangunan daerah	Proses pembangunan dengan memanfaatkan kearifan lokal
	6. Penguatan dalam mendukung pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip	Lemahnya nilai-nilai demokrasi	Tumbuhnya toleransi masyarakat

Sasaran Pokok RPJPD tahapan ke - 3	Indikator	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan; dan		
	7. Penguatan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap.	Masih rendahnya kesadaran hukum	Penegakan hukum
4. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai	1. Penguatan budaya masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berakar dari budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan, baik ditingkat lokal, daerah, maupun nasional;	Bergesernya budaya dan nilai kearifan lokal	Revolusi mental
	2. Penguatan sistem keamanan dalam upaya mencegah, menangkal dan menindak kejahatan yang ada dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan elemen lain yang berkepentingan;	Budaya sistem keamanan lingkungan mulai pudar	Lingkungan masyarakat aman
	3. Penguatan sistem keamanan lingkungan baik yang dilaksanakan aparat maupun oleh masyarakat;	Budaya sistem keamanan lingkungan mulai pudar	Lingkungan masyarakat aman
	4. Penguatan model penanggulangan yang komprehensif dalam mengupayakan pengurangan pemasokan/permintaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;	Budaya sistem keamanan lingkungan mulai pudar	Lingkungan masyarakat aman
	5. Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban;	Budaya sistem keamanan lingkungan mulai pudar	Lingkungan masyarakat aman
	6. Penguatan sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan/pemberantasan tindak kriminal;	Budaya sistem keamanan lingkungan mulai pudar	Lingkungan masyarakat aman
	7. Penguatan dalam penciptaan kondisi aman dan damai di berbagai wilayah perdesaan terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan sipil; dan	Budaya sistem keamanan lingkungan mulai pudar	Lingkungan masyarakat aman
	8. Penguatan kemampuan lembaga keamanan dari tingkat daerah hingga nasional secara terpadu, serasi dan seimbang.	Budaya sistem keamanan lingkungan mulai pudar	Lingkungan masyarakat aman
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	1. Penguatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diharapkan semakin membaik, dan mulai merata di semua lapisan masyarakat;	Belum meratanya kesejahteraan masyarakat	Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

Sasaran Pokok RPJPD tahapan ke - 3	Indikator	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	2. Penguatan bidang infrastruktur perdesaan terus dikembangkan, terutama yang mendukung pengembangan sektor pertanian;	Masih rendahnya sarana prasarana pertanian di pedesaan	Peningkatan produktivitas pertanian
	3. Peningkatan pembangunan perumahan (rumah murah dan sehat) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat terus ditingkatkan dan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga kondisi tersebut diharapkan semakin mendorong terwujudnya permukiman yang sehat, merata dan berkeadilan;	Masih banyaknya rumah tidak layak huni	Peningkatan kesehatan masyarakat
	4. Penguatan pelayanan bidang kesehatan dengan mempermudah setiap unsur pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan yang didukung dengan sarana/prasarana yang semakin lengkap;.	Masih kurangnya pelayanan dan sarana prasarana kesehatan	Pengelolaan sarana prasarana kesehatan secara profesional
	5. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan; dan	Belum optimalnya penanganan PMKS	Berkurangnya jumlah PMKS
6. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari	6. Peningkatan program partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perbaikan sistem PNPM PPK dan P2KP menjadi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang mandiri.	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan tingkat partisipasi pembangunan
	1. Penguatan proses pembangunan berwawasan lingkungan yang sedang berjalan, dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;	Belum semua pembangunan berwawasan lingkungan	Konsistensi pelaksanaan Perda RTRW
	2. Penguatan pengelolaan dalam pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan	Masih banyaknya kegiatan-kegiatan eksplorasi SDA yang tidak terkendali	Pelaksanaan program konservasi dan pelestarian SDA

Sasaran Pokok RPJPD tahapan ke - 3	Indikator	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	perilaku masyarakat yang mememanfaatkannya;		
	3. Pengembangan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan;	Kesadaran masyarakat untuk pelestarian lingkungan masih belum optimal	Pemantauan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan
	4. Penguatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan dan perluasan kawasan lindung, pengelolaan kawasan andalan dan strategis secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan;	Alih fungsi lahan dan perkembangan dunia industri	Konsistensi pelaksanaan Perda RTRW
	5. Peningkatan dalam pengelolaan sumber daya air (konservasi) yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan	Perubahan fungsi lahan khususnya di daerah tangkapan air	Pelaksanaan program konservasi lingkungan
	6. Penguatan sistem pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya lingkungan.	Eksplorasi SDA yang kurang terkendali	Pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berpotensi merusak SDA
7. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju	1. Pengembangan pembangunan fisik dan fungsi pelabuhan Kabupaten Kendal dalam upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;	Operasional pelabuhan belum optimal	Peningkatan PAD
	2. Pengembangan reklamasi pantai dengan melanjutkan penanaman secara masal tanaman mangrove (hutan bakau) sehingga dapat mencegah abrasi (pengikisan pantai oleh air laut) karena terlindung oleh akar-akar pohon bakau, serta dapat meningkatkan kekayaan biota laut;	Penanganan abrasi belum optimal	Penurunan Abrasi
	3. Pengembangan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan;	Kualitas pangan belum optimal	Kemandirian pangan

Sasaran Pokok RPJPD tahapan ke - 3	Indikator	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	4. Peningkatan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan;	Belum berkembangnya industri kelautan	Peningkatan investasi di bidang kelautan
	5. Peningkatan pengembangan kawasan pegunungan sebagai tempat wisata alam dan hutan lindung; dan	Belum berkembangnya kawasan pegunungan	Peningkatan konservasi dan pengembangan wisata alam
	6. Peningkatan pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung semua sektor.	Pembangunan kelautan belum didukung oleh semua sektor	Pengembangan bidang kelautan menjadi prioritas pembangunan
8. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antar regional, nasional	1. Penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kabupaten Kendal dalam berbagai kerja sama antardaerah dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan;	masih kurangnya komitmen kerjasama antar daerah	Peningkatan komitmen kerjasama antar daerah
	2. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis antarpelaku pembangunan daerah secara regional maupun nasional yang semakin nyata bermanfaat bagi masyarakat;	masih kurangnya komitmen kerjasama dan kemitraan antar daerah	Peningkatan komitmen kerjasama antar daerah
	3. Peningkatan kerja sama regional antardaerah kabupaten/kota, baik yang langsung maupun melalui kerja sama Kedungsepur; dan	masih kurangnya komitmen kerjasama kedungsepur	Peningkatan komitmen kerjasama kedungsepur
	4. Peningkatan kerja sama di tingkat nasional (rencana membuka akses hubungan antarprovinsi melalui jalur laut.	masih kurangnya komitmen kerjasama tingkat nasional	Peningkatan komitmen kerjasama tingkat nasional

4.2 Pemasalahan Pembangunan Masing-Masing Urusan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dikelompokkan berdasarkan urusan, yang akan diuraikan sebagai berikut.

4.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

- 1) Masih rendahnya APK PAUD usia 4 – 6 tahun sebesar 52,92%, capaian tersebut masih jauh dari target nasional di tahun 2019 sebesar 78,70% pada tahun 2019. Namun APK PAUD yang digunakan oleh nasional adalah usia 3 – 6 tahun.
- 2) Belum optimalnya capaian APM di jenjang pendidikan dasar baik SD sederajat maupun SMP sederajat. APM SD sederajat sebesar 84,73% sedangkan APM SMP sederajat baru 60,24%. Angka tersebut masih di bawah target nasional/Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pada tahun 2019 APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20% dan APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%.
- 3) Masih adanya angka putus sekolah untuk SD sederajat dan SMP sederajat. Angka putus sekolah SD sederajat sebesar 0,16% dan angka putus sekolah SMP sederajat sebesar 0,84%. Meskipun angka putus sekolah ini sudah memenuhi target nasional yang angka dicapai di tahun 2019, yaitu angka putus sekolah SD sebesar 0,57% dan angka putus sekolah SMP sebesar 1,01%, angka putus sekolah SD dan SMP di Kabupaten Kendal perlu untuk diturunkan untuk mendukung pencapaian wajib belajar pendidikan dasar minimal 9 tahun.
- 4) Masih rendahnya angka melanjutkan, khususnya dari SMP sederajat ke SMA sederajat. Capaian angka melanjutkan SMP sederajat ke SMA sederajat baru sebesar 88,35%.
- 5) Masih kurangnya ruang kelas dalam kondisi baik. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik baru 60,61% untuk SD Sederajat, dan 69,32% untuk SMP Sederajat.
- 6) Masih rendahnya kualitas pendidik khususnya di jenjang PAUD dan SD. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya persentase pendidik dengan kualifikasi S1/D4 untuk pendidik PAUD 46,36% dan SD sederajat sebesar 84%. sedangkan untuk jenjang SMP sederajat sudah mampu mencapai 91,4%.

b. Kesehatan

- 1) Tingginya Angka Kematian Ibu. Kematian ibu merupakan isu nasional dan akan menjadi indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kabupaten Kendal memiliki kasus kematian yang cukup tinggi. Angka kematian ibu di Kabupaten

Kendal pada tahun 2015 sebesar 148,8 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi masih diatas target nasional (MDGs) 102 per 100.000 kelahiran hidup

- 2) Tingginya kasus kematian bayi. Kasus kematian bayi disebabkan oleh kasus asfeksia, BBLR dan infeksi penyakit lainnya. AKB tahun 2015 di Kabupaten Kendal sebesar 10,35 per 1.000 kelahiran hidup.
- 3) Masih ditemukan kasus gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk meningkat dari 17 kasus tahun 2010 menjadi 30 kasus tahun 2014. Selain itu Balita stunting belum menjadi prioritas dalam perbaikan gizi masyarakat.
- 4) Masih banyaknya rumah tangga yang belum menerapkan perilaku hidup bersih. Sampai tahun 2015 masih ada 13% rumah tangga yang belum menerapkan PHBS.
- 5) Masih ditemukannya kasus balita kekurangan gizi. Pada tahun 2015 prevalensi balita gizi kurang sebesar 3,93%.
- 6) Kesadaran masyarakat untuk memeberikan ASI eksklusif kepada anak usia 6-59 bulan masih kurang, yakni baru 71,07%.
- 7) Belum optimalnya pemeriksaan kehamilan yang dilaksanakan oleh ibu hamil. Hal tersebut dapat dilihat dari cakupan K4 yang masih 93,27%.
- 8) Masih adanya persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan persalinan yang ditangani oleh tenaga berkompeten masih 93,71%.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi. Kondisi saluran primer dan saluran sekunder sebesar 59,5% dalam kondisi rusak.
- 2) Belum optimalnya fungsi saluran drainase. Sebanyak 35% saluran drainase rusak.
- 3) Belum semua rumah tangga yang ada di Kabupaten Kendal terlayani air bersih, total rumah tangga yang mampu mengakses air bersih sebesar 75%.
- 4) Cakupan pelayanan air limbah belum optimal. Tahun 2015 hanya 58% dari total rumah tangga terlayani sistem air limbah.
- 5) Belum semua jalan di Kabupaten Kendal dalam kondisinya

baik, masih terdapat 62,9% jalan dalam kondisi rusak.

- 6) Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik, dari target 20% baru mampu mencapai 11,75%.
- 7) Belum semua kawasan tersedia Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan RTBL untuk mendukung RTRW. Dari 20 kawasan yang seharusnya memiliki RTBL, baru 2 kawasan yang memiliki RTBL.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi, yaitu sebesar 27%.
- 2) Masih terdapat kawasan kumuh belum tertata. Terdapat 1,53% kawasan kumuh yang harus dibenahi karena target nasional untuk kawasan kumuh adalah 0%.
- 3) Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni. Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 95,81%.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1) Masih tingginya kejadian kriminal di wilayah Kabupaten Kendal. Tahun 2015 terjadi sebanyak 150 kasus.
- 2) Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat, rata-rata tiap tahun hanya ada 1 ormas dari 200 ormas yang terdaftar melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan
- 3) Masih tingginya kasus pelanggaran perda oleh masyarakat. tahun 2015 terjadi 80 kasus pelanggaran perda
- 4) Terbatasnya jumlah polisi pamong praja dibandingkan jumlah warga yang ada di Kabupaten Kendal. Tahun 2015 hanya ada 53 anggota satpol PP, sedangkan jumlah penduduk mencapai 955.549 jiwa
- 5) Belum optimalnya cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selama 5 tahun baru 50% dari total kecamatan yang melaksanakan patroli 3 kali dalam sehari.

f. Sosial

- 1) Belum optimalnya penanganan PMKS karena baru sebagian kecil PMKS yang mendapatkan bantuan dan pembinaan oleh pemerintah. Persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar baru sebesar 22,5%.

- 2) Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya baru sebesar 2,4%.
- 3) Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social baru sebesar 3,9%.

4.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

- 1) Belum optimalnya penempatan tenaga kerja, tahun 2015 baru sebesar 71,87% pencari kerja ditempatkan.
- 2) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal sebesar 7,07%.
- 3) Rendahnya kesadaran perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS ketenagakerjaan yaitu baru 88,9%.
- 4) Masih lemahnya perlindungan keselamatan kerja pekerja, terbukti pada tahun 2015 baru 24,84% perusahaan yang menerapkan K3.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan antara IPM dan IPG.
- 2) Masih sedikitnya lembaga PUG yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender. Tahun 2015 baru 4 kelembagaan PUG yang aktif dari total 64 kelembagaan.
- 3) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pada tahun 2015 kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 111 kasus.
- 4) Banyaknya rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan. Tahun 2015 terdapat 24.803 rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan.

c. Pangan

- 1) Belum maksimalnya penguatan cadangan pangan daerah, dari target 60% baru mampu tercapai 20,09%.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. Tahun 2015 baru tercapai 67,8 %

padahal targetnya adalah 90%.

- 3) Belum optimalnya pencapaian skor pola pangan harapan yang ditergetkan 90% baru mampu dicapai 87,9%.
- 4) Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan. Penanganan daerah rawan pangan dari target 60% baru mampu mencapai 35,7%.
- 5) Masih sedikitnya desa/kelurahan rawan pangan yang memiliki lumbung pangan yakni baru 14,2%.

d. Pertanahan

- 1) Masih adanya bidang tanah yang belum bersertifikat.

e. Lingkungan Hidup

- 1) Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah. Total sampah yang mampu terangkut baru mencapai 86,53% dari total produksi sampah.
- 2) Belum tercapainya target SPM bidang lingkungan hidup. Sebagian besar indikator SPM bidang lingkungan hidup belum ada yang mampu mencapai target yang ditetapkan. Indikator tersebut yaitu pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan capaian target indikator tercapai baru 20%; pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa baru tercapai 16,8%; jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara target baru tercapai 2,5%.
- 3) Masih terbatasnya titik-titik yang dipantau dalam rangka pemantauan status mutu air.

f. Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Masih adanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya cakupan penduduk yang memiliki KTP sebesar 74,2% tahun 2015, akte kelahiran sebesar 63,22% tahun 2015, dan dokumen kependudukan lainnya.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan dalam program pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat keswadayaan masyarakat yang rendah yakni 9,49%.
 - 3) Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan Undang-Undang tentang desa masih belum optimal.
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1) Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih rendahnya cakupan peserta KB aktif yang hanya sebesar 80,6%.
 - 2) Masih tingginya angka unmeetned KB. Pada tahun 2015 unmeetned sebesar 9,9%.
 - 3) Belum optimalnya kemampuan penyediaan alat kontrasepsi. Hal ini dilihat dari cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi baru mencapai 27,74% target nasional adalah 30%.
 - 4) Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara aktif dalam program KB sebagai akseptor KB. Persentase KB Pria hanya 1,02%.
 - 5) Masih rendahnya cakupan tribina pada desa/kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Cakupan tribina pada tahun 2015 baru sebesar 20,9%.
 - 6) Belum optimalnya peran PIK R dalam melakukan kegiatan dan penyuluha konseling. Tahun 2015 baru 17,7% dari PIK R yang ada melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling.
- i. Perhubungan
- 1) Masih terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan dengan kebutuhan. Ketersediaan halte baru 50% dari total kebutuhan halte.
 - 2) Masih rendahnya persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik, yaitu hanya 88,9% dari total sarana prasarana yang ada.
 - 3) Belum optimalnya penyediaan rambu-rambu untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten Kendal. Total rambu-rambu yang terpasang baru 22,68% dari kebutuhan seluruhnya.

j. Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum semua perangkat daerah pelayanan publik memiliki portal website, tahun 2015 baru 13% saja dari total perangkat daerah.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan desiminasi informasi dalam pendistribusian informasi nasional.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi pembangunan.

k. Koperasi dan UMKM

- 1) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2015 sebesar 82% koperasi yang ada dari total 570 koperasi, statusnya tidak aktif.
- 2) Masih rendahnya peluang UMKM untuk mengikuti pameran promosi produk. Pada tahun 2014 hanya 25% dari total UMKM yang ada bisa mengikuti pameran.

l. Penanaman Modal Daerah

- 1) Menurunnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kendal. Pada tahun 2011 investor yang masuk sebanyak 561, sedangkan pada tahun 2015 hanya ada 163 investor.

m. Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dapat dilihat dari peringkat Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2013 yang hanya berada di posisi 23.
- 2) Terbatasnya pemuda yang mendapat akses pembinaan. Tahun 2014 hanya 300 orang yang mendapatkan pembinaan.

n. Statistik

- 1) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
- 2) Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.

o. Persandian

- 1) Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi

pemerintah.

- 2) Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan pusat dan provinsi setiap tahun masih rendah.

p. Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Kendal, pada tahun 2015 benda cagar budaya yang dilestarikan baru 70%.
- 2) Masih rendahnya capaian target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebudayaan. Indikator yang belum bisa memenuhi target SPM antara lain yaitu cakupan kajian seni yang ditargetkan mencapai 50% baru bisa tercapai 13,3%. Kemudian cakupan fasilitasi seni baru bisa mencapai 14,28% padahal targetnya adalah 30%. Cakupan sumberdaya kesenian masih 0, padahal targetnya adalah 25%.

q. Perpustakaan

- 1) Belum adanya upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengembangan perpustakaan (perpustakaan digital).
- 2) Masih terbatasnya pustakawan yang tersertifikasi, tahun 2015 baru 3 pustakawan.

r. Kearsipan

- 1) Belum adanya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk informatika/digital.
- 2) Kecilnya persentase arsip inaktif yang dilakukan pemeliharaan fisik, tahun 2015 hanya 355.280 arsip inaktif yang dipelihara dari total 105.618 arsip.
- 3) Belum adanya penilaian berdasarkan masa guna arsip (retensi arsip).
- 4) Terbatasnya jumlah arsiparis/ pengelola arsip tahun 2015 sejumlah 5 orang.

4.2.3 Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- 1) Menurunnya jumlah produksi hasil olahan ikan yang semula 26.279.545 Kg menjadi 20.598.649 kg.
- 2) Belum adanya tempat pelelangan ikan dalam kondisi baik.
- 3) Menurunnya jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan. Pada tahun 2015 hanya ada 0,42% dari total

kelompok nelayan yang dibina

- 4) Belum optimalnya konsumsi ikan penduduk Kabupaten Kendal, tahun 2014 5 hanya 14,53% saja.

b. Pariwisata

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan daerah.
- 2) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru.

c. Pertanian

- 1) Menurunnya produksi tanaman pangan utama non beras (jagung 209.032 ton dan kedelai 1.753 ton).
- 2) Menurunnya produksi beberapa komoditas utama perkebunan yaitu tembakau dan kelapa. Pada tahun 2015 produksi tembakau hanya 4.728 ton, sedangkan kelapa 771 ton.
- 3) Menurunnya populasi peternakan utama pada tahun 2015 yakni sapi potong (21.440 ekor), kambing (36.718 ekor) dan domba (29.839 ekor).
- 4) Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian, peternakan, dan perkebunan yang berpengaruh pada penguasaan teknik budidaya, pengelolaan manajemen dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

d. Perdagangan

- 1) Menurunnya nilai ekspor yang diterima dari perdagangan luar negeri, pada tahun 2011 nilai ekspor yang masuk sebesar 158.122.444,81 US\$, turun menjadi 108.921.201,7 US\$ pada tahun 2015.
- 2) Terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang informal. Tahun 2015 hanya 4 kegiatan pembinaan yang dilaksanakan.

e. Perindustrian

- 1) Masih rendahnya jumlah IKM yang menghasilkan produk bersertifikasi dan sesuai dengan standar nasional. Sampai tahun 2015 baru 25% industri kecil yang memenuhi syarat tersebut.
- 2) Pemanfaatan teknologi oleh pelaku IKM dalam proses produksi masih rendah yakni hanya 20%.

f. Transmigrasi.

- 1) Semakin menurunnya jumlah transmigran yang diberangkatkan. Pada tahun 2014 hanya 4 transmigran dari pendaftar yang berangkat, sedangkan tahun 2015 tidak ada pemberangkatan transmigran. Jumlah tersebut turun dari tahun-tahun sebelumnya.

4.2.4 Permasalahan Urusan Penunjang Pembangunan

a. Perencanaan Pembangunan

- 1) Masih adanya ketidak sinkronan antara dokumen perencanaan di tingkat daerah dengan dokumen perencanaan di masing-masing perangkat daerah.

b. Keuangan

- 1) Masih tingginya SILPA tiap tahunnya, terakhir tahun 2015 sebesar 20%.
- 2) Terbatasnya kontribusi PAD dalam pendapatan daerah, tahun 2015 hanya mencapai 11% dari total pendapatan.
- 3) Rendahnya peningkatan PAD, hanya 11% pada tahun 2015.

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Masih adanya jabatan pengawas yang tidak terisi, pada tahun 2015 sebesar 11,14%.
- 2) Masih banyaknya jabatan pelaksana yang belum terisi, tahun 2015 baru sebesar 57,14% jabatan pelaksana yang terisi.

d. Fungsi Lain

- 1) Masih rendahnya tingkat tindak lanjut hasil temuan BPK, tahun 2015 hanya sebesar 61% hasil temuan yang ditindak lanjuti.
- 2) Masih belum banyak perangkat daerah yang melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dengan melibatkan masyarakat. Sedangkan yang telah melaksanakan hanya 1 perangkat daerah yang memperoleh nilai baik.
- 3) Masih rendahnya nilai evaluasi AKIP dari komponen pelaporan kinerja (8,15).

4.3 Isu Strategis Daerah

Beberapa isu global yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Kendal selama periode RPJMD ini antara lain:

Tabel 4.2
Permasalahan Eksternal yang Berpengaruh Terhadap Pembangunan
Kabupaten Kendal

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dengan berlakunya MEA maka Pemerintah Kabupaten Kendal dituntut untuk menyiapkan mental dan ketrampilan hidup masyarakat sehingga akan mampu bersaing dengan SDM dari wilayah/negara lain	Pembangunan Nasional dengan diterapkannya Nawacita, Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki kewajiban untuk mendukung upaya pencapaian target nasional dalam RPJMN 2014-2019	Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023, dengan adanya kepala daerah/gubernur baru maka dimungkinkan ada kebijakan dan target-target baru yang harus didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.	Pembangunan Tol Batang-Semarang, memiliki dampak yang cukup luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat khususnya di sepanjang jalan pantura. Selain itu juga akan berdampak pada permasalahan lingkungan karena berubahnya pemanfaatan lahan.
2	Agenda Post 2015 (SDGs) Kesepakatan global <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dan perubahan iklim memberikan tantangan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mampu mencapai target yang telah ditentukan.	Pengurangan Subsidi BBM dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), akan berdampak pada tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat	Beroperasinya Bus Rapid Trans di wilayah Kedungsepur, berpotensi terhadap perubahan dinamika sosial ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Kendal	Pembangunan dan beroperasinya Kawasan Industri Kendal. Memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
				Beroperasinya Pelabuhan Penyeberangan dan Niaga Kendal, berpotensi terhadap perubahan dinamika sosial ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Kendal

Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan pada bab 2 dan hasil identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Kendal pada lima tahun yang akan datang. Isu strategis daerah selama lima tahun ke depan yaitu :

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor yang perlu ditangani secara lebih serius. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2010 – 2014 mengalami penurunan dari

16,02% pada tahun 2009 menjadi 11,8% pada tahun 2014. Selama kurun waktu 2010 – 2011 persentase penduduk miskin bergerak lamban yaitu 14,47% pada tahun 2010 turun menjadi 14,26% pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 turun menjadi 13,17%. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program penanggulangan kemiskinan belum optimal. Selain itu angka kemiskinan di Kabupaten Kendal juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya yaitu Temanggung, Batang, dan Kabupaten Semarang.

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi perlu mendapatkan akselerasi di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal sejak tahun 2011 sampai 2014 cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2011 angkanya sebesar 6,57%, pada tahun 2014 turun menjadi 5,1%. Perlu upaya serius dalam rangka menggairahkan dinamika perekonomian Kabupaten Kendal. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan berdampak pula semakin menurunnya kesempatan kerja dengan demikian menjadi salah satu sebab meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Terbangunnya jalan Tol Semarang – Batang di masa lima tahun mendatang, dan juga pembangunan Kawasan Industri Kendal diharapkan akan mampu menggairahkan perekonomian Kabupaten Kendal.

3. Perwujudan dan Peningkatan *Good Governance*

Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kabupaten Kendal. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik belum mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. *E-government* yang ada belum secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan Pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

4. Pengangguran

Angka pengangguran di Kabupaten Kendal dari tahun 2009 – 2013 memiliki trend meningkat. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan pengendalian dari sisi *supply* dan *demand*. Pengendalian angkatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi permasalahan tersendiri, sementara itu penyediaan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja harus dapat ditingkatkan. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2015 meningkat dibandingkan kondisi tahun 2011. Pada tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat menjadi 7,07% dari 6,54% pada tahun 2011.

5. Pembangunan Infrastruktur

Penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan memadai dalam rangka menyediakan prasarana dasar bagi aktivitas penduduk belum optimal. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik masih relatif rendah yakni 37,1%. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan dalam kondisi bagus sangat penting untuk menunjang aktivitas perekonomian dan pengembangan usaha di Kabupaten Kendal. Infrastruktur lain seperti irigasi dalam kondisi rusak juga cukup besar, yaitu mencapai 59,5%.

6. Kualitas Sumberdaya Manusia dan tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal masih relatif rendah dibandingkan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal pada tahun 2014 sebesar 68,46, lebih rendah dari Jawa Tengah. Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kendal juga masih relatif rendah. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Kendal sebesar 74,14 tahun berada di bawah Jawa Tengah. Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal cukup tinggi walaupun tahun 2015 turun namun masih pada angka 148,8 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian juga kasus kematian bayi yang persentasenya masih 10,35 per 1.000 kelahiran hidup. Di tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah masih relatif rendah yaitu 6,53 tahun walaupun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 cenderung meningkat.

7. Kondusivitas Daerah

Kondisi daerah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masih belum optimal, artinya kondisi keamanan dan ketertiban di kabupaten

kendal belum secara optimal mampu menjamin masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi. Jumlah tindak kriminal di Kabupaten Kendal masih cukup tinggi yaitu 150 kasus pada tahun 2015. Tindak kriminal yang cukup mencolok dan harus mendapatkan perhatian adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2015 terdapat 63 kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Kendal. Selain itu kasus pelanggaran Perda juga masih cukup banyak yaitu 80 kasus.

Isu-isu strategis di atas kemudian diberikan nilai untuk menentukan prioritas penanganan. Penilaian tersebut didasarkan atas beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut antara lain adalah isu tersebut terkait dengan janji politik, memiliki pengaruh yang besar jika ditangani, menjadi kewenangan daerah dan sebagainya. Isu strategis yang mendapatkan nilai paling besar akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan. Berikut adalah tabel penilaian isu strategis pembangunan di Kabupaten Kendal tahun 2016-2021.

Tabel 4.3
Penilaian Isu-Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kendal

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kemiskinan	25	10	15	20	10	15	95
2	Pembangunan Ekonomi	20	10	15	15	15	15	90
3	Perwujudan dan Peningkatan Good Governance	15	15	10	15	15	15	85
4	Pengangguran	15	15	10	20	10	20	90
5	Pembangunan Infrastruktur	10	15	20	20	10	25	100
6	Kualitas Sumberdaya Manusia dan tingkat Kesejahteraan Masyarakat	15	10	15	20	15	20	95
7	Kondusifitas Daerah	10	10	10	10	10	15	65

Keterangan Nilai Skala Kriteria:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal selama lima tahun (2016-2021) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT”
(Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera)

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, Merata Berkeadilan, dan Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat Kabupaten Kendal mampu memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Selain itu diharapkan juga masyarakat Kabupaten Kendal akan dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Merata Berkeadilan, adalah kondisi dimana semua hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Kendal. Pembangunan dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten Kendal sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah.

Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia berlandaskan Iman dan Taqwa kepada ALLAH SWT, merupakan landasan dari pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan menjadi semangat bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Kabupaten Kendal dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh

masyarakat. Pelayanan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dan melaksanakan tugas dengan dilandasi iman dan taqwa kepada Allah diharapkan akan terinternalisasi ke dalam semangat pengabdian seluruh aparatur.

Dari penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Kendal akan dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan intisari dari visi yang ditetapkan yaitu Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera.

Dengan tercapainya visi tersebut, diharapkan 5 tahun ke depan Kabupaten Kendal mampu bertransformasi menjadi Permata Pantura. Kendal Permata Pantura, merupakan cita-cita atau *ultimate goals* yang menggambarkan kondisi dimana Kendal sebagai kabupaten yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi di antara wilayah-wilayah yang ada di sekitar Pantai Utara Jawa.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang terurai di atas jika dikaitkan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) dapat dilihat kesesuaiannya. Visi jangka panjang daerah Kabupaten Kendal adalah Kabupaten Kendal Yang Mandiri, Maju, Dan Sejahtera.

Visi Jangka Menengah 2016-2021	Visi Jangka Panjang 2005-2025
Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT	Kabupaten Kendal Yang Mandiri, Maju, Dan Sejahtera

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Kabupaten Kendal Permata Pantura

Unsur Visi	Indikator	Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021
Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,57	75,5
	Tingkat Kemiskinan	11,8 (2014)	7,49
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,07	5,7
	Pertumbuhan Ekonomi	5,17	6,2 - 6,6

Unsur Visi	Indikator	Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021
Merata Berkeadilan	Indeks Gini	NA	0,33
	Indeks Williamson	NA	0,69
Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia berlandaskan Iman dan Taqwa kepada ALLAH SWT	Nilai LKjIP	C	A

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN
2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja

Jika dilihat dari rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam bab IV dokumen RPJMD ini. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Keterkaitan Isu Strategis dengan Misi RPJMD Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2021

Isu Strategis	No Misi	Uraian Misi
Perwujudan dan Peningkatan Good Governance	1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN
Kualitas Sumberdaya Manusia dan tingkat Kesejahteraan Masyarakat.	2	Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
	4	Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme
Kemiskinan	3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penanggulangan kemiskinan
Pembangunan Ekonomi	5	Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal
	6	Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya
Kondusivitas Daerah	7	Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama
Pembangunan Infrastruktur	8	Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
Pengangguran	9	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja

5.3 Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Kendal dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (Tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

- 1) *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

- 2) *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
- 6) *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) *Mewujudkan* masyarakat yang *berkepribadian* dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sinkronisasi RPJMN ke dalam penjabaran visi misi pembangunan Kabupaten Kendal disajikan dalam persandingan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Sinkronisasi RPJMN 2014–2019 dengan RPJMD Kabupaten Kendal
Tahun 2016–2021

RPJMN	RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021
Visi: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong	Visi: Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT Dukungan Visi: Dengan masyarakat yang maju dan sejahtera maka kemandirian daerah akan dapat terwujud
Misi	
1. <i>Mewujudkan</i> keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	--
2. <i>Mewujudkan</i> masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Didukung dengan misi pembangunan nomor 1 dan 4
3. <i>Mewujudkan</i> politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	--
4. <i>Mewujudkan</i> kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	Didukung dengan misi pembangunan nomor 2, 3, 5, 6, 7, 9
5. <i>Mewujudkan</i> bangsa yang berdaya saing.	Didukung dengan misi pembangunan nomor 2, 3, 8, 9
6. <i>Mewujudkan</i> Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	--
7. <i>Mewujudkan</i> masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	Didukung dengan misi pembangunan nomor 7,

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yaitu:

- 1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
- 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
- 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
- 4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
- 5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
- 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
- 7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tabel 5.4
Sinkronisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJMD
Kabupaten Kendal Tahun 2016–2021

RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021
Visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	Visi: Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT Dukungan Visi: Mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera
Misi	
1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.	--
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.	Didukung dengan misi pembangunan nomor 3, 5, 6, 7 dan 9

RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	--
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.	Didukung dengan misi pembangunan nomor
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.	Didukung dengan misi pembangunan nomor 4
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.	Didukung dengan misi pembangunan nomor 1, 2, 3
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Didukung dengan misi pembangunan nomor 8

5.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Misi 1, Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN.

Tujuan:

- a. Mewujudkan reformasi birokrasi

Sasaran:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Misi 2, Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.

Tujuan:

- a. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Kendal.

3. Misi 3, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.
- b. Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana
- c. Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu
- d. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak

4. Misi 4, Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme.

Tujuan:

- a. Mengembangkan potensi pemuda dalam olah raga dan pembangunan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

5. Misi 5, Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk asli daerah.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan daya saing koperasi serta UMKM

6. Misi 6, Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya.

Tujuan:

- a. Meningkatnya produktifitas pertanian dan perikanan dalam memperkuat ketahanan pangan.

Sasaran:

- a. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan.
 - b. Meningkatnya produktifitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan
 - c. Meningkatnya produksi perikanan.
7. Misi 7, Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.

Tujuan:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata dan kekayaan serta keragaman budaya lokal
- b. Memperkuat toleransi antar umat beragama

Sasaran:

- a. Meningkatnya kunjungan wisatawan
 - b. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya
 - c. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
8. Misi 8, Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana jalan, jembatan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas barang dan manusia
- b. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan
- d. Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri

Sasaran:

- a. Tersedianya sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi
- b. Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan
- c. Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan

d. Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan

9. Misi 9, Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

Tujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif, responsif dan tanggap dalam sistem pelayanan yang terpadu.
- b. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
- c. Meningkatkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat

Sasaran:

- a. Meningkatnya investasi
- b. Menurunnya angka pengangguran
- c. Menurunnya angka kriminalitas

Tabel 5.5
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Kendal
Tahun 2016- 2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	1) Opini BPK	Indeks	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	NA	2	2	3	3	3	3
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3) Persentase perangkat daerah pelayanan yang indeks IKMnya Baik	%	80	80	85	90	95	100	100
2	Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.	Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Kendal	4) Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,64	6,73	6,93	7,13	7,33	7,53	7,73
				5) Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,41	12,65	13,07	13,44	13,81	14,18	14,5
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dan keluarga	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	6) Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,15	74,20	74,25	74,30	74,35	74,40	74,45

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
	perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan	berencana.	Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	7) Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	2,07	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
		Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya penanganan PMKS dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan secara terpadu	8) Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%	NA	NA	20	20	20	20	20
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	9) Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme	Mengembangkan potensi pemuda dalam olah raga dan pembangunan .	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	10) Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	52	57	90	95	100	120	125
				11) Prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional	orang	58	60	60	60	60	60	60

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk asli daerah	Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan daya saing koperasi serta UMKM	12) Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.243	1.298	1.353	1.408	1.463	1.518	1.573
				13) Persentase koperasi sehat	%	70	70	72	75	80	85	90
6	Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya	Meningkatkan produktifitas pertanian dan perikanan dalam memperkuat ketahanan pangan.	Meningkatnya ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan.	14) Ketersediaan pangan Utama /beras	%	165	167	170	173	175	177	177
			Meningkatnya produktifitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan	15) Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya (jagung, kedelai) per hektar (kw/ha)	Kw/ha	65,91	56,50	56,83	57,10	57,46	57,77	58,09
			Meningkatnya produksi perikanan.	16) Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan Budidaya	%	1,75	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
7	Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal	Mengoptimalkan pengelolaan potensi	Meningkatnya kunjungan wisatawan	17) Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	% / Tahun	5	5	5	5	5	5	5

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
	serta meningkatkan toleransi antar umat beragama	pariwisata dan kekayaan serta keragaman budaya lokal	Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya	18) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang baik	%	75	80	80	85	100	100	100
		Memperkuat toleransi antar umat beragama	meningkatnya kerukunan antar umat beragama	19) Jumlah kasus konflik antar umat beragama	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
8	Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana jalan, jembatan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas barang dan manusia	Tersedianya sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi	20) Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	62	74	87	93	100	100	100
		Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	21) Persentase irigasi berfungsi baik	%	40,50	45	50	55	60	65	70

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	22) Persentase Kawasan Kumuh	%	1,53	1,18	0,88	0,59	0,29	0	0
				23) Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum	%	75	79	83	89	94	100	100
				24) Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	73	78	84	88	92	95	100
		Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	25) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	49,82	50,48	55,40	58,44	60,41	62,60	63,00
9	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja	Meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif, responsif dan tanggap dalam sistem	Meningkatnya investasi	26) Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	0,083	1,000	1,100	1,210	1,331	1,464	1,610

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
		pelayanan yang terpadu.										
		Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Menurunnya angka pengangguran	27) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,07	7,00	6,70	6,50	6,3	6,00	5,70
		Meningkatkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat	Menurunnya angka kriminalitas	28) Persentase angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Strategi dan Arah Kebijakan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan rumusan arah kebijakan diharapkan dapat merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pangaturan pelaksanaannya. (Lampiran III Permendagri 54/2010, hal-51). Untuk mencapai visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan masing-masing misi.

1. Misi 1, Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN.

Strategi:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan yang terukur, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas penantausahaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku, peningkatan kapasitas ASN
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP, SOP, penilaian kinerja pelayanan publik, pemanfaatan TI untuk pelayanan publik

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja fokus kepada kinerja birokrasi
- b. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah fokus pada kriteria pencapaian status WTP
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada penataan kelembagaan, penyediaan sarpras dan manajemen

2. Misi 2, Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.

Strategi:

- a. Meningkatkan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan, peningkatan cakupan BSM, peningkatan kapasitas kelembagaan

pendidikan non formal, dan upaya-upaya untuk mengurangi beban masyarakat dalam pendidikan

- b. Meningkatkan Angka Melanjutkan dari SMP sederajat ke SMA sederajat melalui pemberian bantuan atau beasiswa untuk melanjutkan sekolah, penyadaran akan pentingnya pendidikan, Pengembangan ekosistem pendidikan

Arah Kebijakan:

- a. Penurunan angka putus sekolah dan pengurangan beban siswa miskin dengan fokus pada siswa SMP serta peningkatan pelayanan pendidikan non formal
- b. Pengembangan ekosistem pendidikan di Kabupaten Kendal dengan fokus pada peningkatan peran swasta dan orang tua untuk meningkatkan angka melanjutkan.

3. Misi 3, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.

Strategi:

- a. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan rumah tangga berPHBS, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas lingkungan sehat, dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
- b. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan prasarana dan sarana pelayanan KB, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta peningkatan kapasitas PLKB.
- c. Meningkatkan peran kader posyandu dalam meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi
- d. Peningkatan Penyediaan alat kontrasepsi melalui dana APBD
- e. Promosi dan penyediaan MOP secara gratis
- f. Menurunkan angka kemiskinan melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- g. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui optimalisasi pelayanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan jaringan, penguatan kelembagaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (puskesmas, RS, P2TP2A, PPT).

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan usia harapan hidup dengan prioritas pada peningkatan usia harapan hidup laki-laki
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan kapasitas PLKB serta pengembangan kelembagaan KB khususnya di pedesaan.
 - c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB, khususnya kader-kader posyandu.
 - d. Peningkatan dayabeli masyarakat terhadap alat kontrasepsi untuk mencapai cakupan KB Mandiri
 - e. Meningkatkan peran laki-laki melaksanakan vasektomi
 - f. Penurunan angka kemiskinan dengan fokus pada kawasan yang memiliki populasi kemiskinan tinggi
 - g. Mewujudkan upaya penegakkan HAM, penghapusan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Misi 4, Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme.

Strategi:

- a. Meningkatkan motivasi berprestasi para atlet melalui penyelenggaraan event-event olah raga dan pemberian penghargaan/tali asih kepada atlet berprestasi, peningkatan kapasitas pembina olah raga/pelatih, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga
- b. meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan melalui pembinaan, pendampingan dan pelatihan

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan prestasi atlet dengan fokus pada pembinaan, pembibitan serta pencarian bakat calon-calon atlet yang berprestasi dengan melibatkan peran serta organisasi keolahragaan yang ada.
 - b. Peningkatan kapasitas generasi muda diprioritaskan pada kewirausahaan pemuda.
5. Misi 5, Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal.

Strategi:

- a. Mengembangkan potensi UMKM melalui pengembangan kualitas data usaha mikro dan kecil, peningkatan ketrampilan pelaku usaha mikro dan kecil, kemitraan usaha dengan koperasi/badan usaha yang lebih besar.

- b. Meningkatkan kapasitas Koperasi melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan dan penguatan kelembagaan

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan prioritas pada fasilitasi perijinan UMKM, akses permodalan usaha dan pemasaran produk UMKM.
- b. memfasilitasi pengembangan koperasi khususnya kepada koperasi-koperasi yang statusnya tidak aktif.

- 6. Misi 6, Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya.

Strategi:

- a. Meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan non beras, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan, dan memperlancara distribusi pangan.
- b. meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lumbung pangan, dan menjaga stabilitas harga pangan
- c. Meningkatkan produktivitas, mutu hasil pertanian, sumberdaya pertanian melalui optimalisasi distribusi saprodi pertanian dan peternakan, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan manajemen usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM bidang pertanian melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan.
- e. Meningkatkan produksi sektor perikanan melalui penguatan kapasitas kelompok usaha perikanan, fasilitasi penyediaan peralatan tangkap dan budidaya, pembangunan infrastruktur pendukung pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada penyediaan bahan pangan, keamanan pangan, dan distribusi.
- b. Peningkatan produksi, mutu dan pemasaran produk/ komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.
- c. Peningkatan kapasitas pelaku usaha bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, khususnya yang bergerak di bidang produksi
- d. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.

7. Misi 7, Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.

Strategi:

- a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung obyek wisata, promosi, dan memperbanyak even-even wisata
- b. Mengoptimalkan pelestarian dan inventarisasi benda cagar budaya
- c. Meningkatkan keterlibatan ormas dan LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan dan TOT kepada pengurus ormas dan LSM.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas pariwisata dengan prioritas pada pengembangan kerjasama paket wisata dengan daerah lain, dan pengembangan destinasi wisata
- b. Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan peran aktif ormas dan LSM dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.

8. Misi 8, Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Strategi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
- b. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi rusak, rehabilitasi secara intensif, dan peningkatan peran Paguyuban Petani Pemakai Air dalam pemeliharaan saluran
- c. Menurunkan jumlah permukiman kumuh perkotaan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu, dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman
- d. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup melalui koordinasi, sosialisasi dan pengawasan secara intensif, serta pemantauan status mutu air, udara dan tanah.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kemandirian jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat

- b. Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus perbaikan jaringan irigasi yang rusak.
 - c. Peningkatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga kurang mampu dan penataan lingkungan terutama pada kawasan kumuh.
 - d. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
9. Misi 9, Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

Strategi:

- a. Meningkatkan jumlah investasi melalui pelayanan perijinan dan non perijinan yang efektif, promosi potensi investasi, dan kerjasama antar daerah
- b. Pengurangan pengangguran melalui program AKAD dan AKAN dengan dibekali ketrampilan yang memadai, peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, ketrampilan kewirausahaan pada kelompok usia produktif.
- c. Meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui peningkatan intensitas patroli pada daerah rawan, penambahan sarana prasarana dan personil Satpol PP, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kemandirian dan kenyamanan lingkungan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan daya tarik investasi diprioritaskan pada penyederhanaan pelayanan perijinan satu pintu, pemberian insentif, dan e-perijinan.
- b. Pengurangan pengangguran difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM calon tenaga kerja, penyelesaian hubungan industrial, dan peningkatan pemanfaatan TI dalam penyediaan informasi peluang kerja
- c. Penurunan kasus pelanggaran Perda dengan prioritas pada tindakan preventif, represif, dan edukatif.

6.2 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

Selanjutnya arah kebijakan yang telah diuraikan diatas, dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahunan ini sifatnya penekanan prioritas namun tidak meninggalkan aspek yang lain, dengan tetap memperhatikan aspek kesinambungan dari setiap tahapan pembangunan tahunan daerah. Tahapan pembangunan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Kendal adalah:

1. Arah Kebijakan Tahun 2016 “Kendal Manis Bersatu”

Kendal Manis Bersatu, menitikberatkan pada Konsolidasi Berkelanjutan dan Perencanaan Pembangunan Terpadu, diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang mengacu pada dokumen RKPD Tahun 2016.

2. Arah Kebijakan Tahun 2017 “Kendal Berkhidmat”

Kendal Berkhidmat, menitikberatkan pada Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Prima, diwujudkan melalui kebijakan :

- 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih, sanitasi, penanganan kawasan kumuh.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada penyediaan teknologi informasi yang menunjang pelayanan, serta peningkatan kualitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)

3. Arah Kebijakan Tahun 2018 “Kendal Bermartabat”

Kendal Bermartabat, menitikberatkan pada Pembangunan Infrastruktur secara Merata, Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Pendidikan Berkualitas dan Kesehatan Murah Terjangkau, diwujudkan melalui kebijakan :

- 1) Melanjutkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan irigasi, ketersediaan air bersih, sanitasi, penanganan kawasan kumuh.
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pengembangan kualitas pendidikan baik formal, non formal maupun informal, dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

4. Arah Kebijakan Tahun 2019 “Kendal Mandiri”

Kendal Mandiri, menitikberatkan pada Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Penurunan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran, diwujudkan melalui kebijakan :

- 1) Peningkatan kapasitas pelaku dan kelembagaan UMKM, Industri kecil menengah (IKM), dan industri rumahan.
- 2) Peningkatan ketahanan pangan dengan prioritas pada peningkatan produksi hasil pertanian, ketersediaan cadangan pangan, distribusi, dan stabilitas harga.
- 3) Peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya.
- 4) Optimalisasi potensi-potensi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (kawasan industri, pelabuhan, dan kawasan strategis ekonomi).
- 5) Penurunan tingkat kemiskinan.

5. Arah Kebijakan Tahun 2020 “Kendal Berdaya Saing”

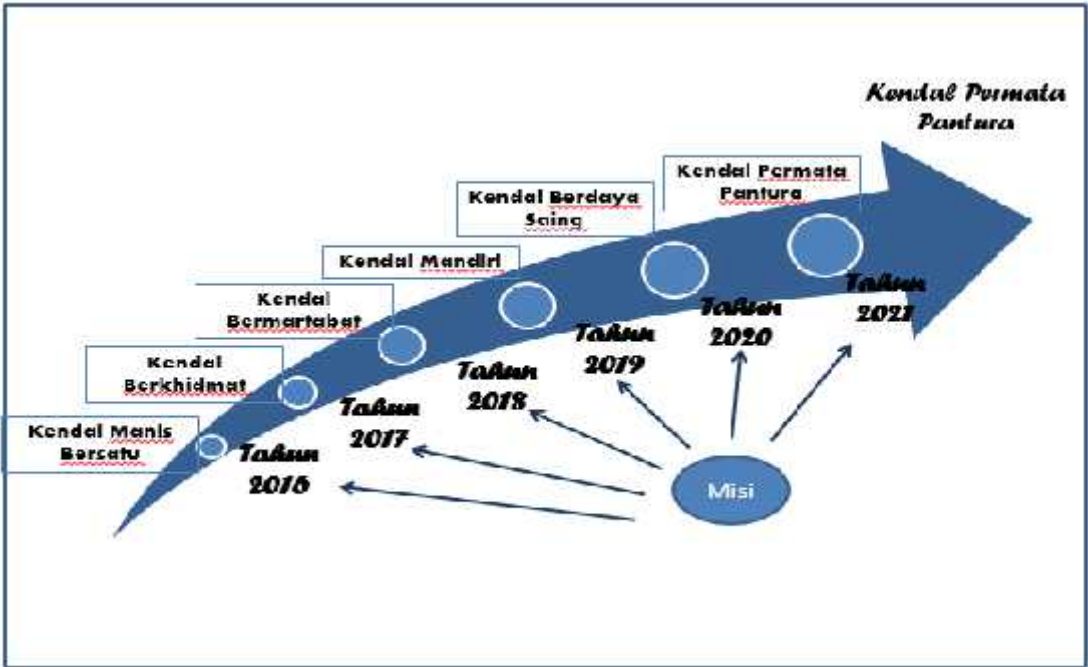
Kendal Berdaya Saing, menitikberatkan pada Investasi yang Maju, Tata Kelola Pemerintahan yang Professional dan Kondusifitas Daerah yang Baik, diwujudkan melalui kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi.
- 2) Peningkatan kemampuan ekspor produk-produk lokal yang memiliki keunggulan kompetitif.
- 3) Pemantapan kualitas infrastruktur.
- 4) Pemantapan kualitas layanan dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan)
- 5) Peningkatan kondusivitas daerah
- 6) Penguatan kebijakan/regulasi yang pro investasi.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja fokus kepada kinerja birokrasi.

6. Arah Kebijakan Tahun 2021 “Kendal Permata Pantura”

Kendal Permata Pantura, menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek yang mendukung pencapaian visi Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sehingga tercipta Kabupaten Kendal yang Mandiri, Maju dan Sejahtera.

Adapun tahapan pembangunan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sebagaimana pada gambar 6.1.



Gambar 6.1
Pentahapan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

Tabel 6.1.
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021

No Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan yang terukur, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas penantausahaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku, peningkatan kapasitas ASN	Peningkatan akuntabilitas kinerja fokus kepada kinerja birokrasi	V	V			V	V
			Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah fokus pada kriteria pencapaian status WTP	V	V			V	V
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP, SOP, penilaian kinerja pelayanan publik, pemanfaatan TI untuk pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada penataan kelembagaan, penyediaan sarpras dan manajemen	V	V			V	V
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Kendal	Meningkatkan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan, peningkatan cakupan BSM, peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan non formal, dan upaya-upaya untuk mengurangi beban masyarakat dalam pendidikan	Penurunan angka putus sekolah dan pengurangan beban siswa miskin dengan fokus pada siswa SMP serta peningkatan pelayanan pendidikan non formal	V		V			V

No Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatkan Angka Melanjutkan dari SMP sederajat ke SMA sederajat melalui pemberian bantuan atau beasiswa untuk melanjutkan sekolah, penyadaran akan pentingnya pendidikan, Pengembangan ekosistem pendidikan	Pengembangan ekosistem pendidikan di Kabupaten Kendal dengan fokus pada peningkatan peran swasta dan orang tua untuk meningkatkan angka melanjutkan.	V		V			V
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan rumah tangga berPHBS, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas lingkungan sehat, dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan	Peningkatan usia harapan hidup dengan prioritas pada peningkatan usia harapan hidup laki-laki	V		V			V
	Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan prasarana dan sarana pelayanan KB, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta peningkatan kapasitas PLKB.	Peningkatan kualitas pelayanan KB dan kapasitas PLKB serta pengembangan kelembagaan KB khususnya di pedesaan.	V		V			V
		Meningkatkan peran kader posyandu dalam meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB, khususnya kader-kader posyandu.	V		V			V

No Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Peningkatan Penyediaan alat kontrasepsi melalui dana APBD	Peningkatan daya beli masyarakat terhadap alat kontrasepsi untuk mencapai cakupan KB Mandiri	V		V			V
		Promosi dan penyediaan MOP secara gratis	Meningkatkan peran laki-laki melaksanakan vasektomi	V		V			V
	Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Menurunkan angka kemiskinan melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan dengan fokus pada kawasan yang memiliki populasi kemiskinan tinggi	V		V			V
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui optimalisasi pelayanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan jaringan, penguatan kelembagaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (puskesmas, RS, P2TP2A, PPT).	Mewujudkan upaya penegakkan HAM, penghapusan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	V		V			V
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatkan motivasi berprestasi para atlet melalui penyelenggaraan event-event olah raga dan pemberian penghargaan/tali asih kepada atlet berprestasi, peningkatan kapasitas pembina olah raga/pelatih, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga	Peningkatan prestasi atlet dengan fokus pada pembinaan, pembibitan serta pencarian bakat calon-calon atlet yang berprestasi dengan melibatkan peran serta organisasi keolahragaan yang ada.	V		V			V

No Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan melalui pembinaan, pendampingan dan pelatihan	Peningkatan kapasitas generasi muda diprioritaskan pada kewirausahaan pemuda	V		V			V
5	Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan daya saing koperasi serta UMKM	Mengembangkan potensi UMKM melalui pengembangan kualitas data usaha mikro dan kecil, peningkatan ketrampilan pelaku usaha mikro dan kecil, kemitraan usaha dengan koperasi/badan usaha yang lebih besar.	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan prioritas pada fasilitasi perijinan UMKM, akses permodalan usaha dan pemasaran produk UMKM	V			V		V
		Meningkatkan kapasitas Koperasi melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan dan penguatan kelembagaan	memfasilitasi pengembangan koperasi khususnya kepada koperasi-koperasi yang statusnya tidak aktif	V			V		V
6	Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan non beras, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan, dan memperlancara distribusi pangan.	Peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada penyediaan bahan pangan, keamanan pangan, dan distribusi.	V			V		V
		meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lumbung pangan, dan menjaga stabilitas harga pangan		V			V		V

No Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Meningkatnya produktifitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan	Meningkatkan produktivitas, mutu hasil pertanian, sumberdaya pertanian melalui optimalisasi distribusi saprodi pertanian dan peternakan, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan manajemen usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.	Peningkatan produksi, mutu dan pemasaran produk/ komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.	V			V		V
		Meningkatkan kapasitas SDM bidang pertanian melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, khususnya yang bergerak di bidang produksi	V			V		V
	Meningkatnya produksi perikanan.	Meningkatkan produksi sektor perikanan melalui penguatan kapasitas kelompok usaha perikanan, fasilitasi penyediaan peralatan tangkap dan budidaya, pembangunan infrastruktur pendukung pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	V			V		V
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung obyek wisata, promosi, dan memperbanyak even-even wisata	Peningkatan kualitas pariwisata dengan prioritas pada pengembangan kerjasama paket wisata dengan daerah lain, dan pengembangan destinasi wisata	V			V		V

No Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya	Mengoptimalkan pelestarian dan inventarisasi benda cagar budaya	Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.	V					V
	meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan keterlibatan ormas dan LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan dan TOT kepada pengurus ormas dan LSM.	Peningkatan peran aktif ormas dan LSM dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.	V				V	V
8	Tersedianya sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Peningkatan kemandirian jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	V	V	V			V
	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi rusak, rehabilitasi secara intensif, dan peningkatan peran Paguyuban Petani Pemakai Air dalam pemeliharaan saluran	Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus perbaikan jaringan irigasi yang rusak.	V	V	V			V
	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Menurunkan jumlah permukiman kumuh perkotaan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu, dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman	Peningkatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga kurang mampu dan penataan lingkungan terutama pada kawasan kumuh.	V	V	V			V

No Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup melalui koordinasi, sosialisasi dan pengawasan secara intensif, serta pemantauan status mutu air, udara dan tanah.	Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	V	V	V			V
9	Terwujudnya pelayanan investasi yang cepat, transparan dan akuntabel.	Meningkatkan jumlah investasi melalui pelayanan perijinan dan non perijinan yang efektif, promosi potensi investasi, dan kerjasama antar daerah	Peningkatan daya tarik investasi diprioritaskan pada penyederhanaan pelayan perijinan satu pintu, pemberian insentif, dan e-perijinan.	V				V	V
	Menurunnya angka pengangguran	Pengurangan pengangguran melalui program AKAD dan AKA dengan dibekali ketrampilan yang memadai, peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, ketrampilan kewirausahaan pada kelompok usia produktif.	Pengurangan pengangguran difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM calon tenaga kerja, penyelesaian hubungan industrial, dan peningkatan pemanfaatan TI dalam penyediaan informasi peluang kerja	V			V		V
	Menurunnya angka kriminalitas	Meningkatkan rasa kemananan dan kenyamanan masyarakat melalui peningkatan intensitas patroli pada daerah rawan, penambahan sarana prasarana dan personil Satpol PP, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.	Penurunan kasus kriminalitas dengan prioritas pada tindakan preventif, represif, dan edukatif.	V				V	V

6.3 Arah Pengembangan Wilayah

Perencanaan wilayah (*Regional Planning*) adalah upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah yang memiliki tiga tujuan pokok yakni meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, meningkatkan kemajuan sektoral dan membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehataraan masyarakat.

Terkait dengan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal, dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa Kabupaten Kendal termasuk dalam kawasan Kedungsapur. Kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah Kedungsapur selain Kabupaten Kendal yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Kawasan ini ke depan diarahkan sebagai kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah, sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur jawa dan pulau lainnya.

Potensi unggulan Kabupaten Kendal dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki dan terus dapat dikembangkan adalah industri unggulan garmen, tas, alas kaki; klaster jambu biji getas merah dan pisang raja bulu; serta destinasi wisata Curug Sewu dan Pantai Sendang Sikucing.

Fungsi wilayah Kedungsapur ke depan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sebagai PKN, arah pengembangan wilayah adalah pada: (1) perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; (2) pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; (3) perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; (4) dan perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai wilayah Kedungsapur meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan TPT. Adapun untuk Kabupaten Kendal, target-target yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2.
Sasaran Pengembangan Wilayah Kedungsapur
Untuk Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018

No	Indikator	Kendal (%)	
		2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,70 – 6,10	6,10 – 6,50
2	Angka Kemiskinan	8,52	7,49
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,50	6,50

(Sumber: *RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018*)

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Kedungsapur yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Kedungsapur adalah Pengembangan Wilayah Kedungsapur Berbasis Perdagangan Jasa, Industri, Pariwisata, dan Agrominapolitan yang Berkelanjutan. Guna mendukung konsep tersebut maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kedungsapur sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kedungsapur

Konsep Pengembangan	Aspek	Kebijakan	Strategi
Pengembangan Wilayah Kedungsapur berbasis Perdagangan Jasa, Industri, Pariwisata, dan Agrowanapolitan yang Berkelanjutan	Ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Kedungsapur melalui pengotimalan sektor potensial dan dukungan pengembangan	Meningkatkan dukungan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi
		Meningkatkan dukungan dan kinerja infrastruktur pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsapur	Perbaikan jalan dan peningkatan kualitas jalan yang merata di wilayah pertanian Kedungsapur
	Fisik (Infrastruktur, Konektivitas, Alam)	Pengembangan infrastruktur yang merata guna mendukung aktivitas di wilayah pertanian Kedungsapur yang masih tertinggal	Meningkatkan dukungan dan kinerja infrastruktur pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsapur
		Pengembangan pelayanan infrastruktur regional di wilayah Kedungsapur	Mengembangkan infastruktur regional yang meningkatkan interaksi wilayah di Kedungsapur
		Pengembangan sektor	Meningkatkan

Konsep Pengembangan	Aspek	Kebijakan	Strategi
		ekonomi potensial yang terpadu di wilayah Kedungsapur	konektivitas internal wilayah Kedungsapur melalui keterhubungan pengembangan sektor ekonomi
		Peningkatan interaksi internal wilayah Kedungsapur	Peningkatan dukungan prasarana jalan penghubung interwilayah di Kedungsapur
			Pengembangan dukungan transportasi massal regional Kedungsapur via BRT dan angkutan penumpang
			Pengembangan konektivitas wilayah Kedungsapur melalui jalur kereta api
		Peningkatan interaksi eksternal wilayah Kedungsapur dengan region lain yang berbatasan	Peningkatan dukungan transportasi dalam memperkuat interaksi eksternal wilayah Kedungsapur
	Sosial	Pengembangan sumber daya manusia di wilayah Kedungsapur melalui pengoptimalan pendidikan masyarakat	Peningkatan pelayanan pendidikan formal dan non formal wilayah Kedungsapur
		Pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat dengan target “penyelesaian masalah langsung dari pihak yang bermasalah”	Penanganan permasalahan pengangguran di wilayah Kedungsapur
	Tata Kelola	Pengembangan Kelembagaan Kedungsapur efektif	Penguatan kerjasama regional Kedungsapur dalam penyediaan infrastruktur dan sistem pelayanan regional

Konsep Pengembangan	Aspek	Kebijakan	Strategi
			Pembentukan baru badan pengelola kerjasama interwilayah Kedungsapur
	Lingkungan Hidup	Pengintegrasian kegiatan ekonomi wilayah dengan pelestarian lingkungan	Pelestarian sumber daya air, tanah, dan hutan

Kondisi pembangunan di Kabupaten Kendal saat ini masih menyisakan permasalahan terkait dengan pemerataan antar wilayah. Masih ditemukan kesenjangan pembangunan antara wilayah di bagian utara, tengah, dan selatan. Permasalahan yang ada yaitu pembangunan ekonomi yang belum merata pertumbuhannya, yang berdampak pada masih tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah-wilayah tertentu dan kesenjangan ekonomi antar wilayah serta antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi.

Pengembangan wilayah Kabupaten Kendal mengacu pada penataan pola ruang seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Di dalam perda tersebut telah ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kendal. Dengan demikian maka antara rencana pengembangan wilayah dan rencana pemanfaatan ruang dapat sinergis dan sesuai dengan peruntukannya.

Kebijakan pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pemantapan kawasan industri pesisir timur;
- b. pengembangan sarana prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri;
- c. pengembangan kegiatan pertanian produktif dan prospektif di bagian utara;
- d. pengembangan agropolitan di bagian selatan;
- e. pengembangan minapolitan di bagian utara;
- f. pengembangan kawasan budidaya tanaman tahunan hasil nonkayu;
- g. pengembangan kegiatan peternakan di bagian selatan;

- h. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki;
- i. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah;
- j. pengembangan kelengkapan sarana prasarana permukiman di bagian tengah;
- k. pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung di bagian selatan; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan pertahanan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan wilayah berdasarkan pusat kegiatan di Kabupaten Kendal terdiri atas:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala nasional.

Kabupaten Kendal sebagai bagian dari kawasan Kedungsapur menjadi salah satu kabupaten yang menjadi PKN di Provinsi Jawa Tengah. PKN perkotaan Kedungsapur memiliki fungsi pelayanan pusat kawasan ekonomi strategis dan industri.

- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

PKL di Kabupaten Kendal meliputi Kecamatan Kendal, Kecamatan Weleri, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Boja, dan Kecamatan Sukorejo.

- a. Perkotaan Kendal dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan tingkat Daerah, pusat perdagangan regional, dan pendidikan. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa serta pendidikan
- b. Perkotaan Weleri dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Fokus utama pengembangan PKL Weleri adalah fasilitas perdagangan dan jasa
- c. Perkotaan Kaliwungu dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat industri, kawasan ekonomi strategis, perdagangan, dan jasa. Arah pengembangan PKL Kaliwungu adalah pengembangan fasilitas dasar kawasan industri, pusat perdagangan, jasa skala regional, dan fasilitas pelayanan transportasi laut skala nasional

- d. Perkotaan Boja dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat kegiatan pertanian penyangga agropolitan, perdagangan, dan jasa serta konservasi. Pengembangan untuk kawasan ini adalah pemantapan fasilitas perdagangan Boja sebagai outlet kawasan agropolitan Boja
- e. Perkotaan Sukorejo dengan fungsi pusat agropolitan, pertanian, peternakan, dan konservasi. Arah pengembangan perkotaan Sukorejo adalah pemantapan fasilitas perdagangan Sukorejo sebagai outlet kawasan agropolitan Sukorejo.

3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

PPK berada di Kecamatan Pegandon dan memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Arah pengembangan PPK adalah pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, dan peribadatan.

4) Pusat Pelayanan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

PPL di Kabupaten Kendal berada di seluruh ibukota kecamatan dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan tingkat kecamatan. Sedangkan arah pengembangan PPL yaitu pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga, dan peribadatan.

Selain pengembangan wilayah seperti yang sudah tertera di atas, pengembangan wilayah juga berdasarakan atas potensi produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal. Produk unggulan merupakan produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah. Produk unggulan juga merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05/30 Bangda tanggal 7 Januari 1999 produk unggulan suatu daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Kandungan teknologi yang cukup menonjol baik industri kecil dan jasa
- 2) Mempunyai jangkauan pemasaran yang luas baik lokal, nasional maupun ekspor.
- 3) Mempunyai ciri khas daerah, inovatif dan melibatkan masyarakat banyak (tenaga kerja setempat).
- 4) Mempunyai kandungan bahan baku lokal yang banyak dan stabil atau melalui pembudidayaan.
- 5) Ramah lingkungan
- 6) Dapat mempromosikan budaya lokal.

Kabupaten Kendal telah memiliki beberapa produk unggulan daerah. Penetapan produk unggulan daerah Kabupaten Kendal tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 050/91/2015 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015. Produk unggulan Kabupaten Kendal tersebut adalah:

- 1) Jambu Getas Merah.
- 2) Pisang Raja Bulu.
- 3) Bandeng Cabut Duri.
- 4) Gula Aren.

Produk unggulan yang dipilih tersebut akan terus didorong pengelolaan dan pengembangannya untuk menjawab adanya tuntutan pasar dalam era globalisasi, dimana persaingan usaha cenderung semakin kompetitif. Oleh karena itu diperlukan juga kebijakan operasional untuk mendorong industri kecil menjadi kekuatan riil yang berbasis pada potensi pertanian dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Kendal sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan gambaran strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Kriteria suatu rumusan kebijakan umum sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 54 Tahun 2010 antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Dengan rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent.

Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi yang tepat dan inherent, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan, sebagai berikut :

1. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan antara lain diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan kualitas layanan pendidikan yang bermutu, jaminan kesehatan masyarakat yang prima dan merata, peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja yang handal dan mampu berdaya saing yang didukung dengan peningkatan kualitas dan

dukungan infrastruktur serta konektivitas antara wilayah hingga ke tingkat desa.

2. Kebijakan umum pada perspektif proses internal antara lain diarahkan pada penguatan sistem pelayanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi yang didukung dengan sistem online dan penyelenggaraan mekanisme sistem pengaduan masyarakat serta sinergitas dan sinkronisasi antar perangkat daerah dilingkungan internal Pemerintah Kabupaten Kendal.
3. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud dari reformasi birokrasi yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang handal , penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan perangkat daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Kendal.
4. Kebijakan umum pada perspektif keuangan antara lain diarahkan pada pengelolaan keuangan yang transparan untuk menghindari praktek praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan di jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, kebijakan juga diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah serta penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah.

Sejalan dengan kebijakan umum yang didasarkan pada empat (4) perspektif (perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan), operasionalisasi kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 juga diterjemahkan pada masing-masing misi pembangunan daerah yang dijelaskan sebagai berikut :

7.1.1 Kebijakan Umum Misi Pertama

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi pertama yaitu “Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada perwujudan reformasi birokrasi melalui peningkatan pendayagunaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta mampu mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima demi terciptanya kepuasan masyarakat dan perbaikan citra birokrasi.

Urusan utama yang menjadi fokus dan berperan pada pencapaian Misi Pertama ini adalah :

- 1) Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 2) Urusan Fungsi Penunjang Keuangan;
- 3) Urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- 4) Urusan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
- 5) Urusan Fungsi Lain (Setda, Setwan, Inspektorat)
- 6) Urusan komunikasi dan informatika
- 7) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8) Urusan Pertanahan
- 9) Urusan statistik
- 10) Urusan persandian
- 11) Urusan kearsipan

7.1.2 Kebijakan Umum Misi Kedua

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi kedua yaitu “Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada peningkatan kualitas masyarakat Kendal secara umum melalui peningkatan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan dengan tetap memperhatikan ekosistem pendidikan yang didukung sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan yang sesuai standar nasional.

Urusan utama yang menjadi fokus dan berperan pada pencapaian Misi Kedua ini adalah :

- 1) Urusan Pendidikan
- 2) Urusan perpustakaan

7.1.3 Kebijakan Umum Misi Ketiga

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi ketiga yaitu “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penanggulangan kemiskinan”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada peningkatan derajat dan kualitas hidup masyarakat Kendal secara utuh, melalui pelayanan kesehatan yang prima, jaminan dan perlindungan sosial yang merata

serta perwujudan keberdayaan masyarakat yang berkeadilan gender dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat desa.

Urusan utama yang menjadi fokus dan berperan pada pencapaian Misi ketiga ini adalah :

- 1) Urusan Kesehatan
- 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3) Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 4) Urusan Sosial
- 5) Urusan Transmigrasi
- 6) Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa

7.1.4 Kebijakan Umum Misi Keempat

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi keempat yaitu “Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada optimalisasi peran dan potensi pemuda dalam olahraga maupun kepemudaan serta ketersediaan dukungan sarana dan prasarana keolahragaan dengan tetap berlandaskan rasa cinta tanah air.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi Keempat adalah:

- 1) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

7.1.5 Kebijakan Umum Misi Kelima

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi kelima yaitu “Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada penguatan daya saing dan daya tahan produk unggulan dan asli daerah melalui penguatan Koperasi UKM, kemudahan akses terhadap permodalan, akses pasar dan optimalisasi Kawasan Industri Kendal.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi kelima adalah:

- 1) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
- 2) Urusan Perdagangan
- 3) Urusan Perindustrian

7.1.6 Kebijakan Umum Misi Keenam

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi keenam yaitu “Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada peningkatan diversifikasi

produk pertanian tanaman pangan sebagai perwujudan ketahanan pangan, peningkatan produksi perikanan melalui pengelolaan TPI dan pemasaran hasil produksi.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi keenam adalah:

- 1) Urusan Pertanian
- 2) Urusan Kelautan dan perikanan
- 3) Urusan Pangan

7.1.7 Kebijakan Umum Misi Ketujuh

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi ketujuh yaitu “Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada pengembangan kepariwisataan melalui promosi dan event kepariwisataan dengan tetap melandaskan pada kekayaan budaya lokal yang didukung dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta kerukunan antarumat beragama.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi ketujuh adalah:

- 1) Urusan Kebudayaan
- 2) Urusan Pariwisata

7.1.8 Kebijakan Umum Misi Kedelapan

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi kedelapan yaitu “Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada dukungan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, konektivitas antar wilayah hingga ke tingkat desa, dengan tetap mengedepankan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi kedelapan adalah :

- 1) Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 2) Urusan Perumahan rakyat dan permukiman
- 3) Urusan Lingkungan Hidup
- 4) Urusan Perhubungan

7.1.9 Kebijakan Umum Misi Kesembilan

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi kesembilan yaitu “Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan

pada kebijakan yang pro investasi melalui pelayanan perijinan dan non perijinan yang efektif, promosi potensi investasi, dan penyiapan dukungan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, selain itu perlu diarahkan terkait dukungan situasi dan kondisi yang kondusif, serta masyarakat yang aman dan tenteram.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi kesembilan adalah:

- 1) Urusan Penanaman Modal
- 2) Urusan Tenaga Kerja
- 3) Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

7.2 Program Pembangunan Daerah

Setelah menetapkan kebijakan umum maka langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.

Program pembangunan daerah Kabupaten Kendal merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Kendal yang berisi program prioritas yang bersifat strategis.

7.2.1 Program Unggulan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu “Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN”, maka program unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- 1) Peningkatan peran aparatur daerah yang amanah dan profesional melalui peningkatan pembinaan kepegawaian, pendidikan kedinasan, sistem informasi kepegawaian, pemberian reward dan punishment.
- 2) Peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui penguatan SOTK, sistem perencanaan dan penganggaran partisipatif, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah,

sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

- 3) Peningkatan PAD Kendal dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta penguatan sistem akuntansi pengelolaan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pelayanan masyarakat, kualitas Perda dan sistem pelayanan perijinan dengan optimalisasi penyusunan Perda, penegakan Perda, sistem perijinan daerah terpadu, gratis pembuatan KTP/KK/akte kelahiran.
- 5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, pelaksanaan dan pengawasan melalui akses mudah masyarakat terhadap informasi kegiatan, kebijakan pemerintahan, informasi layanan masyarakat terpadu, dialog, curah pendapat, pelibatan masyarakat secara aktif dalam penyusunan, pelaksanaan & pengawasan kebijakan publik.
- 6) Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dengan mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta aturan turunannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
- 7) Peningkatan kinerja dan kesejahteraan hidup bagi aparatur pemerintahan daerah melalui pemberian tunjangan kinerja PNS (insentif, lauk pauk, beras dan lain lain).
- 8) Pemberian tunjangan untuk Kepala Desa dan perangkat desa, BPD serta pemberian insentif bagi ketua RT / RW.
- 9) Peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor layanan publik terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan & administrasi kependudukan.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- 2) Program peningkatan kesejahteraan pegawai
- 3) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 5) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- 6) Program pengembangan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 7) Program perencanaan pembangunan daerah
- 8) Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah
- 9) Program peningkatan disiplin aparatur
- 10) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

7.2.2 Program Unggulan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu “Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia”, maka program unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- 1) Peningkatan sarana prasarana pendidikan, pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu pendidikan karakter, peningkatan manajemen berbasis sekolah dan desentralisasi pendidikan.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

7.2.3 Program Unggulan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan”, maka program unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- 1) Peningkatan penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin, tersedianya lapangan pekerjaan, percepatan pembangunan kawasan terisolasi & perbatasan.
- 2) Meningkatkan layanan kesehatan berkualitas melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (Polindes, Puskesmas, RSUD).
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, pengawasan obat dan makanan untuk memberikan layanan kesehatan murah bagi keluarga prasejahtera.

- 4) Peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat serta peningkatan program gizi seimbang bagi masyarakat.
- 5) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyediaan sarana prasarana memadai terhadap alat penunjang kesehatan.
- 6) Peningkatan fasilitas umum masyarakat penunjang kesehatan masyarakat.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
- 5) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 6) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- 7) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- 8) Program Keluarga Berencana
- 9) Program Pelayanan Kontrasepsi
- 10) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 11) Program penanggulangan kemiskinan lainnya
- 12) Program peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- 13) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

7.2.4 Program Unggulan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu “Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme”, maka program unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- 1) Peningkatan pembinaan & pemberdayaan berkelanjutan serta peningkatan sarana prasarana penunjang pemberdayaan

pemuda, karang taruna, komunitas pemuda/pemudi, remaja masjid/mushola, komunitas olahraga, komunitas seni budaya dll.

- 2) Peningkatan kreatifitas & ketrampilan pemuda, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Meningkatkan sarana-prasarana olahraga.
- 4) Memberikan reward kepada atlet-etlet berprestasi di level daerah maupun nasional.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olah Raga
- 2) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

7.2.5 Program Unggulan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu “Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal”, maka program unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas SDM & manajemen UKM/UMKM & koperasi.
- 2) Peningkatan akses UKM/UMKM & koperasi terhadap sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi informasi dan pasar.
- 3) Peningkatan kualitas kelembagaan & kerjasama koperasi, system pengelolaan pasar tradisional/pasar modern yang integral.
- 4) Mendorong kemudahan penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan pedagang kecil dan sebagainya tanpa membebani.
- 5) Mendorong peningkatan permodalan lembaga keuangan mikro untuk kredit & pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 3) Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

7.2.6 Program Unggulan Misi Keenam

Dalam rangka perwujudan misi keenam yaitu “Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan,

dan sumberdaya alam lainnya”, maka program unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi keenam adalah:

- 1) Program pelestarian kawasan hutan di sekitar gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Kendal.
- 2) Perwujudan ketahanan pangan daerah
- 3) Program pengembangan kawasan pesisir
- 4) Menerbitkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dalam rangka mengembangkan potensi pantai dan pegunungan.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/peternakan)
- 2) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- 3) Program pengembangan perikanan tangkap
- 4) Program pengembangan perikanan budidaya

7.2.7 Program Unggulan Misi Ketujuh

Dalam rangka perwujudan misi ketujuh yaitu “Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama”, maka program unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- 1) Melestarikan seni budaya lokal melalui festival seni budaya.
- 2) Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok seni budaya.
- 3) Peningkatan sarana prasarana tempat ibadah, majelis taklim dll.
- 4) Peningkatan sarana prasarana pendidikan berbasis agama.
- 5) Pemberian dana insentif bagi guru Madin, MI, MTs, MA, pondok pesantren.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan kegiatan keagamaan.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program pengembangan Pemasaran pariwisata
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Nilai Budaya
- 4) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

7.2.8 Kebijakan Umum Misi Kedelapan

Dalam rangka perwujudan misi kedelapan yaitu “Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di

perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”, maka program unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan.
- 2) Peningkatan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Peningkatan pengamanan dan rehabilitasi daerah aliran sungai termasuk antisipasi bahaya banjir dan keperluan irigasi pertanian.
- 4) Peningkatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam.
- 5) Peningkatan perlindungan terhadap flora & fauna sebagai keanekaragaman hayati yang menjadi aset bangsa dan negara.
- 6) Peningkatan layanan air bersih untuk rumah tangga, pemukiman dan industri.
- 7) Peningkatan layanan jaringan irigasi sampai tingkat usaha pertanian.
- 8) Peningkatan jalan dan jembatan pada kawasan perbatasan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan sentra-sentra produksi.
- 9) Peningkatan kualitas permukiman dan perumahan.
- 10) Peningkatan pengelolaan sampah dan drainase air limbah.
- 11) Peningkatan jalan umum, trotoar, taman, penerangan dan arena bermain & olahraga bagi masyarakat.
- 12) Peningkatan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan raya dan transportasi umum.
- 13) Membuka kemudahan akses transportasi dan komunikasi yang menghubungkan wilayah pegunungan dengan wilayah pantai agar potensi yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin demi kemajuan Kabupaten Kendal.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- 2) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- 3) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum, dan air limbah
- 4) Program Pengembangan Perumahan

- 5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 6) Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi SDA

7.2.9 Program Unggulan Misi Kesembilan

Dalam rangka perwujudan misi kesembilan yaitu “Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja”, maka program unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga penelitian untuk pengembangan sumber daya alam daerah, potensi wisata daerah, potensi lapangan kerja baru, potensi energi terbarukan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan sumber daya mineral.
- 2) Mengembangkan Sistem Informasi dan pengelolaan potensi daerah dalam berbagai bidang.
- 3) Peningkatan kualitas, ketrampilan & produktivitas tenaga kerja dengan pembinaan dan perbaikan iklim ketenaga-kerjaan, daya saing & hubungan industrial.
- 4) Peningkatan sistem perijinan investasi yang mendukung promosi daerah, peningkatan layanan informasi potensi Kabupaten Kendal yang massif baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan program pembangunan yang mendukung misi ini adalah:

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 5) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan
- 6) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 7) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
- 8) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Selengkapnya kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015-2021 yang diselaraskan dengan sasaran dan indikatornya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
Misi, 1 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN										
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan yang terukur, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas penantausahaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku, peningkatan kapasitas ASN	• Peningkatan akuntabilitas kinerja fokus kepada kinerja birokrasi • Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah fokus pada kriteria pencapaian status WTP	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat / BinteK yang difasilitasi BKD Kab. Kendal pada tahun berjalan	%	100	100	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	100	100	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang telah mengikuti Diklat penjenjangan Auditor/P2UPD	%	100	100	Fungsi Penunjang lainnya	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	62	85	Fungsi Penunjang lainnya	Inspektorat
				Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Belanja Langsung terhadap total APBD	%	36	45	Fungsi Penunjang Keuangan	Badan Keuangan Daerah
					Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WDP	WTP	Fungsi Penunjang Keuangan	Badan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
				Program pengembangan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% PD yang bernilai IKM baik	%	80	100	Fungsi Penunjang lainnya	Setda
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan tepat waktu	%	78	100	Fungsi Penunjang lainnya	Setda
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP, SOP, penilaian kinerja pelayanan publik, pemanfaatan TI untuk pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada penataan kelembagaan, penyediaan sarpras dan manajemen	Program Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Aparatur Pemerintah	meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur	bulan	12	60	Fungsi Lainnya	Semua PD
				Program peningkatan disiplin aparatur	meningkatnya disiplin aparatur	bulan	12	60	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Semua PD
				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	Unit	9	22	Komunikasi dan informatika	Dinas Kominfo
					Koneksi Point to Point (PTP) wireless ke UPTD Teknis di Kab. Kendal	titik	6	62	Komunikasi dan informatika	Dinas Kominfo
				Misi 2, Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.						
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan keterjangkauan pelayanan	Penurunan angka putus sekolah dan pengurangan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	%	106,29	100,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
	Kabupaten Kendal	pendidikan melalui penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan, peningkatan cakupan BSM, peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan non formal, dan upaya-upaya untuk mengurangi beban masyarakat dalam pendidikan	beban siswa miskin dengan fokus pada siswa SMP serta peningkatan pelayanan pendidikan non formal	Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	98,57	100,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/ MI/Paket A	%	84,73	90,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	60,24	66,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0,11	0,02	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0,83	0,10	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatkan Angka Melanjutkan dari SMP sederajat ke SMA sederajat melalui pemberian bantuan atau beasiswa untuk	Pengembangan ekosistem pendidikan di Kabupaten Kendal dengan fokus pada peningkatan peran swasta dan orang tua untuk	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/ MTs	%	100,00	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/ MTs ke SMA/SMALB/ SMK/MA	%	88,35	90	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
		melanjutkan sekolah, penyadaran akan pentingnya pendidikan, Pengembangan ekosistem pendidikan	meningkatkan angka melanjutkan.							
Misi 3, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan										
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan rumah tangga berPHBS, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas lingkungan sehat, dan peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana	Peningkatan usia harapan hidup dengan prioritas pada peningkatan usia harapan hidup laki-laki	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%		30	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%		100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	per 1.000 penduduk	<0,02	<0,01	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular berbasis Posbindu	%	NA	21	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
		prasarana kesehatan		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	60	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai (unit)	%	NA	80	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	%	10	100	Kesehatan	RSUD Dr. Soewondo
	Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana melalui peningkatan prasarana dan sarana pelayanan KB,	Peningkatan kualitas pelayanan KB dan kapasitas PLKB serta pengembangan kelembagaan KB khususnya di pedesaan.	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	%	80,6	82	Pengendalian penduduk dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
		peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta peningkatan kapasitas PLKB.								
		Meningkatkan peran kader posyandu dalam meningkatkan peserta KB aktif melalui media komunikasi dan informasi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB, khususnya kader-kader posyandu.		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	9,9	10	Pengendalian penduduk dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Penyediaan alat kontrasepsi melalui dana APBD	Peningkatan dayabeli masyarakat terhadap alat kontrasepsi untuk mencapai cakupan KB Mandiri	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	27,74	28	Pengendalian penduduk dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Promosi dan penyediaan MOP secara gratis	Meningkatkan peran laki-laki melaksanakan vasektomi	Program Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,02	1,4	Pengendalian penduduk dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
										Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Menurunkan angka kemiskinan melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan dengan fokus pada kawasan yang memiliki populasi kemiskinan tinggi	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%	20	100	Sosial	Dinas Sosial
				Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya	Menurunnya angka kemiskinan	%	11,8	7,49	Lintas urusan	Lintas PD
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui optimalisasi pelayanan penanganan	Mewujudkan upaya penegakan HAM, penghapusan kekerasan dan perlindungann terhadap perempuan dan	Program peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	rasio		0,04	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
		tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan jaringan, penguatan kelembagaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (puskesmas, RS, P2TP2A, PPT).	anak.		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 4, Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme										
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatkan motivasi berprestasi para atlet melalui penyelenggaraan event-event olah raga dan pemberian penghargaan/tali asih kepada atlet berprestasi, peningkatan kapasitas pembina olah	Peningkatan prestasi atlet dengan fokus pada pembinaan, pembibitan serta pencarian bakat calon-calon atlet yang berprestasi dengan melibatkan peran serta organisasi keolahragaan yang ada.	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	cabor	29	33	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
		raga/pelatih, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga								
		meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan melalui pembinaan, pendampingan dan pelatihan	Peningkatan kapasitas generasi muda diprioritaskan pada kewirausahaan pemuda	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	12	27	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Misi 5, Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal										
5	Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan daya saing koperasi serta UMKM	Mengembangkan potensi UMKM melalui pengembangan kualitas data usaha mikro dan kecil, peningkatan ketrampilan pelaku usaha mikro dan kecil, kemitraan usaha	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan prioritas pada fasilitasi perijinan UMKM, akses permodalan usaha dan pemasaran produk UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah wirausaha baru mikro dan kecil	orang	17.744	34.197	Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
					Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	unit	NA	1.573	Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan		Jumlah produk unggulan daerah (PUD) yang menjadi OVOP	unit	5	10	Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
		dengan koperasi/badan usaha yang lebih besar.		Kompetitif Usaha Kecil Menengah						dan menengah
		Meningkatkan kapasitas Koperasi melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan dan penguatan kelembagaan	memfasilitasi pengembangan koperasi khususnya kepada koperasi-koperasi yang statusnya tidak aktif	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	71,4	78,65	Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
Misi 6, Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya										
6	Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan non beras, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan, dan memperlancara distribusi pangan.	meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lumbung pangan, dan menjaga stabilitas harga pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Penguatan Cadangan Pangan	%	20,09	45	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
					Skor pola pangan harapan	%	87,9 (perhitungan versi lama)	88,9	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
	Meningkatnya produktifitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan	Meningkatkan produktivitas, mutu hasil pertanian, sumberdaya pertanian melalui optimalisasi distribusi saprodi pertanian dan peternakan, pengembangan usaha pertanian kawasan terpadu, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan manajemen usaha serta pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.	Peningkatan produksi, mutu dan pemasaran produk/ komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ peternakan)	Produksi pertanian tanaman pangan utama				Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
					- Padi	Ton	276.688	1.387.596		
					- Jagung	Ton	209.450	1.053.552		
					- Kedelai	Ton	3.040	15.312		
		Meningkatkan kapasitas SDM bidang pertanian melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan	Peningkatan kapasitas pelaku usaha bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, khususnya yang	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	51	73	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
		pelatihan.	bergerak di bidang produksi							
	Meningkatnya produksi perikanan.	Meningkatkan produksi sektor perikanan melalui penguatan kapasitas kelompok usaha perikanan, fasilitas penyediaan peralatan tangkap dan budidaya, pembangunan infrastruktur pendukung pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (kg)	Kg	1.858.904	2.314.469	Kelautan dan Perikanan	DKP
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	21.967.096	29.206.044	Kelautan dan Perikanan	DKP
Misi 7, Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama										
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung obyek wisata, promosi,	Peningkatan kualitas pariwisata dengan prioritas pada pengembangan	Program pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata	orang	239.899	1.611.062	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
				Program Pengembangan Destinasi	Jumlah obyek wisata unggulan	obyek	9	10	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
		dan memperbanyak even-even wisata	kerjasama paket wisata dengan daerah lain, dan pengembangan destinasi wisata	Pariwisata						Pariwisata
	Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya	Mengoptimalkan pelestarian dan inventarisasi benda cagar budaya	Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	75	100	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan keterlibatan ormas dan LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan dan TOT kepada pengurus ormas dan LSM.	Peningkatan peran aktif ormas dan LSM dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Ormas, LSM dan OKP yang melaksanakan peningkatan wawasan kebangsaan	kelompok	17	25	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Kesbangpol

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
Misi 8, Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup										
8	Tersedianya sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	37,1	100	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	DPU dan Penataan Ruang
	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi rusak, rehabilitasi secara intensif, dan peningkatan peran Paguyuban Petani Pemakai Air dalam pemeliharaan saluran	Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus perbaikan jaringan irigasi yang rusak.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase irigasi berfungsi baik	%	40,50	45	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	DPU dan Penataan Ruang
	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman	Menurunkan jumlah permukiman	Peningkatan rehabilitasi Rumah Tidak	Program Pengembangan Perumahan	% rumah layak huni yang tertangani	%	15	35	Pekerjaan Umum dan penataan	DPU dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
	yang sehat, teratur dan berkelanjutan	kumuh perkotaan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu, dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman	Layak Huni bagi keluarga kurang mampu dan penataan lingkungan terutama pada kawasan kumuh.						Ruang	
				Program Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum, dan air limbah	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	58	100	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	DPU dan Penataan Ruang
	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup melalui koordinasi, sosialisasi dan pengawasan secara intensif, serta pemantauan status mutu air, udara dan tanah.	Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan status mutu air	Titik/tahun	40	30	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	15	20	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Luas cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Ha	0	75	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
Misi 9, Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja										
9	Meningkatnya investasi	Meningkatkan jumlah investasi melalui pelayanan perijinan dan non perijinan yang efektif, promosi potensi investasi, dan kerjasama antar daerah	Peningkatan daya tarik investasi diprioritaskan pada penyederhanaan pelayan perijinan satu pintu, pemberian insentif, dan e-perijinan.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	sektor	5	25	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	investor	163	266	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Menurunnya angka pengangguran	Pengurangan pengangguran melalui program AKAD dan AKAN dengan dibekali ketrampilan yang memadai, peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, ketrampilan kewirausahaan pada kelompok	Pengurangan pengangguran difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM calon tenaga kerja, penyelesaian hubungan industrial, dan peningkatan pemanfaatan TI dalam penyediaan informasi peluang kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	%	71,87	71,87	Ketenagakerjaan	Disnaker
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	88,89	Ketenagakerjaan	Disnaker
					Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	58,96	83,33	Ketenagakerjaan	Disnaker
					Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan	%	80	80	Ketenagakerjaan	Disnaker

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	PD Utama
							Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021		
		usia produktif.			pelatihan kewirausahaan					
				Program Perlindungan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB	%	92,86	75	Ketenagakerjaan	Disnaker
	Menurunnya angka kriminalitas	Meningkatkan rasa kemananan dan kenyamanan masyarakat melalui peningkatan intensitas patroli pada daerah rawan, penambahan sarana prasarana dan personil Satpol PP, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.	Penurunan kasus kriminalitas dengan prioritas pada tindakan preventif, represif, dan edukatif.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	persentase patroli siaga ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP dan Damkar
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	meningkatnya penanganan penyidikan terhadap kasus pelanggaran Perda	berkas	30	100	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP dan Damkar
				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	cakupan penegakan perda	%	100	100	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satpol PP dan Damkar

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program dan prioritas disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD. Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
1	Urusan Pendidikan																	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini																	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 Tahun	%	52,92	55,00	57,00	4.254.500	59,00	3.495.000	61,00	3.870.000	63,00	4.230.000	65,00	4.655.000	65,00	20.504.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0-6 Tahun	%	38,17	40,00	42,00		44,00		46,00		48,00		50,00		50,00		
		Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	%	37,23	39,00	41,50		43,50		46,00		48,00		50,00		50,00		
	Sembilan Tahun																	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	106,29	103,15	100	89.281.470	100	101.611.250	100	110.807.500	100	114.038.300	100	121.361.050	100	537.099.570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	98,57	98,9	99,2		99,5		99,8		100		100		100		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	%	84,73	85	86		87		88		89		90		90		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	60,24	61	62		63		64		65		66		66		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0,11	0,1	0,08		0,06		0,04		0,03		0,02		0,02		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0,83	0,71	0,59		0,47		0,35		0,23		0,1		0,1		
		Angka Kelulusan (AL) SD	%	99,95	99,98	100		100		100		100		100		100		
		Angka Kelulusan (AL) SMP	%	99,1	99,4	99,9		100		100		100		100		100		
		Angka Mengulang SD	%	1,36	1,3	1,24		1,18		1,12		1,06		1		1		
		Angka Mengulang SMP	%	0,21	0,19	0,17		0,15		0,13		0,11		0,1		0,1		
		Nilai Rata-rata Ujian Sekolah Siswa SD		67,79	74,55	76		77		78		79		80		80		
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional Siswa SMP		54	55	56		57		58		59		60		60		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/MA	%	88,35	88,45	88,55		88,7		88,8		88,9		90		90		
		Persentase SD Berakreditasi A	%	17,86	22	35		45		55		65		75		75		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Persentase SMP Berakreditasi A	%	50,98	58,82	68,63		78,43		88,24		94,12		100		100		
		Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	%	60,19	61,3	62,41		63,52		64,63		65,74		66,85		66,85		
		Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	%	69,71	75,23	79,75		82,26		84,77		87,28		89,79		89,79		
		Persentase Ruang Kelas SD Memiliki Meubelair Baik	%	52,59	52,62	52,9		53,45		54		54,56		55,12		55,12		
		Persentase Ruang Kelas SMP Memiliki Meubelair Baik	%	68,2	68,79	68,79		69,2		69,62		70,04		70,46		70,46		
		Persentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	29,95	40,56	47,38		52,62		57,87		63,11		68,36		68,36		
		Persentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	67,65	71,57	71,57		76,47		81,37		86,27		91,18		91,18		
		Persentase SD Memiliki Ruang UKS Kondisi Baik	%	11,2	11,36	11,54		12,94		14,68		16,43		18,18		18,18		
		Persentase SMP Memiliki Ruang UKS Kondisi Baik	%	42,16	42,16	42,16		47,06		51,96		56,86		61,76		61,76		
		Persentase SD Memiliki Sanitasi Kondisi Baik	%	70,93	70,98	71,85		73,6		75,35		77,1		78,85		78,85		
		Persentase SMP Memiliki Sanitasi Kondisi Baik	%	76,47	81,37	85,29		89,22		92,16		95,1		98,04		98,04		
		Persentase SD Memiliki Sarana Prasarana Ibadah	%	16,99	16,99	16,99		20,45		23,95		27,45		30,94		30,94		
		Persentase SMP Memiliki Ruang Komputer Kondisi	%	41,18	43,14	43,14		45,1		47,06		49,02		50,98		50,98		
		Persentase SMP Memiliki Laboratorium IPA	%	44,12	50	53,92		55,88		57,84		59,8		61,76		61,76		
		Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD		1	1	1		1		1		1		1		1		
		Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP		0,98	0,99	1		1		1		1		1		1		
		Rasio Guru/Siswa SD		0,07	0,067	0,063		0,06		0,057		0,053		0,05		0,05		
		Rasio Guru/Siswa SMP		0,06	0,059	0,058		0,056		0,054		0,052		0,05		0,05		
	Program Pendidikan Menengah					12.084.768				-		-		-		12.084.768		
	Program Pendidikan Non Formal					7.206.000		8.658.000		8.988.500		9.646.500		9.982.000		44.481.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	%	96,41	96,58	96,76		96,94		97,12		97,3		97,5		97,5		
		Angka Kelulusan (AL) Paket A	%	93,14	93,45	93,75		94,05		94,35		94,65		95		95		
		Angka Kelulusan (AL) Paket B	%	75,33	76,13	76,9		77,7		78,5		79,3		80		80		
		Angka Kelulusan (AL) Paket C	%	90,33	90,78	91,25		91,7		92,15		92,6		93		93		
		Persentase PKBM Memiliki Akreditasi	%	25	30	40		50		60		70		75		75		
		Persentase LKP	%	15,38	20,51	25,64		30,77		35,9		43,59		50		50		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Jumlah Desa Vokasi yang Dikembangkan	Desa	9	10	11		12		13		14		15		15		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						14.855.300		20.338.000		21.095.500		26.254.000		27.276.500		109.819.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Pendidik TK Memiliki Sertifikasi	%	42,74	42,95	43,16		43,37		43,58		43,79		44		44		
		Persentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	%	54,89	55,75	56,6		57,45		58,3		59,15		60		60		
		Persentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	%	56,96	57,8	58,6		59,5		60,4		61,2		62		62		
		Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4	%	46,36	46,97	47,57		48,18		48,79		49,39		50		50		
		Persentase Pendidik SD Berkualifikasi S1/D4	%	84	85	86		87		88		89		90		90		
		Persentase Pendidik SMP Berkualifikasi S1/D4	%	91,4	92,33	93,27		94,2		95,13		96,07		97		97		
	Program Menejemen Pelayanan Pendidikan						3.055.000		2.682.000		2.882.000		3.220.000		3.415.000		15.254.000	
		Ketersediaan Buku Profil Pendidikan	unit	1	1	1		1		1		1		1		5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Sekolah	%	1,05	1,57	2,1		2,62		3,15		3,67		4,2		4,2		
		Persentase Sekolah	%	5,88	8,82	11,76		14,7		17,65		20,59		23,53		23,53		
2	Urusan Kesehatan																	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		14.500.000	Dinkes
		Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	77		83		85		90		90		90		100		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						45.505.000		65.505.000		65.505.000		65.505.000		65.505.000		307.525.000	Dinkes
		Cakupan Penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100		100		100		100		100		100		100		
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	unit	1	12	9		8		-		-		-		30		
	Program Pengawasan Obat dan Makanan						1.300.000		1.400.000		1.450.000		1.500.000		1.550.000		7.200.000	Dinkes
		Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM / P-IRT)	%	62		65		70		75		80		85		85		
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						1.375.000		1.375.000		1.375.000		1.375.000		1.375.000		6.875.000	Dinkes
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	77	78	80		85		85		90		90		90		
		Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif (Status Minimal Madya)	%	37,50	40,00	42,00		45,00		47,00		50,00		50,00		50,00		
		Cakupan kader kesehatan aktif dalam SBH*	%	80	80	80		80		85		85		90		90		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						1.653.800		2.279.800		2.382.300		2.469.800		2.554.800		11.340.500	Dinkes
		Prevalensi balita gizi kurang	%	3,93	4,00	5,9		5,8		5,7		5,6		5,6		5,6		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100		100		100		100		100		100		100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	35	40	44		47		50		52		54		54		
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase BBLR (Berat Badan kurang dari 2.500 gr)	%	4,08	4,07	4,06		4,05		4,04		4,03		4,00		4,00		
		Cakupan pelayanan pemeriksaan laboratorium air bersih/ air minum	%	50	60	70		75		80		85		90		90		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						1.650.000		3.925.000		4.475.000		4.075.000		4.450.000		18.575.000	Dinkes
		Cakupan penggunaan air bersih	%	75,00	80,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100		100		
		Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan	%	70	80	99		100		100		100		100		100		
		Cakupan penggunaan jamban keluarga yang memenuhi syarat	%	73	75	76		77		78		79		80		80		
		Cakupan Pengelolaan sampah rumah tangga	%	15	15	15		20		30		45		50		50		
		Cakupan Rumah sehat	%	63	65	66		70		75		80		85		85		
		Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	-	30	61		65		69		75		100		100		
		Puskesmas memiliki IPAL	unit	-	2	3		4		4		4		4		21		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						1.495.000		1.582.500		1.870.000		2.052.500		2.245.000		9.245.000	Dinkes
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Jml seluruh pasien Tb yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk disuatu wilayah tertentu (CNR)	per 100.000 penduduk	120,40	125	131		138		146		155		165		165		
		Prosen pasien baru TB paru terkonfirmasi bakteriologis yang sembuh setelah slesai masa pengobatan, diantara pasien baru TB paru terkonfirmasi yang tercatat (angka kesembuhan)	%	>85	>85	>85		>85		>85		>85		>85		>85		
		Persentase angka kasus HIV yang diobati (SUFA)	%	50	60	65		70		75		80		85		85		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Jml penderita baru kusta ditemukan pada periode satu tahun per 100.000 penduduk (CDR)	per 100.000 penduduk			<5		<5		<5		<5		<5		<5		
		Prosen jml diare balita yang dilayani dalam satu tahun per target penemuan penderita diare pada tahun yg sama	%	22.5 %	22.5 %	22.5 %		25		27,5		30		32,5		32,5		
		Prosen jml diare semua umur yang dilayani dalam satu tahun per target penemuan penderita diare pada tahun yg sama	%			12.5 %		15		17,5		20		22,5		22,5		
		Prosen puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan tata laksana pnemonia melalui program MTBS	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase puskesmas yang melakukan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	per 100.000 penduduk	68	<65	<63		<60		<58		<56		<55		<55		
		Persentase Kematian DBD	%			<1,4%		<1,2%		<1,2%		<1,2%		<1,2%		<1,2%		
		Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	per 1000 penduduk	<0,02	<0,02	<0,02		<0,01		<0,01		<0,01		<0,01		<0,01		
		Pencegahan penularan penyakit zoonosis (Flu burung, pes, rabies, anthrak, GHPR, leptospirosis), penyakit zoonosis tertangani 100 %	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase KLB dapat ditangani < 24 jam	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) anak usia di bawah 15 tahun	per 100.000 penduduk	≥2	≥2	≥2		≥2		≥2		≥2		≥2		≥2		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						250.000		300.000		350.000		400.000		500.000		1.800.000	Dinkes
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan integrasi sistem informasi kesehatan	%	-	-	25		40		80		100		100		1		
		Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	20,00	20,50	20,80		20,90		20,90		21,00		21,10		21,10		
		Rasio para medis per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	40	41	42		43		44		45		45		45		
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin						10.000.000		13.500.000		14.500.000		6.100.000		7.100.000		51.200.000	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran													PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target	Rp (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		cakupan penduduk memiliki Jaminan pemeliharaan kesehatan (universal total Coverage /UTC)	%	60	65	70		75		80		85	(15)	90		90		
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya						15.000.000		23.000.000		7.000.000		8.500.000		10.000.000		63.500.000	Dinkes
		Cakupan puskesmas (unit)	unit	30	30	30		30		30		30		30		30		
		Cakupan pembantu puskesmas (unit)	unit	52	52	52		53		54		54		54		54		
		Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai (unit)	%	60	60	60		65		70		75		80		80		
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia						15.000		20.000		25.000		30.000		35.000		125.000	Dinkes
		Cakupan pemeriksaan pra usaha dan usaha	%	60	65	70		71		72		73		74		74		
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak						1.586.800		1.164.000		1.650.000		2.200.000		2.750.000		9.350.800	Dinkes
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang di fasilitas kesehatan	%	NA	80,00	81,00		82,00		83,00		83,50		84,00		84,00		
		Cakupan kunjungan bayi	%	97	97	97		97		97		97		97		97		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,27	94,00	94,50		95		95		95		95		95		
		Cakupan pelayanan nifas	%	80	80	80		80		90		90		90		90		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	65	65	65		65		80		80		80		80		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	70	70	70		88		88		90		90		90		
		Cakupan pelayanan anak balita	%	90	90	90		90		90		90		90		90		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular						1.025.000		1.173.000		1.375.000		1.610.000		1.950.000		7.133.000	Dinkes
		Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular berbasis Posbindu	%	5,24	5,24	5,24		7		10,5		15,75		21		21		
1	Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru/mata						70.852.500		128.450.000		93.160.000		65.610.000		54.750.000		412.822.500	RSUD Dr.H. SOEWONDO KENDAL
		Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD						78.550.000		86.405.000		95.045.500		104.550.050		115.005.005		479.555.555	RSUD Dr.H. SOEWONDO KENDAL
		- BOR	%	75	75	75		75		75		75		75		75		
		- AVLOS	hari	3.5	3,50	3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		- TOI	kali	1		1		1		1		1		1		1		
		- BTO	kali	50		50		50		50		50		50		50		
		- NDR	%	2.5	2.50	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		
		- IKM	nilai	80	80	81		82		83		84		85		85		
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan						6.250.000		10.000.000		10.000.000		75.000.000		100.000.000		201.250.000	DPU dan Penataan Ruang
		Jumlah jembatan terbangun	buah		1,00	3,00		2,00		1,00		1,00		1,00		7,00		
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong					81	4.877.500	84	5.765.870	87	6.342.457	90	6.976.702	93	7.674.372		31.636.901	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase saluran drainase/ gorong-gorong berkondisi baik	%	40,57	42,19	81,00		84,00		87,00		90,00		93,00		93,00		
							8.630.500		6.650.000		7.150.000		7.150.000		7.150.000		36.730.500	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase cakupan pelayanan drainase lingkungan	%	NA	69	75		86		95		100		100		100		
	Program Pembangunan turap/talud/ bronjong						19.998.000		13.197.800		14.517.580		15.969.338		17.556.271		81.238.989	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase Turap/Talud/Bronjong berkondisi baik	%			10		15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		
	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan						200.000		220.000		242.000		266.200		292.820		1.221.020	DPU dan Penataan Ruang
		Tersediannya dokumen inspeksi jalan dan jembatan	%	100,00		100		100		100		100		100		100		
	Jembatan																	
							330.410.000		363.451.000		200.000.000		220.000.000		242.000.000		1.355.861.000	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	37,10	62,46	69,95		78		84		91		98		100,00		
	Program Tanggap Darurat jalan dan jembatan						50.000		55.000		60.500		66.550		73.205		305.255	DPU dan Penataan Ruang
		Tertangainya jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	%	100,00		100		100		100		100		100		100		
	Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan						1.335.000		1.248.500		1.373.350		1.510.685		1.661.051		7.128.586	DPU dan Penataan Ruang
		Tersediannya data base jalan dan jembatan yang up to date	%	100,00		100		100		100	-	100		100		100		
	Program peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan						3.230.000		1.353.000		1.488.300		1.637.130		1.800.843		9.509.273	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	70,00		80		85		90		95		100		100		
	Program pembangunan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya						600.000		700.000		800.000		900.000		1.000.000		4.000.000	DPU dan Penataan Ruang
		Jumlah kegiatan konservasi	keg	34,00	9,00	9		10		11		12		13				
	Program pengendalian Banjir						17.365.750		11.990.000		13.189.000		14.507.900		15.958.690		73.011.340	DPU dan Penataan Ruang
		Menurunnya luasan genangan di daerah rawan banjir	Ha	40,00		30		28		26		24		22		22		
	Program Penyediaan dan pengolahan air baku						6.688.300		7.357.130		8.092.843		8.902.127		9.792.340		40.832.740	DPU dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%		10,00	10		20		30		40		50		50		
	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.						40.462.000		44.508.200		48.959.020		53.854.922		59.240.414		247.024.556	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase irigasi berfungsi baik	%	40,50		25		30		35		40		45		45		
4	Pengelolaan Areal Pemakaman						12.800.000		16200000		1250000		300000		350000		30.900.000	DPU dan Penataan Ruang
		Rasio tempat Pemakaman dengan satuan penduduk				5%		10%		15%		20%		25%				
5	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah						19.330.000		19.900.000		19.200.000		11.800.000		12.000.000		82.230.000	DPU dan Penataan Ruang
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%			83		89		94		98		100		100		
															4.300.000		4.300.000	DPU dan Penataan Ruang
		persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	NA	78	84		88		92		95		100		100		
	Program Pemanfaatan Ruang						1.850.000		1.750.000		1.350.000		1.450.000		1.500.000		7.900.000	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase tersedianya luasan KTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.	%	1,3	2	4		6		8		10		12		12		
	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang						600.000		800.000		1.050.000		1.100.000		850.000		4.400.000	DPU dan Penataan Ruang
		Ruang publik yang berubah peruntukannya.	%	100	90	75		60		45		35		25		25		
	Program Perencanaan Tata Ruang						750.000		1.650.000		2.500.000		2.150.000		1.250.000		8.300.000	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	%	NA	NA	20		40		60		80		100		100		
	umum						10.510.000		28.985.000		30.737.200		31.512.300		31.637.610		133.382.110	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase ketersediaan sarana prasarana umum	%			10%		15%		20%		25%		30%		30%		
	Program penyelenggaraan jasa konstruksi						100.000.000		160.000.000		90.000.000		200.000.000		110.000.000		660.000.000	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi	%			10%		15%		20%		25%		30%		30%		
	Pedesaan/Perkotaan						532.000.000		383.800.000		741.200.000		855.000.000		981.200.000		3.493.200.000	DPU dan Penataan Ruang
		Persentase permukiman yang dilengkapi prasarana permukiman berkualitas	%			5%		10%		15%		20%		25%		25%		
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
	Program pengembangan perumahan						33.450.000		20.350.000		20.350.000		20.350.000		20.350.000		114.850.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	95,88	96,30	96,71		97,12		97,53		97,94		98,35		98,35		
	Program lingkungan sehat perumahan						2.410.000		3.100.000		1.600.000,00		-		-		7.110.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		% kawasan permukiman kumuh	%	1,53	1,18	0,88		0,59		0,29		0		0		0		
	Program Perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial						100.000		25.000		25.000		25.000		25.000		200.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		jumlah rumah yang direhabilitasi	unit			40		10		10		10		10		80		
	Program Peningkatan kualitas rumah dan sarpras , utilitas umum					-	-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase orang dan badan hukum yang memiliki sertifikasi dan registrasi perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil	%					5		10		15		20		20		
	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran						635.000		770.000		830.000		900.000		900.000		4.035.000	Satpol PP dan Damkar
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten	%	50	60	70%		80%		90%		100%		100%		100%		
		Cakupan penanganan kebakaran sesuai dengan Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate)	%	70	75	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
		Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	0		90%		95%		100%		100%		100%		100%		
		Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	unit	11	12	12		12		12		12		12		12		
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																	
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						1.618.880		2.236.300		3.246.300		2.376.300		1.376.300		10.854.080	Satpol PP dan Damkar
		persentase patroli siaga ketentrman ketertiban umum dan ketentrman masyarakat	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	210	213	220		220		225		225		225		1.115		
		cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	rasio	1,3	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		
		jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	per 10.000 penduduk	98	98	98		98		98		98		98		98		
		rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	per desa/kelurahan	5	5	5		5		5		5		5		5		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab		
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Tertanganinya konflik sosial yang terjadi	%	95	100		100		100	3.214.001	100	3.280.001	100	3.330.000	100	3.330.000	100	13.154.001	Kantor Kesbangpol
		Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						650.000		460.000		495.000		530.000		530.000		2.665.000	Satpol PP dan Damkar	
		cakupan penegakan perda	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
		rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	per 10.000 penduduk	0,53	0,51	0,52		0,54		0,56		0,58		0,60		0,60			
	Program Peningkatan Pemberantasan PEKAT						100.000		100.000		125.000		150.000		150.000		625.000	Satpol PP dan Damkar	
		meningkatkan penanganan penyidikan terhadap kasus pelanggaran Perda	berkas	30	70	80		85		90		95		100		450			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan						1.870.505		1.870.505		1.870.505		1.870.505		1.870.505		9.352.525	Kantor Kesbangpol	
		meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	2500	3135	3125		3125		3125		3125		3125		15.625			
	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan						580.710		580.710		580.710		580.710		580.710		2.903.550	Kantor Kesbangpol	
		Ormas, LSM dan OKP yang melaksanakan peningkatan wawasan kebangsaan	kelompok	17	5	5		5		5		5		5		30			
	Program Pendidikan Politik Masyarakat						1.842.500		2.920.000		3.312.500		3.625.000		2.101.800		13.801.800	Kantor Kesbangpol	
		LSM dan Ormas aktif	kelompok	57	75	95		120		135		150		170		170			
		kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	82	30	50		50		60		66		30		286			
		Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	%	76,7	0	0		78		81		0		85		85			
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam						2.230.000		2.560.000		2.680.000		2.800.000		2.800.000		13.070.000	BPBD	
		desa/kelurahan tangguh bencana	desa	2	1	2		2		2		2		2		11			
		sekolah siaga bencana	sekolah	1	1	2		2		2		2		2		11			
							1.595.000		1.790.000		1.850.000		1.900.000		1.900.000		9.035.000	BPBD	
		Cakupan Kejadian Bencana yang tertangani	%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Cakupan korban terdampak bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar	%			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Program Pengembangan Data dan Informasi				325.000.000		380.000.000		240.000.000		245.000.000		150.000.000		250.000.000		1.590.000.000	BPBD	
		tersedianya data dan informasi tentang kebencanaan	dokumen		4	7		3		3		2		3		22			
6	Urusan Sosial																		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS						3.382.116		4.472.000		4.412.116		4.422.116		4.437.116		21.125.464	Dinsos	
		Prosen tase pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%	NA	NA	20		20		20		20		20		100			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Persentase fakir miskin yang dapat perlindungan sosial	%	NA	NA	10		10		10		10		10		50		Dinsos
		Persentase fakir miskin yang dapat akses terhadap layanan rujukan terpadu	%	NA	50	100		100		100		100		100		100		Dinsos
	Program pelayanan dan Rehabsos						1.413.610		1.498.600		1.415.600		1.529.600		1.559.600		7.417.010	Dinsos
		Persentase pelayanan dan rehap sos yang tertangani	%	NA	NA	20		20		20		20		20		100		
		Persentase Warga Migran korban tiker yg di pulangkan dari titik debarkasi di kabupaten ke daerah asal	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
		Persentase anak yang mendapatkan layanan rehabsos luar lembaga	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Penyandang DisabilitaS Yg mendapt layanan rehab	%	NA	NA	10		10		10		10		10		50		
		Persentase Lanjut Usia terlantar yang dapat layanan sosial luar lembaga	%	NA	NA	10		10		10		10		10		50		
		PersentaseTuna sosial Yang dapat layanan rehabsos	%	NA	NA	10		10		10		10		10		50		
	Program pembinaan anak terlantar						60.000		70.000		80.000		90.000		100.000		400.000	Dinsos
		Persentase pembinaan Anak terelantar yang tertangani	%	NA	NA	10		10		10		10		10		50		
		persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jamsos	%			10		10		10		10		10		50		
	Program pembinaan Anak Cacat dan trauma						530.000		540.000		545.000		550.000		555.000		2.720.000	Dinsos
		Prosen tase pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani	%	NA	NA	10		10		10		10		10		50		
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial						2.125.000		2.235.000		2.330.000		2.425.000		2.330.000		11.445.000	Dinsos
		Persentase Pening katan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%	7,00	7,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		42,00		
	bencana alam						490.092		505.092		515.092		530.092		540.000		2.580.368	Dinsos
		Persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		persentase korban bencana(alam dan sos) yang dapat kebutuhan dasar saat tanggap darurat	%			100		100		100		100		100		100		
B	Urusan Wajibyang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
1	Urusan Tenaga Kerja																	
	Program Peningkatan kesempatan kerja						5.726.625		4.760.000		5.728.000		6.951.000		6.251.000		29.416.625	Disnaker
		Pencari kerja yang ditempatkan	%	71,87	71,87	71,87		71,87		71,87		71,87		71,87		71,87		
	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja						3.390.000		7.778.000		4.121.000		4.476.500		4.832.000		24.597.500	Disnaker
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	89,29		89,29		88,89		88,89		88,89		88,89		
1		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	58,96	80,00	83,33		83,33		83,33		83,33		83,33		83,33		
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	80	66,67	80		80		80		80		80		80		
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terbina	%	58,14	46,51	80		80		80		80		80		80		
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Berijin	LPK	10	10	10		10		10		10		10		10		
	Program Perlindungan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan						625.000		741.500		924.000		1.079.000		1.298.000		4.667.500	Disnaker
		Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	24,84	91,86											91,86		
		Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB	%	92,86	93	75		75		75		75		75		75		
		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BRJS Ketenagakerjaan	%	88,9	75	75		75		75		75		75		75		
		Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%	69,77	81,4											81,4		
		Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	36,17	40,78											40,78		
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
	Program Pengutan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						579.500		495.000		381.500		532.000		414.000		2.402.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
		Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	6,45	30,43	33,33		49,33		64,1		68,75		77,78		77,78		
	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan Perempuan						611.437		610.000		586.100		547.222		628.300		2.983.059	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
		Cakupan Pembentukan Desa Layak anak	%															
	Program Peningkatan Peranserta dan kesetaraan gender dan pembangunan						240.000		270.000		285.000		320.000		320.000		1.435.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,91	49,91	49,91		49,91		49,91		49,91		49,91		49,91		
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif	%	22,22	22,22	22,22		22,22		22,22		22,22		22,22		22,22		
	Program peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak						1.221.045		1.362.000		863.000		899.000		939.000		5.284.045	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
		Rasio KDRT dan anak	%	0,04	0,04	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		0,04		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100		100		100		100		100		100		100,00		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	100		100		100		100		100		100		100,00		
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100		100		100		100		100		100		100,00		
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100		100		100		100		100		100		100,00		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	100		100		100		100		100		100		100,00		
		Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100		100		100		100		100		100		100,00		
		Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100		100		100		100		100		100		100,00		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100		100		100		100		100		100		100,00		
		Industri rumahan (IR) yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%	16	21,62	26,40		31,18		35,96		40,7		45,52		45,52		
3	Urusan Pangan																	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan						2.320.000		2.515.000		2.525.000		2.600.000		2.680.000		12.640.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan pangan Utama /beras	%	165		170		173		175		177		177		177		
		Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kapita	177	180	183		187		190		195		195		195		
		Ketersediaan protein perkapita	Kkal/kapita	165	167	170		172		175		177		177		177		
		Penguatan Cadangan Pangan	%	20,09	25	30		35		40		45		45		45		
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	67,8	70	72		75		78		80		80		80		
		Penanganan daerah rawan pangan	%	35,7	42,8	42,8		50		50		50,1		50,1		50,1		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	87,9 (versi lama)	81,5	84,1		86,8		88,35		88,9		88,9		88,9		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	83,5	85		85,4		87		87,5		87,5		87,5		
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						290.000		325.000		380.000		415.000		450.000		1.860.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase Jumlah produk olahan unggulan lokal yang dipamerkan	%	38,46		53,40		53,40		56,31		58,25		58,25		58,25		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						1.020.000		945.000		970.000		1.050.000		1.095.000		5.080.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase kelompok tani yang dibina ketrampilanya	%	5,2		3,78		3,13		3,26		3,52		3,65		23,34		
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						2.630.000		2.630.000		2.750.000		3.085.000		2.920.000		14.015.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase Penyuluh yang meningkat kapasitasnya	%	23,4		32,20		40,99		46,07		51,16		60,09		60,09		
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan						630.000		545.000		560.000		560.000		620.000		2.915.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase kelompok tani yang dibina ketrampilan penerapan teknologi pertanian	%	0,5		2,22		1,83		1,80		1,80		2,09		10,30		
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan						50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		250.000	Dinas Pertanian dan Pangan
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase KTH yang dibina rehabilitasi hutan dan lahan	%	2,4		2,44		2,44		2,44		2,44		2,44		14,63		
4	Urusan Pertanahan																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program Peningkatan Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						365.000		383.250		402.412		422.533		450.000		2.023.195	Bag. Tapem
		lahan pemda yang bersertifikat	bidang	NA	NA	45		45		45		45		45		225		
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	penanganan konflik pertanahan milik pemda	kasus	0	0	0		0		0		0		0		0		
5	Urusan Lingkungan Hidup																	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup						2.650.000		2.825.000		2.925.000		2.990.000		3.090.000		14.480.000	DLH
		kualitas baku mutu air	titik	45	29	35		30		30		30		30		184		
	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH						1.545.000		1.940.000		1.885.000		1.745.000		1.960.000		9.075.000	DLH
		Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL UPL SPPL (230 usaha)	%	15	13	15		15		17		20		20		20		
		lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	26,8		59,8		79,1		90		95		95		95		
		Kegiatan Penegakan hukum lingkungan	usaha	13		30		35		35		40		45		185		
	SDA						2.495.000		2.650.000		2.750.000		2.875.000		2.975.000		13.745.000	DLH
		Berkurangnya luas lahan kritis	Ha	0		20		20		20		20		20		100		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						28.345.000		45.833.710		11.970.000		13.808.000		34.213.000		134.169.710	DPU dan Penataan Ruang
									3.455.000		2.820.000		2.895.000		2.895.000		12.065.000	DLH
		Persentase pengurangan timbulan sampah	%	70	71,29	75,88		82		89,64		94,16		96,55		96,55		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan/Pertamanan						6.530.000.000		12.598.710.000		10.325.000.000		11.233.000.000		11.018.325.000		51.705.035.000	DPU dan Penataan Ruang
		persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan/persampahan	%			40		50		55		75		85		85		
		Jumlah masyarakat pengelolaan sampah yang dibina	orang	235	150	150		150		150		150		150		750		DLH
	Program Pengelolaan RTH								17508000		23018000		23648000		8.978.000,00		73.152.000	DPU dan Penataan Ruang
							325.000		360.000		410.000		510.000		550.000		2.155.000	DLH/DPU dan Penataan Ruang
		RTHK Perkotaan Publik	%	3	3	14		14		14		14		14		14		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial						200.000		200.000		250.000		250.000		300.000		1.200.000	DLH
		Jumlah Masyarakat di Lingkungan Industri tembakau yang dibina	orang	0	45	75		75		75		75		75		375		
	Program Perlindungan dan Konservasi SDA						1.290.000		4.305.000		4.345.000		4.700.000		4.700.000		19.340.000	DLH
		Lahan kritis yang tertangani	Ha	0	0	20		20		20		20		20		100		
6	Urusan : Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan						3.892.650		4.039.500		4.645.425		5.342.239		7.065.111		24.984.925	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio penduduk ber KTP	%	74,2	80	84		88		92		96		98		98		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Rasio anak ber-akte kelahiran	%	86,6	90	92		94		96		98		99		99		
		Kepemilikan akta kelahiran	%	63,22	70	75		80		85		90		95		92		
		Rasio pasangan berakte nikah	%	1		5		7		9		11		13		13		
		Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Cakupan Akte Kematian	%	2	10	25		45		70		80		100		100		
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat						3.634.900		3.800.900		4.250.900		4.245.900		4.460.900		20.393.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		PKK aktif	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Posyandu aktif	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		LKD/K (Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan) aktif	Jumlah	286	286	286		286		286		286		286		286		
		Jumlah kelompok BP SPAM yang dibina	Jumlah	89	89	90		91		92		93		94		94		
		Jumlah kerjasama antar desa	jumlah	15	17	18		19		20		20		20		20		
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						1.177.000		1.150.000		1.280.000		1.325.000		1.395.000		6.327.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	20	28	28,5		29		29,5		30		30,5		30,5		
		Persentase BUMDes yang terbentuk	%	2	3	4		5		6		7		8		8		
		Persentase posyantek aktif	%	0	2	2,5		3		3,5		4		4,5		4,5		
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						1.430.000		1.540.000		1.605.000		1.655.000		1.655.000		7.885.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase swadaya masyarakat terhadap jumlah dana anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat beserta pelestarian yang dikucurkan	%	5	7	7,5		8,5		9		9,4		9,5		9,5		
	pemerintah desa						1.005.000		1.105.000		1.005.000		955.000		965.000		5.035.000	Dinas Pemberdayaan Masvarakat
		Jumlah desa/kelurahan yang memiliki profil	desa/kel	260	275	270		275		280		285		286		286		
		Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	desa	266	266	266		266		266		266		266		266		
8	Berencana																	
	Program Keluarga Berencana						5.991.980		5.789.200		5.220.200		6.013.250		5.750.250		28.764.880	Dinas Pengendalian Penduduk,
		Rasio akseptor KB baru	%	93	93	94		94		95		95		95,5		95,5		
		Cakupan peserta KB aktif	%	80,8	80,9	81		81,3		81,6		81,8		82		82		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,45	1,43	1,40		1,35		1,30		1,25		1,2				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran													PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target	Rp (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	10	10	10		10		10		10		10		10		
		Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,1	1,1	1,2		1,25		1,3		1,35		1,4		1,4		
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	%			100		100		100		100		100		100		
		Lapangan Keluarga Berencana /Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	%			5		5		5		5		5		5		
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) strata berkembang	%	63,8	64,1	65,5		67,2		69		70,7		72,4		72,4		
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang				65,5		67,2		69		70,7		72,4		72,4		
	Pelayanan Kontrasepsi						686.000		947.000		858.000		858.000		858.000		4.207.000	Dinas pemberdayaan perempuan
		Cakupan penyedia alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%			27,74		27,74		27,74		27,74		27,74		28,00		
	Program Pembangunan Pusat pelayanan informasi dan konseling Remaja						248.545		266.500		262.000		279.500		227.000		1.283.545	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
		Persenta se kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%			100		100		100		100		100		100		
		Persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	20	21	22		24		26,6		28,8		31,1		31,1		
	Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga						419.615		191.750		293.950		299.950		299.950		1.505.215	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	77,59	78,59	80		80		80		80		80		80		
		Cakupan Tri Bina pada Desa/Kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL)	%			24,47		28,22		27,97		29,7		31,47				
	Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-PADU						14.875		17.850		17.850		17.850		20.000		88.425	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%			81,27		82,27		83,27		84,27						
9	Urusan Perhubungan																	
	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan						39.500.000		60.000.000		66.000.000		72.000.000		80.000.000		317.500.000	Dishub

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Jumlah Pelabuhan Laut /Udara/ Terminal Bis	unit	4	5	5		5		6		6		6		6		
		Jumlah terminal yang beroperasi	unit	4	5	5		5		5		5		6		6		
	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ						19.799.000		11.000.000		12000000		15.000.000		17.000.000		74.799.000	Dishub
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	unit	504	554	608		670		780		875		940		940		
	Program peningkatan Pelayanan Angkutan						235.000		260.000		375.000		415.000		520.000		1.805.000	Dishub
		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	unit	1	1	1		1		1		1		1		1		
		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tyersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	%	57	57	57		57		57		57		57		57		
		Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	12.056		12.235		12.336		12.594		12.845		12.930		12.930		
	Program Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan						59.500.000		60.075		60.080		60.085		60.180		59.740.420	Dishub
		Persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%		53,33	63		66		73		80		86		86		
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	unit	4	5	5		5		5		5		6		6		
	Program Peningkatan Dan pengamanan Lalu Lintas						24.616.000		4.500.000		4850000		5.200.000		5.800.000		44.966.000	Dishub
		Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	unit	567	667	767		970		1059		1217		1.500		1.500		
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten/ Kota.	unit	1520	2550	3600		4650		5700		6750		7.877		7.877		
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						2.100.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		6.100.000	Dishub
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	unit	11	11	11		11		11		11		11		11		
10	Urusan Komunikasi dan Informatika																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021					
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target			Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Program kerjasama informasi dengan media massa			30			325.000		325.000		335.000		340.000		345.000		1.670.000	Diskominfo	
		Persentase SKPD yang menyampaikan informasi publik secara lengkap	%	14	14	14		68		100		100		100			100		
		Sarana komunikasi (Media Massa, Media Interpersonal, Media Luar ruang, Media Tradisional dan Media Online)	jenis		6	6		6		6		6		6			30		
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi						2.415.000		1.820.000		1.945.000		2.075.000		2.300.000		10.555.000	Diskominfo	
		Jumlah Hotspot yang tersedia	titik	14	14	14		17		20		23		26		26			
		Persentase SKPD memiliki Akses layanan Internet menggunakan FO	titik	1	1	1		1		1		1		1		6			
		Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	SKPD	9	9	15		17		19		21		22		22			
		Koneksi Point to Point (PTP) wireless ke UPTD Teknis di Kab. Kendal	titik	6	6	15		15		15		11		0		62			
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi						385.000		195.000		205.000		210.000		215.000		1.210.000	Diskominfo	
		Jumlah sumberdaya aparatur SKPD yg memiliki pengetahuan dan keterampilan TIK dan <i>e-government</i>	orang	59	59	59		59		59		59		59		59			
		Jumlah sumberdaya masyarakat yg memiliki pengetahuan dan keterampilan TIK	orang			500		500		200		100		100		1400			
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			0			430.000		490.000		490.000		530.000		540.000		2.480.000	Diskominfo	
		Jumlah Perda / Perbup yang dimiliki dalam penyelenggaraan TIK	bh			3		1		0		0		0		4			
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			15			904.750		904.750		970.000		970.000		1.020.000		4.769.500	Diskominfo	
		Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	unit	11	11	15		16		17		18		19		19			
11	Urusan Koperasi dan UMKM																		
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif						1.100.000		1.130.000		1.160.000		1.190.000		1.220.000		5.800.000	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah	
		Jumlah wirausaha baru mikro dan kecil	orang	32.997	33.197	33.397		33.597		33.797		33.997		34.197		34.197			
		Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	unit	1.243	1.298	1.353		1.408		1.463		1.518		1.573		1.573			
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						1.425.000		1.350.000		1.625.000		1.725.000		1.815.000		7.940.000	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah	
		Jumlah UMKM yang mengikuti pameran	unit	25	55	90		130		175		225		280		280			
	Koperasi						530.000		620.000		690.000		750.000		810.000		3.400.000	Dinas Perindustrian, koperasi,	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Persentase koperasi sehat	%	70	70	72%		75%		80%		85%		90%		90%		
		Persentase koperasi aktif	%	71,40	71,40	75,76	76,55	77,30		78,00		78,65		78,65		0,79		
		Jumlah pertumbuhan koperasi	unit	570	590	610		630		650				690		690		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM						3.050.000		3.125.000		3.200.000		3.275.000		3.350.000		16.000.000	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
		Jumlah produk unggulan daerah (PUD) yang menjadi OVOP	unit	4	5	6		7		8		9		10		10		
	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya						100.000 -		0		150.000 -		0		150.000		400.000	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
		Jumlah UMKM	kecamatan	NA	NA	5	-	-		10	-	-		10		25		
12	Urusan Penanaman Modal Daerah																	
	Program peningkatan promosi dan kerjasama						1.115.000		1.333.750		1.942.500		2.251.250		2.770.000		9.412.500	
		Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	sektor	5	5	5		5		5		5		5		30	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi						1.487.000		1.652.000		1.925.000		2.045.000		2.245.000		9.354.000	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah	146	194	241		289		336		384		432		432		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		kecepatan pelayanan perijinan	hari	14	7	7		7		7		7		7		7		
	Program potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah						155.000		140.000		160000		180.000		200.000		835.000	
		Peta potensi investasi kabupaten Kendal	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1		6		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga																	
	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda						692.560		761.816		837.997		921.797		1.013.976		4.228.146	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	8	8	8		12		12		15		15		62		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan						1.075.800		118.338		1.301.712		143.188		157.500		2.796.538	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah organisasi pemuda yang dibina	kelompok	13	15	15		18		20		22		24		24		
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda						211.640		232.804		256.084		281.692		309.860		1.292.080	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	10	10	12		15		20		25		27		27		
	Program pengembanagan kebijakan dan managemen olahraga						1.980.000		2.170.000		2.387.000		2.625.700		2.888.270		12.050.970	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah organisasi olahraga yang dibina	cabor	29	29	29		32		33		33		33		33		
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga						1.980.000		2.170.000		2.387.000		2.625.700		2.888.270		12.050.970	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah klub olahraga	klub	58	60	62		64		66		68		70		70		
	Program peningkatan sarana dan prasarana						1.342.845		1.477.129		1.624.841		1.787.324		1.966.000		8.198.139	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
		Jumlah gedung olahraga	unit	7	7	7		8		9		10		10		10		
		Jumlah atlit berprestasi	orang	52	57	90		95		100		120		125		125		
14	Urusan Statistik																	
	Program Pengembangan Data/ Informasi						1.375.000		827.500		1.277.250		1.074.475		1.184.422		5.738.647	Diskominfo

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan	buah	2	2	2		2		2		2		2		2		
15	Urusan Persandian																	
	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah						648.700		713.570		784.927		863.420		949.762		3.960.378	Bag. Umum
		Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
16	Urusan Kebudayaan																	
	Program pengembangan Nilai Budaya						7.500.000		87.000		95.000		100.000		100.000		7.882.000	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%			80		80		85		100		100		100		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						5.375.000		892.000		941.000		1.041.000		1.075.000		9.324.000	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	50	50	50		80		80		90		90		90		
		Jumlah Misi Kesenian	%	75	75	80		80		90		90		100		100		
		Jumlah grup kesenian	kelompok	550	550	565		575		580		585		600		600		
		Cakupan Kajian Seni	%	50	60	70		80		90		90		90		90		
		Cakupan Fasilitasi Seni	%	50	50	50		80		80		90		90		90		
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	50	50	75		75		80		90		90		90		
		Cakupan Organisasi seni	%	80	80	85		90		90		95		95		95		
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya						150.000		167.500		174.000		182.000		190000		863.500	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		Cakupan Gelar Seni	%	70	75	80		90		90		95		95		95		
17	Urusan Kearsipan																	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan						340.000		34.000		34.400		40.000		40.000		488.400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah arsip yang dialihmediakan	lembar	0	0	600		700		800		900		1.000		4.000		
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan arsip dinamis dan statis	berkas	7.600	1.600	1.600		1.700		1.800		1.900		2.000		9.000		
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan						950.000		95.000		95.000		95.000		95.000		1.330.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	%	NA	3,09	3,18		3,29		3,40		3,40		3,52		3,52		
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi						130.000		150.000		160.000		160.000		160.000		760.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Arsiparis / Tenaga teknis kearsipan	orang	5		7	0	8	0	9	0	10	0	11		11		-
		Jumlah Arsiparis / Tenaga teknis perpustakaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	139	174	209		244		279		314		349		349		
18	Urusan Perpustakaan																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						529.000		540.000		540.000		540.000		540.000		2.689.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Pustakawan / Tenaga teknis perpustakaan (orang)	orang	3		5		6		7		8		9		9		
		tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	23.770	26.770	29.770		32.770		35.770		38.770		41.770		41.770		
		jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	13.720	15.092	16.601		18.261		20.087		22.096		24.306		24.306		
C	Urusan Pilihan																	
1	Urusan Perikanan dan Kelautan																	
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						4.495.000		3.070.000		3.070.000		3.095.000		3.095.000		16.825.000	DKP
		Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	21.967.096	22.883.000	24.027.885		#####		26.490.743		#####		#####		30.666.346		
		Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (%)	kelompok	0,42	5,00	5		5		5		5		5		5		
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kip)	kelompok	14	10	10		10		10		10		10		10		
		Jumlah surat tanda pencatatan / perijinan usaha pembudidayaan ikan (bh)	buah	1		5		5		5		5		5		5		
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap						7.840.000		12.980.000		13.780.000		13.780.000		13.780.000		62.160.000	DKP
		Produksi perikanan tangkap (kg)	kg	1.858.904	2.096.288	2.138.213		2.180.977		2.224.596		2.269.087		2.314.469		2.360.758		
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam kondisi baik (%)	%	0	20	40		60		80		100		100		100		
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						4.000.000		4.580.000		4.580.000		4.580.000		4.580.000		22.320.000	DKP
		Tingkat konsumsi ikan penduduk (kg/kap/th)	kg/kap/th	14,53		15,43		16,2		17,01		17,86		18,75		18,75		
		Jumlah surat tanda daftar kapal perikanan yang dikeluarkan (bh)	buah	378		125		150		175		200		225		225		
	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan						250.000		275.000		275.000		275.000		275.000		1.350.000	
		Produksi perikanan tangkap (kg)	kg	1.858.904	2.096.288	2.138.213		2.180.977		2.224.596		2.269.087		2.314.469		2.360.758		
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar						750.000		500.000		500.000		500.000		500.000		2.750.000	
		Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	21.967.096	22.883.000	24.027.885		#####		26.490.743		#####		#####		30.666.346		
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir						150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		750.000	
		Cakupan bina kelompok nelayan (kdp)	kelompok	24	10	10		10		10		10		10		10		
	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut						1.045.000		150.000		150.000		150.000		150.000		1.645.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran													PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target	Rp (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		kegiatan peningkatan kapasitas nelayan dalam bidang keselamatan pelayaran	kegiatan	4	4	4		4		4		4		4		24		
2	Urusan Pariwisata																	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariiwisata						2.180.000		2.287.000		2.335.000		2.428.000		2.554.000		11.784.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Kunjungan wisata	orang	239.899	239.899	263.889		290.277		319.304		351.234		386.358		1.611.062		
		Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	75	80	85		85		90		95		100		100		
	Program pengembangan Destinasi Pariwisata						400.000		435.000		435000		475.000		475.000		2.220.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah obyek wisata unggulan	obyek	9	9	9		9		10		10		10		10		
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata						1.200.000		1.250.000		1300000		1.500.000		1.650.000		6.900.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,45	0,56	0,5		0,51		0,53		0,61		0,71		0,71		
3	Urusan Pertanian																	
	Program peningkatan kesejahteraan petani						1.030.000		1.080.000		1.130.000		1.150.000		1.200.000		5.590.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Cakupan bina kelompok petani	kelompok	51	69	70		71		72		72		73		73		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan						1.660.000		1.700.000		1.750.000		1.800.000		1.900.000		8.810.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produksi pertanian tanaman pangan utama																
		Padi	ton	289.870	255.623	276.965		277.242		277.519		277.796		278.074		1.643.219,00		
		Jagung	ton	209.032	209.450	209.869		210.289		210.710		211.131		211.553		1.263.002,00		
		Kedelai	ton	3.032	3.040	3.047		3.055		3.062		3.070		3.078		18.352,00		
		Produksi Tanaman Perkebunan																
		Tebu	kwintal	21.124,06	20.591,32	20.622,25		21.333,98		21.123,98		20.798,17		20.827,20		125.296,90		
		Tembakau	ton	4.728,66	4.728,66	4.728,66		4.728,66		4.728,66		4.728,66		4.728,66		28.371,96		
		Kopi	ton	1.082,07	1.098,30	1.114,78		1.131,50		1.148,47		1.165,70		1.183,18		6.841,93		
		cengkeh	ton	422,41	89,22	99,96		179,25		197,91		217,71		228,58		1.012,63		
		Karet	ton	52,11	52,63	53,16		53,69		54,23		54,17		54,77		322,65		
		Kelapa	ton	771,42	773,35	775,28		777,22		779,16		781,11		783,06		4.669,18		
		kakao	ton	123,85	125,71	127,59		129,51		131,45		133,42		135,42		783,10		
		Produksi Tanaman hortikultura																
		bawang merah	kwintal	254.993,00	256.905,00	258.832,00		260.773,00		262.729,00		264.700,00		266.685,00		1.570.624,00		
		cabe	kwintal	45.001,00	45.451,00	45.906,00		46.365,00		46.828,00		47.297,00		47.769,00		279.616,00		
	Program peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan						300.000		310.000		320.000		350.000		360.000		1.640.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Keikutsertaan dalam pameran promosi produk pertanian	event	4	4	4		4		4		4		4		24		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan						1.300.000		1.350.000		1.400.000		1.450.000		1.400.000		6.900.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Cakupan bina kelompok petani	kelompok	51	69	70		71		72		72		73		73		
	/Perkebunan						3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		17.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Produksi pertanian tanaman pangan utama																
		- Padi	Ton	289.870	255.623	256.832		257.749		259.116		260.219		261.428				
		- Jagung	Ton	209.032	209.450	209.869		210.289		210.710		211.131		211.553				
		- Kedelai	Ton	3.032	1.337	1.341		1.344		1.347		1.351		1.354				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Produksi tanaman hortikultura																
		- Bawang merah	Kwintal	254.993,00	256.905	258.832		260.773		262.729		264.700		266.685				
		- Cabe	Kwintal	45.001,00	45.451	45.906		46.365		46.828		47.297		47.769				
		Produksi tanaman perkebunan																
		- Tebu	Kwintal	21.124,06	20.591,32	20.622,25		21.333,68		21.123,98		20.798,17		20.827,20				
		- Tembakau	Ton	4.728,66	3.000,00	3.442,50		3.251,20		3.185,00		3.246,20		3.307,50				
		- Kopi	Ton	1.082,07	1.098,30	1.114,78		1.131,50		1.148,47		1.165,70		1.183,18				
		- Cengkeh	Ton	422,41	89,22	99,96		179,25		197,91		217,71		228,58				
		- Karet	Ton	52,11	52,63	53,16		53,69		54,23		54,77		55,32				
		- Kelapa	Ton	771,42	773,35	775,28		777,22		779,16		781,11		783,06				
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi					1.005.000		1.105.000		1.215.000		1.350.000		1.350.000		6.025.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Sapi potong	ekor	21.440,00	20.486	20.606		20.738		20.856		20.986		21.106			21.106	
		- Kambing	ekor	36.718,00	37.186	37.558		37.934		38.140		38.313		38.696			38.696	
		- Domba	ekor	29.839,00	30.137	30.438		30.742		30.884		31.044		31.354			31.354	
		- Ayam ras pedaging	ekor	8.587.800,00	8.590.000	8.600.000		8.600.000		8.610.000		8.620.000		8.630.000				
		- Ayam ras petelur	ekor	3.583.300,00	3.583.300	3.588.000		3.596.000		3.596.000		3.605.000		3.610.000				
		Produksi daging dan telur ayam ras																
		- Daging sapi	kg	418.140,00	422.321	426.544		430.809		435.117		443.819		445.032				
		- Daging kambing	kg	14.513,00	14.534	14.555		14.576		14.597		14.697		14.718				
		- Daging domba	kg	5.374,00	5.406	5.438		5.470		5.502		5.700		5.798				
		- Daging ayam ras pedaging	kg	3.649.815,00	3.633.700	3.638.000		3.702.300		3.706.600		3.710.900		3.712.000				
		- Telur ayam ras	kg	28.827.900,00	28.828.100	28.865.000		28.930.000		28.935.000		29.002.800		29.042.900				
	penyakit ternak	Angka kematian / mortalitas ternak					1.225.000		1.250.000		1.250.000		1.275.000		1.300.000		6.300.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		§ Sapi	%	3%	2,9%	2,80%		2,70%		2,60%		2,50%		2,40%			2,40%	
		§ Kambing	%	2,61%	2,56%	2,51%		2,46%		2,41%		2,39%		2,15%			2,15%	
		§ Domba	%	2,61%	2,56%	2,51%		2,46%		2,41%		2,39%		2,15%			2,15%	
		§ Ayam ras	%	4,80%	5,60%	5,40%		5,30%		5,20%		5,60%		5,00%			2,90%	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Produksi daging dan telur ayam ras					60.000		65.000		70.000		75.000		80.000		350.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging sapi	kg	418.140,00	422.321	426.544		430.809		435.117		443.819		445.032				
		- Daging kambing	kg	14.513,00	14.534	14.555		14.576		14.597		14.697		14.718				
		- Daging domba	kg	5.374,00	5.406	5.438		5.470		5.502		5.700		5.798				
		- Daging ayam ras pedaging	kg	3.649.815,00	3.633.700	3.638.000		3.702.300		3.706.600		3.710.900		3.712.000				
		- Telur ayam ras	kg	28.827.900,00	28.828.100	28.865.000		28.930.000		28.935.000		29.002.800		29.042.900				
	Penerapan teknologi peternakan	Populasi komoditas peternakan utama					160.000		170.000		180.000		180.000		200.000		890.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Sapi potong	ekor	21.440	20.486	20.606		20.738		20.856		20.986		21.106			21.106	
		- Kambing	ekor	36.718,00	37.186	37.558		37.934		38.140		38.313		38.696			38.696	
		- Domba	ekor	29.839,00	30.137	30.438		30.742		30.884		31.044		31.354			31.354	
6	Urusan Perdagangan																	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan						6.500.000		5.450.000		450.000		450.000		450.000		13.300.000	dinas perdagangan
		Persentase UTTP yang ditera	%	0	0	0%		50%		70%		80%		90%		90%		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor						710.000		710.000		725.000		750.000		750.000		3.645.000	dinas perdagangan
		Perkembangan nilai ekspor	%	3	5	5%		5%		5%		5%		5%		5%		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						15.025.000		15.187.500		17.468.250		19.804.575		24.164.033		91.649.358	dinas perdagangan
		Cakupan bina kelompok pedagang/ jumlah pedagang	%	100	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran													Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021					
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target	Rp (ribu)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	50	75	80%		85%		90%		95%		95%		95%			
		Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	0	0	0,00%		8,33%		8,33%		16,66%		16,66%		16,66%			
	Asongan						60.000		70.000		80.000		90.000		100.000		400.000	dinas perdagangan	
		Persentase lokasi PKL yang tertata	%	0	0	10%		10%		10%		10%		10%		10%			
7	Urusan Perindustrian																		
	Menengah						1.815.000		1.890.000		1.980.000		2.080.000		2.160.000		9.925.000	Dinas Perindustrian, koperasi,	
		Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	0,2	0,25	0,55%		1,62%		2,77%		4,01%		4,62%		4,62%			
		Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	%	12	12,42	13,24%		14,13%		15,12%		16,47%		17,89%		17,89%			
		Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	0,33	0,33	0,33%		0,45%		0,63%		0,86%		1,12%		1,12%			
	Industri						250.000		250.000		250.000		100.000		100.000		950.000	Dinas Perindustrian, koperasi,	
		Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	0,33	0,33	0,66%		1,22%		1,98%		2,64%		3,30%		3,30%			
	Program Penataan Struktur Industri						200.000		250.000		300.000		500.000				1.250.000	Dinas Perindustrian, koperasi,	
		Persentase industri yang berkembang	%	99	99	99,90%		99,89%		99,74%		99,26%				99,26%			
8	Urusan Transmigrasi																		
	Program Transmigrasi Lokal						40.000		52.000		60.000		78.000		81.000		311.000	Disnaker	
		Jumlah calon transmigran yang dilatih tentang kemampuan dasar sesuai dengan lokasi dan kebutuhan kompetensi.	KK	0	10		10		10		10		10		10		50		
	Program pengembangan wilayah transmigrasi						105.000		126.000		142.000		159.000		187.000		719.000	Disnaker	
		Persentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	%	0	83,33	57,14		50		44,44		40		40		40			
D	Urusan Penunjang																		
1	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya						4.531.390		4.760.000		4.830.000		4.895.000		4.960.000		23.976.390	Badan Kepegawaian, Pendidikan	
		Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat / BinteK yang difasilitasi BKD Kab. Kendal pada tahun berjalan	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur						4.485.686		4.407.000		4.370.000		4.465.000		4.515.000		22.242.686	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
		Persentase struktur jabatan yang terisi	%	86,5	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												PD Penanggung Jawab	
					2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian						857.879		900.000		920.000		945.000		945.000		4.567.879	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	jenis	7	8	10		12		14		16		19		19		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai						611.960		680.000		680.000		680.000		680.000		3.331.960	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	100	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	Inspektorat																	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						2.498.150		2.750.000		3.050.000		3.400.000		3.675.000		15.373.150	Ispektorat
		Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	62%	70%	75%		80%		82%		83%		85%		85%		
		Jumlah LHP yang harus ditindaklanjuti dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	LHP	146 LHP	146	140		145		145		145		145		720		
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	1	2		2		3		3		3		3		
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	1	2	2		2		3		3		3		3		
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						45.000		50.000		55.000		60.000		65.000		275.000	Ispektorat
		Persentase tenaga pemeriksa yang telah mengikuti Diklat penjenjangan Auditor/P2UPD	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						35.000		40.000		45.000		50.000		55.000		225.000	Ispektorat
		Persentase Aparatur Sipil Negara yang melaporkan Harta Kekayaannya	%			90%		100%		100%		100%		100%		100%		
3	Keuangan dan Asset Daerah																	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						10.853.320		11.662.152		11.828.367		13.011.203		14.312.323		61.667.365	Badan Keuangan Daerah
		Belanja Pegawai terhadap APBD	%	53%		48		46		45		45		45		45		
		Belanja Langsung terhadap total APBD	%	36%		35		40		43		45		45		45		
		Rasio belanja modal terhadap APBD	%	21%		25		30		30		30		30		30		
		Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	20%		16		14		12		12		12		12		
		Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan	%	20%		18		18		18		18		18		18		
		Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	85%		87		89		91		93		93		93		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	11	13	15		17		19		21		23		23		
		Peningkatan PAD	%/tahun	11		10		10		10		10		10		10		
		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WDP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
4	Sekretariat Dewan																	
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						15.315.000		15.315.000		15.315.000		15.315.000		15.315.000		76.575.000	Setwan
		Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan.	buah	15	15	16		16		17		17		18		84		
	Program Kehumasan						915.000		870.000		870.000		1.010.000		1.010.000		4.675.000	Setwan
		Jumlah publikasi kegiatan DPRD.	kegiatan	25	25	30		35		40		42		45		192		
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			400.000			400.000		400.000		450.000		500.000		600.000		2.350.000	Setwan
		Jumlah Kajian Peraturan Daerah	buku	1	1	5	-	6	-	6	-	7	-	8		32		
5	Sekretariat Daerah																	
1	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						3.435.000		3.405.000		3.185.000		3.040.000		3.020.000		16.085.000	Bag. Organisasi
		Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundangan tentang penataan kelembagaan	unit	30		50												
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						675.000		825.000		850.000		975.000		1.100.000		4.425.000	Bag. Organisasi
		% PD yang bernilai IKM baik	%	80%	80%	85%		90%		95%		100%		100%		100%		
							350.000		370.000		382.000		394.000		406.000		1.902.000	Bag. Umum
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah																	
		Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah (%)	%	100		100		100		100		100		100		100		
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						1.231.195		1.354.315		1.489.746		1.638.721		1.802.593		7.516.569	Bag. Umum
		Terkendalinya tata kelola operasional kesekretariatan (%)	%	100		100		100		100		100		100		100		
	Program penataan Peraturan Perundang-undangan						1.507.080		1.656.896		1.822.585		2.004.843		2.205.327		9.196.731	Bagian Hukum Setda Kendal
		Jumlah Raperda yang masuk dalam program pembentukan Perda	buah	12		10		10		10		10		10		50		
	Program Kegiatan Kehumasan						3.567.000		3.940.000		4.309.000		4.714.900		5.161.390		21.692.290	Bagian Humas
		Tingkat keamanan/kenyamanan/kelancaran kegiatan Bupati/ Wakil Bupati	%/tahun	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Rasio berita daerah dengan jumlah media	rasio			200,00		206,66		213,33		220,00		226,66		226,66	-	
		Jumlah fasilitasi terhadap pers	kegiatan			13		13		13		13		13		77	-	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Jumlah event yang dipublikasikan dan atau didokumentasikan	kegiatan		840		850		860		870		880		5130	-		
		Jumlah instansi yang melaksanakan fungsi kehumasan	instansi		40		40		40		40		40		240	-		
		Jumlah personil yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan	personil		80		80		80		80		80		480	-		
	Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga, Serta Kesejahteraan Rakyat	yang terbina dibidang agama, olahraga dan kesejahteraan sosial	Lembaga dan orang		10.000	18.690.000	10.000	21.160.000	10.000	21.435.000	10.000	22.910.825	10.000 orang dan lembaga	24.330.925	50.000	108.526.750	Bag. Kesra	
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa yang di bina	desa		19 Desa	975.000	19 Desa	1.023.750	19 Desa	1.074.937	19 Desa	1.128.684	19			4.202.371	Bag. Tapem	
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan Prosedur pengawasan	Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel				1.095.000		2.199.750		2.309.737		2.425.224				8.029.711	Bag. Tapem	
		bangunan yang berijin dan laik fungsi					5%	280.000.000	10%	280.000.000	15%	350.000.000	20%	370.000.000	20%	1.280.000.000	DPU dan Penataan Ruang	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Kerjasama Daerah	buah		8 Produk Kerjasama	225.000	7 Produk Kerjasama	236.250	7 Produk Kerjasama	248.062	8 Produk Kerjasama	260.465	8			969.777	Bag. Tapem	
	Program Pengembangan Data Informasi	Jumlah data Apartur Desa yang diperbaharui	desa		60 Desa	115.000	47 Desa	120.750	41 Desa	126.787	60 Desa	133.126	60			495.663	Bag. Tapem	
	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Inflasi	%		4,9	27.054.600	4,8	32.770.000	4,7	37.580.000	4,6	42.775.000	4,5	48.215.000	4,5	188.394.600	Bagian Perekonomian	
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rupiah (ribu)		10.500.000		#####		10.850.000		#####		#####		54.350.000			
6	Perencanaan Pembangunan																	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					1.000.000	-	582.500	-	817.250	-	804.475	-	694.422		3.898.647	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
		tersedianya data teknis koordinasi Bidang Ekonomi	dokumen	6		9		7		7		6		6		35		
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya					820.000	-	790.000	-	865.000	-	880.000	-	950.000		4.305.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
		tersedianya data teknis koordinasi Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	dokumen	11		57		56		56		56		56		281		
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam					1.010.000	-	780.000	-	795.000	-	785.000	-	850.000		4.220.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
		tersedianya data teknis koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	dokumen	7		25		21		25		27		32		130		
	Program Kerjasama Pembangunan					80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		400.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
		tersusunnya konsep perencanaan kerjasama pembangunan	dokumen	1		1		1		1		1		1		5		
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					700.000	-	350.000	-	350.000	-	350.000	-	350.000		2.100.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
		tersusunnya konsep Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	dokumen	2		4		3		3		3		3		16		
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar					950.000	-	350.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000		2.500.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
					2016	2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		tersusunnya konsep Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	dokumen	2		6		4		4		4		4		22		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						1.125.000		882.500		890.750		899.825		1.409.807		5.207.882	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
		tersedianya dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan		32		28		26		26		26		27		133	-	
									2.350.000		2.350.000		2.375.000		2.375.000		9.450.000	
		Persentase SKPD yang melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan tepat waktu	%			83		86		88		95		100		100		Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kendal
		Persentase paket kegiatan pengadaan barang/jasa lewat ULP	%			92		94		96		98		100		100		Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kendal
	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah						225.000		245.000		260.000		270.000		290.000		1.290.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
		tersusunnya konsep pengembangan dan fasilitasi IPTEK, inovasi daerah	dokumen	3		3		3		3		3		3		15		
	Program Pengembangan Data/ Informasi						1.000.000		582.500		817.250		804.475		694.422		3.898.647	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
		Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan	dokumen	6		9		7		7		6		6		35		
	Total Kebutuhan Anggaran Non Rutin						8.868.250.404		15.166.309.512		12.975.964.222		14.183.557.242		14.228.788.994		65.422.870.375	
	Program Seluruh SKPD																	
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	terjaminnya kelancaran kegiatan perkantoran	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	233.324.600	semua PD Non Kecamatan
							48.000.000		42.997.500		45.147.375		47.404.744		49.774.981			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN'	terpenuhinya kebutuhan dan sarana prarasana kerja	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	204.792.140	semua PD Non Kecamatan
							38.000.000		38.697.750		40.632.638		42.664.269		44.797.483			
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	meningkatnya displin aparatur	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	20.627.460	semua PD Non Kecamatan
							2.095.000		4.299.750		4.514.738		4.740.474		4.977.498			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	meningkatnya kapasitas aparatur	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	39.254.920	semua PD Non Kecamatan
							2.190.000		8.599.500		9.029.475		9.480.949		9.954.996			
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH	meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	181.019.680	semua PD Non Kecamatan
							32.760.000		34.398.000		36.117.900		37.923.795		39.819.985			
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	terciptanya tertib administrasi dan pelaporan	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	1.150.000	
							1.150.000											
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	1.250.000	
							1.250.000											
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN'	terpenuhinya kebutuhan dan sarana prarasana kerja	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	124.755.738	Kecamatan
							110.500.000		3.307.500		3.472.875		3.646.519		3.828.845			
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	meningkatnya displin aparatur	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	1.160.383	Kecamatan
							210.000		220.500		231.525		243.101		255.256			
	PRORAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH	meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur	bulan	12	12	12		12		12		12		12		60	17.542.487	Kecamatan
							11.365.000		1.433.250		1.504.913		1.580.158		1.659.166			
	Total Kebutuhan Anggaran Belanja Rutin						247.520.000		133.953.750		140.651.438		147.684.009		155.068.210		824.877.407	
	Total Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung						9.115.770.404		15.300.263.262		13.116.615.660		14.331.241.252		14.383.857.204		66.247.747.781	

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal (Bappenas). Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (Permendagri 54 tahun 2010).

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD ini menjadi target bagi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah selama lima tahun. Indikator kinerja daerah menjadi pedoman bagi SKPD dalam penentuan target kinerja Renstra SKPD dan Renja SKPD. Indikator dan target kinerja dalam RPJMD ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dikelompokkan berdasarkan aspek dan fokus pembangunan, baik indikator agregat dan indikator makro, maupun indikator urusan pembangunan daerah, seperti tercantum pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1.
Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kendal

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2015	Tahun 2016 (Target)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1)	Pertumbuhan ekonomi	%	5,17	5,2 – 5,6	5,4 – 5,8	5,6 -6,0	5,8 – 6,2	6,0-6,4	6,2-6,6	6,2-6,6	Lintas PD
2)	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rp	26,01	26,97	27,97	29,01	30,08	31,19	32,35	32,35	Lintas PD
3)	Inflasi	%	6,65	6,29	5,95	5,63	5,32	5,03	4,76	4,76	Lintas PD
4)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,57	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	75,5	Lintas PD
5)	Pengeluaran per Kapita	Rupiah/k apita/tah un	10.419.0 00	10.517.000	10.613.000	10.725.000	10.835.00 0	10.912.000	11.014.000	11.014.00 0	Lintas PD
6)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,22 (2014)	93,35	93,5	93,7	93,9	94,2	94,5	94,5	Lintas PD
7)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,54 (2014)	75,00	75,5	76	76,5	77	77,5	77,5	Lintas PD
8)	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	10,35	9,00	8,89	8,75	8,5	8,2	8	8	Lintas PD
9)	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	12,41	11,5	11,0	10,5	10,2	10	9,5	9,5	Lintas PD
10)	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,05	0,048	0,045	0,040	0,035	0,030	0,030	0,030	Lintas PD
11)	Angka Kematian Ibu	per 100000 KH	148,8	129,4	122,9	120	118	116	102,0	102,0	Lintas PD
12)	Opini BPK	Indeks	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Lintas PD
13)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	NA	2	2	3	3	3	3	3	Inspektorat

14)	Persentase perangkat daerah pelayanan yang indeks IKMnya Baik	%	80	80	85	90	95	100	100	100	Setda
15)	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,64	6,73	6,93	7,13	7,33	7,53	7,73	7,73	Dinas pendidikan dan kebudayaan
16)	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,41	12,65	13,07	13,44	13,81	14,18	14,5	14,5	Dinas pendidikan dan kebudayaan
17)	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,15	74,20	74,25	74,30	74,35	74,40	74,45	74,45	Dinas kesehatan
18)	Total Fertillity Rate (TFR)	Indeks	2,07	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19)	Prosentase pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%	NA	NA	20	20	20	20	20	20	Dinas Sosial
20)	Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

31)	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	62	74	87	93	100	100	100	100	DPU dan Penataan Ruang
32)	Persentase irigasi berfungsi baik	%	40,50	45	50	55	60	65	70	70	DPU dan Penataan Ruang
33)	Persentase Kawasan Kumuh	%	1,53	1,18	0,88	0,59	0,29	0	0	0	DPU dan Penataan Ruang
34)	Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum	%	75	79	83	89	94	100	100	100	DPU dan Penataan Ruang
35)	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	73	78	84	88	92	95	100	100	DPU dan Penataan Ruang
36)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	49,82	50,48	55,40	58,44	60,41	62,60	63,00	63,00	DLH
37)	Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	0,083	1,000	1,100	1,210	1,331	1,464	1,610	7,715	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38)	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,07	7,00	6,70	6,50	6,3	6,00	5,70	5,70	Disnaker
39)	Persentase angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol
ASPEK PELAYANAN UMUM											
Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1.	Pendidikan (perangkat										
1)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4–6 Tahun	%	52,92	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	65,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
2)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0–6	%	38,17	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	50,00	Dinas pendidikan dan

	Tahun										kebudayaan
3)	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	%	37,23	39,00	41,50	43,50	46,00	48,00	50,00	50,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
4)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	106,29	103,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
5)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	98,57	98,90	99,20	99,50	99,80	100,00	100,00	100,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
6)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	%	84,73	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
7)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	60,24	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
8)	Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0,11	0,10	0,08	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	Dinas pendidikan dan kebudayaan
9)	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0,83	0,71	0,59	0,47	0,35	0,23	0,10	0,10	Dinas pendidikan dan kebudayaan
10)	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
11)	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA	%	88,35	88,45	88,55	88,70	88,80	88,90	90,00	90,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan

12)	Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	%	60,19	61,30	62,41	63,52	64,63	65,74	66,85	66,85	Dinas pendidikan dan kebudayaan
13)	Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	%	69,71	75,23	79,75	82,26	84,77	87,28	89,79	89,79	Dinas pendidikan dan kebudayaan
14)	Persentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	29,95	40,56	47,38	52,62	57,87	63,11	68,36	68,36	Dinas pendidikan dan kebudayaan
15)	Persentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	67,65	71,57	71,57	76,47	81,37	86,27	91,18	91,18	Dinas pendidikan dan kebudayaan
16)	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
17)	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP		0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
18)	Rasio Guru/Siswa SD		0,07	0,067	0,063	0,06	0,057	0,053	0,05	0,05	Dinas pendidikan dan kebudayaan
19)	Rasio Guru/Siswa SMP		0,06	0,059	0,058	0,056	0,054	0,052	0,05	0,05	Dinas pendidikan dan kebudayaan
20)	Persentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	%	96,41	96,58	96,76	96,94	97,12	97,30	97,50	97,50	Dinas pendidikan dan kebudayaan

21)	Persentase PKBM Memiliki Akreditasi	%	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	75,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
22)	Persentase Pendidik TK Memiliki Sertifikasi	%	42,74	42,95	43,16	43,37	43,58	43,79	44,00	44,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
23)	Persentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	%	54,89	55,75	56,60	57,45	58,30	59,15	60,00	60,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
24)	Persentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	%	56,96	57,80	58,60	59,50	60,40	61,20	62,00	62,00	Dinas pendidikan dan kebudayaan
2	Kesehatan										
1)	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	77	80	83	85	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
2)	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3)	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	1	12	9	8	0	0	0	30	Dinas Kesehatan
4)	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM / P-IRT)	%	62	64	65	70	75	80	85	85	Dinas Kesehatan
5)	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	77	80	80	85	85	90	90	90	Dinas Kesehatan
6)	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif (status Minimal Madya)	%	37,5	40	42	45	47	50	50	50	Dinas Kesehatan
7)	Prevalensi balita gizi kurang	%	3,93	4,00	5,9	5,8	5,7	5,6	5,6	5,6	Dinas Kesehatan

8)	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9)	Persentase BBLR (Berat badan <2.500 gr)	%	4,08	4,07	4,06	4,05	4,04	4,03	4,00	4,00	Dinas Kesehatan
10)	Cakupan penggunaan air bersih	%	75	80,73	90	95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11)	Strata Kabupaten Sehat	Kategori	NA	0	0	0	0	0	Padapa	Padapa	Dinas Kesehatan
12)	Cakupan penggunaan jamban keluarga yang memenuhi syarat	%	73	77	85	95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13)	Cakupan Rumah sehat	%	63	64	66	70	75	80	85	85	Dinas Kesehatan
14)	Puskesmas memiliki IPAL	unit	0	2	3	4	4	4	4	30	Dinas Kesehatan
15)	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
16)	Jml seluruh pasien Tb yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk disuatu wilayah tertentu (CNR)	/100.000 pddk	120,4	125	131	138	146	155	165	165	Dinas Kesehatan
17)	Prosentase angka kasus HIV yang diobati (SUFA)	%	25	50	65	70	80	85	85	85	Dinas Kesehatan
18)	Prosen puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan tata laksana pnemonia melalui program MTBS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
19)	Prosentase puskesmas yang melakukan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
20)	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	/100.000 pddk	68	<65	<63	<60	<58	<56	<55	<55	Dinas Kesehatan

33)	AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	RSUD Dr.H. Soewondo
34)	NDR (Net Date Rate)	%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	RSUD Dr.H. Soewondo
35)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	Nilai	80	80	81	82	83	84	85	85	RSUD Dr.H. Soewondo
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1)	Prosentase saluran drainase/gorong-gorong berkondisi baik	%	40,57	42,19	81	84	87	90	93	93	DPU dan Penataan Ruang
2)	Prosentase cakupan drainase lingkungan kondisi baik	%		69	75	86	95	100	100	100	DPU dan Penataan Ruang
3)	Prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%			65	70	75	80	85	85	DPU dan Penataan Ruang
4)	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%		78	84	88	92	95	100	100	DPU dan Penataan Ruang
5)	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.	%	1,3	2	4	6	8	10	12	12	DPU dan Penataan Ruang
6)	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	%	0	0	20	40	60	80	100	100	DPU dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1)	Cakupan Rumah Layak Huni	%	95,88	96,3	96,71	97,12	97,53	97,94	98,53	98,53	DPU dan Penataan Ruang

2)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten	%	50	60	70	80	90	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
3)	Cakupan penanganan kebakaran sesuai dengan Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate)	%	70	75	80	85	90	95	100	100	Satpol PP dan Damkar
4)	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	unit	11	12	12	12	12	12	12	12	Satpol PP dan Damkar
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat										
1)	persentase patroli siaga ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
2)	cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	210	213	220	220	225	225	225	1.328	Satpol P
3)	cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	rasio	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Satpol P
4)	jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	98	98	98	98	98	98	98	98	Satpol P
5)	rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	per desa/kelurahan	5	5	5	5	5	5	5	5	Satpol P
6)	Tertanganinya konflik sosial yang terjadi	%	95	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol
7)	Cakupan penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol P
8)	rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	0,53	0,51	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,60	Satpol P
9)	meningkatnya penanganan penyidikan	berkas	30	70	80	85	90	95	100	520	Satpol P

	terhadap kasus pelanggaran Perda										
10)	meningkatnya jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	2500	3135	3125	3125	3125	3125	3125	18.760	Kantor Kesbangpol
11)	Ormas, LSM dan OKP yang melaksanakan peningkatan wawasan kebangsaan	kelompok	17	5	5	5	5	5	5	30	Kantor Kesbangpol
12)	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	82	30	50	50	60	66	30	286	Kantor Kesbangpol
13)	LSM dan Ormas aktif	kelompok	57	75	95	120	135	150	170	170	Kantor Kesbangpol
14)	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	%	76,7	0	0	78	81	0	85	85	Kantor Kesbangpol
15)	desa /kelurahan Tangguh Bencana	Desa	2	2	2	2	2	2	2	10	BPBD
16)	sekolah siaga bencana	sekolah	1	2	2	2	2	2	2	10	BPBD
6	Sosial										
1)	Persentase pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%/tahun	NA	NA	20	20	20	20	20	20	Dinsos
2)	Persentase fakir miskin yang dapat perlindungan sosial	%/tahun	NA	NA	10	10	10	10	10	10	Dinsos
3)	Persentase fakir miskin yang dapat akses terhadap layanan rujukan terpadu	%/tahun		50	100	100	100	100	100	100	Dinsos
4)	Persentase pelayanan dan rehap sos yang tertangani	%/tahun	NA	NA	20	20	20	20	20	20	Dinsos
5)	Persentase Warga Migran korban tiker yg di pulangkan dari titik	%/tahun	NA	NA	100	100	100	100	100	100	Dinsos

	debarkasi di kabupaten ke daerah asal										
6)	Persentase anak yang mendapatkan layanan rehabsos luar lembaga	%/tahun	NA	NA	100	100	100	100	100	100	Dinsos
7)	Persentase Penyandang Disabilitas Yg mendapt layanan.rehab	%/tahun	NA	NA	10	10	10	10	10	10	Dinsos
8)	Persentase Lanjut Usia terlantar yang dapat layanan sosial luar lembaga	%/tahun	NA	NA	10	10	10	10	10	10	Dinsos
9)	Persentase Tuna sosial Yang dapat lay.rehabsos	%/tahun	NA	NA	10	10	10	10	10	10	Dinsos
10)	Persentase pembinaan Anak terelantar yang terta ngani	%/tahun	NA	NA	10	10	10	10	10	10	Dinsos
11)	Persentase pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani	%/tahun	NA	NA	10	10	10	10	10	10	Dinsos
12)	Persentase Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%/tahun	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinsos
13)	Persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%/tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos
Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Ketenagakerjaan										
1)	Pencari kerja yang ditempatkan	%	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	Disnaker
2)	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	89,29	89,29	88,89	88,89	88,89	88,89	Disnaker

3)	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	58,96	80,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	Disnaker
4)	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	80	66,67	80	80	80	80	80	80	Disnaker
5)	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terbina	%	58,14	46,51	80	80	80	80	80	80	Disnaker
6)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Berijin	LPK	10	10	10	10	10	10	10	10	Disnaker
7)	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	24,84	91,86	-	-	-	-	-	91,86	Disnaker
8)	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB	%	92,86	93	75	75	75	75	75	75	Disnaker
9)	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,9	75	75	75	75	75	75	75	Disnaker
10)	Prosentase Pemeriksaan Perusahaan	%	69,77	81,4	-	-	-	-	-	81,4	Disnaker
11)	Prosentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	36,17	40,78	-	-	-	-	-	40,78	Disnaker
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1)	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	6,45	30,43	33,33	49,33	64,1	68,75	77,7	77,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,91	49,91	49,91	49,91	49,91	49,91	49,91	49,91	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif	%	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4)	Rasio KDRT dan anak	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5)	Cakupan Pengelola Industri rumahan (IR) yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%	16,	21,62	26,40	31,18	35,96	40,7	45,52	45,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

											Berencana
3	Pangan										
1)	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kapita	177	180	183	187	190	195	195	195	Dinas Pangan dan Pertanian
2)	Ketersediaan protein perkapita	Kkal/kapita	165	167	170	172	175	177	177	177	Dinas Pangan dan Pertanian
3)	Penguatan Cadangan Pangan	%	20,09	25	30	35	40	45	45	45	Dinas Pangan dan Pertanian
4)	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
5)	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	67,8	70	72	75	78	80	80	80	Dinas Pangan dan Pertanian
6)	Penanganan daerah rawan pangan	%	35,7	42,8	42,8	50	50	50,1	50,1	50,1	Dinas Pangan dan Pertanian
7)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87,9*) Perhitungan versi lama	81,5	84,1	86,8	88,35	88,9	88,9	88,9	Dinas Pangan dan Pertanian
8)	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	80	83,5	85	85,4	87	87,5	87,5	87,5	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Pertanahan										
1)	Lahan Pemda Bersertifikat	Bidang	0	0	45	45	45	45	45	225	Bag. Tapem
2)	penanganan konflik pertanahan milik Pemda	kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Lingkungan Hidup										
1)	Kualitas baku mutu air	titik	45	29	35	30	30	30	30	155	DLH
2)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	titik	6	8	10	12	14	16	16	76	DLH
3)	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan	titik	6	8	10	12	14	16	16	76	DLH

	administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air										
4)	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	aduan	20	26	30	35	40	40	40	211	DLH
5)	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL UPL SPPL (230 usaha)	%	15	13	15	15	17	20	20	20	DLH
6)	Lahan kritis yang tertangani	Ha	0	0	20	20	20	20	20	100	DLH
7)	Prosentase pengurangan timbulan sampah	%	70	71,29	75,88	82	89,64	94,16	96,55	96,55	DPU dan Penataan Ruang
8)	Jumlah masyarakat pengelolaan sampah yang dibina	orang	235	150	150	150	150	150	150	900	DLH
9)	RTHK Perkotaan Publik	%	0	20	20	20	20	20	20	20	DPU dan Penataan Ruang
10)	RTHK Perkotaan Privat	%	0	0	10	10	10	10	10	10	DLH
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1)	Rasio Penduduk ber KTP	%	74,20	80	84	88	92	96	98	98	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2)	Rasio Anak berakta kelahiran	%	86,6	90	92	94	96	98	99	99	Dinas Administrasi Kependudukan dan

											Pencatatan Sipil
3)	Kepemilikan akta kelahiran	%	63,22	70	75	80	85	90	95	95	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4)	Rasio Pasangan berakate nikah	%	1	3	5	7	9	11	13	13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5)	Cakupan Akte Kematian	%	2	10	25	45	70	80	100	100	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1)	PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2)	Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3)	LKD/K (Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan) aktif	unit/tahun	286	286	286	286	286	286	286	286	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4)	Jumlah kelompok BP SPAM yang dibina	kelompok	89	89	90	91	92	93	94	94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5)	Jumlah kerjasama antar desa	MoU	15	17	18	19	20	20	20	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6)	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	20	28	28,50	29	29,50	30	30,50	30,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7)	Persentase BUMDes yang terbentuk	%	2	3	4	5	6	7	8	8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8)	Persentase posyantek aktif	%	0	2	2,5	3	3,5	4	4,5	4,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9)	Persentase swadaya masyarakat terhadap jumlah dana anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat beserta pelestarian yang dikucurkan	%	5	7	7,5	8,5	9,0	9,4	9,5	9,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10)	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki profil	desa	260	260	270	275	280	285	286	286	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11)	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	%	266	266	266	266	266	266	266	266	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan KB										
1)	Rasio akseptor KB (baru)	%	93	93	94	94	95	95	95,5	95,5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

											dan Perlindungan Anak
2)	Cakupan peserta KB aktif	%	80,8	80,9	81	81,3	81,6	81,8	82	82	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,45	1,43	1,40	1,35	1,30	1,25	1,2	1,2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidakterpenuhi (Unmet Need)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5)	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,1	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

											Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6)	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	%	63,8	64,1	65,5	67,2	69	70,7	72,4	72,4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7)	Persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	20	21	22	24	26,6	28,8	31,1	31,1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8)	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	77,59	78,9	80	80	80	80	80	80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Perhubungan										
1)	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	unit	4	5	5	5	6	6	6	6	Dishub

10	Komunikasi dan Informatika										
1)	Jumlah Hotspot yang tersedia	titik	14	14	17	20	23	26	29	29	Diskominfo
2)	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	SKPD	9	12	15	17	19	21	22	22	Diskominfo
3)	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	unit	11	11	15	16	17	18	20	20	Diskominfo
11	Koperasi UMKM										
1)	Jumlah wirausaha baru mikro dan kecil	unit	32.997	33.197	33.397	33.597	33.797	33.997	34.197	34.197	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
2)	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.243	1.298	1.353	1.408	1.463	1.518	1.573	1.573	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
3)	Prosentase Koperasi aktif	%	71,4%	71,4%	75,76%	76,55%	77,30%	78%	78,65%	78,65%	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
12	Pernanaman Modal										
1)	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor	5	5	5	5	5	5	5	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah	146	194	241	289	336	384	432	432	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

											Terpadu Satu Pintu
3)	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4)	Kecepatan pelayanan perizinan	hari	14	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Kepemudaan dan Olahraga										
1)	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	8	8	8	12	12	15	15	70	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2)	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	kelompok	13	15	15	18	20	22	24	24	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3)	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	10	10	12	15	20	25	27	119	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4)	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	cabor	29	29	29	32	33	33	33	33	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5)	Jumlah klub olahraga	klub	58	60	62	64	66	68	70	70	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6)	Jumlah gedung olahraga	unit	7	7	7	8	9	10	10	10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

7)	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	52	57	90	95	100	120	125	125	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
14	Statistik										
1)	Buku Kendal dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfo
2)	Buku PDRB dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Diskominfo
15	Persandian										
1)	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	1,53	1,00	1,25	1,50	2,00	2,25	2,50	2,50	Bag. Umum
16	Kebudayaan										
1)	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	50	50	50	80	80	90	90	90	Dinas pendidikan dan kebudayaan
2)	Jumlah Misi Kesenian	%	75	75	80	80	90	90	100	100	Dinas pendidikan dan kebudayaan
3)	Jumlah grup kesenian	Kelompok	550	550	565	575	580	585	600	600	Dinas pendidikan dan kebudayaan
4)	Cakupan Kajian Seni	%	50	60	70	80	90	90	90	90	Dinas pendidikan dan kebudayaan
5)	Cakupan Fasilitas Seni	%	50	50	50	80	80	90	90	90	Dinas pendidikan dan kebudayaan
6)	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	50	50	75	75	80	90	90	90	Dinas pendidikan

											dan kebudayaan
7)	Cakupan Organisasi seni	%	80	80	85	90	90	95	95	95	Dinas pendidikan dan kebudayaan
8)	Cakupan Gelar Seni	%	70	75	80	90	90	95	95	95	Dinas pendidikan dan kebudayaan
17	Kearsipan										
1)	Pengelolaan arsip dinamis dan statis	berkas	7.600	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	910.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2)	Prosentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	%	NA	3,09	3,18	3,29	3,4	3,4	3,52	3,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3)	Jumlah arsip yang dialihmediakan	lembar	0	0	600	700	800	900	1000	4000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4)	Jumlah Arsiparis / Tenaga teknis perpustakaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	139	174	209	244	279	314	349	349	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Perpustakaan										
1)	tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	23.770	26.770	29.770	32.770	35.770	38.770	41.770	41.770	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2)	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	13.720	15.092	16.601	18.261	20.087	22.096	24.306	116.443	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan											
1	Kelautan dan Perikanan										
1)	Produksi perikanan budidaya	kg	21.967.096	22.883.000	24.027.885	25.229.279	26.490.743	27.815.280	29.206.044	155.652.231	DKP
2)	Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya	%	0,42	5	5	5	5	5	5	5	DKP

	ikan										
3)	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	Kelompok /tahun	14	10	10	10	10	10	10	10	DKP
4)	Produksi perikanan tangkap	Kg	1.858.904	2.096.288	2.138.213	2.180.977	2.224.596	2.269.087	2.314.469	13.223.630	DKP
5)	Prosentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam kondisi baik	%	0	20	40	60	80	100	100	100	DKP
6)	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok /tahun	24	10	10	10	10	10	10	10	DKP
2	Pariwisata										
1)	Kunjungan wisata	orang	239.899	239.899	263.889	290.277	319.304	351.234	386.358	1.850.961	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2)	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	75	80	85	85	90	95	100	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3)	Jumlah obyek wisata unggulan	obyek	9	9	9	9	10	10	10	10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,45	0,56	0,50	0,51	0,53	0,61	0,71	0,71	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	Pertanian										
1)	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	51	69	70	71	72	72	73	427	Dinas Pertanian dan Pangan
2)	Produksi pertanian tanaman pangan utama										Dinas Pertanian dan Pangan
	- Padi	Ton	289.870	276.688	276.965	277.242	277.519	277.796	278.074	1.664.284	
	- Jagung	Ton	209.032	209.450	209.869	210.289	210.710	211.131	211.553	1.263.002	
	- Kedelai	Ton	3.032	3.040	3.047	3.055	3.062	3.070	3.078	18.352	

3)	Produksi tanaman hortikultura										Dinas Pertanian dan Pangan
	- Bawang merah	Kwintal	254.993	256.905	258.832	260.773	262.729	264.700	266.685	1.570.624	
	- Cabe	Kwintal	45.001	45.451	45.906	46.365	46.828	47.297	47.769	279.616	
4)	Produksi tanaman perkebunan										Dinas Pertanian dan Pangan
	- Tebu	Kwintal	21.124	20.591,32	20.622,25	21.333,68	21.123,98	20.798,17	20.827,20	125.296,9	
	- Tembakau	Ton	4.728,00	4.728,66	4.728,66	4.728,66	4.728,66	4.728,66	4.728,66	28.371,96	
	- Kopi	Ton	1.082,00	1.098,30	1.114,78	1.131,50	1.148,47	1.165,70	1.183,18	6.841,93	
	- Cengkeh	Ton	422,00	89,22	99,96	179,25	197,91	217,71	228,58	1.012,63	
	- Karet	Ton	52,00	52,63	53,16	53,69	54,23	54,77	55,32	322,65	
	- Kelapa	Ton	771,00	773,35	775,28	777,22	779,16	781,11	783,06	4.669,18	
	- Kakao	Ton	123,00	125,71	127,59	129,51	131,45	133,42	135,42	783,10	
5)	Populasi komoditas peternakan utama										Dinas Pertanian dan Pangan
	- Sapi potong	ekor	21.440	20.486	20.606	20.738	20.856	20.986	21.106	21.106	
	- Kambing	ekor	36.718	37.186	37.558	37.934	38.140	38.313	38.696	38.696	
	- Domba	ekor	29.839	30.137	30.438	30.742	30.884	31.044	31.354	31.354	
	- Ayam ras pedaging	ekor	8.587.800	8.590.000	8.600.000	8.600.000	8.610.000	8.620.000	8.630.000	8.630.000	
	- Ayam ras petelur	ekor	3.583.300	3.583.300	3.588.000	3.596.000	3.596.000	3.605.000	3.610.000	3.610.000	
6)	Meningkatnya produksi daging dan telur										Dinas Pertanian dan Pangan
	- daging sapi	kg	418.140	422.321	426.544	430.809	435.117	443.819	445.032	2.603.642	
	- daging kambing	kg	14.513	14.534	14.555	14.576	14.597	14.697	14.718	87.677	
	- Daging domba	kg	5.374	5.406	5.438	5.470	5.502	5.700	5.798	33.314	
	- Daging ayam ras pedaging	kg	3.677.145	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.900.000	3.712.000	22.412.000	
	- Telur ayam ras	kg	28.827.900	28.828.100	28.865.000	28.930.000	28.935.000	29.002.800	29.042.900	173.603.800	
7)	Angka kematian / mortalitas ternak										Dinas Pertanian dan Pangan

	- Sapi potong	%	3	2,90	2,80	2,70	2,60	2,50	2,40	2,40	
	- Domba	%	2,61	2,56	2,51	2,46	2,41	2,39	2,15	2,15	
	- Kambing	%	2,61	2,56	2,51	2,46	2,41	2,39	2,15	2,15	
	- Ayam ras	%	4,80	4,60	4,40	4,20	4	3,8	3,8	3,8	
4	Perdagangan										
1)	Persentase UTTP yang ditera	%	0	0	0	50	70	80	90	90	Dinas perdagangan
2)	Perkembangan nilai ekspor	%	3	5	5	5	5	5	5	5	Dinas perdagangan
3)	Cakupan bina kelompok pedagang/ jumlah pedagang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas perdagangan
4)	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	50	75	80	85	90	95	95	95	Dinas perdagangan
5)	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	0	0	0	8,33 (1 pasar)	8,33 (1 pasar)	16,66 (2 pasar)	16,66 (2 pasar)	16,66 (2 pasar)	Dinas perdagangan
6)	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	0	0	10	10	10	10	10	10	Dinas perdagangan
5	Perindustrian										
1)	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	0,2	0,25	0,55	1,62	2,77	4,01	4,62	4,62	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
2)	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	%	12,0	12,42	13,24	14,13	15,12	16,47	17,89	17,89	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
3)	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	0,33	0,33	0,33	0,45	0,63	0,86	1,12	1,12	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil

											dan menengah
4)	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	0,33	0,33	0,66	1,22	1,98	2,64	3,30	3,30	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
5)	Persentase industri yang berkembang	%	99	99	99,90	99,89	99,74	99,26	99,26	99,26	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
6)	Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB	%	40,74	40,97	41,2	41,43	41,67	41,9	42,14	42,14	Dinas Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
6	Transmigrasi										
1)	Jumlah calon transmigran yang dilatih tentang kemampuan dasar sesuai dengan lokasi dan kebutuhan kompetensi.	KK	0	10	10	10	10	10	10	60	Disnaker
2)	Persentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	%	0	83,33	57,14	50	44,44	40	40	40	Disnaker
Urusan Penunjang											
1	Kepegawaian										
1)	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat / BinteK yang difasilitasi BKD Kab. Kendal pada tahun berjalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2)	Persentase struktur jabatan yang terisi	%	86,5	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4)	Jumlah Produk Kerjasama Daerah	Dokumen	7	7	8	7	7	8	8	45	Bag. Tapem
5)	Dokumen/Data Dasar Perencanaan Pengelolaan Penanggulangan Bencana	dokumen	2	3	2	2	2	2	2	13	BPBD
5	Perencanaan Pembangunan										
1)	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	35	40	46	50	55	60	65	65	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
2)	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD	%	NA	50	60	65	70	80	90	90	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
3)	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
4)	Persentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD	%	35	40	46	50	55	60	65	65	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
ASPEK DAYA SAING											
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur										
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1)	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	unit	88	88	88	89	90	91	92	92	Lintas PD
2)	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	unit	25	25	26	26	26	26	26	26	Lintas PD
	Lingkungan Hidup										
1)	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	75	79	83	89	94	100	100	100	Lintas PD

Fokus Iklim Berinvestasi											
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1)	Angka kriminalitas	Kasus	150	145	130	125	120	115	110	110	Lintas PD
2)	Lama proses perijinan	hari	14	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Fokus Sumber Daya Manusia											
1)	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	4,89	4,89	5	5,2	5,4	5,6	5,8	5,8	BPS
2)	Rasio ketergantungan	Rasio	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	BPS

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

X.1 Pedoman Transisi

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku RPJMD sama dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, yaitu tahun 2016-2021.

Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2022 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

X.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut:

- 1) Bupati Kendal berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
- 2) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan semua pemangku kepentingan agar mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
- 3) Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah pada periode yang sama sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Renstra

Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- 4) RPJMD ini akan dijabarkan kedalam RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- 5) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD dan mewujudkan sinergitas pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD kedalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD untuk memastikan pencapaian visi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah.
- 6) RPJMD ini pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Kendal.
- 7) RPJMD ini menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat Kabupaten Kendal untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.

BAB XI PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Dokumen ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam UU tersebut diamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan juga jangka pendek.

Penyusunan dokumen RPJMD ini dilandasi dengan 4 pendekatan, yakni pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif berarti bahwa proses penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih dan dibahas bersama dengan DPRD dalam penetapan peraturan perundangan daerah. pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun stakeholder yang lain dalam rangka mewujudkan tercapainya visi, misi, dan program pembangunan yang telah di susun dalam dokumen RPJM ini sangat dibutuhkan. Dengan kerjasama dan koordinasi antar pihak tersebut maka Visi Kendal Permata Pantura bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.